Muktamar Ke-35
Nahdlatul Ulama
Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang
27-31 Agustus 2026 | 14-18 R. Awwal 1448 H

HIMPUNAN MATERI

MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

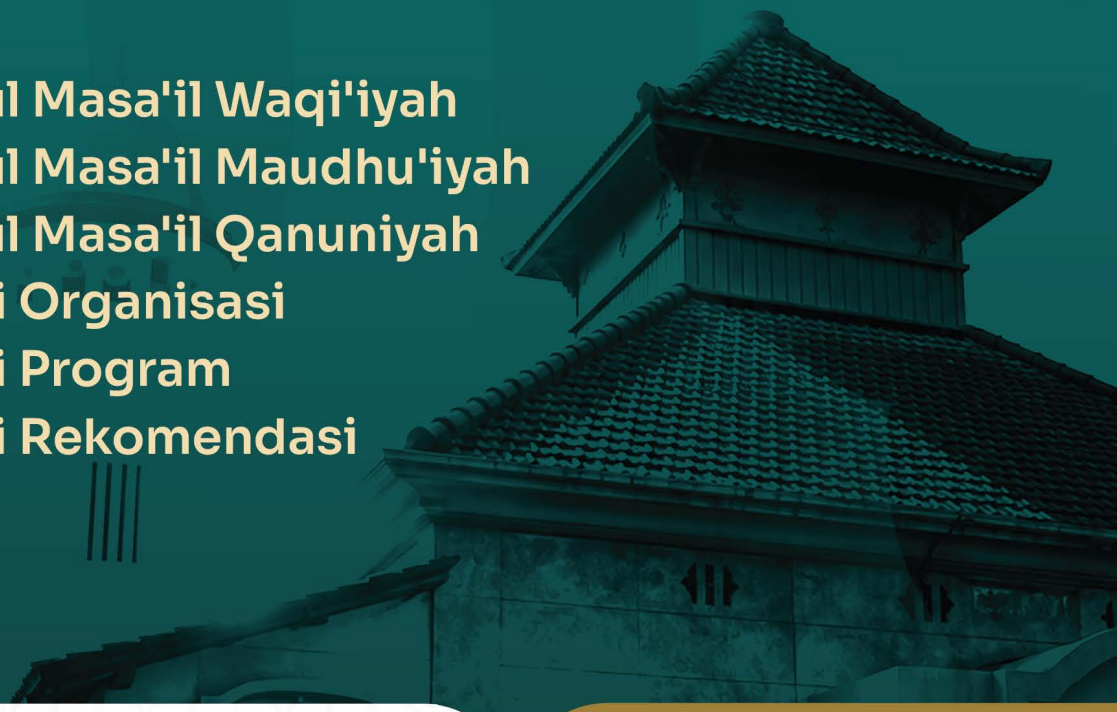

> Bahtsul Masa'il Waqi'iyah
> Bahtsul Masa'il Maudhu'iyah
> Bahtsul Masa'il Qanuniyah
> Komisi Organisasi
> Komisi Program
> Komisi Rekomendasi

Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama

Ponpes
Bahrul Ulum
Tambakberas
Jombang
14-18 Rabi'ul Awwal 1448 H
27-31 Agustus 2026 M

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA

Muktamar Ke-35
Nahdlatul Ulama
Pergas Khatul Ahlis Sunnah wal Jamaah
untuk Indonesia Maju, Adil & Makmur 2045

HIMPUNAN MATERI

MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang

14–18 Rabi'ul Awwal 1448 H/27–31 Agustus 2026 M

Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama

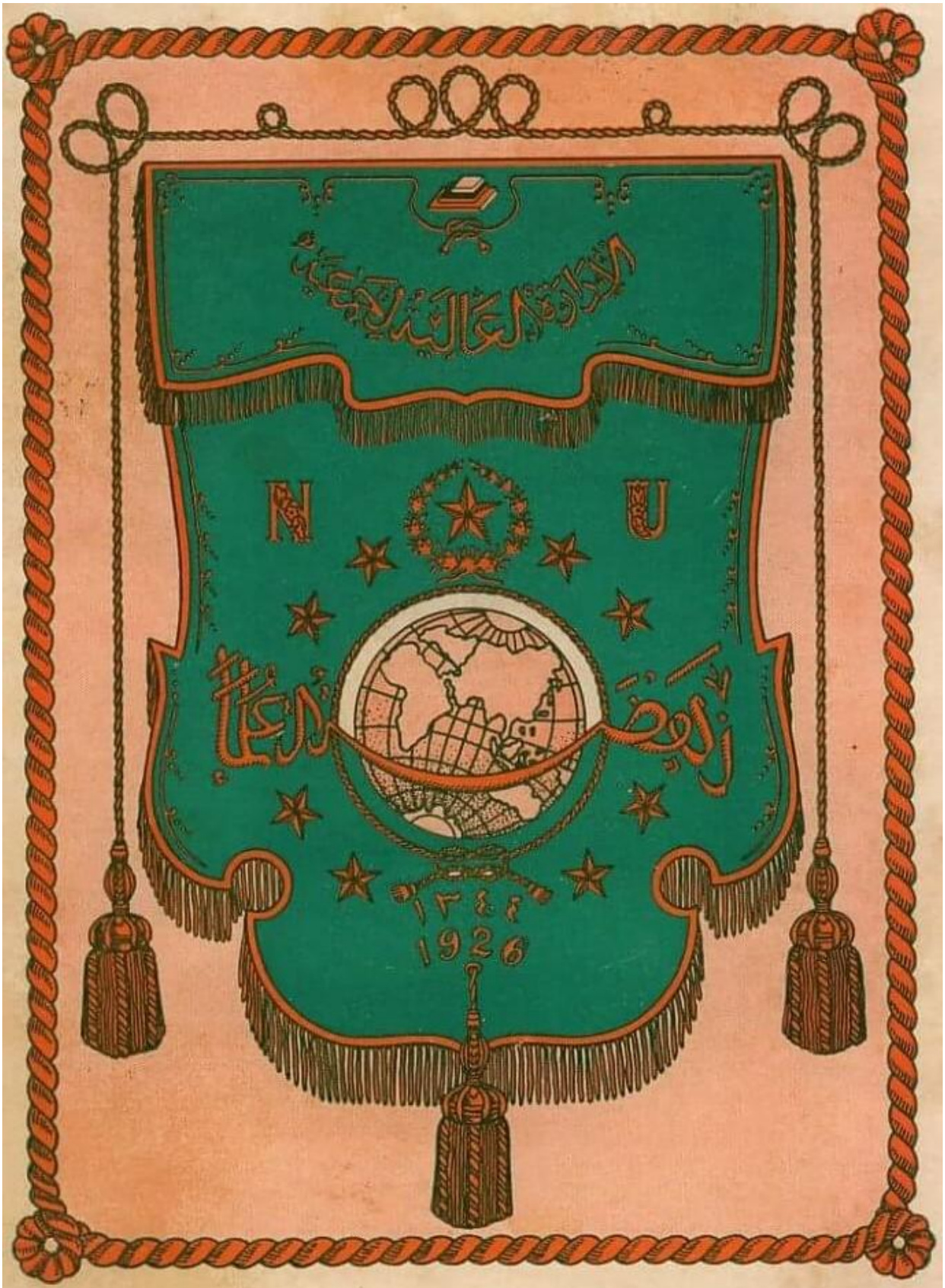

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

KATA PENGANTAR
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Alhamdulillah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dapat terselenggara. Sebagai majelis permusyawaratan tertinggi, Muktamar merupakan forum yang tinggi kedudukannya dan sangat strategis posisinya. Oleh karena itu, sangat tepat bila majelis ini dijadikan sebagai momentum untuk menata dan memajukan NU dan sekaligus dijadikan sebagai wahana untuk turut menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini. Dua bidang itu yang menjadi perhatian dan tujuan dari Muktamar NU saat ini, agar NU terus berperan dan terus relevan bagi kebutuhan umat dan bangsa.

Sesuai dengan AD/ART, Muktamar memiliki otoritas untuk membicarakan dan menetapkan hal-hal berikut: a) memutuskan masalah-masalah keagamaan (masail diniyah) baik bersifat tematik (maudluiyah), qonuniyah (berkaitan dengan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan) dan waqi'iyah (masalah yang terjadi di masyarakat); b) perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; c) menetapkan Garis-garis Besar Program Nahdlatul Ulama untuk 5 tahun, dan; d) taushiyah (rekomendasi) baik untuk internal jam'iyyah maupun kepada masyarakat dan pemerintah, serta e) Pemilihan Rais Am dan Ketua Umum Nahdlatul Ulama.

Muktamar yang insya Allah akan diselenggarakan mulai tanggal 27—31 Agustus 2026 adalah Muktamar yang ke-35 sejak NU didirikan. Berbagai agenda yang telah dipersiapkan, kiranya memiliki makna yang strategis bagi pembangunan peradaban bangsa, termasuk pengembangan organisasi NU di masa depan. Nilai strategis Muktamar tentu menuntut para ulama dan pengurus NU untuk berpikir keras memberikan keputusan dan kebijakan yang terbaik. Karena itu tugas kita adalah melakukan pembahasan secara cermat, cerdas dan serius melalui forum persidangan selama Muktamar berlangsung. Mengingat substansinya, maka Muktamar akan diikuti oleh peserta utusan dari PWNU dan PCNU se-Indonesia, anggota Pleno PBNU, dan para alim ulama, pengasuh pondok pesantren, dan tenaga ahli. Konsepsi dan pemikiran yang dihasilkan tentu menjadi pijakan Nahdlatul Ulama dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa.

Berbagai persoalan akan dikaji, dibahas dan dicari jalan keluarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama* mencari dan menetapkan dasar hukum; *Kedua,* merumuskan menjadi sebuah konsep yang utuh; *Ketiga,* mencari jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi NU dan bangsa ini. Dengan langkah ini diharapkan kita dapat menyelesaikan berbagai masalah dengan baik.

Dalam menjalanklan kebijakan orgaisasi baik yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan apalagi dalam soal politik kenegaraan kita memerlukan landasan hukum syar'i yang kokoh. Selain itu membutuhkan konsep yang matang, utuh dan komprehensif. Selanjutnya dibutuhkan kerangka kerja yang operasional. Ini yang perlu digarap dalam Muktamar ini.

Di antara apa yang kita cita-citakan itu sudah tertuang dalam materi Muktamar ini, yaitu: Hukum komersialisasi data genetika; hukum penggunaan neoralinkchip pada otak manusia; hukum bitkoin; standar kadar emas dalam nisob zakat mal; kebijakan fiskal negara dalam perspektif Islam; konsep i'adatun nazhor atas keputusan hukum NU; telaah RUU Sistem Pindidikan Nasional; RUU Ketenagakerjaan; jinayat dalam Qonun Aceh; rancangan perubahan AD/ART NU; rekomendasi tentang tata kelola SDA, lingkungan hidup, perbaikan pendidikan dan kesejahteraan guru, peran agama dan masyarakat dalam perdaiaman, dan pemberdayaan ekonomi rakyat; dan tidak ketinggalan akan membahas program kerja NU 2026-2031 serta peta jalan NU 2050. Dengan pengajuan materi semacam itu diharapkan nanti organisasi NU dapat terkonsolidasikan dengan baik, memiliki konsep kemasyarakatan dan keagamaan yang utuh dan komprehensif yang bisa dijalankan warga NU dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam berpolitik dan dalam mengelola masyarakat dan negara.

Dengan susah payah materi Muktamar ini telah dirumuskan, tinggal ditangan peserta Muktamar ini untuk menyempurnakan dan mematangkan, sehingga diharapkan nantinya menjadi keputusan yang baku, yang memiliki keabsahan secara agama, dan memiliki ketepatan secara konsep dan memiliki kecocokan dalam penerapannya.

Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, partisipasi dalam penyusunan materi dan kesuksesan Muktamar tahun ini.

Dengan memohon hidayah dan ma'unah dari Allah SWT dan syafa'at dari Nabi Muhammad SAW kita berharap semua materi ini dapat digarap dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Semuanya ini perlu dijalankan dengan keikhlasan karena ini merupakan amal dan ibadah kita.

والله الموفق إلى أقوم الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 20 Agustus 2026

KH. Miftachul Akhyar	KH. Akhmad Said Asrori	KH. Yahya C. Staquf	Drs. H. Saifullah Yusuf
Rais Aam	Katib Aam	Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
KOMISI BAHTSUL MASAIL WAQI'IYAH 7
1. Komersialisasi Data Genetika (DNA) 9
2. Penggunaan Neuralink Chip Pada Otak Manusia 17
3. Hukum Bitkoin 28
4. Standarisasi Kadar Emas pada Nisab Zakat Mal 40
KOMISI BAHTSUL MASAIL MAUDLUIYAH 45
1. Kebijakan Fiskal Negara dalam Perspektif Islam 47
2. Konsep I'adathun Nazhor atas Keputusan Keagamaan NU 52
3. Konsep Nilai-Nilai Keulamaan 69
KOMISI BAHTSUL MASAIL QANUNIYAH 97
1. RUU Sistem Pendidikan Nasional 99
2. RUU Ketenagakerjaan: Pembatasan Alih Daya, PKWT, Pengupahan, dan PHK 106
3. Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah 118
KOMISI ORGANISASI 129
1. Rancangan Perubahan Anggaran Dasar 132
2. Rancangan Perubahan Anggaran Rumah Tangga NU 144
KOMISI REKOMENDASI 209
1. Tata Kelola Sumber Daya Alam, Kedaulatan Energi, dan Ketahanan Pangan 211
2. Lingkungan Hidup dan Teknologi Terbarukan 214
3. Penguatan Peran Agama dan Masyarakat dalam Perdamaian Dunia 216
4. Perbaikan Tata Kelola Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Guru/Dosen untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Berkeadilan 219
5. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalaui Koperasi Berbasis Komunitas yang Inklusi dan Berdaya Saing 221
KOMISI PROGRAM 223
1. Pendahuluan 225
2. Analisis Kontekstual 226
3. Landasan Dasar Program NU 232
4. Peta Jalan NU 2026-2050 235
5. Arah Strategi Program NU 2026-2031 242

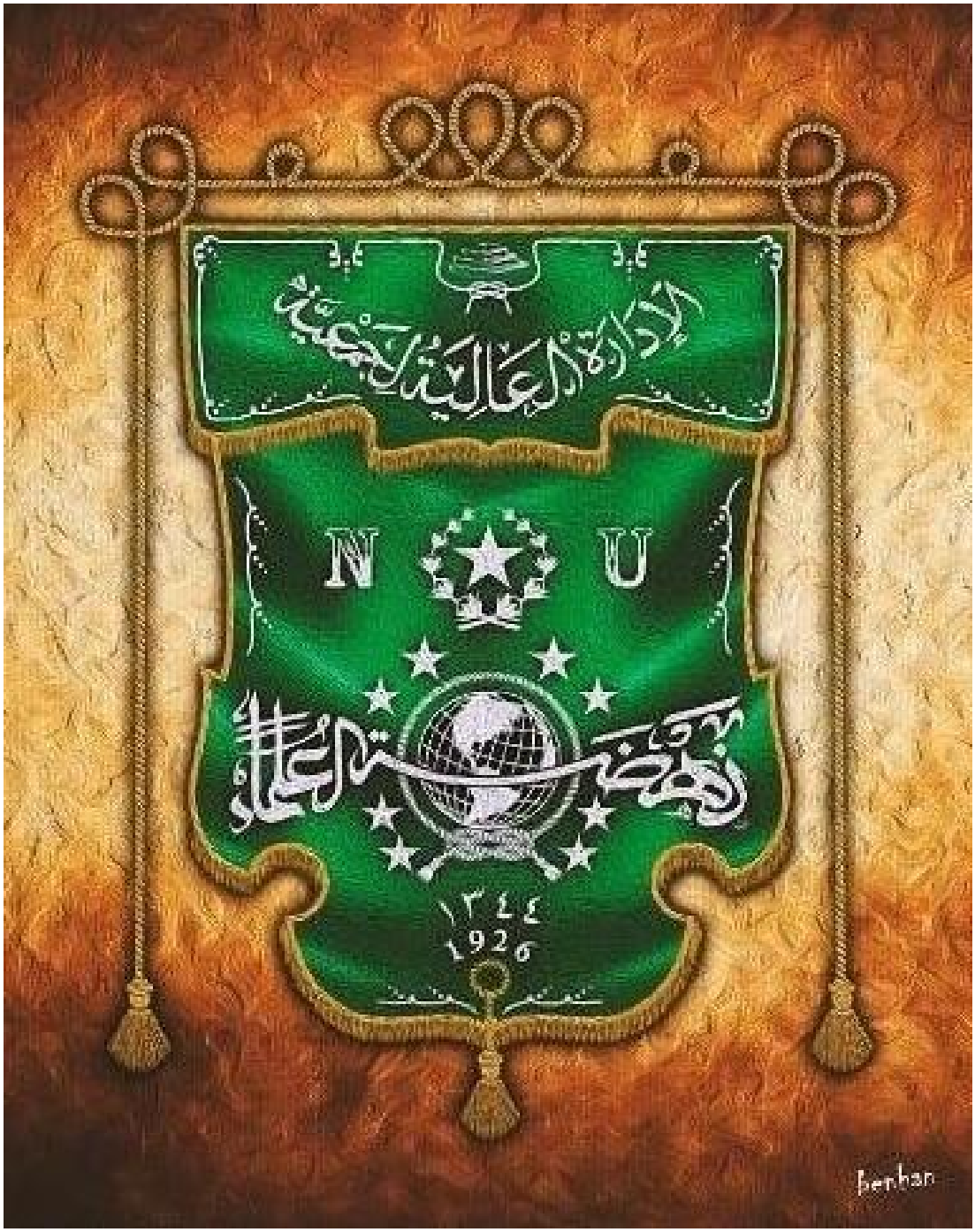
الإدارة العالية
N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926
Benhar

Muktamar Ke-35
Nahdlatul Ulama
Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang
27-31 Agustus 2026 | 14-18 R. Awwal 1448 H

BAHTSUL MASA'IL WAQI'IYAH

MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
14-18 Rabi'ul Awwal 1448 H/27-31 Agustus 2026 M

Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama

MATERI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-WAQI'IYAH MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

MATERI I

KOMERSIALISASI DATA GENETIKA (DNA)

1. Komersialisasi Data Genetik (DNA)

A. Deskripsi Masalah

Saat ini teknologi kesehatan sudah sangat canggih. Hanya dengan sampel air liur atau setetes darah, laboratorium bisa membaca DNA *(Deoxyribonucleic Acid)*, dalam bahasa Indonesia disebut Asam Deoksiribonukleat. DNA adalah kode cetak biru biologis yang ada di dalam tubuh setiap manusia. Di dalam DNA tersebut, tersimpan informasi yang sangat rahasia dan pribadi, mulai dari garis keturunan, sifat fisik, hingga risiko penyakit yang mungkin kita derita di masa depan.

Sekarang muncul tren di masyarakat, orang-orang dengan sukarela memeriksakan DNA mereka ke perusahaan swasta, misalnya untuk sekadar tahu asal-usul nenek moyang atau memetakan bakat anak sejak kecil.

Masalahnya, setelah tes selesai, data DNA yang sudah diarsip menjadi data itu tidak dihapus. Data DNA dapat dikumpulkan dalam jumlah besar oleh perusahaan, lalu dijual atau dikerjasamakan dengan pabrik obat (farmasi), dan perusahaan teknologi luar negeri untuk bahan penelitian sains dan pembuatan obat dengan nilai keuntungan mencapai miliaran rupiah.

Kasus paling masif dan menjadi sorotan internasional adalah perusahaan tes DNA komersial asal Amerika Serikat, 23andMe. Perusahaan ini mengumpulkan jutaan data profil genetik/silsilah individu melalui layanan tes DNA rumahan yang populer.[1] Ketika 23andMe menghadapi krisis finansial dan mengajukan kebangkrutan, basis data genetik berisi jutaan informasi biologis milik pengguna sempat terancam dilelang atau dijual kepada pihak ketiga (seperti perusahaan farmasi atau investor komersial) untuk melunasi utang perusahaan. Hal ini memicu kecaman keras dari regulator global (seperti Federal Trade Commission/FTC di AS) karena data paling privat milik manusia diperlakukan layaknya aset komersial biasa.[2]

Sebelumnya, sistem 23andMe juga pernah mengalami pembobolan keamanan (eksploitasi kredensial) yang membocorkan data jutaan profil DNA, silsilah keluarga, serta laporan kesehatan pengguna ke tangan peretas (*hacker*), yang berujung pada investigasi gabungan internasional dan sanksi denda besar oleh otoritas pelindungan data global.[3]

Meskipun belum ada skandal komersialisasi massal tes DNA komersial seperti di Barat, ancaman nyata di Indonesia berpusat pada minimnya literasi privasi genetik masyarakat saat mengikuti cek kesehatan gratis, riset biomedis komersial berkedok kerja sama internasional, atau pengumpulan sampel spesimen medis tanpa pengawasan ketat yang melanggar koridor Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam hukum Islam (fiqih), tubuh manusia itu mulia dan hukum asalnya tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi dalam kasus ini, yang diperjualbelikan bukan lagi daging atau darah secara

---

[1] https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2025/06/23andme-fined-for-failing-to-protect-uk-users-genetic-data/. Diakses pada 27 Juli 2026, 23:22 WIB.

[2] https://id.investing.com/news/stock-market-news/ftc-khawatir-penanganan-data-pribadi-23andme-di-tengah-kebangkrutan-93CH-2749572. Diakses pada 27 Juli 2026, 23:22 WIB.

[3] https://www.tek.id/tek/23andme-ungkap-kebocoran-69-juta-data-dna-ke-hacker-b2icg9rmM. Diakses pada 27 Juli 2026, 23:18 WIB.

fisik, melainkan data yang berisi informasi rahasia tubuh kita. Di sinilah para ulama perlu memperjelas statusnya: apakah data rahasia tubuh boleh dikomersialkan atau tidak.

Selain itu, DNA kita tidak berdiri sendiri. DNA kita adalah cerminan cetak biru genetik keluarga, dari DNA orang tua dan akan diwariskan ke anak cucu. Jadi, ketika seseorang setuju untuk memberikan data DNA-nya ke pihak tertentu, dia secara tidak langsung juga membocorkan rahasia kesehatan seluruh anggota keluarga dan keturunannya. Jika data ini bocor, anak cucunya bisa dirugikan, misalnya ditolak saat mendaftar asuransi kesehatan karena diketahui punya data genetik yang bermasalah, seperti kemungkinan risiko terkena penyakit kanker, Alzheimer, dan semisalnya.

B. Pertanyaan

1. Apakah data DNA yang diambil dari tubuh bisa dianggap sebagai hak milik pribadi yang sah untuk diperjualbelikan, ataukah data itu tetap harus dijaga karena merupakan data rahasia pribadi yang bersifat spesifik yang dilindungi sebagaimana dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Bab III Pasal 4?
2. Bolehkah seseorang memberikan izin kepada pihak tertentu semisal korporasi komersial atau platform tes DNA, padahal data DNA juga berisi informasi spesifik keluarga dan keturunannya yang bisa berdampak buruk pada masa depan nanti?

C. Jawaban

1. Data DNA yang diambil dari tubuh merupakan hak privasi pemilik DNA yang tidak boleh diperjualbelikan tanpa seizin pemiliknya, sebab penggunaan data DNA tanpa seizin pemiliknya berpotensi merugikan pemiliknya seperti:
   a. Digunakan instrumen penipuan yang merugikan pemilik data DNA, misalnya mendaftar pinjol dan semisalnya atas nama pemilik data DNA;
   b. Digunakan sebagai alat pencurian kekayaan pemilik DNA;
   c. Disalahgunakan untuk menjatuhkan reputasi pemilik data DNA;
   d. Dijadikan bahan untuk mengeksploitasi hak komersial pemilik data DNA.

   Adapun mengkomersilkan data DNA, baik oleh pemilik data DNA maupun Korporasi atas izin pemilik, hukumnya diperbolehkan melalui skema *naql yad* (alih kuasa) selama tidak merugikan pihak lain yang masih memiliki keterkaitan dengan pemilik data DNA.
2. Idem

D. Referensi

Data DNA merupakan hak Privasi Pemilik DNA yang tidak boleh disebarluaskan

1. **الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ جـ7 صـ5235**

أ - السر: هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتما إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.

ب - السر: أمانة لدى من استودع حفظه، التزاما بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل.

ج - الأصل حظر إفشاء السر. وإفشاؤه بدون مقتض معتبر موجب للمؤاخذة شرعا.

2. **الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (٧/ 139)**

فصل: ومما يُنهى عنه إفشاءُ السرِّ، والأحاديث فيه كثيرة، وهو حرام إذا كان فيه ضرر أو إيذاء.

قوله: (ضرر) أي في النفس أو المال أو غيرهما. قوله: (أو إيذاء) أي يتأذى بإشاعة ذلك وإن لم يحصل منه ضرر فإن لم يترتب عليه أذى ولا ضرر كره.

3. **بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (٣/ 221)**

(الثامن عشر إفشاء السر) سواء سر نفسه أو غيره سيما الواقع بين الزوجين ومن شعار الفسقة وله مفاسد كثيرة كالحقد والبغض والعداوة والنميمة وإيقاظ الفتنة وفي حديث المشارق «لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله تعالى يوم القيامة» يعني معاصي ذلك الساتر من إشاعتها في الموقف – إلى أن قال – قال في الإحياء وإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار وقال الماوردي إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه لأنه لا يخلو عن الخيانة والنميمة – إلى أن قال – (اعلم أن) (ما وقع أو قيل) من الأفعال والأقوال (في مجلس مما يكره إفشاؤه إن لم يخالف الشرع) (يلزم كتمانه) إذا كان فيه إضرار الغير ويندب مؤكدا إذا لم يكن فيه إضرار

Kecuali Pemilik Data DNA mengizinkan

4. **غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب الجزء الاول صـ 117 الحنبلي**

مطلب في حرمة إفشاء السر وذكر الآثار الواردة في ذلك ويحرم على كل مكلف (إفشاء) أي نشر وإذاعة سر وهو ما يكتم كالسريرة وجمعه أسرار وسرائر قال في القاموس فشا خبره فشوا وفشوا وفشيا انتشر وأفشاه نشره ولعله يحرم حيث أمر بكتمه أو دلته قرينة على كتمانه أو ما كان يكتم عادة.

5. **الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ 293)**

النوع الثاني: ما طلب صاحبه كتمانه:

٧ - ما استكتمك إياه الغير وائتمنك عليه، فلا يجوز بثه وإفشاؤه للغير، حتى أخص أصدقاء صاحب السر، فلا يكشف شيئا منه ولو بعد القطيعة بين من أسر ومن أسر إليه، فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن. وهذا إذا التزمت بالكتمان، أما إذا لم تلتزم، فلا يجب الكتمان، ويدل لذلك حديث زينب امرأة ابن مسعود ونصه: عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري. وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله، فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. النوع الثاني: ما طلب صاحبه كتمانه: ما استكتمك إياه الغير وائتمنك عليه، فلا يجوز بثه وإفشاؤه للغير، حتى أخص أصدقاء صاحب السر، فلا يكشف شيئا منه ولو بعد القطيعة بين من أسر ومن أسر إليه، فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن. وهذا إذا التزمت بالكتمان، أما إذا لم تلتزم، فلا يجب الكتمان.

6. **فتح الباري لابن حجر (٣/ 330)**

قال القرطبي ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة لوجهين أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وإنما علم أنهما رأتا أن لا ضرورة تحوج إلى كتمانهما ثانيهما أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكون إجابته أوجب من التمسك بما أمرتاه به من الكتمان وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك ويحتمل أن تكونا سألتاه ولا يجب إسعاف كل سائل.

Menyebarluaskan dan Memperjual belikan Data Pribadi dalam pandangan Ulama Kontemporer

7. **دار الإفتاء المصرية | تاريخ الفتوى 3 مارس 2026 م | رقم الفتوى 8900 | مفتي أ. د/ نظير محمد عياد**

حكم بيع المبرمج البيانات الشخصية

(السؤال) ما حكم بيع المبرمج البيانات الشخصية؟ فأنا أعمل مبرمجًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأمتلك بحكم عملي قاعدة معلومات ضخمة، تحتوي على بيانات بيومترية (بصمات وجه وصوت) وشخصية للمستخدمين الذين وافقوا مسبقًا على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام لأغراض التطوير التقني، وقد عُرض عليَّ بيع هذه القاعدة لشركة أجنبية كبرى بعوض مادي، ولا أعرف ما نشاطها وكيف ستستفيد من هذه المعلومات. أرجو الإفادة بالحكم الشرعي في بيع قاعدة البيانات هذه.

(الجواب) يحرم على المبرمج بيع قاعدة المعلومات للبيانات الشخصية والبيومترية لشركة أجنبية أو غيرها مقابل نظير مادي دون إذن من أصحابها، والموافقة المسبقة من المستخدمين على سياسة الخصوصية لم تكن تمليكًا للبيانات، وإنما هي ائتمان وإذنٌ مقيد بغرض التطوير التقني، ويحرم على المبرمج الخروج عن هذا الغرض والمتاجرة بالبيانات لتحقيق ربح شخصي خائنًا لمبدأ الأمانة الرقمية، ومخالفًا لشرط الإذن، متعديًا على حقوق المستخدم في شخصه، وعرضه وماله.

التفاصيل:

Data Pribadi yang dimaksud

-- إلى أن قال -- (حكم بيع المبرمج البيانات الشخصية)

قد أسهم التطور التكنولوجي المتسارع وكثرة التقنيات الرقمية الحديثة والتي منها :الذكاء الاصطناعي في إتاحة وسائل أكثر دقة وحداثة في جمع ومعالجة وتحليل البيانات والمعلومات الشخصية، بما يسمح باستخلاص أنماط سلوكية ونفسية دقيقة للأفراد، فالبيانات الشخصية هي: البيانات المتعلقة بالشخص الطبيعي، والتي يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، وقد تكون هذه البيانات الشخصية بيانات "حساسة" متى أفصحت عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، كما أفادت المادة رقم (1) من قانون حماية البيانات الشخصية رقم (151) لسنة 2020م.

Data DNA merupakan data Privasi yang tidak boleh disebar dan diperjual belikan kecuali ada izin

وقد جعل ذلك البيانات الشخصية موردًا بالغ الحساسية؛ نظرًا لإمكانية توظيفها في التأثير على قرارات الإنسان أو الإضرار بمصالحه المادية والمعنوية، ومن ثَمَّ غدت حماية هذه البيانات ضرورة لصون كرامة الإنسان والحفاظ على خصوصيته وأمنه المالي والاجتماعي. ومتى حاز مبرمج الذكاء الاصطناعي تلك المعلومات بطريقة شرعية فإن ذلك لا يمنحه الحق في التعامل بها وفق ما يريد؛ إذ يُعد ذلك تعدّيًا على حق الفرد في بياناته الحيوية الخاصة بصورته وصوته، وكلاهما من حقوقه الخالصة التي لا يجوز اقتحامها إلا بإذنٍ معتبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم "كُل المسلِم على المسلِم حرام: دمه، وماله، وعرضه" رواه الإمام مسلم. قال القاضي أبو الفضل عياض في "إكمال المُعْلِمِ بفوائد مسلم" (7/ 530، ط. دار الوفاء): [فالدم كناية عن النفس، والعرض كناية عن أذاه بالقول] اهـ.

ويعدّ تصرف المطور في هذه الحالة تجاوزًا لحدود الإذن الممنوح له، لتحقيق النفع الشخصي بالتصرف فيها لشركات أجنبية أو غيرها؛ فالمستخدم حين وافق على سياسة الخصوصية، فعل ذلك بناءً على ائتمان منه للمبرمجين، ولغرض التطوير التقني لا غير، ومن ثَمَّ تكون يدهم على هذه البيانات يد أمانة. والمكلف مأمور بأداء الأمانات وحفظها بقول الله تعالى :﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (النساء: 58).

وبقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ من خانك"رواه الإمام أحمد.

والتصرف في البيانات على غير الوجه المأذون فيه هو خيانة للأمانة، وهو أمر محرم شرعًا؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له «رواه الإمام أحمد.

Tidak diperbolehkan ketika menyebabkan dampak negatif

وعملية التصرف في البيانات الشخصية والبيومترية -كبصمة الصوت أو الوجه أو غير ذلك- في جوهرها اعتداء مركب؛ فهي تبدأ بخيانة الأمانة، والتصرف في البيانات المملوكة لأصحابها تصرفًا غير مشروع بتجاوز حدود الإذن، حتى تنتهي إلى احتمالية إساءة استخدام هذه البيانات عبر التقنيات الحديثة، وتعريض الآخرين للخطر بكشف خصوصيتهم.

ويتضاعف جُرم هذا التصرف بما يفضي إليه من مآلاتٍ خطيرة؛ إذ يُعرِّض البيانات للتزوير والانتحال، والسطو على أموال الغير وحساباته، أو استغلال حقوقه التجارية دون مقابل، وهو تعدٍّ صريحٌ على حقوقه المالية، والتي يمتلك أصحابها فقط حق التصرف فيها، وهو من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه، قال تعالى :﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 188) – إلى أن قال --

وأكل أموال الناس بالباطل صورة من صور الغصب المحرم شرعًا؛ إذ الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق، سواء كان ذلك مالًا أم حقًّا ماليًّا، مما يمتلك أصحابه فقط حق التصرف فيه. قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (11/ 49، ط. دار المعرفة): [(اعلم) بأن الاغتصاب أخذ مال الغير بما هو عدوان من الأسباب، واللفظ مستعمل لغة في كل باب مالًا كان المأخوذ أو غير مال. يقال: غصبت زوجة فلان وولده، ولكن في الشرع تمام حكم الغصب يختص بكون المأخوذ مالًا متقومًا. ثم هو فعل محرم؛ لأنه عدوان وظلم] اهـ.

(موقف القانون المصري من تداول البيانات الشخصية دون إذن صاحبها)

قد اتجه المشرع المصري في قانون حماية البيانات الشخصية لمنع التصرف في هذه البيانات دون إذن صاحبها، فنص في المادة رقم (2) منه على أنه: [لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا] اهـ. ونص في قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937م المعدل بقانون (141) لسنة 2021م، في المادة (309) مكررًا، فقرة رقم (1) على أنه: [يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه: (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص] اهـ. كما نص في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (175) لسنة 2018م في المادة (25) على أنه: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين -كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة] اهـ.

(الخلاصة)

بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يحرم على المبرمج بيع قاعدة المعلومات للبيانات الشخصية والبيومترية لشركة أجنبية أو غيرها مقابل نظير مادي دون إذن من أصحابها، والموافقة المسبقة من المستخدمين على سياسة الخصوصية لم تكن تمليكًا للبيانات، وإنما هي ائتمان وإذنٌ مقيد بغرض التطوير التقني، ويحرم على المبرمج الخروج عن هذا الغرض والمتاجرة بالبيانات لتحقيق ربح شخصي خائنًا لمبدأ الأمانة الرقمية، ومخالفًا لشرط الإذن، متعديًا على حقوق المستخدم في شخصه، وعرضه وماله.

8. **دار الافتاء المصرية المفتي أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية، رقم الفتوى 8889**

(حكم محاكاة شخص حي بالذكاء الاصطناعي)

(السؤال:) ما حكم محاكاة شخص حي بالذكاء الاصطناعي؟ فقد انتشر مؤخرًا فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الشخصيات العامة، يتحدث فيه ساخرًا عن مسألة شائكة بأسلوب يثير الجدل، ثم أصدرت هذه الشخصية بيانًا تنفي فيه صلتها بهذا المقطع، مؤكدة أنه تم ابتكاره بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأن ناشره لم يحصل على إذن مسبق، مما أدى إلى تضليل الناس وإحداث بلبلة. ورد ناشر المقطع بأنه مجرد عمل ترفيهي للدعابة والمزاح، وليس فيه ما يضر بهذه الشخصية سواء من الناحية الواقعية أو القانونية. فما حكم إنشاء واستخدام برامج لمحاكاة الأحياء صوتًا وصورةً بواسطة تقنية (التزييف العميق - DeepFake) بغير إذنهم؟ وهل يتغير الحكم إذا كان القصد من ذلك الترفيه أو المزاح؟

(الجواب:) إنشاء واستخدام برامج لمحاكاة الأحياء بالذكاء الاصطناعي بواسطة تقنية (التزييف العميق - DeepFake) لاختلاق الأحداث وتحريفها ونشر الفتنة في المجتمع- هو عمل مُحَرَّمٌ شرعًا، ومجرم قانونًا، واستخدامه في التزييف والتدليس يُعدُّ من الكذب، والتزوير، والبهتان، والاعتداء على أعراض الناس وأموالهم، وهي من كبائر الذنوب، سواء كان بإذن صاحب الشأن أو كان دون إذنه، وسواء كان للترفيه والمزاح أو لم يكن. وتجوز المحاكاة التوثيقية بعرض ما حدث فعلًا، وإخراجها على ما وقعت عليه، دون تحريف لمضمونها أو إساءة لصاحبها، كوسيلة توضيحية مجدية وفعَّالة لنشر القيم الأخلاقية والتربوية وبناء العقليات المستقيمة، بشرط إذن صاحبه وانضباطه بالضوابط والقيود الشرعية وخلوه من المخالفات والمحظورات الشرعية -- إلى ان قال –

ووجه الحرمة في كل منهما اشتمالهما على جملة من المحاذير الشرعية: أولًا: الاعتداء على حق الفرد في شخصه، حيث يمثل استخدامها اعتداءً صارخًا على البيانات الحيوية للإنسان الخاصة بصورته وصوته، وكلاهما من حقوقه الخالصة، التي لا يجوز اقتحامها إلا بإذنٍ معتبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم :كُل المسلِم على المسلِم حرام: دمه، وماله، وعرضه رواه الإمام مسلم. قال القاضي أبو الفضل عياض في "إكمال المُعْلِمِ بفوائد مسلم" (7/ 530، ط. دار الوفاء): [فالدم كناية عن النفس، والعرض كناية عن أذاه بالقول] اهـ. ومحاكاة صوت وصورة الحي بدون إذنه بواسطة الذكاء الاصطناعي بتقنية التزييف العميق في جوهرها جناية مركبة من الأذى الفعلي والقولي، فهي تبدأ باعتداء فعلي بسرقة البيانات البيومترية للشخص، والتلاعب التقني بها، لتزوير هيئته وصورته وصوته، ثم ينتج عنه أذىً قوليٌّ يتمثل في نسبة أقوال لم يقلها إليه أو أفعال لم يقدم عليها، مما ينال من عرض الشخص وسمعته. ولا ريب أن التزييف العميق -لما لم يحدث- أشد حرمة وضررًا من مجرد الأذى بالفعل والقول المباشر، كونه يمزج بين الافتراء وتزييف الوعي الجماعي، فهو لا يتضمن تزوير الحقائق، واختلاق أدلة مادية فقط، بل هو أبلغ صور الكذب والنسبة الزائفة في العصر الحاضر، وقد انعقد الإجماع على حرمة الكذب. -- إلى أن قال -- وقال القاضي: الاستطالة في عرض المسلم أن يتناول منه أكثر ممَّا يستحقه على ما قيل له، أو أكثر ممَّا رخصوا له فيه، ولذلك مثَّله بالربا وعدّه من عداده، ثم فضله على سائر أفراده، لأنه أكثر مضرة وأشدُّ فسادًا، فإن العرض شرعًا وعقلًا أعزُّ على

النفس من المال، وأعظم منه خطرًا] اهـ. وهو ما ينتهي إلى القول بأن محاكاة الحي دون إذنه بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعارض مع مقصدين من المقاصد الخمس الكلية للشريعة الغراء، هما: حفظ البدن والعرض. ثانيًا: تلك المحاكاة اعتداء صريح على حقوق الغير المالية المصونة شرعًا، فقد اكتسب صوت المرء وصورته في العصر الحاضر مكانة عالية، وبعدًا اقتصاديًّا جديدًا، حيث يُعد التوقيع البيومتري حقًّا ماليًّا ومعنويًّا ذا قيمة، هو ملك لصاحبه، تقبله الأجهزة التكنولوجية المتطورة، مثل بصمة الوجه والصوت لفتح الحسابات البنكية، والأجهزة الشخصية، والخزائن المتطورة، كوسيلة للتوثيق والسداد. وهو ما يجعل التزييف ليس مجرد جناية على شخص الغير وعرضه، بل هي سرقة الهوية كاملة، بما فيها ذمة الشخص المالية، والتي هي جزءٌ لا يتجزأ من شخصيته القانونية والشرعية، إذ تُمكّن المُزَوِّر من الانتحال محل الضحية قانونيًّا، والسطو على أمواله وحساباته، أو استغلال حقوقه التجارية دون مقابل.

Hifdzu al-Mal mencakup Ikhtisas

9. **الثمار اليانعة ص: 13 - 14 شركة المعارف للطبع والنشر بندوغ**

ومنه حفظ الكليات وهى الدين والنفس والنسب والمال والعرض والعقل فالدين هو الأحكام الشرعية وحفظه يكون بصيانته عن إتيان المكفرات وعن إزالة حرمة الحرمات وحفظ النفس يكون بصيانتها عما يضرها والمراد بالنفس هنا النفس العاقلة المحترمة فيدخل الصغير والمجنون وتخرج البهيمة والعاقلة غير المحترمة فلا يجب حفظها وحفظ المال يكون بعدم التعدى بفعل غير المأذون فيه والمراد به كل ما يحل تملكه شرعا وإن قل فمثل المال الاختصاص فى حرمة التعدى فيه لا فى الحد والضمان ولحفظ ذلك المال شرع حد السرقة وحد قطع الطريق وضمان المتلفات.

Skema Alih Kuasa (Naql Yad)

10. **مناهل العرفان صـ 376-377 للشيخ فضل عبد الرحمن**

حكم نقل الأعضاء

نقل الأعضاء من جسد حي أو ميت لآخر لا يجوز، لأنه لم يكن مأذونا فيه من الشارع، بل نهى عن التغيير لخلق الله، فإذا منع الشارع خصاء اللآدمي لذلك فما بالك بنقل أعضائه من عين وقلب ونحو ذلك وإن كان ميتا؟! ففيه هتك لحرمته الواجب علينا صونها. نعم الدم يجوز فيما يظر لي أخذه من الشخص ونقله إلى آخر إذا لم يكن فيه ضرر على المأخوذ منه لأنه كالفضلة ولكن لا يصح بيعه لأنه نجس وغير مملوك، غير أنه يجوز أخذ عوض عنه كالإختصاص في مقابل رفع اليد عنه، وكل هذا يؤخذ من كلام الفقهاء وبحوثهم وتعاليلهم فلا نطيل بذلك.

11. **فقه المعاملات المعاصرة (٣/ 7) محمد حسن عبد الغفار**

شروط بيع لبن الأمهات: إذا قلنا بجواز البيع لا بد لنا من أن ننظر في هذه المسألة إلى أمرين: الأمر الأول: ألا يضر اللبن الطفل، فإذا أضره لم يجز بيعه؛ لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:١٩٥]. الشرط الثاني: انتشار التحليل، وهو خمس رضعات مشبعات، ولها حالتان. قبل ذلك نذكر الرد على الأحناف. كأنهم قاسوا على الأعضاء، والأعضاء لا يجوز لها أن تتبرع بها, ثم قالوا: لا تباع؛ لأنها شريفة، ولا يجوز بيع جزء منها. نقول: نعم، هذا شريف، والإنسان شريف، لكن الشرف لا يمنع من البيع. والقياس على الأعضاء قياس مع الفارق، مع أننا نوافقكم على أن التبرع بالأعضاء لا يجوز، لكن اللبن متولد مثله مثل الدم، ولذلك يجوز لك التبرع بالدم، وهذا باتفاق العلماء، ولكن لا يجوز بيعه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وهناك قياس مع الفارق لا يدل على الحرمة، هذا هو الرد على قول الأحناف.

Merugikan pihak lain yang berkaitan dengan data DNA-nya

12. **المفاتيح في شرح المصابيح (٥/ 248)**

٣٩٣٩ - وقال: "المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق".

قوله: "المجالس بالأمانة"؛ يعني: يجب على أهل المجلس أن يحفظوا سر أهل المجلس، لا يفشون ما جرى في المجلس من الأحاديث، وهذا إذا كان ذلك الحديث حديثا يكره صاحبه إفشاءه. أما مثل الزنا، وأخذ مال الغير، وسفك دم: حرام: لا يجوز حفظ السر في هذه الثلاثة؛ يعني: من قال في مجلس: إني أريد قتل فلان، أو الزنا بفلانة، أو أخذ مال فلان؛ لا يجوز على المستمعين حفظ هذا السر، بل يجب عليهم إفشاؤه؛ ليفر من يريد قتله، أو الزنا بها، أو أخذ ماله.

13. **فيض القدير (2/ 533)**

2477 - (إن من أعظم الأمانة) أي من أعظم خيانة الأمانة (عند الله تعالى يوم القيامة) يوم ظهور الجزاء (الرجل) [ص:534] خبر إن وفيه تقدير مضاف أي خيانة الرجل كما تقرر (يفضي إلى امرأته) أي يصل إليها استمتاعا فهو كناية عن الجماع (وتفضي إليه) أي تستمتع به وأصله من الفضاء. قال الراغب: الفضاء المكان الواسع ومنه أفضى بيده وأفضى إلى امرأته قال تعالى {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} (ثم ينشر سرها) أي يتكلم بما جرى بينه وبينها قولا وفعلا وهذا وعيد شديد كما قال النووي في حرمة إفشاء هذا السر إذا لم يترتب عليه فائدة وإلا كأن تدعي عجزه عن الجماع أو إعراضه عنها ونحو ذلك فلا يحرم بل لا يكره ذكره واعلم أن كراهة إفشاء السر شامل لحليلته لأخرى فإن قلت: هذا يناقضه ما علمه أنس بتوقيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أتى أزواجه بغسل واحد ولا طريق لعلمه إلا إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قاله الإمام البيهقي قلت: لعل النهي عن إفشاء السر من قبيل الغيبة أو إن كان مفصلا أو بحضور الناس. أما ما ليس من قبيل الغيبة وهو إجمالي لمن لا يحتشمه كخادمه فليس منهيا أو يقال إنما قصد بإعلام أنس بيان الجواز (حم م د عن أبي سعيد الخدري) ولم يخرجه البخاري.

14. **بغية المسترشدين صـ 126**

(مسألة ى) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف

15. **حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج ٦/ ١٤٢**

(قوله: نعم يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعا الخ). انظر صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فانه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا أو لم يقدر مدة فبعد تسليم الصحة يستحق منفعة الجميع ولا تمكن المعاقدة مع غيره ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو اذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل

16. **اسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٥١**

(أو استرضاء) فيه أى طلب منه البراءة منه ... قال السيوطي: ولو لم يرض صاحب الحق فى نحو الغيبة إلا ببذل مال كان للتائب بذله سعيا فى خلاص ذمته والغبطة فى ذلك له.

MATERI II
PENGGUNAAN NEURALINK CHIP PADA TUBUH MANUSIA

2. Penggunaan Neuralink Chip Pada Otak Manusia

A. Deskripsi Masalah

Seiring pesatnya perkembangan neuroteknologi, inovasi perangkat antarmuka otak-komputer (*Brain-Computer Interface*/BCI) nirkabel kini telah diimplementasikan pada manusia. Salah satu pelopor utamanya adalah Neuralink yang hingga Januari 2026 dilaporkan telah menanamkan perangkat BCI pada 21 pasien manusia.

Brain Computer Interface (BCI)

Brain Computer Interface (BCI) adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi langsung antara otak manusia dan komputer atau perangkat elektronik. Tujuan utama BCI adalah menangkap aktivitas neuron dari otak, kemudian menerjemahkannya menjadi perintah yang dapat dipahami oleh komputer.

Klasifikasi BCI

Brain-Computer Interface atau BCI secara garis besar dibagi menjadi dua jenis.

1. **Non-Invasive BCI**, contohnya adalah EEG atau Electro encephalo graphy. Pada jenis ini, sensor ditempatkan di luar kepala untuk menangkap sinyal listrik otak. Sinyal otak tersebut kemudian diproses oleh komputer untuk menjadi sebuah perintah. Pada BCI non-invasif seperti EEG, tidak diperlukan tindakan operasi karena sensor hanya dipasang di permukaan kepala.
2. **Invasive BCI**, contohnya adalah **Neuralink Chip**. Pada jenis ini, chip ditanamkan di dalam otak melalui operasi untuk membaca sinyal neuron secara langsung. Chip tersebut dilengkapi dengan benang elektroda yang sangat tipis. Pada Neuralink yang bersifat invasif, chip yang sangat tipis ditempatkan langsung di area otak yang menjadi target, sehingga mampu merekam aktivitas neuron dengan resolusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan EEG. Sinyal tersebut kemudian diproses menggunakan perangkat elektronik dan algoritma program komputer untuk diterjemahkan menjadi perintah, misalnya untuk menggerakkan kursor komputer, mengetik, atau mengendalikan perangkat lain hanya melalui aktivitas otak.

Karena sinyal direkam secara langsung dari jaringan otak, tingkat akurasi dan kecepatan respons yang dihasilkan jauh lebih baik dibandingkan dengan BCI non-invasif. Namun, metode ini memiliki tantangan yang lebih besar karena memerlukan prosedur bedah, memiliki risiko medis, serta membutuhkan pengujian keamanan dan efektivitas jangka panjang sebelum dapat digunakan secara luas.

Teknis Penempatan dan Pemasangan Neuralink

Menurut penjelasan dari BRIN, penempatan Neuralink di otak dapat dijelaskan dalam empat poin:

1. **Lokasi penempatan di otak.** Target utama dari Neuralink adalah Area Motorik Primer atau M1, yang berfungsi untuk membaca niat seseorang untuk bergerak. Di sekitar area tersebut terdapat Area Premotor yang berfungsi untuk merencanakan gerakan, dan Area Somatosensorik yang berfungsi menerima informasi sensorik dari tubuh. Secara anatomi, lokasinya berurutan dari Premotor Cortex, Primary Motor Cortex (M1), hingga Somatosensory Cortex.

2. **Proses pemasangan Neuralink.** Prosesnya melalui empat tahap. Tahap pertama, chip Neuralink ditempatkan tepat di atas area motorik atau M1. Tahap kedua, elektroda yang sangat tipis yang disebut Thread ditanam ke dalam korteks motorik. Tahap ketiga, chip tersebut mulai membaca sinyal aktivitas neuron. Dan tahap keempat, sinyal tersebut dikirim secara nirkabel ke perangkat eksternal di luar tubuh.
3. **Area elektroda di korteks motorik**. Jika dilihat dari tampak atas otak atau kedua hemisfer, terdapat pembagian fungsi. M1 Kiri berfungsi untuk mengontrol gerakan sisi kanan tubuh, sementara M1 Kanan mengontrol gerakan sisi kiri tubuh. Begitu juga terdapat Premotor Kiri dan Premotor Kanan, serta Somatosensorik Kiri dan Kanan. Pada pembesaran area M1, terlihat bahwa elektroda yang digunakan sangat tipis dalam ukuran mikrometer dan mampu membaca aktivitas neuron secara individu.
4. **Alur kerja Neuralink.** Alurnya dimulai dari adanya aktivitas neuron di korteks motorik, kemudian aktivitas tersebut ditangkap sebagai sinyal listrik oleh elektroda, lalu sinyal tersebut diproses oleh chip Neuralink, setelah itu sinyal dikirim secara nirkabel melalui bluetooth, kemudian komputer atau AI menerjemahkannya menjadi sebuah perintah, dan akhirnya perintah tersebut digunakan untuk mengendalikan perangkat eksternal seperti komputer atau lengan robotik.

Cara Kerja BCI dan Neuralink

Secara definisi, BCI atau Brain-Computer Interface adalah teknologi yang menerjemahkan sinyal listrik dari otak menjadi perintah bagi perangkat luar, seperti kursor komputer, lengan robotik, atau sintesis suara, tanpa harus melalui jalur saraf dan otot.

Adapun perangkat Neuralink yang disebut Implan N1, bentuknya adalah cakram seukuran koin yang akan menggantikan sepotong kecil tulang tengkorak. Perangkat ini memiliki 64 benang elektroda yang ukurannya lebih tipis dari rambut manusia. Pemasangannya dilakukan di korteks motorik melalui robot bedah khusus. Sifatnya nirkabel dan dapat diisi ulang dayanya. Versi yang diujikan pada manusia saat ini menggunakan 1.024 elektroda yang terbagi dalam 64 benang tersebut.

Sebagai data pendukung, perlu diketahui bahwa jumlah sel saraf di otak manusia itu mencapai 86 miliar sel. Sementara elektroda yang ada pada implan N1 saat ini berjumlah 1.024 elektroda. Hingga bulan Januari tahun 2026, peserta uji klinisnya berjumlah 21 orang, dengan total jam pemakaian yang terkumulasi sudah lebih dari 15.000 jam.

Klasifikasi Tiga Kluster Penggunaan BCI

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membagi penggunaan teknologi Brain-Computer Interface (BCI) atau implan otak ke dalam tiga kluster besar, untuk membedakan mana yang sudah nyata, mana yang sudah mapan, dan mana yang masih wacana.

1. **Kluster Pertama adalah Kluster Medis / Restoratif**

   Ini adalah teknologi nyata yang sedang berjalan saat ini. Contohnya adalah Neuralink dengan implan N1, Synchron dengan Stentrode, dan BrainGate dari konsorsium riset akademik. Statusnya saat ini masih dalam tahap uji klinis berjalan, diperuntukkan bagi pasien lumpuh berat dan penderita ALS. Hingga hari ini belum ada satu pun yang disetujui untuk pasar penuh.

   Secara umum, fungsi dari teknologi ini adalah untuk memulihkan fungsi mobilitas dan komunikasi pasien dengan kondisi medis berat yang kehilangan kendali atas tubuhnya, seperti kelumpuhan atau paraplegia, amputasi untuk mengontrol lengan bionik, dan ALS non-verbal yang tidak bisa bicara.

Perlu dicatat bahwa izin Neuralink dari FDA diberikan pada September 2023 khusus untuk pasien dengan kondisi berat seperti kelumpuhan dan ALS, bukan untuk penggunaan pada orang yang sehat. Seluruh uji klinis Neuralink pada manusia berada pada kategori restoratif bagi penyandang disabilitas berat. Per Januari 2026, implan tersebut sudah digunakan oleh 21 orang.

Riset terkait yang sedang berjalan adalah PRIME Study dengan kode NCT06429735 untuk kendali kursor, CONVOY Study dengan kode NCT06710626, dan VOICE untuk pemulihan bicara. Prinsip utama yang dipegang adalah manfaat harus lebih besar untuk pasien daripada risikonya, atau risk-benefit ratio. Selain Neuralink, Synchron juga mengembangkan Stentrode, yaitu BCI yang dipasang melalui pembuluh darah memakai kateter, sementara BrainGate dikembangkan oleh Brown University dan Massachusetts General Hospital.

2. **Kluster Kedua adalah Kluster Preventif / Psikiatris**

   Teknologi pada kluster ini sudah ada, tetapi menggunakan perangkat yang berbeda, bukan Neuralink. Contohnya adalah NeuroPace RNS System untuk epilepsi, serta DBS atau Deep Brain Stimulation untuk Parkinson yang sudah disetujui FDA sejak tahun 1997, dan DBS untuk OCD berat yang disetujui FDA tahun 2009. Statusnya sudah disetujui FDA. Perlu ditegaskan bahwa ini bukan Neuralink, melainkan perangkat terpisah yang sudah mapan penggunaannya di dunia medis.

3. **Kluster Ketiga adalah Kluster Augmentatif / Transhumanis**

   Kluster ini masih bersifat spekulatif, tanpa bukti klinis. Yang dibayangkan adalah manusia memiliki daya ingat super, penyatuan otak dengan AI, dan augmentasi kognisi bagi manusia yang sehat. Statusnya masih spekulatif. Tidak ada satu pun produk yang disetujui, ini baru wacana industri, bukan realitas yang terbukti.

   Kluster ketiga ini merupakan teknologi implan otak oleh manusia yang sehat dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kognitif melampaui batas normal, yang dalam istilahnya disebut sebagai transhumanisme. Namun perlu ditegaskan, klaim-klaim tentang adanya daya ingat super, percepatan pemrosesan otak, hingga penyatuan otak manusia dengan kecerdasan buatan untuk manusia sehat, itu semua tidak memiliki bukti ilmiah dan tidak pernah diujikan secara klinis.

Maka, augmentasi kognitif melalui implan otak pada manusia sehat adalah sesuatu yang masih bersifat spekulatif, belum terbukti, dan lebih merupakan wacana industri, bukan realitas klinis yang terbukti.

Apa yang Bisa dan Tidak Bisa Didekode dari Otak?

Dalam teknologi Brain-Computer Interface atau BCI, harus dibedakan antara yang didekode dan yang tidak didekode. Yang didekode oleh BCI adalah **Niat Gerak Motorik**. Yaitu rencana gerak fisik yang berasal dari korteks motorik, berupa pola aktivasi neuron saat seseorang membayangkan sedang bergerak, dan perintah motorik tersebut tetap bisa dibaca meskipun tubuh dalam keadaan lumpuh.

Berbeda dengan itu, yang tidak bisa didekode adalah **Isi Pikiran dan Niat Moral**. Seperti keyakinan, aqidah, dan batin seseorang, niat moral, emosi, atau isi percakapan, serta pikiran, memori, atau hasrat yang tersembunyi.

Relevansinya untuk masalah taklif, BCI itu hanya mendekode rencana gerak fisik dari korteks motorik, bukan keyakinan batin atau niat moral seseorang. Bahkan akurasi dekode itu pun masih terbatas, yaitu sekitar 80% untuk dua jari dan sekitar 60% untuk tiga jari, sebagaimana dilaporkan dalam Nature Communications tahun 2025. Sehingga, membaca pikiran dalam arti membaca niat batin bukanlah kemampuan yang tersedia saat ini.

Kesimpulan

Dari ketiga kluster penggunaan BCI dapat disimpulkan sebagai berikut: kluster pertama yang untuk pengobatan lumpuh masih uji coba, kluster kedua yang untuk Parkinson dan epilepsi sudah mapan tapi beda alat (bukan *Neuralink Chip*), sementara kluster ketiga yang untuk membuat manusia sehat menjadi super cerdas masih sekadar wacana[4].

B. Pertanyaan

1. Bagaimana hukum menanamkan chip ke dalam jaringan otak manusia (*Neuralink Chip*) dalam jenis Kluster Medis/Restoratif?
2. Bagaimana hukum menanamkan chip ke dalam jaringan otak manusia dalam Kluster Augmentatif/Transhumanis?
3. Chip tesebut bisa membaca sinyal otak saat seseorang yang baru berniat atau baru berpikir mau melakukan sesuatu, lalu datanya diproses oleh kecerdasan buatan (AI) dari luar. Sejauh mana orang tersebut tetap dianggap mandiri secara akal dan bertanggung jawab penuh di hadapan Allah (terkena hukum dosa/pahala) atas perbuatannya, jika pikirannya sudah dipengaruhi atau dibantu oleh algoritma komputer?

C. Jawaban

1. Hukum menanamkan chip ke dalam jaringan otak manusia dalam jenis Kluster Medis/ Restoratif ialah diperbolehkan karena masih dalam cakupan konsep tadawi yang disyariatkan, dengan syarat:
   a. Terdapat hajat atau darurat yang diakui syariat, seperti mengembalikan fungsi anggota tubuh yang hilang sebagaimana konsep tadawi itu sendiri;
   b. Tingkat keselamatan dan keberhasilan pemasangan chip lebih besar daripada resikonya;
   c. Efektifitas keberhasilannya dinilai dan dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten;
   d. Tidak terdapat alternatif pengobatan lain yang tidak melibatkan tindakan pembedahan.
2. Hukum menanamkan chip ke dalam jaringan otak manusia dalam Kluster Augmentatif/ Transhumanis tidak diperbolehkan karena kluster ini (peningkatan kapasitas kognitif otak) bukan sebagai pengobatan sehingga tidak termasuk *hajat* yang melegalkan tindakan pem-bedahan (*jarh*).

D. Referensi

Neuralink Kluster Medis

1. أسنى المطالب جـ 9 صـ 260

(ولو غلبت السلامة في قطع السلعة، و) في (المداواة) على خطرهما (جاز) ذلك لأنه إصلاح بلا ضرر (وإلا) بأن غلب التلف أو استوى الأمران أو شك (فلا) يجوز ذلك لأنه جرح يخاف منه فكان كجرحه بلا سبب (ويتخير) بين القطع، وعدمه (في قطع اليد المتآكلة) أو نحوها (إن جرى الخطران) خطر القطع، وخطر الترك (وغلبت السلامة) في القطع على خطره وإن استوى الخطران أو زاد خطر القطع بخلاف ما إذا لم تغلب السلامة لا يجوز القطع، وعليه يحمل إطلاق المهذب منع القطع، ولو كان الخطر في الترك دون القطع أو لا خطر في واحد منهما فله القطع كما فهم بالأولى، وبه صرح في الأصل في الأولى، وكذا لو كان الخطر في القطع دون الترك، وغلبت السلامة كما فهم من قطع السلعة والمداواة، ولو قال عقب قطع السلعة أو عضو متآكل لا غنى عن قوله، ويتخير إلى آخره، ولشمل ما لو كان الخطر في القطع دون الترك، وغلبت السلامة

[4] Harimat Hendarwan, Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN).

2. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج جـ 5 صـ 536

(ولمستقل) بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي والماوردي وغيرهما ولو سفيها (قطع سلعة) منه وهي بكسر السين، وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها: خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة، وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين (إلا) سلعة (مخوفة) قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي (لا خطر في تركها) أصلا (أو الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه، وقد قال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى، والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين، وإن نازع البلقيني في الجواز عند استوائهما، وقال لو قال الأطباء: إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب اهـ. وهذا الثاني أوجه، ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي: العضو المتأكل.

3. حاشيتا قليوبي وعميرة جـ 4 صـ 210

(ولمستقل) بأمر نفسه (قطع سلعة)، منه وهي بكسر السين غدة تخرج بين الجلد واللحم إزالة للشين بها، (إلا مخوفة) من حيث قطعها (لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها، فلا يجوز له قطعها بخلاف ما الخطر في تركها أكثر أو في القطع والترك متساو، فيجوز له قطعها كغير المخوفة، (ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر) فيه (إن زاد خطر الترك) عليه (لا لسلطان) بعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع ولو زاد خطره على خطر الترك أو تساويا امتنع القطع.

قوله: (كغير المخوفة) بأن لا يكون فيه خوف في تركها ولا في قطعها. فجملة الصور ستة، يمتنع القطع في اثنتين منها، بأن يختص الخطر بالقطع أو يكون فيه أكثر، ويجب في اثنتين أيضا أن يختص الخطر بالترك أو يكون فيه أكثر كما قاله البلقيني وأقر شيخنا في شرحه، ويجوز في الباقيتين. فقوله فيجوز هو جواز بعد منع، فيصدق بالواجب فتأمل. وبقي ما لو جهل خطر الترك أو القطع أو هما معا وفي ابن حجر جواز القطع في الأولى دون البقية، كذا قالوا وفيه بحث واضح لأنه إذا جهل خطر الترك فإما أن يعلم خطر القطع أو لا، والقطع في الأول ممتنع والثاني هو جهلهما معا وبما ذكر علم أن ما عدا جهلهما معا، وإذا جهل خطر القطع فإما أن يعلم خطر الترك أو لا، والقطع في الأول ممتنع، والثاني هو جهلهما معا، وإذا جهل خطر جهلهما معا داخل في كلامهم السابق، لأن قولهم إن الخطر يختص بالترك شامل لما إذا علم عدم خطر القطع أو جهل، وقولهم إن الخطر يختص بالقطع شامل، لما إذا علم عدم خطر الترك أو جهل، فلم يخرج عن كلامهم إلا مسألة جهل خطرهما معا والظاهر فيها عدم القطع لاجتماع المقتضي والمانع فراجعه وتأمله. ويعلم الخطر بقول أهل الخبرة ولو واحدا أو بمعرفة القاطع بنفسه، أو بمعرفة الولي إذا كان عارفا بذلك.

4. نهاية المطلب في دراية المذهب جـ 17 صـ 350-351

قال: " وإذا كان برجل سِلْعَةً، فأمر السلطان بقطعها ... إلى آخره "

السِّلعة غدد تخرج بعضوٍ من الأعضاء، لا تكون مفضيةً إلى ضرر، [ولكنها] تشوّه الخَلْق، وتسوء، وقد [يُخشى] منها الإفضاء إلى أمرٍ مخوف، فإذا تأكَّلَت جارحةٌ، وكانت تتداعى، فلا يخفى أن قطعها إذا استصوبه أهل البصائر مما يؤثر في الدفع على ما سنفصل ونصف. ونحن نفرض ما نريدُ من ذلك في البالغ المستقلّ المالك لأمر نفسه، ثم نعود إلى أحكام الولاة، فنقول: إذا لم يكن في قطع السِّلعة خوفٌ، فأراد صاحبها قطعَها لإزالة شَيْن، فلا حرج عليه في ذلك. ولو كان في قطعها تخوّف، وليس في بقائها إلا الشين، فلا يحل للإنسان أن يقطعها من نفسه؛ فإن التعرّض للخوف لا يعادل الشَّيْن. ولو كان في قطعها خوف، فنقول في تفصيل ذلك: إن كان لم يظهر الخوف في القطع، وظهر الخوف في التبقية، فيجوز القطع لا خلاف فيه، فإن قطع من نفسه، جاز، وإن أمر من يقطعها منه، فللغير أن يقطعها بأمره؛

فإنه أمير نفسه، وتصرّفه على هذا الوجه أولى من تصرّف الغير في الغير، وهو بمثابة الأمر بالحجامة والفصد، وما في معناهما. وإن كان في القطع خوف، وفي التبقية خوف، [ومقادير] الخوف وأوزانه لا تعتدل، فإن كان الخوف في التبقية أكثرَ وأغلبَ على الظن، وكان في القطع خوف أيضاً، فالذي صار إليه الأصحاب في الطرق أن له أن يقطع، ويأمر بالقطع لاستفادته غلبةَ الظن، على ما وصفناها، وإن استوى الأمران، واعتدل الخوفان، ولم يترجح أحدهما على الثاني، فقد كان شيخي يختار أنه لا يحل له القطع هاهنا؛ إذ لا فائدة فيه، والعواقب مغيبة. وذهب بعض الأصحاب إلى أنه لا معترض عليه إذا اعتدل الأمران، ولم يُخْلِ الأصحابُ الصورة عن خلاف أيضاً، فاستبان لي في الصورتين من كلام الأصحاب أوجه: أحدها - أن القطع إذا كان مخوفاً، لم يجز، والثاني - أنه جائز في الصورتين، والثالث - أنه يجوز إذا كان خوفُ التبقية أغلبَ، ولا يجوز إذا اعتدلا في الظن. وإن كان خوف القطع أغلب، فلا خلاف أنه لا يجوز. واتفق الأصحاب على أن من عظمت الآلام عليه، وصار بحيث لا يستقل بها، فليس له أن يسعى في إهلاك نفسه، ولذلك إذا كان به عِلَّة مُهلكة، وقد قيل لا خلاص، فليس له أن يذبح نفسه بسبب مذفِّف، ولو أُضرمت النار في إنسان وكان لا يطيق الصبر [على] لفحاتها فأراد أن يلقي نفسه في بحر ورأى ذلك أهونَ، فهذا قد اختلف فيه أبو يوسف ومحمد، وراجعنا شيخنا في ذلك، فقال: له أن يبتدئ مهلكاً باختياره. وفي المسألة احتمال؛ فإن الإحراق مذفف، وكذلك الإغراق، والرأي ما ذكره شيخنا. هذا رأينا في المستقل وما يجوز له من القطع وما لا يجوز.

5. حاشية الجمل على شرح المنهج جـ 5 صـ 278

(وحل قطع جزئه) أي جزء نفسه كلحمة من فخذه (لأكله) بلفظ المصدر؛ لأنه إتلاف جزء لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة هذا (إن فقد نحو ميتة) مما مر كمرتد وحربي (وكان خوفه) أي خوف قطعه (أقل) من الخوف في ترك الأكل أو كان الخوف في ترك الأكل فقط كما فهم بالأولى بخلاف ما إذا وجد نحو ميتة أو كان الخوف في القطع فقط أو مثل الخوف في ترك الأكل أو أشد فإنه يحرم القطع.

(قوله وكان خوفه أقل) قال الزركشي هذه المسألة شبيهة بقطع السلعة وقد ذكرا فيها أنه إن كان الخوف في القطع أكثر لم يجز أو في البقاء أكثر جاز على الأصح قال وما ذكراه في حالة التساوي مخالف لجزمهما هنا بالمنع وكأن الفرق أنه لا يؤمن هنا مع القطع تلف النفس بخلافه في السلعة اهـ سم. وعبارة شرح م ر: وأن لا يكون في قطعه خوف أصلا أو كان الخوف في قطعه أقل منه في تركه فإن كان مثله أو أكثر أو الخوف في القطع فقط حرم قطعا، وإنما جاز قطع السلعة في حالة تساوي الخطرين؛ لأنها لحم زائد ويزول الشين بقطعها ويحصل بها الشفاء وهذا تغيير وإفساد للبنية الأصلية فكان أضيق، ومن ثم لو كان ما يراد قطعه نحو سلعة أو يد متآكلة جاز هنا حيث يجوز قطعها في حالة الاختيار بالأولى قاله البلقيني. انتهت

6. شرح النووي على مسلم (14/ 192)

(لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله) فهذا فيه بيان واضح لأنه قد علم أن الأطباء يقولون المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي والمداواة رده إليه وحفظ الصحة بقاؤه عليه فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرها ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض وبقراط يقول الأشياء تداوى بأضدادها ولكن قد يدق ويغمض حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء فيقل الثقة بالمضادة ومن ها هنا يقع الخطأ من الطبيب فقط فقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون عن غير مادة أو عن مادة باردة أو عن مادة حارة دون الحرارة التى ظنها فلايحصل الشفاء فكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بآخر كلامه على ماقد يعارض به أوله فيقال قلت لكل داء دواء ونحن نجد كثيرين من المرضى يداوون فلا يبرءون فقال إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لالفقد الدواء وهذا واضح والله أعلم.

7. كتاب غاية تلخيص المراد جـ 1 صـ 239

(مسألة): يحرم على من لم يعرف الطب وقوانينه المعروفة عند أهله الإقدام على التطبب من الكتب المصنفة في ذلك من غير خبرة بمعرفة العلة جنساً ونوعاً، والتمييز بين البلدان والأزمان والأسنان،

ويفسق بتعاطيه لذلك وتردّ شهادته، ويضمن ما تولد من تطببه لقوله عليه الصلاة والسلام: "من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن" رواه أبو دواد والنسائي، ويعرف عدم تطببه بقول عدلين طبيبين غير عدوين، فلو قال غير العارف للمريض: ابلع هذا الدواء فبلعه، فإن كان مميزاً وجبت الدية، وإلا فالقصاص بشرطه، أما العارف بالطب فلا ضمان عليه إن كان صدوقاً عدلاً صاحب ذكاء وحذق ومهارة، بأن استفاض في الناس منه ذلك كله وصدقوه من كثرة تجاريبه في المعالجة، وعليه يحمل كلام من أطلق الضمان وعدمه.

8. الطب النبوي لابن القيم صـ 9

فصل: فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ولكن لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة التي تسمى أقرباذين، بل كان غالب أدويتهم بالمفردات، وربما أضافوا إلى المفرد ما يعاونه، أو يكسر سورته، وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك، وأهل البوادي قاطبة، وإنما عني بالمركبات الروم واليونانيون، وأكثر طب الهند بالمفردات. وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب. قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية لم يحاول دفعه بالأدوية

9. فتاوى العصرية لعلي جمعة

وجراحة التجميل قد تكون لأمر طبي يقرره الطبيب للمصلحة بحيث يتم ذلك بما يقرر في الطب بطريقة لا تلحق الضرر بالإنسان فهي حينئذ حلال كشفط الدهون وتدبيس المعدة وإنقاص الوزن. أما عمليات تغيير الشكل من غير داع طبي لذلك فهي حرام.

مجمع القرآن الكريم بليبيا

"من تسخير العقل إلى تسليع العقل" الموقف الشرعي من واجهات الدماغ والحاسوب.

ما تزال البشرية منذ فجر التاريخ تنتقل من طورٍ من أطوار المعرفة إلى طورٍ آخر، وما من اكتشافٍ عظيم إلا وكان في الوقت نفسه امتحاناً أخلاقياً للإنسان قبل أن يكون إنجازاً علمياً له؛ إذ ليست القضية الكبرى في قدرة الإنسان على الفعل، وإنما في حدود ما ينبغي له أن يفعله، وفي الغايات التي يسخّر لها علمه وصناعته. وقد شهد العالم في الآونة الأخيرة انتقال تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب من المختبرات البحثية إلى بدايات الاستخدام الطبي والتجاري، بعد الإعلان عن إجازة أولى الشرائح العصبية المخصصة لمساعدة المصابين بالشلل وإصابات الحبل الشوكي وبعض الأمراض العصبية على استعادة جزء من قدرتهم على الحركة أو التواصل، وذلك من خلال التقاط الإشارات الكهربائية الصادرة عن الدماغ وتحويلها إلى أوامر رقمية تتحكم في أجهزة خارجية أو أطراف صناعية أو وسائل اتصال مساعدة.

وهنا ينبغي تحرير محل النزاع قبل إصدار الأحكام؛ إذ إن كثيراً مما تداولته المنصات الإعلامية قد خلط بين الواقع العلمي القائم وبين التصورات المستقبلية أو الخيالية، فهذه الشرائح لا تقوم اليوم بتحميل المعارف إلى الدماغ، ولا بزرع الذكاء الاصطناعي في الإنسان، ولا بقراءة الأفكار والذكريات على الصورة التي تصوّرها الأعمال الروائية والسينمائية، وإنما تقتصر وظيفتها الحالية على ترجمة أنماط معينة من الإشارات العصبية المرتبطة بالحركة أو التواصل إلى أوامر قابلة للتنفيذ بواسطة أنظمة إلكترونية خارجية.

ومن هنا فإن الموقف القرآني لا يقوم على معاداة العلم، ولا على الارتياب في كل جديد، بل إن الأصل في المنافع والأعيان والأدوات الإباحة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، ويقول سبحانه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾، وقد قرر الأصوليون أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على المنع، وأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها وغاياتها. فإذا استعملت هذه التقنيات لإعادة الحركة إلى مشلول، أو تمكين مصاب بإصابة عصبية من التواصل مع

الناس، أو استعادة وظيفة مفقودة بسبب مرض أو حادث، فإن ذلك يدخل في دائرة التداوي المشروع، بل قد يكون من أبواب الإحسان التي رغب فيها الشرع، ومن تحقيق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل والكرامة الإنسانية. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا عبادَ الله، فإنَّ اللهَ لم يضعْ داءً إلا وضع له دواءً»، كما يدخل ذلك تحت القاعدة الفقهية الكبرى: الضرر يزال، وقاعدة: المشقة تجلب التيسير، وقاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع، وقاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

كما أن هذا الاستعمال ينسجم مع مقصد حفظ النفس الذي هو أحد الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على رعايتها، ومع مقصد حفظ العقل الذي جعله الإسلام مناط التكليف وأساس المسؤولية الشرعية، بل إن حفظ العقل في الشريعة لا يقتصر على حمايته من المسكرات والمخدرات فحسب، بل يشمل كل ما يؤدي إلى صيانته أو استعادة وظائفه أو إزالة العوارض التي تعوقه عن أداء مهمته التي خلق لها.

غير أن المسألة تأخذ وجهاً آخر حين تنتقل هذه التقنيات من دائرة العلاج إلى دائرة التعزيز غير العلاجي، ومن استعادة الوظيفة المفقودة إلى إعادة تشكيل الإنسان أو رفع قدراته الطبيعية إلى مستويات اصطناعية بقصد المنافسة أو الهيمنة أو التمييز البيولوجي بين البشر. فهنا يبرز الفارق الجوهري بين «العلاج» و«إعادة التصميم»، وبين «إزالة الضرر» و«إنتاج إنسان جديد»، وبين «الطب» و«الهندسة الوجودية للإنسان».

إن الإنسان في التصور القرآني ليس مادة أولية قابلة لإعادة التشكيل وفق أهواء الأسواق أو مصالح الشركات أو مشاريع الهيمنة السياسية، وإنما هو مخلوق مكرم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، وهو مستخلف في الأرض، قال سبحانه: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، وقد أقام الشرع أحكامه كلها على افتراض وجود إنسان حر الإرادة، مستقل الاختيار، قادر على التمييز، مسؤول عن أفعاله وقراراته.

ومن أجل ذلك كان العقل أحد الضرورات الكلية الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، بل إن بعض العلماء ألحق بها الكرامة الإنسانية والعرض والحرية باعتبارها من مكملات تلك الضرورات أو من توابعها.

ولهذا فإن أخطر الأسئلة التي تثيرها هذه التقنيات لا تتعلق بالرقائق الإلكترونية ذاتها، وإنما تتعلق بسيادة الإنسان على عقله وإرادته وبياناته العصبية وخصوصيته الذهنية. لقد اعتادت البشرية أن تدافع عن خصوصية الرسائل والمراسلات والحسابات المصرفية والبيانات الشخصية، أما العصر القادم فقد يكون عصر الدفاع عن حرمة الأفكار والانفعالات والإشارات العصبية ذاتها. وهنا تستحضر الشريعة قاعدة عظيمة من قواعدها الكلية وهي: الضرر لا يزال بالضرر، وقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند تعذر الجمع بينهما، وقاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وقاعدة: سد الذرائع إلى الفساد واجب إذا غلب على الظن وقوع المفسدة. فإذا ثبت علمياً في المستقبل إمكان التأثير على الإرادة البشرية أو التلاعب بالقرارات أو استغلال البيانات العصبية في الابتزاز أو المراقبة أو الإكراه أو التوجيه السلوكي القسري، فإن الشريعة تنظر إلى ذلك باعتباره اعتداءً مباشراً على مقصد حفظ العقل وعلى حرمة الإنسان وكرامته واستقلال شخصيته القانونية والأخلاقية. كما أن من القواعد الأصولية المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً؛ فمتى كانت التقنية وسيلة إلى علاج مشروع كانت مشروعة، ومتى تحولت إلى أداة للهيمنة أو الإفساد أو الإكراه أو الإضرار بالإنسان انتقل حكمها تبعاً لذلك.

وليس من الصواب شرعاً الاحتجاج بقوله تعالى على لسان إبليس: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ لتحريم كل تدخل طبي أو تقني؛ إذ لو صح ذلك لحرمت الجراحة وزراعة الأعضاء والأطراف الصناعية وزراعة القوقعة وأجهزة تنظيم القلب وسائر التدخلات العلاجية المعاصرة، وإنما يحمل التغيير المذموم على ما كان عبثاً أو إفساداً أو تغييراً للفطرة ومقاصد الخلقة دون حاجة معتبرة أو مصلحة راجحة.

إن الإسلام لا يقف في وجه العلم النافع، وإنما يقف في وجه العلم المنفصل عن الأخلاق، ولا يعارض

التقنية التي ترد إلى المريض بعض ما فقده من وظائفه وقدراته، وإنما يعارض تحويل الإنسان إلى سلعة معرفية أو منصة بيانات أو موضوع للهيمنة التقنية والسياسية والاقتصادية. وسيظل الفرق عظيماً بين شريحة تعيد لمشلول قدرته على الإمساك بيد أمه، وبين شريحة تهدف إلى إعادة صياغة الإنسان وفق معايير السوق أو النفوذ أو سباقات التفوق الجيوسياسي.

فالقرآن لا يرفض أن يكون الإنسان سيداً للتقنية ومسخراً لها في عمران الأرض وتحقيق الرحمة بين الناس، ولكنه يرفض أن يتحول الإنسان نفسه إلى مادة خام في خدمة التقنية أو إلى تابع لإرادة الآلة.

ومن هنا... فإن الموقف الشرعي من هذه النازلة يمكن تلخيصه في قاعدة جامعة: كل تقنية تحقق حفظ النفس أو العقل أو الكرامة الإنسانية دون أن تفضي إلى مفسدة راجحة أو اعتداء على حرية الإنسان وإرادته فهي من باب العمران المشروع، وكل تقنية تنقل الإنسان من مقام الاستخلاف إلى مقام الاستلاب والسيطرة والبرمجة والإكراه فهي محل منع أو تقييد أو رقابة بقدر ما يندفع به ضررها وتتحقق به مصلحة الخلق والبلاد والعباد.

بقلم: مدرسة علوم الإعجاز بأكاديمية القرآن الكريم بليبيا السند العلمي للمجمع القرآني

Neuralink Kluster Augmentatif

10. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣٨٧/٢ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)

قوله: ويحرم وشر الأسنان أي تحديدها، وتفليجها بمبرد ونحوه للتحسين.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب جـ 1 صـ 173

(و) يحرم (تجعيده) أي الشعر (ووشر الأسنان) أي تحديدها وترقيقها للتغرير وللتعرض للتهمة فيهما وللخبر السابق في الثاني (والخضاب بالسواد) لخبر «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» رواه أبو داود وغيره.

(قوله: ووشر الأسنان) يستثنى الواشر لإزالة الشين كوشر السن الزائدة والنازلة عن أخواتها فإنه لا يحرم لأنه يقصد به تحسين الهيئة.

11. الفقه الإسلامي وأدلته | للزهيلي | جـ 8 صـ 803

قرار رقم: 173 (18/11) بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الجراحة التجميلية وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:

أولا: تعريف جراحة التجميل: جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين وتعديل شكل جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر.

ثانيا: الضوابط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل:

1. أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها.
2. أن لا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات.
3. أن يقوم بالعمل طبيب (طبيبة) مختص مؤهل: وإلا ترتبت مسؤوليته (حسب قرار المجمع رقم 142 (15/8)
4. أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض (طالب الجراحة).
5. أن يلتزم الطبيب (المختص) بالتبصير الواعي (لمن سيجري العملية) بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية.

6. أن لا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرا ومساسا بالجسم من الجراحة.
7. أن لا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" رواه البخاري، وحديث ابن عباس: " لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء "رواه أبو داود، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى، أو أهل الفجور والمعاصي.
8. أن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وأحكام كشف العورات وغيرها، إلا لضرورة أو حاجة داعية.

ثالثا: الأحكام الشرعية: يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:

1. عادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقوله سبحانه: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) العلق/4. ب-إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم. ج- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية) واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر. د- إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله، أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة. ه- إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا (قرار المجمع 26 (4/1)
2. لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.
3. يجوز تقليل الوزن (التنحيف) بالوسائل العلمية المعتمدة، ومنها الجراحة (شفط الدهون) إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.

12.قواعد الأحكام الجزء الأول ص: 44 دار الكتب العلمية

جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، ولا يجوز التداوي بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها، ولم يجد دواء غيرها، ومثله قطع السلعة التي يخشى على النفس من بقائها.

Penggunaan Neuralink tidak menghilangkan status seseorang sebagai mukallaf, sehingga ia tetap memikul tanggung jawab syar'i atas setiap perbuatannya. Sebab, teknologi Neura-link yang ada saat ini hanya berfungsi menangkap dan menerjemahkan sinyal motorik otak, bukan menghilangkan akal, merampas kehendak (irādah), ataupun memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, selama pengguna masih memiliki kesadaran, kemampuan memahami (idrak), dan kebebasan memilih (ikhtiyar), maka taklif syariat tetap berlaku baginya.

Referensi

1. أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٨/٤ ـــ زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦)

(فرع) لو (أمر) إنسان (عبده)، أو عبد غيره المميز الذي لا يعتقد وجوب طاعته في كل ما يأمره (بقتل أو إتلاف) لغيره ظلما ففعل (أثم) الآمر لإتيانه بمعصية (واقتص من العبد وتعلق الضمان) أي ضمان المال (برقبته، وإن أمر صبيا غير مميز، أو مجنونا ضاريا، أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته) فيما ذكر

بقتل، أو إتلاف ففعل (فالقصاص) أو المال (على الآمر) وليا كان أو أجنبيا عبدا أو حرا ضاق المكان أو اتسع (عبدا كان المأمور أو حرا ولا يتعلق برقبته وذمته مال)؛ لأنه كالآلة فأشبه ما لو أغرى بهيمة على إنسان فقتلته لا يتعلق بها ضمان، وذكر الأعجمي الحر من زيادته.

2. أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 166)

(والضمان) في التلف باستيفاء الجلاد في حد أو تعزير بأمر الإمام (على الإمام لا) على (الجلاد) ؛ لأنه آلته ولا بد منه في السياسة ولو ضمناه لم يتول الجلد أحد لكن استحب له الشافعي أن يكفر لمباشرته القتل.

3. الحاوي الكبير (4/ 310)

فصل: إذا كان المحرم راكبا فأتلف بركوبه صيدا إما برجله أو بيده أو برأسه أو بذنبه فعليه ضمانه؛ لأن أفعال مركوبه منسوبة إليه وكذلك لو ساق المحرم مركوبه أو قاده فأتلف المركوب شيئا ضمنه السائق أو القائد، ولكن لو سار المركوب وحده، وليس عليه راكب ولا معه سائق ولا له قائد فأتلف صيدا كان غير مضمون؛ لأن أفعاله إذا انفرد منسوبة إلى اختياره.

4. البحر المحيط في أصول الفقه (2/ 73)

[الشرط] السادس الاختيار فيمتنع تكليف الملجأ، وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله كمن يلقى من شاهق فهو لا بد له من الوقوع، ولا اختيار له فيه، ولا هو بفاعل له، وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع، وحركة كحركة المرتعش ومثله المضطر. واتفق أئمتنا على أن المضطر إلى فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه وهو عند المعتزلة فوق الملجأ، وعندنا مثله، كمن شد وثاقه وألقي على شخص فقتله بثقله لكن الفقهاء صرحوا بتكليفه، فقالوا: المضطر لأكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح، وفي وجه لا يجب. قد يوجه بأصول المعتزلة، فيقال: لا فعل للمضطر ولا اختيار حتى يتعلق به الإيجاب ويكتفي بصورة الداعية، لكن جهة التكليف فيه سيأتي بيانها في المكره. وكذلك يمتنع تكليف المكره ومن لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به، كمن قال له قادر على ما يتوعد: اقتل زيدا وإلا قتلتك، لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك، فإقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي ألقى من شاهق، وإن اشتركا في عدم التكليف لكن تكليفه هذا أقرب من تكليف الملجأ، ولهذا أبيح له الإقدام على شرب الخمر، وكلمة الكفر.

5. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 433)

[كون الفهم شرط التكليف]

ش - الأصل الرابع: المحكوم عليه ; وهو المكلف. وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى في أن فهم المكلف هل هو شرط التكليف أو لا؟ فذهب جمهور المحققين إلى أن شرط المكلف أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. ووافقهم بعض من جوز التكليف بالمحال، بناء على أن فائدة التكليف: الابتلاء، وهو لا يتصور في تكليف من لم يفهم الخطاب. لأنه إنما يتصور التهيؤ للامتثال إذا فهم المبتلى الخطاب. بخلاف التكليف بالمحال، فإنه يتصور فيه التهيؤ للامتثال وإن لم يمكن الامتثال، فتحصل فائدة التكليف التي هي الابتلاء.

6. كفاية النبيه في شرح التنبيه ١٠٢/٤ — ابن الرفعة (ت ٧١٠)

ثم في هذه [الحالة] إذا قدر على النطق بالتكبير والقراءة والتشهد والسلام نطق به، وإلا أجراه على قلبه. قال في «التهذيب» ولا ينقص ثوابه. قال: ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا؛ لأن الصلاة تجري مجرى الإيمان؛ فلا تسقط مع العقل والفهم بحال. وقد استدل الغزالي على [إيجاب إمرار] الصلاة بالقلب بقوله □: «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [كما أخرجه مسلم، وهذا حد استطاعته.

MATERI III
HUKUM BITCOIN

3. HUKUM BITCOIN

A. Deskripsi Masalah

Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi buku besar terdistribusi seperti *blockchain*, yang berfungsi untuk memverifikasi transaksi serta memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan. Aset kripto ini terbagi menjadi dua jenis.

Pertama, **Aset Kripto Terdukung** (*Backed Crypto Asset*), yaitu aset kripto yang nilainya didukung atau diikat (*pegged*) dengan aset dunia nyata, biasanya mata uang. Contohnya adalah USDT yang memiliki nilai 1:1 dengan USD, dan Astwrix. Jenis ini dapat dipertimbangkan sebagai aset kripto yang sesuai dengan prinsip syariah. **Kedua, Aset Kripto Tidak Terdukung** (*Unbacked Crypto Asset*), yaitu aset kripto yang tidak didukung atau tidak memiliki underlying aset lainnya dan biasanya berdasarkan proyek tertentu. Sehingga nilainya murni berdasarkan *supply* dan *demand* pasar. Contohnya adalah Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).[5]

Secara hukum, alat pembayaran yang sah adalah uang, sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Bahkan, berdasarkan Pasal 21 UU Mata Uang, rupiah sebagai mata uang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran.[6] Penggunaan Kripto di Indonesia dianggap sah secara hukum, bukan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi sebatas sebagai komoditi saja. Artinya, cryptocurrency baru dapat diperjualbelikan sebagai aset berjangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Hal ini menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat digolongkan sebagai hak (benda tidak berwujud) karena dapat dikuasai.[7]

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2026 P2SK, regulasi kripto di Indonesia kini diatur lebih ketat oleh OJK dengan ekosistem yang terdiri dari Bursa Aset Kripto, Lembaga Kliring, Kustodian, dan Pedagang.

Untuk Bursa Aset Kripto, aturannya harus didirikan minimal oleh 11 perseroan terbatas, mayoritas PT merupakan PAKD, dan kepemilikan saham oleh setiap pemegang saham maksimal 20% dari modal disetor. Sedangkan Lembaga Kliring wajib memiliki sistem untuk penerapan identitas tunggal bagi para konsumen aset kripto, serta memiliki rekening terpisah yang digunakan khusus untuk penempatan seluruh dana konsumen terkait perdagangan aset kripto. Untuk Kustodian, ditetapkan bahwa kustodian aset kripto terpusat harus berlisensi. Sementara untuk Pedagang, dapat menerima konsumen baik dalam bentuk orang perseorangan maupun non-perseorangan.

Ada tiga ketentuan utama yang ditegaskan:

1. Seluruh aktivitas kripto wajib ditransaksikan melalui dan/atau dilaporkan kepada bursa aset kripto.
2. Praktik *insider trading* dan manipulasi harga kripto dilarang secara tegas.

---

[5] Materi Otoritas Jasa Keuangan.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

[7] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

3. OJK berwenang untuk membekukan atau memblokir transaksi kripto.

Jika melanggar, ada Sanksi Pidana Pasal 304A, yaitu: penyelenggara yang beroperasi tanpa izin OJK diancam 10 tahun penjara, pelanggaran terhadap kerahasiaan data konsumen diancam 5 tahun penjara, dan pelaku insider trading atau manipulasi pasar juga diancam 5 tahun penjara.

Otoritas Jasa Keuangan memaparkan per Juni 2026 jumlah akun Kripto Warga Negara Indonesia adalah 22.649.770, sejumlah 41.507 warg asing, dan 943 badan usaha. Pada Juni 2026, nilai transaksi aset Kripto sebesar Rp 28,58 triliun. Angka ini meningkat sebesar 24,2 % dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Perkembangan aset kripto yang dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah aset kripto yang terdaftar hanya sebanyak 545 koin. Memasuki tahun 2025, terjadi lonjakan yang sangat besar menjadi 1.301 koin. Kenaikan hampir 2,5 kali lipat ini seiring dengan peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK dan pelonggaran aturan whitelist koin. Namun pada tahun 2026, jumlah tersebut mengalami penyesuaian menjadi 1.214 koin. Penurunan sebanyak 87 koin ini menandakan adanya proses evaluasi dan delisting terhadap aset-aset yang dianggap tidak memenuhi standar keamanan dan likuiditas.

Mayoritas aset yang diperdagangkan hingga saat ini masih didominasi oleh Aset Kripto Luar Negeri, seperti Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan Render Token. Hal ini tercermin dari data transaksi bulan Juni, dimana 5 aset dengan nilai transaksi terbesar semuanya adalah aset luar negeri. USDT menjadi yang paling dominan dengan nilai transaksi mencapai Rp 7,47 Triliun, disusul Bitcoin sebesar Rp 2,53 Triliun. Di posisi selanjutnya ada HYPE sebesar Rp 753 Miliar, Ethereum Rp 740 Miliar, dan Solana Rp 613 Miliar8.

Di antara semua jenis mata uang *cryptocurrency*, saat ini Bitcoin menjadi yang paling populer di pasaran. Harganya sangat tinggi membuat banyak orang mulai tertarik untuk menekuni investasi menggunakan Bitcoin. Saat ini harga 1 koin BTC di pasaran 1.175.525.000 (Update 27 Juli 2026).[9] Hal ini membuat Bitcoin sebagai *cryptocurrency* termahal hingga saat ini. Pada awal 2020, popularitas c*ryptocurrency* meningkat di banyak negara, termasuk Indonesia.

Berbeda dengan uang biasa yang dikontrol pemerintah, Bitcoin itu desentralisasi dan berjalan di teknologi blockchain yang transparan dan aman. Salah satu yang bikin Bitcoin berharga adalah jumlahnya yang terbatas, hanya 21 juta koin di dunia, sehingga harganya sangat dipengaruhi oleh hukum kelangkaan. Karena itulah harganya sangat volatil, bisa naik dan turun drastis dalam hitungan jam karena sentimen pasar dan ekonomi global. Meski risikonya tinggi, Bitcoin menawarkan keunggulan besar: bisa digunakan untuk transaksi global lintas negara tanpa perantara bank, prosesnya cepat, dan biayanya relatif lebih rendah.

B. PERTANYAAN

1. Menurut fiqih, apakah Bitcoin memenuhi syarat sebagai *mal* dan alat tukar (*tsaman*)?
2. Apa hukum transaksi menggunakan Bitcoin?

C. JAWABAN

1. Secara fiqih Bitcoin memenuhi syarat sebagai *mal* (harta) dan dapat dijadikan sebagai *tsaman* (alat tukar).
2. Diperbolehkan selama tidak dilarang oleh negara dan membahayakan masyarakat.

[8] Otoritas Jasa Keuangan.
[9] Ajaib.co.id

D. REFERENSI

***Mal* versi Syafiiyah**

1. **الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٧٩٦١/١٠**

الحقوق المعنوية (كالاسم التجاري، والترخيص التجاري، والتأليف والاختراع) أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة شرعًا، فيجوز التصرف فيها حسب الضوابط الشرعية، وهي مصونة لا يجوز الاعتداء عليها. وهذا يتفق مع قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت عام ١٤٠٩ هـ.

2. **مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢٩٢٠/٥**

الحقوق المعنوية. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩ هـ/ ١٠ إلى ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. قرر:

أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك اصبح حقًا ماليًا.

ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها .والله أعلم.

3. **الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٢٨٦١/٤**

حق التأليف والنشر والتوزيع: أ - أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعًا على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوبًا شرعًا. والمؤلف قد بذل جهدًا كبيرًا في إعداد مؤلَّفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهوالفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصًا دائمًا له، ثم لورثته لقول النبي ﷺ فيما رواه البخاري وغيره: «من ترك مالًا أو حقًا فلورثته.

4. **الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٣٣٥٦/٥**

وأما شروط الثمن والمثمن فهي خمسة:

1. أن يكون غير منهي عنه شرعًا: فلا ينعقد بيع الميتة والدم وما لم يقبض.
2. أن يكون طاهرًا: فلا يجوز بيع النجس كالخمر والخنزير، والمشهور منع بيع العاج والزبل والزيت النجس مطلقًا. وأجاز ابن وهب ذلك البيع، فمن رأى أن عاج الفيل ناب جعله كالميتة، ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حكمه حكم القرن.
3. أن يكون منتفعًا به شرعًا: فلا يجوز بيع ما لا منفعة فيه كالكلاب والخشاش (الحشرات) وآلات اللهو، واختلف المالكية في بيع الكلاب للصيد وحراسة الغنم على رأيين.
4. أن يكون معلومًا للعاقدين: فلا يجوز بيع المجهول.
5. أن يكون مقدورًا على تسليمه: فلا ينعقد بيع معجوز التسليم كالسمك في الماء.

5. **فتوح البلدان ٤٥٢/١ ـــ البلاذري (ت ٢٧٩)**

حدثني مُحَمَّد بْن سَعْد عَنِ الواقدي عن كثير بْن زيد عَنِ المطلب بْن عَبْد اللَّهِ بْن حنطب أن عَبْد الملك بْن مروان أخذ رجلا يضرب على غير سكة المسلمين فأراد قطع يده ثُمَّ ترك ذلك وعاقبه. قَالَ المطلب:

فرأيت من بالمدينة من شيوخنا حسنوا ذلك من فعله وحمدوه. قَالَ الواقدي: وأصحابنا يرون فيمن نقش عَلَى خاتم الخلافة المبالغة في الأدب والشهرة، وأن لا يرون عَلَيْهِ قطعا، وذلك رأي أَبِي حنيفة والثوري. وقال مَالِك، وابن أَبِي ذئب، وأصحابهما: نكره قطع الدرهم إذا كانت عَلَى الوفاء وننهى عنه لأنه منَ الفساد، وقال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه لا بأس بقطعها إذا لم يضر ذلك بالإسْلام وأهله.

6. نهاية الزين ١١٢/١

إذا أَمر بِوَاجِب تَأَكد وُجُوبه وَإِذا أَمر بمندوب وَجب وَإِن أَمر بمباح فَإِن كَانَ فِيهِ مصلحَة عَامَّة كَتَرْكِ شرب الدُّخان وَجب بِخِلَاف مَا إِذا أَمر بِمحرم أَو مَكْرُوه أَو مُبَاح لَا مصلحَة فِيهِ عَامَّة

7. الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ٤٠٧/١

وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْإِمَامِ إذَا أَمَرَ بِمُبَاحٍ أَوْ مَنْدُوبٍ تَجِبُ طَاعَتُهُ إذَا كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ

8. الأم للشافعي (٥/ 171):

ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت وما لا يطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه.

9. نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ 498):

فصل أكثر أئمتنا ذكر المالية وأجروا في أثناء الكلام ما يتمول وما لا يتمول، ورأوا ذلك قاعدة متبعة في تصحيح البيع ونفيه. ونحن نفصل القول في هذا على إيجاز وبيان، إن شاء الله تعالى. فمما يسميه الفقيه غير متمول ما لا يقبل البيع في جنسه، وهو ينقسم إلى نجس وإلى محترم: أما الأعيان النجسة قد سبق القول فيها، وأما المحترم الذي لا يتمول كالحر وما يحرز بالشرع كبقعة الكعبة، أو حرز كالبقاع التي اتخذت مساجد. ثم ما لا يتمول لجنسه، وهو الأعيان النجسة لا قيمة لها، ولا تضمن بالإتلاف، وما لا يتمول لحرمته، فلها أبدال عند الإتلاف. ومقصودنا من هذا الفصل شيء آخر. فإذا قلنا: هذا لا يتمول لقدره، فليقع الاعتناء به، وإن كان جنسه مالا. والضابط فيه أن كل ما ليس للانتفاع به على حياله وقع محسوس، فهو الذي يقال: إنه لا يتمول، كالحبة والحبتين فصاعدا. وليعتبر وقعه منسوبا إلى كل جهة؛ فإن حبات معدودة قد لا يكون لها وقع في الإنسان، وهي تقيم عصفورة، أو تسد منها مسدا. فكل ما فيه نفع محسوس، فهو مال، وكل ما ليس فيه نفع محسوس، فهو غير متمول. وكل منتفع به طاهر غير محترم إذا تحقق الاحتواء عليه، فهو مال. وإن كان الناس لا يتمولونه لكثرته ورخاء السعر. فليكن التعويل في الفرق بين ما يتمول وما لا يتمول على المنفعة في الأجناس الطاهرة غير المحترمة. فلو أجد (١) الرجل صخرة، وكان فيها منفعة ظاهرة، فيجوز أن يبيعها بآلاف ممن يشتريها: وهم في شعاب جبال مفعمة بالصخور. وعليه يخرج تجويز بيع [هذه] (٢) في أمثال هذه البلاد. فأما الحبة من الحنطة فلا، ولا يختلف هذا بسني الأزم والمجاعة ورخاء الأسعار. ولكن ما يقال فيه: إنه لا يتمول لقلته فيه حق لصاحبه، فلا يجوز أخذ حبة من مال إنسان بناء على أنها لا تتمول. ومن أخذها لزمه ردها. قال شيخي: كان القفال يقول: إن تلفت لم يبعد أن أوجب مثلها. وإن منعت بيعها. نعم لو كان كذلك القليل من جنس متقوم، فلا قيمة فهذا حاصل القول في ضبط ما يتمول. وما لا يتمول.

10. الأشباه والنظائر للسيوطي (ص327):

«[خاتمة: في ضبط المال والمتمول]

أما المال، فقال الشافعي: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلت وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى. وأما المتمول: فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين: أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول. الثاني: أن المتمول هو الذي تعرض له قيمة عند غلاء الأسعار. والخارج عن المتمول: هو الذي لا يعرض فيه ذلك.

11. المنثور في القواعد الفقهية» (٣/ 222):

المال ما كان منتفعا به أي مستعدا؛ لأن ينتفع به وهو إما أعيان أو منافع والأعيان قسمان: جماد وحيوان فالجماد مال في " كل " أحواله.

12. روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ 352)

الشرط الثاني: أن يكون منتفعا به. فما لا نفع فيه، ليس بمال.

13. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 237):

(الثاني النفع) به شرعا ولو مآلا كحجش صغير؛ لأن بذل المال في غيره سفه وآخذه آكل له بالباطل

(قوله: النفع به) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده، وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة فإن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر، وإما للخسة كالحشرات

14. حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٣/ 9)

(ولا) يصح (بيع ما لا منفعة فيه) لأنه لا يعد مالا، فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها-الى ان قال- وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعير ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله أو وضعه

قوله: (كالحشرات) وأصلها صغار دواب الأرض، ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم م ر. فإن قيل: إن منفعة هذه المذكورات في الخواص فما وجه استثنائها دون غيرها؟ قلت: أجاب شيخنا بأن هذه لما اشتهرت وعلمها غالب الناس استثنيت، وأما غيرها فلا لاختصاصها بحذاق الأطباء أج.

15. «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٢/ 197):

قوله: (وللمبيع شروط خمسة) لو عبر بالعوض لشمل الثمن لأنه مثله، وذكر الخمسة إيضاح وبعضهم اكتفى بالملك والعلم، وبعضهم بذلك مع النفع وهذه الخمسة عامة، ويزاد عليها في نحو الربوي وفي نحو الزروع ما يأتي فيهما.

16. «حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» (٣/ 22):

(و) شرط (في المعقود عليه) مثمنا أو ثمنا خمسة أمور

(قوله مثمنا أو ثمنا) انظر هل يصح كون الثمن منفعة أو لا ثم رأيت في الروض وشرحه في كتاب الصداق ما نصه فصل كل عمل يستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة ثوب وخدمة وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا تأمل

***Mal* versi Hanafiyyah**

17. حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي(٤/ 501):

المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا؛ فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة حنطة وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوما كالخمر، وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم بحر ملخصا عن الكشف الكبير. وحاصله أن المال أعم من المتمول؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر، والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمر مال لا متقوم، فلذا فسد البيع بجعلها ثمنا، وإنما لم ينعقد أصلا بجعلها مبيعا؛ لأن الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود، إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان، ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن،-الى ان قال- وفي التلويح أيضا من بحث القضاء: والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع وقت الحاجة، والتقويم يستلزم المالية عند الإمام والملك عند الشافعي. وفي البحر عن الحاوي القدسي: المال اسم لغير الآدمي، خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار.

18. البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (٥/ 277):

المال ما يميل إليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة أو ما خلق لمصالح الآدمي ويجري فيه الشح والضنة اهـ..

19. روح البيان (٩/ 26):

«والأموال جمع مال وهو كل ما يتملكه الناس من دراهم او دنانير او ذهب او فضة او حنطة او خبز او حيوان او ثياب او سلاح او غير ذلك والمال العين هو المضروب وسمى المال مالا لكونه بالذات تميل القلوب اليه وفي التلويح المال ما يميل اليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة او ما خلق لمصالح الآدمي ويجرى فيه الشح والضنة انتهى.

***Mal* versi Malikiyyah**

20.الموافقات (٢/ 32):

ولو عدم المال لم يبق عيش- وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه[10]، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي إليها من جميع المتمولات، فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء، وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا، وأنها زاد للآخرة.

21.أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (٢/ 107):

المسألة السابعة: [متعلق المسروق]: فهو كل مال تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به، فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه، ولا يتصور الانتفاع منه، كالخمر والخنزير مثلا.

22.الإشراف على نكت مسائل الخلاف(٢/ 947):

مسألة: يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها، كان أصلها مباحاً أو غير مباح، وقال أبو حنيفة: كل ما كان أصله مباحاً فلا يقطع فيه كالصيد والماء والحجارة وغيرها؛ فدليلنا الظاهر والخبر، لأنه جنس مال يتمول في العادة كالثياب وسائر العروض ولأن القطع أريد لحفظ الأموال وليس بعضها بأولى في ذلك من بعض.

***Mal* versi Hanabilah**

23. «الشرح الكبير على متن المقنع» (٤/ 7):

«(الثالث: أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة) (فيجوز بيع البغل والحمار ودود القز وبذره والنحل منفرداً أو في كواراته) قوله لغير ضرورة احتراز من الميتة والمحرمات التي تباح في حال المخمصة والخمر يباح دفع اللقمة بها، فكل عين مملوكة يجوز اقتناؤها والانتفاع بها في غير حال الضرورة يجوز بيعها إلا ما استثناه الشرع كالكلب وأم الولد والوقف لان الملك سبب إطلاق التصرف، والمنفعة المباحة يباح له استبقاؤها فجاز له أخذ عوضها وأبيح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليها ودفعاً لحاجته بها كسائر ما أبيح نفعه، وسواء في ذلك ما كان طاهرا كالثياب والعقار وبهيمة الأنعام والخيل والصيود أو مختلفاً في نجاسته كالبغل والحمار لا نعلم في ذلك خلافاً، ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي إذا قلنا بجواز بيعهما لأنه ينتفع به في المال فأشبه طفل العبيد

24. «حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات» (٢/ 555):

«قوله: (وهو ما يباح نفعه)؛ أيْ: الانتفاع به، أعم من أن يكون عينًا أو منفعة، والمنفعة غير الانتفاع. وعلى هذا التأويل فلا يكون المص كغيره ساكتًا (٣) عن التعريف للمنفعة، بل أراد من المال ما يشملها، وهو المنتفع به، عينًا كان أو منفعة، كما أشار إليه شيخنا في شرح الإقناع وعبارته: "وظاهر كلامه هنا كغيره أن النفع لا يصح بيعه، مع أنه ذكر في حدِّ البيع صحته، فكان ينبغي أن يقال هنا كون مبيع مالًا، أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع"، انتهى (١).

[10] هذا التعريف يعرف المال انطلاقا من كون المال محل الملك، والملك- الذي هو في حقيقته اختصاص- لا يتعلق إلا بما له قيمة بين الناس، وإلا، فلا معنى للاختصاص به، فأساس المالية هو العلاقة التي تقوم بين الناس والشيء، وذلك لحاجة الانتفاع به بوجوه الانتفاع المشروعة وانظر: "الفروق" "٢/ ٢٠٨".

***Mal* versi ulama Kontemporer**

25. «الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (٤/ 2875):

«تعريف المال ـ المال في اللغة: كل مايقتنى ويحوزه الإنسان بالفعل سواء أكان عيناً أم منفعة، كذهب أو فضة أو حيوان أو نبات أو منافع الشيء كالركوب واللبس والسكنى. أما مالا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالاً في اللغة كالطير في الهواء والسمك في الماء والأشجار في الغابات والمعادن في باطن الأرض.

وأما في اصطلاح الفقهاء ففي تحديد معناه رأيان:

أولاً ـ عند الحنفية: المال: هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادة، أي أن المالية تتطلب توفر عنصرين:

1. إمكان الحيازة والإحراز: فلا يعد مالاً: ما لايمكن حيازته كالأمور المعنوية مثل العلم والصحة والشرف والذكاء، وما لا يمكن السيطرة عليه كالهواء الطلق وحرارة الشمس وضوء القمر.
2. إمكان الانتفاع به عادة: فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلاً كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعاً لا يعتد به عادة عند الناس كحبة قمح أو قطرة ماء أو حفنة تراب، لا يعد مالاً، لأنه لا ينتفع به وحده. والعادة تتطلب معنى الاستمرار بالانتفاع بالشيء في الأحوال العادية، أما الانتفاع بالشيء حال الضرورة كأكل لحم الميتة عند الجوع الشديد (المخمصة) فلا يجعل الشيء مالاً، لأن ذلك ظرف استثنائي. وتثبت المالية بتمول الناس كلهم أو بعضهم ، فالخمر أو الخنزير مال لانتفاع غير المسلمين بهما. وإذا ترك بعض الناس تمول مال كالثياب القديمة فلا تزول عنه صفة المالية إلا إذا ترك كل الناس تموله.

ثانياً ـ وأما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه (١). وهذا المعنى هو المأخوذ به قانوناً، فالمال في القانون وهو كل ذي قيمة مالية.

حصر الحنفية معنى المال في الأشياء أو الأعيان المادية أي التي لها مادة وجِرم محسوس. وأما المنافع والحقوق فليست أموالاً عندهم وإنما هي ملك لا مال. وغير الحنفية اعتبروها أموالاً؛ لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها، وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم، ويجري عليها الإحراز والحيازة. والمقصود بالمنفعة: هو الفائدة الناتجة من الأعيان، كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثوب ونحو ذلك. وأما الحق: فهو ما يقرره الشرع لشخص من اختصاص يؤهله لممارسة سلطة معينة أو تكليف بشيء. فهو قد يتعلق بالمال كحق الملكية وحق الارتفاق بالعقار المجاور من مرور أو شرب أو تعلي، وقد لا يتعلق بالمال كحق الحضانة، والولاية على نفس القاصر.

26. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان صـ 219

استدل الحنفية على عدم مالية المنافع بأن المال ما يمكن إحرازه وحيازته وإدخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا تقبل الحيازة والادخار؛ لأنها أعراض لا تبقى زمانين، بل تحدث أنا بعد أن فلا يمكن إحرازها وبالتالي لا تكون مالاً، فهي قبل أن تحدث معدومة والمعدوم ليس بمال، وبعد حدوثها لا يمكن إحرازها وما لا يمكن إحرازه لا يسمى مالاً. وهي وإن لم تكن بذاتها مالاً إلا أنها تصير مالاً بالعقد كالإجارة استحساناً؛ لورود النص بذلك وجريان العرف به .

Cryptocurrency tidak sama dengan uang fiat *(fiat money)*, karena tidak diterbitkan oleh bank sentral maupun otoritas moneter yang sah, serta tidak terdapat pihak yang menjamin nilai dan keberlakuannya.

27. بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص157):

أن أوراق العملة لها جهتان: الأولى: أنها يتعامل بها في البيوع والإجارات، وسائر العقود المالية كالسكك والأثمان سواء بسواء، بل وقد ألزمت الدول جميع الناس لقبولها في اقتضاء الديون والحقوق، فلا يسع لدائن في القانون اليوم أن يمتنع من قبولها في اقتضاء دينه. ومن هذه الجهة صارت هذه

الأوراق أثمانا عرفية.
والجهة الثانية: أنها وثيقة من قبل الحكومة، والتزمت الحكومة بأداء بدلها عند هلاكها، فمن هذه الجهة أنها تخالف الأثمان العرفية المسكوكة، فإن الحكومة لا تؤدي بدلها عند هلاكها، ومن هذه الجهة ينبغي أن تعتبر كسندات لديون، أو كوثائق مالية أخرى.
ولكننا إذا أمعنا النظر في الجهة الثانية، رأينا أنها لا تبطل ثمنية هذه الأوراق، فإن الأصل أن الحكومة كانت تريد أن تصدر هذه الأوراق كأثمان عرفية، ولهذا ألزمت الناس قبولها في اقتضاء ديونهم، ولكن الأثمان المسكوكة سابقا، حتى النقود الرمزية منها، كانت في أنفسها أموالا لها قيمة يعتد بها، ولم يكن تقومها موقوفا على إعلان الحكومة، ولا بجعلها أثمانا رمزية، فإنها كانت تصنع تارة من الذهب والفضة، ومرة من الصفر، وأخرى من النحاس أو الحديد، مما هي أموال في أنفسها، ولو أبطلت الحكومة ثمنيتها بقي تقومها من حيث موادها. وأما هذه الأوراق فليست أموالا في أنفسها، وإنما جاء فيها التقوم من قبل الحكومة، ولو أبطلت الحكومة ثمنيتها بطل تقومها، فلم تكن هذه الأوراق لتحوز من ثقة الناس ما تحوزه الأثمان المعدنية، ولهذا التزمت الحكومة بأداء بدلها عند هلاكها أو ضياعها، لا لأنها لم تكن أثمانا عرفية في نظر الحكومة، بل لتحوز هذه الأثمان ثقة العامة، ويتعامل بها الناس دون أيما خطر.
فليست جهة كونها وثيقة مما يبطل ثمنيتها، فإنها تنبئى عن وعد الحكومة بأداء بدلها، وليس لهذا الوعد أي أثر في تعامل الناس فيما بينهم، ولو كانت الحكومة لا تريد أن تجعلها أثمانا عرفية، لما جبرت الناس على قبولها، بل إن هذه الجهة قد منحت هذه الأوراق من الثقة ما هو فوق ثقة الأثمان الأخرى، فإنها تهلك وتضيع بلا بدل، وهذه يمكن إبدالها من الحكومة-الى ان قال- فاتضح بما ذكرنا أن النقود الورقية لم تبق الآن سندات لديون في تخريجها الفقهي، وإنما صارت أثمانا رمزية يعبر عنها الفقهاء بكلمة " الفلوس النافقة " فإن الفلوس النافقة تكون قيمتها الاسمية أكثر بكثير من قيمتها الذاتية، فكذلك الأوراق النقدية تكون قيمتها الاسمية أضعاف قيمتها الذاتية، وجرى بها التعامل العام فيما بين الناس، دون أيما فرق بينهما وبين الفلوس النافقة، حتى لا توجد العملة المعدنية اليوم - ولو رمزية - إلا نزرا قليلا،

1. Hukum bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* tidak boleh karena termasuk transaksi atas aset *ma'dum* (mondial) yang mengandung *gharar* dan *qimar*

1. المجموع شرح المهذب (٩/ 257):

(ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التى لم تخلق لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والغرر وما انطوى عنه أمره وخفى عليه عاقبته)-الى ان قال- الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه (فأما) ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر وذكر أو أنثى وكامل الأعضاء أو ناقصها وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالإجماع ونقل العلماء الإجماع أيضا في أشياء غررها حقير-الى ان قال- قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا وقد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة وبيع الحنطة في سنبلها ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة فبعضهم يرى الغرر يسيرا لا يؤثر وبعضهم يراه مؤثرا والله سبحانه وتعالى أعلم

2. «شرح النووي على مسلم» (١٠/ 157):

واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة والله أعلم
(باب تحريم بيع حبل الحبلة)

[١٥١٤] فيه حديث بن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة) هي بفتح الحاء والباء في الحبل وفي الحبلة قال القاضي ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله حبل وهو غلط والصواب الفتح قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال الأخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة وقال بن الأنباري الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال حملت المرأة ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث واختلف العلماء في المراد بالنهى عن بيع حبل الحبلة فقال جماعة هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن بن عمر وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم وقال آخرون هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوي هو بن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر وهذا البيع باطل على التفسيرين أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه والله أعلم

3. **إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ : 102**

(كل ما فيه قمار) وصورته المجمع عليها أن يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما، وهو المراد من الميسر في الآية، ووجه حرمته إن كان كل واحد متردد بين أن يغلب صاحبه فيغنم أو يغلبه فيغرم، فإن عدلا عن ذلك إلى حكم السبق والرمي بأن ينفرد أحد اللاعبين بإخراج العوض ليأخذ منه إن كان مغلوبا وعكسه إن كان غالبا فالأصح حرمته أيضا.

4. **البجيرمي على المنهج الجزء الرابع صـ : 376**

قوله والميسر هو القمار وهو ما يكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم صغيرة إن لم يؤخذ مال وإلا فكبيرة. إهـ.

5. **الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الخامس صـ : 94**

قال السرخسي الحنفية: الغرر: ما يكون مستور العاقبة وقال القرافي من المالكية: أصل الغرر: هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء، وقال الشيرازي الشافعي: الغرر: ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته وقال الإسنوي الشافعي: الغرر: هو ما تردد بين شيئين أغلبهما أخوفهما وقال ابن تيمية: الغرر هو المجهول العاقبة. وقال ابن القيم: هو ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجوداً أو معدوماً كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد، وإن كان موجودا، وقال ابن حزم: ما لا يدري المشتري ما اشترى، أو البائع ما باع والخلاصة: أن بيع الغرر: هو البيع الذي يتضمن خطرا يلحق أحد المتعاقدين، فيؤدي إلى ضياع ماله. وعرفه الأستاذ الزرقاء فقال: هو بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود، لما فيه من مغامرة وتغريريجعله أشبه بالقمار. والغرر الذي يبطل البيع: هو غرر الوجود: وهو كل ما كان المبيع فيه محتملا للوجود والعدم. أما غرر الوصف فمفسد للبيع، كما عرفنا في شرائط الصحة الغرر إذن: هو الخطر بمعنى أن وجوده غير متحقق، فقد يوجد وقد لا يوجد. وبيع الغرر: بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه، أو لا تعلم قلته وكثرته، أو لا يقدر على تسليمه.

6. **فتاوى ومشورات للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الجزء الثاني صـ : 49**

القاعدة التي تحدد معنى الميسر تتخلص في أن كل مال يدفعه الإنسان مقابل منفعة يحتمل أن يحصل عليها ويحتمل أن لا يحصل عليها فهو داخل في معنى الميسر، والميسر محرم بنص القرأن، وهذا الذي تسألني عنه من هذا القبيل يدفع الشخص ما يدفعه من الدراهم متأملا أن يجيب الإجابة الصحيحة فيدخل في القرعة فيكون له نصيب من أرباحها، وقد ينال ما تأمله وقد لا ينال ولكن الكل يدفعون الدراهم التي لا بد من دفعها.

Fatwa ulama kontemporer terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi

7. دار الإفتاء المصرية

عملة البيتكوين والتعامل بها

المفتى: الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام تاريخ الفتوى: 28 ديسمبر 2017 رقم الفتوى: 14139

السؤال :ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسمى بـالبتكوين؟

الجواب :بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين"Bitcoin" ، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم» :مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .«فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار-الى ان قال- أنَّ لها أثرًا سلبيًّا كبيرًا على الحماية القانونية للمتعاملين بها من تجاوزِ السَّماسِرة أو تعدِّيهم أو تقصيرهم في ممارسات الإفصاح عن تفاصيلِ تلك العمليَّات ولا القائمين بها، وتسهيل بيع الممنوعات وغسل الأموال عبر هؤلاء الوسطاء؛ فأغلب الشركات التي تمارس نشاط تداول العملات الإلكترونية تعملُ تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملةَ غيرُ مسموحٍ بها في كثير من الدول؛ ولذا لا يمكنُ اعتبارُ هذه العملة الافتراضية وسيطًا يصحُّ الاعتمادُ عليه في معاملات الناس وأمور معايشهم؛ لفقدانها الشروطَ المعتبرةَ في النقود والعملات؛ حيث أصابها الخللُ الذي يمنع اعتبارها سلعةً أو عملةً؛ كعدم رواجها رواجَ النقود، وعدمِ صلاحيتها للاعتماد عليها؛ كجنسٍ من أجناس الأثمان الغالبة التي تُتخَذُ في عملية "التقييس" بالمعنى الاقتصادي المعتبر في ضبط المعاملات والبيوع المختلفة والمدفوعات الآجلة من الديون، وتحديد قِيَمِ السِّلع وحساب القوَّةِ الشِّرائية بِيُسرٍ وسهولةٍ، وعدم إمكانية كَنْزها للثروة واختزانها للطوارئ المحتملة مع عدم طَرَيَانِ التغيير والتَّلف عليها؛ فضلًا عن تحقُّق الصوريَّة فيها بافتراض قيمة اسميَّة لا وجود حقيقي لها، مع اختلالها وكونها من أكثرِ الأسواق مخاطرة على الإطلاق .-الى ان قال- المخاطر والمحاذير الشرعية التي اشتملت عليها هذه العملة

على هذا: لم تتوفر في عملة "البتكوين" الشروطُ والضوابطُ اللازمةُ في اعتبار العملة وتداولها، وإن كانت مقصودةً للربح أو الاستعمال والتداول في بعض الأحيان، إلا أنها مجهولةٌ غير مرئيةٍ أو معلومةٍ، مع اشتمالها على معاني الغش الخفيِّ والجهالة في معيارها ومَصْرِفها، مما يُفْضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين؛ فأشبهت بذلك النقودَ المغشوشة ونفاية بيت المال، وبيع تراب الصَّاغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائلِ التي قرَّر الفقهاءُ حرمةَ إصدارِها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها؛ لعدم شيوع معرفتها قدرًا ومعيارًا ومَصْرفًا؛ ولما تشتمل عليه من الجهالة والغش، وذلك يدخلُ في عموم ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال» :مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.« هذا، بالإضافة إلى أن التعامُلَ بهذه العملة يترتَّبُ عليه أضرارٌ شديدةٌ ومخاطرُ عاليةٌ؛ لاشتماله على الغرر والضَّرر في أشدِّ صورهما. والغرر - كما عرَّفه العلامة البجيرمي الشافعي في "حاشيته على الإقناع" (3/ 4، ط: دار الفكر)- هو: [مَا انْطَوَتْ عَنَّا عَاقِبَتُهُ أَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا] اهـ. وقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها حَوَتْ أكبر قدرٍ من الغرر في العملات والعقود المالية الحديثة على الإطلاق، مع أنَّ شيوعَ مثلِ هذا النَّمطِ من العملات والممارسات النَّاتجة عنها يُخِلُّ بمنظومةِ العمل التقليديَّة التي تعتمدُ

على الوسائطِ المتعددة في نقل الأموال والتَّعامل فيها؛ كالبنوك، وهو في ذاتِ الوقت لا يُنشِئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرَّة، ويُضيّق فرصَ العملِ. كما أنَّها تُشْبِهُ المقامَرَة؛ فهي تؤدِّي -وبشكلٍ مباشرٍ- إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسَّسات؛ من إفسادِ العُملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السُّوق المحليَّة والدَّوليَّة، وانخفاض القيمة الشِّرائية لهذه العملات، بما يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والتَّصدير والاستيراد. -الى ان قال-

كما أن التعامُلَ بهذه العملة التي لا تعترف بها أغلب الدول، ولا تخضع لرقابة المؤسسات المصرفية بها والتي على رأسها البنوك المركزية المنوط بها تنظيم السياسة النقدية للدول وبيان ما يقبل التداول من النقود من عدمه -يجعل القائم به مفتئتًا على ولي الأمر الذي جَعلَ له الشرعُ الشريفُ جملةً من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقومَ بما أُنيط به من المهام الخطيرة والمسؤوليات الجسيمة.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فلا يجوز شرعًا تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

8. المجلس الإسلامي للإفتاء -الداخل الفلسطيني

لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تصدر قرارًا بتحريم التعامل بعملة البيتكوين والعملات الرقمية

نصّ القرار: " لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى "غير الرسمية" بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها " الشيخ د. مشهور فواز

تفصيل الفتوى وأسباب التحريم

نظرت لجنة الاجتهاد والفتوى في الموضوع أعلاه في اجتماعها بتاريخ 28 من صفر الخير 1444هـ يوافقه 23 سبتمبر 2022م، وعُرض عليها بحثان في موضوع العملات الرقمية، وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء؛ والوقوف على حقيقتها قررت اللجنة الآتي:

أولاً :لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى "غير الرسمية" بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها، للأسباب الآتية:

1. لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، وأركان النقود والعملات: أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة. وليس في البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة شيء من ذلك، فلم تكن عملة حقيقية.
2. ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون. وعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من هذه الوظائف، فلم تكن عملة معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة.
3. العملات الرقمية ليست سلعاً؛ لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها؛ كما هو الحال في السلع. كما أنها ليست أصلاً مالياً؛ فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة.

4. عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها. وقد تنبّه الفقهاء منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان، فقال الإمام أحمد رحمه الله: " لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأنّ الناس إنْ رُخّص لهم ركبوا العظائم". (الأحكام السلطانية" ص 281) ويقول الرافعي رحمه الله: " ويكره للرعية ضرب الدراهم وإنْ كانت خالصة، فإنه من شأن الإمام". (الشرح الكبير للرافعي 6/ 13)
5. 5إنّ التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة ، ولا في التقنيات ، ولا في التجارة الحقيقية، وإنما هو مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال.

9. فتوى دار الافتاء الليبية:

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي :ما حكم التعامل بالعملات الرقمية كالبتكوين، وهي عملة افتراضية يتم استخدامها عن طريق الإنترنت، لكنها لا تخضع لسلطة الحكومات والمؤسسات المالية، وليس لها ما يغطي قيمتها، وكيف يتم دفع الزكاة عنها؟

الجواب :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه .أمّا بعد :فإنّ الشريعة لم تعيّن شيئا ليكون عملة دون غيره، بل جعلت مرجع ذلك إلى ما تعارف الناس عليه وشاع استعماله بينهم، قال الإمام مالك رحمه الله: (وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمُ الجلودَ؛ حَتّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ؛ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ نَظِرَة) [المدونة:5/3]؛ إشارةً منه إلى جريان علّة الربا فيها .وقال ابن تيمية رحمه الله: (وَأَمَّا الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارُ فَمَا يُعْرَفُ لَهُ حَدٌّ طَبْعِيٌّ وَلَا شَرْعِيٌّ بَلْ مَرْجِعُهُ إلَى الْعَادَةِ وَالِاصْطِلَاحِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَا يَتَعَلَّقُ الْمَقْصُودُ بِهِ؛ بَلْ الْغَرَضُ أَنْ يَكُونَ مِعْيَارًا لِمَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ لَا تُقْصَدُ لِنَفْسِهَا بَلْ هِيَ وَسِيلَةٌ إلَى التَّعَامُلِ بِهَا وَلِهَذَا كَانَتْ أَثْمَانًا؛ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ...وَالْوَسِيلَةُ الْمَحْضَةُ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ لَا بِمَادَّتِهَا وَلَا بِصُورَتِهَا يَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ كَيْفَمَا كَانَتْ([مجموع الفتاوى:251/19 .[
وقد اشترط بعض الفقهاء لجواز جعل الشيء عملة تكون ثمنا للأشياء وتقوّم بها المتلفات أن يكون بإذن الدولة، قال الإمام أحمد رحمه الله: (لَا يَصلُحُ ضَرْبُ الدّراهِمِ إلّا في دارِ الضّربِ، بِإذْنِ السّلطانِ؛ لأنّ النّاسَ إنْ رُخِّصَ لَهُمْ رَكِبُوا العَظَائِم) [الأحكام السلطانية: 299].

والتعامل بهذه العملات الرقميّة لم يرُج بين الناس رواجا عامّا، وليس لها جهة تضمن قيمتها للناس، بل يعتمد سعرها على المضاربة فيها، وعليه فلا يصح كونها عملة تجري فيها علة الثمنيّة لتمنع فيها الربا أو تجري فيها الزكاة، أمّا حكم التعامل بها بيعا وشراء فإن من شرط صحة عقد البيع ألا يكون مشتملا على الغرر، والتقلبات الكبيرة لسعر هذه العملة تجعل التعامل بها أشبه ما يكون بالقمار، ثم إنها ليس لها جهة رسمية تضمن قيمتها لأصحابها كما هو الحال في الأوراق النقدية .عليه؛ فلا يجوز التعامل بهذه العملات ما دامت على صورتها الحالية، والله أعلم .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

10. فتوى الشيخ محمد صنقور

حكم التعامل بعملة البيتكوين. المسألة:هل يصحُّ التعامل بعملة البيتكوين؟

الجواب: التعامل بما يُسمَّى بعملة البيتكوين محلُّ إشكال بل منع لعدم إحراز صلاحيَّتِها لأنْ تكون ثمناً أو مثمناً يعني الشك في ماليَّتها، فهي عملة افتراضية رقميَّة مشفَّرة، ليس لها غطاءٌ عيني أو حتى اعتباري بل ولا تحظى بالاعتبار المقتضي لصيرورتها مالاً يصحُّ التداول به -لا أقلَّ أنَّها كذلك إلى الآن- هذا مضافاً الى الاضطراب الفاحش وغير المعقول في قيمتها السوقيَّة المفترضة بحيث يُعدُّ التعامل بها من المعاملة الغرريَّة. والحمد لله ربِّ العالمين

MATERI IV
STANDARISASI KADAR EMAS DALAM NISAB ZAKAT MAL

4. Standarisasi Kadar Emas dalam Nisab Zakat Mal

A. Deskripsi Masalah

Dalam praktik pengelolaan zakat mal di Indonesia, muncul perbedaan pendapat mengenai standar nisab yang digunakan sebagai acuan kewajiban zakat. Sebagian pihak menggunakan standar emas murni (24 karat), sementara sebagian lainnya menggunakan standar emas 14 karat dengan alasan menyesuaikan kondisi pasar dan kemudahan implementasi.

Penggunaan standar emas 14 karat menimbulkan persoalan karena nilai nisab menjadi lebih rendah dibanding emas murni, sehingga berpotensi mewajibkan zakat kepada masyarakat yang secara ekonomi belum tergolong kaya. Kekhawatiran tersebut kian diperparah oleh potret riil sistem penghitungan zakat profesi di Indonesia yang umumnya masih menerapkan penarikan pajak dari pendapatan bruto. Dalam hal ini, persentase zakat langsung dipotong dari total gaji atau honorarium yang diterima, tanpa terlebih dulu mengurangkan biaya kebutuhan pokok, cicilan utang, serta biaya proteksi kelayakan hidup keluarga (*hadul kifayah*).

Akibatnya, muncul anomali sosial seorang *muzakki* secara nominal di atas kertas dianggap telah dianggap mempunyai harta yang mencapai nisab, namun secara faktual di lapangan ia justru terseok-seok untuk sekadar memenuhi kebutuhan primer sehari-hari.

Karenanya, diperlukan penjelasan hukum mengenai keabsahan penggunaan standar emas 14 karat dalam konteks pelaksanaan zakat mal di Indonesia.

B. Pertanyaan

Apakah penggunaan standar emas 14 karat dalam menentukan nisab zakat mal, termasuk zakat tijaroh dan zakat profesi, dibenarkan menurut syariat?

C. Jawaban

Emas 14 karat mengandung emas murni sekitar 58,33%-62,49 %. Sisanya, sekitar 41,67%-37,51%, berupa campuran logam lain seperti perak, tembaga, atau nikel. Menurut mazhab Syafi'i, standar nisab zakat mal harus menggunakan emas murni. Emas campuran, meskipun kadar emasnya lebih besar, tidak dapat dijadikan acuan nisab. Emas campuran dapat terkena kewajiban zakat jika kadar murninya mencapai nisab. Dengan demikian, menggunakan emas 14 karat sebagai standar nisab tidak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i.

Adapun menurut mazhab Hanafi diperinci sebagai berikut:

1. Zakat mal berupa *nuqud* yang nisabnya ditentukan berdasarkan emas diperbolehkan dihitung menggunakan emas campuran apabila kadar emasnya lebih dominan, seperti emas 14 karat.
2. Dalam zakat *tijarah*, madzhab Hanafi tidak membatasi penghitungan nisab hanya pada emas, melainkan menggunakan standart nisab yang pertama kali tercapai dari salah satu emas dan perak. Ketentuan ini berlaku juga untuk emas atau perak campuran yang kadarnya lebih dominan dari campurannya, seperti 14 karat. Pada masa sekarang, nisab perak umumnya lebih dahulu tercapai karena qimah nya jauh lebih rendah dari qimah emas. Dalam perkataan lain, apabila qimah zakat *tijarah* telah mencapai salah satu dari nisab emas atau perak campuran yang lebih dominan kadarnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

D. Referensi

1. تحفة المحتاج ج 4 صـ 310 دار الكتب العلمية

(وَلَا شَيْءَ فِي الْمَغْشُوشِ) أَيْ الْمَخْلُوطِ مِنْ ذَهَبٍ بِنَحْوِ فِضَّةٍ وَمِنْ فِضَّةٍ بِنَحْوِ نُحَاسٍ (حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا) لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ: **لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ**. فَإِذَا بَلَغَ خَالِصُ الْمَغْشُوشِ نِصَابًا أَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَالِصٌ يُكْمِلُهُ أَخْرَجَ قَدْرَ الْوَاجِبِ خَالِصًا أَوْ مِنْ الْمَغْشُوشِ مَا يُعْلَمُ أَنَّ فِيهِ قَدْرَ الْوَاجِبِ.

"Tidak ada kewajiban zakat dalam nuqud campuran, yaitu emas yang dicampur dengan semisal perak dan perak dicampur dengan semisal tembaga, sampai kadar murni nuqud mencapai nisab. Hal ini karena hadits al-Bukhari dan Muslim: "Tidak ada kewajiban zakat dalam perak yang di bawah 5 wasaq." Sebab itu, apabila kadar murni emas/ perak campuran mencapai nisab atau muzakki memiliki emas/ perak murni yang menyempurnakan nisab, maka muzakki wajib mengeluarkan kadar wajibnya emas/perak murni atau dari emas/perak campuran yang diketahui mencapai kadar wajib zakat". [11]

2. الدر المختار ج 3 صـ 230-231 دار الكتب العلمية

(وَغَالِبُ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِضَّةٌ وَذَهَبٌ وَمَا غَلَبَ غِشُّهُ) مِنْهُمَا (يُقَوَّمُ) كَالْعُرُوضِ ... (وَاخْتُلِفَ فِي) الْغِشِّ (الْمُسَاوِي وَالْمُخْتَارُ لُزُومُهَا احْتِيَاطًا) خَانِيَّةٌ. وَلِذَا لَا تُبَاعُ إلَّا وَزْنًا. وَأَمَّا الذَّهَبُ الْمَخْلُوطُ بِفِضَّةٍ، فَإِنْ غَلَبَ الذَّهَبُ فَذَهَبٌ وَإِلَّا فَإِنْ بَلَغَ الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ نِصَابَهُ وَجَبَتْ.

"Perak dan emas yang dominan (dari logam campuran) dihukumi seperti perak dan emas (murni). Logam campuran yang lebih dominan dari emas dan perak, maka ditaksir nilainya seperti harta tijarah. Terjadi perbedaan pendapat dalam logam campuran yang sebanding dengan kadar emas/perak. Menurut pendapat al-Mukhtar, wajib dizakati karena kehati-hatian. Demikian dalam Fatawa Khaniyah. Karenanya, logam campuran tersebut tidak boleh dijual kecuali dengan cara ditimbang. Adapun emas yang dicampur dengan perak, bila emas lebih dominan, maka dihukumi emas. Jika tidak, maka jika emas atau perak mencapai nisabnya, maka wajib dizakati".[12]

3. بدائع الصنائع ج 2 صـ 17 دار الكتب العلمية

فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مَغْشُوشَةً، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْفِضَّةُ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغِشَّ فِيهَا مَغْمُورٌ مُسْتَهْلَكٌ. كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ وَالزُّيُوفِ وَالنَّبَهْرَجَةِ وَالْمُكْحُلَةِ وَالْمُزَيَّفَةِ. قَالَ: لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا كُلِّهَا الْفِضَّةُ. وَمَا تَغْلِبُ فِضَّتُهُ عَلَى غِشِّهِ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا. وَالشَّرْعُ أَوْجَبَ بِاسْمِ الدَّرَاهِمِ.

"Adapun jika mata uang perak itu campuran, maka apabila unsur yang dominan adalah perak, hukumnya sama wajib zakat; karena unsur campuran di dalamnya dianggap tenggelam dan musnah. Demikianlah riwayat Al-Hasan dari Abu Hanifah bahwa zakat itu wajib pada dirham jiyad (kualitas bagus), zuyuf (kualitas rendah/rusak), nabharajah (yang tidak laku), mukuhlah (yang dicampur dengan celak sehingga kehitaman), dan muzayyafah (palsu/berkurang nilainya). Imam Abu Hanifah berkata: "Karena pada semua jenis tersebut, unsur yang dominan adalah perak, dan segala sesuatu yang unsur peraknya dominan atas unsur campurannya, maka ia tercakup dalam penyebutan nama "dirham" secara mutlak. Sementara syariat menetapkan kewajiban zakat berdasarkan nama/sebutan 'dirham'".[13]

---

[11] Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfahul Muhtaj Hamisy Hasyiyah as-Syirwani*, (Beirut, Darul Kutub al-'Ilmiah: 2015), juz IV, halaman 310.

[12] Muhammad 'Alauddin al-Hashkafi, *ad-Durrul Mukhtar Hamisy Hasyiyah Raddil Muhtar*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiah: 2011), juz III, halaman 230-231.

[13] 'Alauddin al-Kasani, *Badai' al-Shanai',* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah: 1986), juz II, halaman 17.

4. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 2 صـ 76-77 دار الكتب العلمية

قَالَ (وَغَالِبُ الْوَرِقِ وَرِقٌ لَا عَكْسُهُ) يَعْنِي إذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِضَّةٌ وَلَا يَكُونُ عَكْسُهُ فِضَّةً وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْغِشَّ وَإِنَّمَا هُوَ عُرُوضٌ، لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ غِشٍّ وَتَخْلُو عَنْ الْكَثِيرِ، فَجَعَلْنَا الْغَلَبَةَ فَاصِلَةً، وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى النِّصْفِ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ. ثُمَّ إنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ الْفِضَّةَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَيْفَمَا كَانَ، لِأَنَّهُ فِضَّةٌ. وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ الْغِشَّ، يُنْظَرُ: فَإِنْ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ لِلتِّجَارَةِ، يُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَتْ فِضَّتُهُ تَتَخَلَّصُ، تُعْتَبَرُ، فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا وَحْدَهَا أَوْ بِالضَّمِّ إلَى غَيْرِهَا، لِأَنَّ عَيْنَ الْفِضَّةِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا نِيَّةُ التِّجَارَةِ وَلَا الْقِيمَةُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ لَمْ تَتَخَلَّصْ مِنْهُ فِضَّتُهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْفِضَّةَ قَدْ هَلَكَتْ فِيهِ، إذْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا لَا حَالًا وَلَا مَآلًا، فَبَقِيَتْ الْعِبْرَةُ لِلْغِشِّ، وَهُوَ عُرُوضٌ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ التِّجَارَةِ، فَصَارَتْ كَالثِّيَابِ الْمُمَوَّهَةِ بِمَاءِ الذَّهَبِ. فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِضَّةِ الْمَغْلُوبَةِ وَبَيْنَ الْغِشِّ الْمَغْلُوبِ حَتَّى اعْتَبَرْتُمْ الْفِضَّةَ الْمَغْلُوبَةَ وَأَجْرَيْتُمْ عَلَيْهِ أَحْكَامَ الْفِضَّةِ إذَا كَانَتْ تَخْلُصُ مِنْهُ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا الْغِشَّ الْمَغْلُوبَ بَلْ جَعَلْتُمْ كُلَّهُ فِضَّةً قُلْنَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْفِضَّةَ قَائِمَةٌ فِي كَثِيرِ الْغِشِّ حَقِيقَةً حَالًا بِاللَّوْنِ وَمَآلًا بِالْإِذَابَةِ بِخِلَافِ الْغِشِّ الْمَغْلُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ حَالًا وَلَا يَخْلُصُ مَآلًا بَلْ يَحْتَرِقُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الذَّهَبُ الْمَغْشُوشُ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لِأَنَّ حُكْمَهُ يُعْرَفُ بِبَيَانِ حُكْمِ الْفِضَّةِ الْمَغْشُوشَةِ

An-Nasafi berkata: "Dan (hukum) dirham yang didominasi oleh perak adalah (tetap dianggap) perak, tidak sebaliknya." Maksudnya, jika unsur yang dominan pada dirham adalah perak, maka ia adalah perak. Namun, tidak berlaku sebaliknya—yakni jika unsur yang dominan adalah campuran (ghisy), maka tidak dianggap sebagai perak, melainkan sebagai 'urudh (barang dagangan).

Mengapa demikian? Karena dirham secara lazim tidak pernah terlepas dari sedikit campuran, namun terlepas dari campuran yang banyak. Karena itu, kami menetapkan dominasi (kadar lebih dari 50%) sebagai batas pemisah, yakni apabila perak melebihi separuh (dari total berat), dengan mempertimbangkan hakikat bendanya. Selanjutnya:

1. *Jika perak dominan: maka wajib zakat secara mutlak, bagaimanapun bentuknya, karena statusnya adalah perak.*
2. *Jika campuran yang dominan: maka perlu diperhatikan:*
   a. *Jika diniatkan untuk dagang: maka nilainya diperhitungkan secara mutlak (sebagai barang dagangan).*
   b. *Jika tidak diniatkan dagang: maka diperiksa kembali; jika perak di dalamnya dapat dimurnikan, maka peraknya diperhitungkan dan wajib zakat jika mencapai nishab (sendiri atau digabung dengan harta lain), karena zat perak tidak mensyaratkan niat dagang.*
   c. *Jika perak tidak dapat dimurnikan: maka tidak ada kewajiban zakat apa pun, karena zat peraknya dianggap telah "binasa" atau musnah, tidak bisa dimanfaatkan baik saat ini maupun di masa depan. Yang tersisa hanyalah unsur campurannya, dan karena ia statusnya adalah 'urudh (barang komoditas), maka disyaratkan harus ada niat dagang. Hukumnya sama seperti pakaian yang disepuh dengan air emas.*

Pertanyaan (i'tiradh): "Apa perbedaan antara perak yang kalah dominan (tapi bisa dimurnikan) dengan unsur campuran yang kalah dominan, sehingga perak yang kalah dominan tetap dianggap perak, sedangkan campuran yang kalah dominan justru "ditelan" (dianggap semua perak)?"

Jawaban: Perbedaannya adalah, pada perak yang kalah dominan, zat peraknya tetap ada secara hakiki—saat ini tampak dari warnanya, dan di masa depan dapat diperoleh melalui peleburan. Berbeda dengan campuran yang kalah dominan; ia tidak tampak saat ini dan tidak bisa dimurnikan di masa depan (ia akan terbakar saat peleburan). Demikian pula ketentuan ini berlaku untuk emas yang tercampur. Imam an-Nasafi tidak menyebutkan emas karena hukumnya sudah dipahami melalui

penjelasan hukum perak yang tercampur.[14]

5. بدائع الصنائع ج 2 صـ 21 دار الكتب العلمية

وإذا كان تقدير النصاب من أموال التجارة بقيمتها من الذهب والفضة، وهو أن تبلغ قيمتها مقدار نصاب من الذهب والفضة، فلا بد من التقويم حتى يعرف مقدار النصاب، ثم بماذا تقوم؟ ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه يقوم بأوفى القيمتين من الدراهم والدنانير، حتى إنها إذا بلغت بالتقويم بالدراهم نصابا ولم تبلغ بالدنانير، قومت بما تبلغ به النصاب. ... وكيفما كان ينبغي أن يقوم بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم أو الدنانير وهي التي يكون الغالب فيها الذهب والفضة.

"Jika penentuan nisab harta tijarah didasarkan pada taksiran nilai dengan emas atau perak, yaitu bahwa nilai harta tijarah tersebut mencapai kadar nisab emas atau perak, maka pentaksiran nilai harga harus dilakukan agar dapat diketahui nisabnya. Lalu, dengan apakah penilaian itu dilakukan?

Al-Qudūrī dalam syarahnya terhadap Mukhtaṣar al-Karkhī menyebutkan bahwa harta tijarah ditaksir dengan mata uang dinar atau dirham yang paling menguntungkan (mustahiq zakat). Sehingga apabila taksiran menggunakan dirham nilainya mencapai nisab, sedangkan dengan dinar tidak mencapai nisab, maka pentaksiran dilakukan dengan alat ukur yang mencapai nisab (dalam contoh ini Adalah dirham) ... Bagaimanapun juga, seharusnya pentaksiran nilai menggunakan mata uang yang paling minimal masih layak disebut sebagai dirham atau dinar, yaitu mata uang yang kandungan emas atau peraknya lebih dominan (ketimbang unsur campurannya)."[15]

[14] Utsman bin 'Ali az-Zaila'i, *Tabyinul Haqaid Syarhu Kanzid Daqaid,* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 2010), juz II, halaman 76-77.

[15] Al-Kasani, *Bada'i ash*-Shanai fi Tartib asy-Syarai, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1986), juz II, halaman 21.

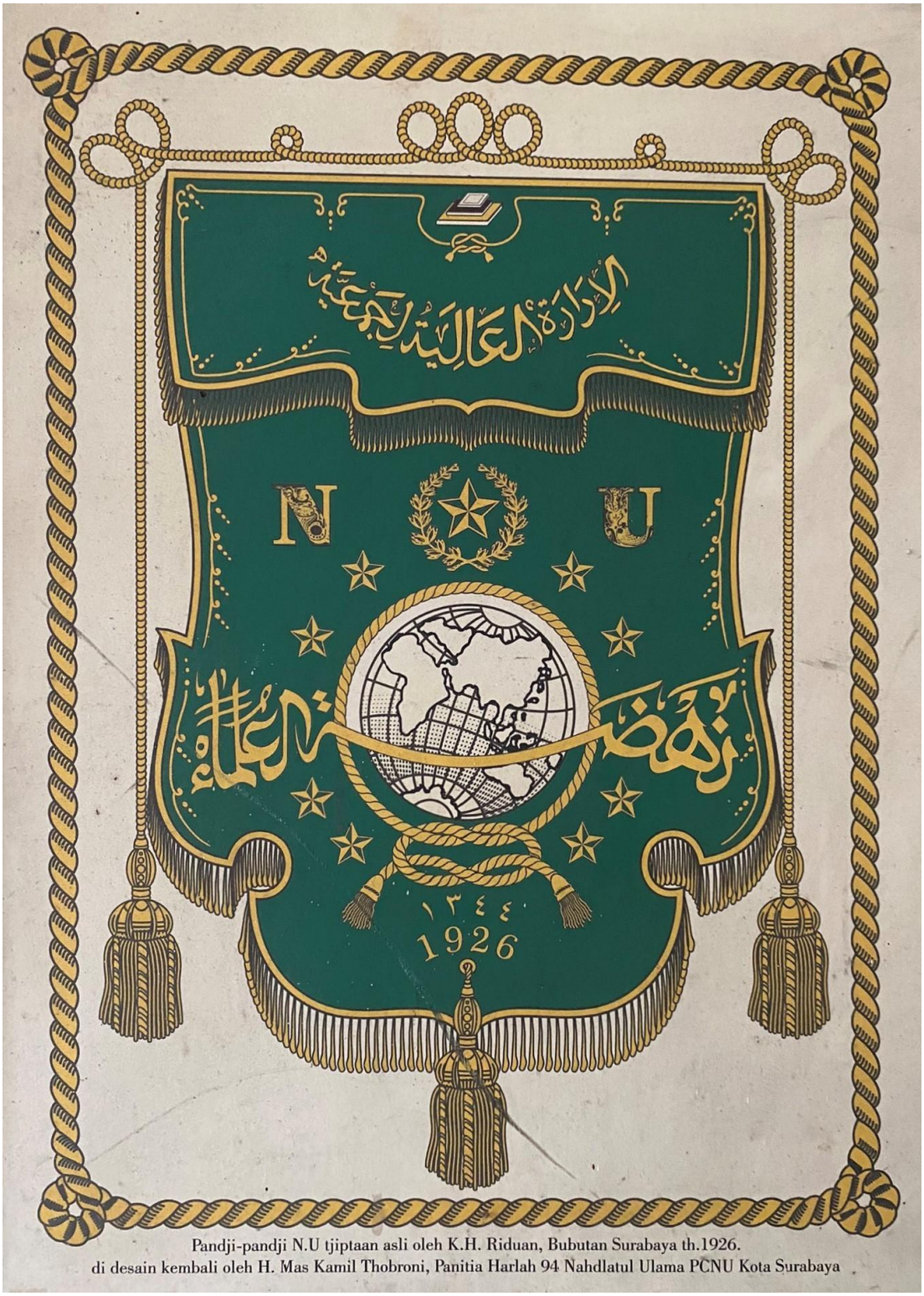

Pandji-pandji N.U tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th.1926.
di desain kembali oleh H. Mas Kamil Thobroni, Panitia Harlah 94 Nahdlatul Ulama PCNU Kota Surabaya

Muktamar Ke-35
Nahdlatul Ulama
Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang
27-31 Agustus 2026 | 14-18 R. Awwal 1448 H

BAHTSUL MASA'IL MAUDHU'IYAH

MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
14-18 Rabi'ul Awwal 1448 H/27-31 Agustus 2026 M

Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama

MATERI BAHTSUL MASAIL AL-MAUDHU'IYAH
MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA
MATERI I
KEBIJAKAN FISKAL NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pola kebijakan fiskal negara dalam perspektif islam

Dalam MUNAS Nahdlatul Ulama di Hotel Sultan Jakarta tahun 2025, diputuskan bahwa negara harus memprioritaskan penerimaan APBN non-pajak. Sehingga pemerintah wajib meng-optimalkan badan usaha milik negara sebagai sumber pendapatan utamanya. Dan posisi pene-rimaan pajak ditempatkan pada kondisi dimana keuangan negara tidak tercukupi oleh penerimaan BUMN.

B. Dalam harta ada kewajiban lain selain zakat

Imam al-Mubarakfuri[16] dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi* mengatakan bahwa kewajiban bagi harta selain zakat diwujudkan dalam bentuk kontribusi membebaskan tawanan, memberi makan orang kelaparan, dan pertolongan penyelamatan.

(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ)
قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدَوَيْهِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَدُّوَيْهِ بميم وتسكين الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْقُرَشِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ التِّرْمِذِيُّ صَدُوقٌ مِنَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ . قَوْلُهُ (إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ) كَفِكَاكِ أَسِيرٍ وَإِطْعَامِ مُضْطَرٍّ وَإِنْقَاذِ مُحْتَرَمٍ فَهَذِهِ حُقُوقٌ وَاجِبَةٌ غَيْرُهَا لَكِنَّ وُجُوبَهَا عَارِضٌ

Artinya : Selain zakat, ada kewajiban yang harus dilakukan untuk membebaskan tawanan, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberikan pertolongan penyelamatan. Kewajiban ini diluar kewajiban zakat karena adanya faktor kebutuhan

C. Legalitas zakat dan pajak sebagi instrument fiskal negara

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong-royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional demi memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Allah SWT berfirman[17]:

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya: Mereka berkata: Wahai Dzulqurnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa pem-buat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok peng-halang antara kami dan mereka?

Menurut Imam Ahmad bin Yahya al-Maliki[18], ayat ini adalah menjadi dalil bahwa zakat dan pajak yang dipungut pemerintah merupakan instrumen pokok dalam mengatasi berbagai persoalan keuangan negara dalam misalkan dalam sektor keamanan. Menurut beliau, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam pemungutan pajak. Agar pajak memiliki konsep *al-'adl* dan *al-Maslahat*

إِنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يُطَالَبُ الْمُسْلِمُوْن بِمَغَارِيْم غَيْرِ وَاجِبَةٍ بِالشَّرْعِ وَإِنَّمَا يُطَالَبُوْنَ بِالزَّكَاةَ وَمَا أَوْجَبَهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّة كَالْفَيْئِ وَالرِّكَازِ وَإِرْث مَنْ يَرِثُهُ بَيْتُ الْمَال وَهَذَا مَا أَمْكَنَ بِهِ حَمْلُ الْوَطَن وَمَا يُحْتَاجُ لَهُ مِنْ جُنْدٍ

[16] Abdul Rahman ibn Abdul Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi* Vol II hlm 262
[17] Al-QUr'an surat Al-Kahfi ayat 94
[18] Ahmad bin Yahya bin Muhammad al-Wansyarisi al-Maliki, *al-Mi'yar al_Mu'arrob,* Vol X,hlm 127-138

وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِين وَسَدِّ ثَلْمِ الْإِسْلام فَإِذَا عَجُزَ بَيْتُ الْمَال عَنْ أَرْزَاقِ الْجُنْدِ وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْه مِنْ آلَةِ حَرْبٍ وَعُدَّةٍ فَيُوَزَّعُ عَلَى النَّاسِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْه مِنْ ذَلِكَ وَعِنْدَ ذَلِكَ يُقَالُ يُخَرَّجُ هَذَا الْحُكْم وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالى قَالُوا يَا ذَالْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا الآية لَكِنْ لَا يَجُوْزُ هَذَا إِلَّا بِشُرُوْطٍ (اَلْأولُ) أَنْ تَتَعَيَّنَ الْحَاجَةُ فَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَال مَا يَقُوْمُ بِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِين جِزْيَةٌ وقال صلى الله عليه وسلم لَا يَدْخُلُ الْجَنَّة صَاحِبُ مَكْس وَهَذَا يُرْجَعُ إِلَى إِغْرَامِ الْمَال ظُلْما (الثاني) أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْهِ بِالْعَدْل وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَسْتَأْثِرَ بِهِ دُوْنَ الْمُسْلِمِين وَلَا أَنْ يُنْفِقَهُ فِي شَرَفٍ وَلَا أَنْ يُعْطَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ وَلَا يُعْطِيَ أَحَدًا أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ (الثالث) أَنْ يَصْرِفَ مَصْرَفَهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَة وَالْحَاجَة لَا بِحَسَبِ الْغَرَض (الرابع) أَنْ يَكُوْنَ الْغَرْمُ عَلَى مَا كَانَ قَادِرًا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا إِجْحَافٍ وَمَنْ لَا شَيْءَ لَهُ أَوْ لَهُ شَيْءٌ قَلِيْلٌ فَلَا يَغْرم شَيْئًا (الخامس) أَنْ يَتَفَقَّدَ هَذَا فِي كُلِّ وَقْتٍ فَرُبَّمَا جَاءَ وَقْتٌ لَا يَفْتَقِرُ فِيْهِ لِزِيَادَةٍ عِلْمًا فِي بَيْتِ الْمَال فَلاَ يُوَزَّعُ وَكَما يَتَعَيَّن الْمَال فِي التَّوْزِيع، فَكَذَلِكَ إِذَا تَعَيَّنَتْ الضَّرُوْرَة لِلْمَعُوْنَة بِالْأَبْدَان، وَلَمْ يَكْفِ الْمَال، فَإِنَّ النَّاسَ يُجْبَرُوْن عَلَى التَّعَاوُنِ عَلَى الْأَمْرِ الدَّاعِي لِلْمَعُوْنَة، بِشَرْطِ الْقُدْرَةِ وَتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَة وَالْإِفْتِقَارِ إِلَى ذَلِكَ

Artinya : Dalam pungutan pajak, tata kelolanya meliputi:

1. *Kondisi keuangan negara tidak tercukupi oleh zakat dan sektor usaha lain*
2. *Pajak dipungut secara adil dan merata. Tidak boleh membebaskan pajak bagi sebagian kelompok namun terlalu menekan pada kelompok lain*
3. *Pajak didistribusikan tepat sasaran dengan skala prioitas.*
4. *pembayar pajak tergolong mampu (al-aghniya), dan besaran pajak tidak memberatkan rakyat*
5. *Diberlakukan secara temporal tidak bersifat permanen*

Maka sebagai bentuk partisipasi rakyat bergotong-royong dalam membantu negara, Imam al-Haramain[19] berkata, negara manarik zakat dan boleh memungut pajak dengan syarat-syarat seperti di atas.

D. Integrasi zakat dan pajak menuju tax credit

Dalam konsep islam, ada sebuah kewajiban yang menjadi tanggung jawab negara, yakni memungut zakat dan mengelolanya. Pungutan zakat ini diambil dari segmen masyarakat yang mampu untuk kemudian didistribusikan kepada kaum fakir miskin. Nabi bersabda[20] :

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ: «فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» .

Artinya: Jika mereka telah menerimamu maka informasikan kepada mereka, bahwa mereka memiliki kewajiban zakat yang dipungut dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir

Al-Qur'an menetapkan bahwa Zakat dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan keagamaan dan lainnya. Pada sisi lain, negara mengalokasikan anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur, membangun sekolah dan fasilitas Kesehatan,penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penanganan bencana. Ada ruang perjumpaan yang sangat nyata. Dana zakat yang dikelola secara amanah adalah dana umat islam yang bekerja untuk kepentingan bangsa. Maka bilamana dana zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal bisa di-integrasikan secara proporsional tentu secara signifikan akan menghapus beban ganda umat islam. Keduanya memiliki kontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat perlindungan sosial, memberdayakan masyarakat, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata. Sayangnya, hingga kini kebijakan yang berlaku masih menempatkan zakat hanya sebagai pengurang

[19] Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Ghiyats al-Umam*, hlm 280

[20] Muhammad ibn Idris al-Syafi'I, *Musnad Al-Syafi'I*, Vol II hlm 131

penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 telah mengatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui badan atau lembaga amil resmi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, bukan langsung dari pajak yang terutang. Artinya, zakat baru diperlakukan sebagai tax deduction. Maka agar tidak menjadi beban ganda umat perlu didorong agar zakat bisa diperlakukan sebagai tax credit.

Konsep integrasi zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal ini tidaklah dipahami bahwa dengan membayar zakat secara otomatis telah membayar pajak. Dua beban ini tetap berjalan pada relnya masing-masing. Zakat sebagai kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan rukun islam. Dan pajak adalah kontribusi dan partisipasinya sebagai warga negara. Diperlukan perhitungan akumulatif unuk mengintegrasikan zakat dan pajak. Misalkan si fulan kewajiban akumulatifnya senilai 10 juta. Dengan membayar zakat mal sebesar 4 juta kepada LAZISNU, maka fulan tinggal membayar 6 juta sisanya dalam bentuk pajak.

E. Prinsip-prinsip dasar dalam pajak berkeadilan dan bermaslahat

1. Prinsip *al-Maslahat*

Al-Syaikh Husein bin Ibrahim Al-Maghrabi al-Maliki menyatakan bahwa pungutan pajak di atas didasarkan pada kaidah fiqih *al-Maslahah al-mursalah*. Beliau berkata[21] :

(مسئلة) قَالَ الشَّيْخ التَتْبَكْتِي فِي تَكْمِيْلِ الدِّيْبَاج آخِرَ تَرْجَمَةِ العَلَّامَة الشَّيْخ اِبْرَاهِيْم بِنْ مُوْسَى بِنْ مُحَمَّد اللَّخَمِي الْغَرْنَاطِي اَبُو اِسْحَق الشَّهِيْر بِالشَّاطِبِي مَا نَصُّه وَكَانَ صَاحِبُ التَّرْجَمَة مِمَّنْ يَرَى جَوَازَ ضَرْبِ الْخَرَّاج عَلَى النَّاس عِنْدَ ضُعْفِهِم وَحَاجَاتِهِمْ لِضُعْفِ بَيْتِ الْمَال عَنِ الْقِيَام بِمَصَالِح النَّاس كَمَا وَقَعَ لِلشَّيْخ اَلْمَالِقِي فِي كِتَاب الْوَرَع قَالَ تَوْظِيْفُ الْخَرَّاج عَلَى الْمُسْلِمِين مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَة

Artinya : Hukum pungutan pajak kepada orang-orang muslim didasarkan pada kaidah fiqih al-maslahah al-mursalah. Dan menurut kami (madzhab malikiyyah) tidak diragukan hukum bolehnya.

2. Pajak haram diterapkan kepada rakyat miskin

Pajak adalah solusi dari persoalan keuangan negara yang berdasar pada prinsip *al-maslahah*. Artinya, pajak diterapkan pada segmen rakyat yang telah mencapai taraf *al-ghaniy* (berkecukupan). Dan batasan kaya yang ideal dalam perspektif islam Adalah satu nishab emas (85 gram emas). Maka bilamana seseorang telah menerima gaji setahun senilai 85 gram emas maka baru bisa dipungut pajak. Hukumnya haram bilamana pajak dipungut dari segmen masyarakat yang tidak mampu (*al-Faqir*). Imam 'Izzuddin bin 'Abdis Salam berkata[22] :

[فَصْلٌ فِي تَصَرُّفِ الْوُلَاةِ وَنُوَّابِهِمْ]

يَتَصَرَّفُ الْوُلَاةُ وَنُوَّابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ دَرْءًا لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ، وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ،

Artinya : Para pemimpin negara dan perangkatnya harus merumuskan kebiijakan yang terbaik untuk rakyatnya. Demi menghindarkan kondisi bahaya dan kerusuhan. Serta untuk menggapai kemanfaatan dan kesejahteraan. Dan kebijakan ini haruslah yang terbaik. Bukan sekedar baik saja.

Pajak hanya boleh diterapkan pada sektor produktif yang *profitable* seperti sektor pertanian, pertambangan, jasa transortasi. Bukan pada sektor non profit seperti pendidikan, area keagamaan (masjid dan musholla). Regulasi pajak model semacam ini adalah sebagai bentuk partisipasi para *al-aghniya'* dalam pembangunan negara. Imam Al-Syatibi[23] mengatakan:

---

[21] Husein bin Ibrahim al-Maliki Al-Maghrobi, *Qurrotul 'Ain*, hlm 332

[22] Kitab Qowaidul Ahkam fi Masholih Anam, Izzuddin bin 'Abdis Salam, Juz 2 Hal 89, Maktabah Syamilah

[23] Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, *Al-I'tishom*, Vol II, hlm 169

[تَوْظِيفُ الْإِمَامِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ]
الْمِثَالُ الْخَامِسُ: إِنَّا إِذَا قَرَّرْنَا إِمَامًا مُطَاعًا مُفْتَقِرًا إِلَى تَكْثِيرِ الْجُنُودِ لِسَدِّ الثُّغُورِ وَحِمَايَةِ الْمُلْكِ الْمُتَّسِعِ الْأَقْطَارِ، وَخَلَا بَيْتُ الْمَالِ وَارْتَفَعَتْ حَاجَاتُ الْجُنْدِ إِلَى مَا لَا يَكْفِيهِمْ، فَلِلْإِمَامِ - إِذَا كَانَ عَدْلًا - أَنْ يُوَظِّفَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مَا يَرَاهُ كَافِيًا لَهُمْ فِي الْحَالِ، إِلَى أَنْ يَظْهَرَ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ إِلَيْهِ النَّظَرُ فِي تَوْظِيفِ ذَلِكَ عَلَى الْغَلَّاتِ وَالثِّمَارِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَيْلَا يُؤَدِّيَ تَخْصِيصُ النَّاسِ بِهِ (إِلَى) إِيحَاشِ الْقُلُوبِ، وَذَلِكَ يَقَعُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ بِحَيْثُ لَا يُجْحِفُ بِأَحَدٍ وَيَحْصُلُ الْغَرَضُ الْمَقْصُودُ. وَإِنَّمَا لَمْ يُنْقَلْ مِثْلُ هَذَا عَنِ الْأَوَّلِينَ لِاتِّسَاعِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَانِهِمْ بِخِلَافِ زَمَانِنَا، فَإِنَّ الْقَضِيَّةَ فِيهِ أَحْرَى، وَوَجْهُ الْمَصْلَحَةِ هَنَا ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلِ الْإِمَامُ ذَلِكَ النِّظَامَ بَطَلَتْ شَوْكَةُ الْإِمَامِ، وَصَارَتْ دِيَارُنَا عُرْضَةً لِاسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ.

Artinya: Bab pungutan pajak kepada orang-orang kaya dalam kondisi al-hajat. Di saat situasi negara membutuhkan anggaran penguatan keamanan dan menjaga stabilitas negara. Sementara kondisi keuangan negara belum bisa memenuhinya, maka pemerintah bisa menerapkan pungutan pajak kepada orang-orang yang mampu di berbagai sektor, misalkan sektor pertanian, perkebunan dan lainnya. Pungutan pajak ini harus hati-hati dan proporsional. Tidak boleh hanya dibebankan kepada sebagian rakyat. Dan dipungut dalam prosentase yang kecil. Hal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan Masyarakat. Konsep pajak tersebut berlandaskan kemaslahatan. Dan bilamana pemerintah tidak memungut pajak maka akan bisa runtuh kedaulatan nagaranya dan akan bisa ditaklukkan oleh negara lain

3. Prinsip *al-'Adl*

Dalam prinsip *al-'Adl* ini, regulasi pajak harus mematuhi tata kelola internal yang transparan. Maksudnya, setiap uang pajak yang diterima akan dikelola secara amanah dan disalurkan pada sektor yang membutuhkan. Setiap bentuk korupsi dana pajak dan penyelewengan APBN adalah kejahatan yang wajib diberikan sangsi berat. Dan pemerintah wajib menjaga dana pajak ini agar tersalurkan dengan optimal dan terserap dengan baik. Pemborosan anggaran negara merupakan bentuk khianat pada amanah yang telah diterima. Prinsip *al-'Adl* mewajibkan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengelolaan. Imam al-Nawawi mengutip penjelasan dari Imam al-Qodli 'Iyadl. Beliau berkata[24] :

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَاهُ بَيِّنٌ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ غِشِّ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ قَلَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِمْ وَاسْتَرْعَاهُ عَلَيْهِمْ وَنَصَبَهُ لِمَصْلَحَتِهِمْ فِي دِينِهِمْ أَوْ دُنْيَاهُمْ فَإِذَا خَانَ فِيمَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْصَحْ فِيمَا قُلِّدَهُ إِمَّا بِتَضْيِيعِهِ تَعْرِيفَهُمْ مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ دِينِهِمْ وَأَخْذَهُمْ بِهِ وَإِمَّا بِالْقِيَامِ بِمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِ شَرَائِعِهِمْ وَالذَّبِّ عَنْهَا لكل متصد لا دخال دَاخِلَةٍ فِيهَا أَوْ تَحْرِيفٍ لِمَعَانِيهَا أَوْ إِهْمَالِ حُدُودِهِمْ أَوْ تَضْيِيعِ حُقُوقِهِمْ أَوْ تَرْكِ حِمَايَةِ حَوْزَتِهِمْ وَمُجَاهَدَةِ عَدُوِّهِمْ أَوْ تَرْكِ سِيرَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ فَقَدْ غَشَّهُمْ قَالَ الْقَاضِي وَقَدْ نَبَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَةِ الْمُبْعِدَةِ عَنِ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya : Al-Qodli 'Iyadl berkata: makna hadits tersebut memberikan peringatan kepada orang-orang yang diberikan amanah jabatan memimpin rakyat. agar menjalankan amanahnya dengan baik, mengedepankan prinsip kemaslahatan dunia dan akhirat dalam setiap regulasinya. Maka pemimpin ini bisa dikategorikan telah melakukan penipuan atas rakyatnya manakala telah berkhianat atas amanah yang diterimanya, tidak menjalankan tugas dengan baik, menerlantarkan kewajibannya, tidak menegakkan supremasi hukum, tidak memberikan hak-hak rakyatnya, tidak menerapkan prinsip keadilan kepada rakyatnya. Dan semua ini termasuk dosa besar yang bisa menjauhkan dari surga.

[24] Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi. Kitab Syarah Muslim juz 2 hal 166 (Maktabah Syamilah)

4. **Prinsip *al-rifq***

Dalam sebuah hadits shahih, Nabi Muhammad SAW memperingatkan agar para pemimpin negara memberikan kemudahan kepada rakyat dan tidak memberikan beban berat kepada mereka. Nabi bersabda[25] :

يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: »اللهُمَّ، مَنْ وَ لِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَ مَنْ وَ لِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَ فَقَ بِهِمْ، فَارْ فُقْ بِهِ

Artinya : Nabi Muhammad SAW bersabda: Ketika beliau di rumahku (Sayidah 'Aisyah) : Ya Allah, barangsiapa dari pemimpin rakyat yang memberatkan rakyatnya maka timpakanlah berat (siksa) padanya. Dan barangsiapa dari pemimpin rakyat yang memberikan kemudahan kepada rakyatnya, maka berilah kasih sayang (surga) kepadanya.

Pungutan pajak di hampir semua sektor adalah bentuk tindakan semena-mena kepada rakyat.. Imam al-Nawawi mengatakan bahwa hukumnya haram bagi pemimpin negara untuk memberatkan rakyatnya. Beliau berkata[26] :

هَذَا مِنْ أَبْلَغِ الزَّ وَ اجِ رِ عَنِ الْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ وَ أَعْظَمِ الْحَثِّ عَلَى الرِّ فْقِ بِهِمْ

Artinya : hadits shahih ini (yang diriwayatkan sayyidah 'Aisyah) adalah larangan paling keras bagi pemimpin agar tidak memberatkan beban rakyatnya. Dan sangat mendorong agar pemimpin untuk meringankan beban (belas kasihan) rakyatnya.

[25] Al-Imam Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi. Kitab Shahih Muslim juz 3 hal 1458 (Maktabah Syamilah)
[26] Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi. Kitab Syarah Muslim juz 12 hal 213 (Maktabah Syamilah)

MATERI II
KONSEP I'ADATUN NAZHOR
METODOLOGI DAN PROSEDUR I'ADAH AN-NADZAR

A. DESKRIPSI MASALAH

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama (Perkum) terbaru nomor 7 tahun 2024, telah ditegaskan bahwa hasil-hasil keputusan Bahtsul Masail yang ditetapkan pada forum Munas maupun Muktamar dimungkinkan untuk dilakukan i'adah an-nadzar (peninjauan ulang). Ketentuan ini menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang pernah ditetapkan bukanlah sesuatu yang tertutup untuk dikaji kembali apabila ditemukan pertimbangan baru yang lebih kuat, perubahan realitas sosial yang signifikan, atau perkembangan metodologi istinbath yang lebih memadai.

Namun demikian, dibukanya ruang i'adah an-nadzar menimbulkan pertanyaan metodologis yang sangat penting. Sebab, tanpa metodologi yang disepakati bersama, proses peninjauan ulang berpotensi melahirkan perbedaan standar, subjektivitas, bahkan ketidakpastian dalam tradisi pengambilan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Sebagaimana NU telah memiliki prosedur yang relatif jelas dalam istinbath hukum untuk kasus-kasus terbarukan, baik melalui pendekatan qauli, ilhaqi, maupun manhaji, maka diperlukan pula rumusan metodologi yang jelas mengenai bagaimana suatu keputusan Munas atau Muktamar dapat ditinjau ulang. Apakah *i'adah an-nadzar* dilakukan dengan pendekatan yang sama sebagaimana istinbath hukum sebelumnya? Apakah cukup dengan menemukan qaul yang lebih rajih? Apakah harus melalui pendekatan maqashid syariah dan kemaslahatan? Ataukah diperlukan syarat-syarat tertentu agar stabilitas keputusan organisasi tetap terjaga? Untuk mejawabnya diperlukan kerangka metodologis yang dapat dijadikan pedoman bersama dalam pelaksanaan i'adah an-nadzar terhadap keputusan-keputusan NU.

B. PERTANYAAN

1. Siapa yang berhak mengajukan permohonan i'adah an-nadzar terhadap suatu keputusan, siapa yang berotoritas menilai kelayakannya untuk ditinjau ulang, serta bagaimana mekanisme dan kriteria yang digunakan dalam proses pengujiannya?
3. Metodologi apakah yang perlu disepakati sebagai pedoman dan proses pelaksanaan *i'adah an-nadzar* di lingkungan Nahdlatul Ulama?
4. Bagaimana kedudukan hukum hasil i'adah an-nadzar terhadap hukum sebelumnya? Apakah ia berfungsi membatalkan dan menggantikan keputusan terdahulu, menghadirkan alternatif hukum baru yang setara, atau sekadar menyempurnakan dan mereinterpretasikan keputusan yang telah ada?

C. JAWABAN

1. SUBJEK DAN FORUM

Dalam Praturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 7 tahun 2024 dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan *I'adah an-nadzar* atas keputusan MUNAS ataupun muktamar sebelumnya adalah Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama (pasal 3 huruf f). Adapun yang berhak membahas adalah forum Munas dan Muktamar. Adapun mekanismenya adalah, keputusan munas bisa ditinjau ulang pada forum munas yang lain. Begitupun keputusan muktamar dapat ditinjau ulang pada muktamar lainnya.

2. METODOLOGI DAN PROSEDUR

A. PENDAHULUAN

Salah satu karakter fundamental syariat Islam adalah keberlakuannya yang bersifat universal dan abadi. Syariat tidak diturunkan untuk menjawab persoalan suatu generasi tertentu, melainkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga datangnya hari kiamat. Karena itu, keberlangsungan syariat sepanjang masa merupakan bagian dari kesempurnaan risalah Islam.

Imam az-Zarkasyi dalam *al-Baḥr al-Muhith* menegaskan:

مَسْأَلَةٌ أَحْكَامُ الشَّرْعِ ثَابِتَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. كُلُّ حُكْمٍ ثَبَتَ لَنَا بِقَوْلِ اللَّهِ أَوْ بِقَوْلِ رَسُولِهِ أَوْ بِإِجْمَاعٍ أَوْ بِقِيَاسٍ فَهُوَ دَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Masalah: hukum-hukum syariat tetap berlaku hingga hari kiamat. Setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan firman Allah, sabda Rasulullah, ijma', maupun qiyas, maka hukum tersebut berlaku terus hingga hari kiamat."[27]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat *al-dawam* (keberlangsungan) yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Akan tetapi, keabadian syariat tidak berarti bahwa seluruh bentuk penerapannya terhadap realitas sosial bersifat statis. Justru karena syariat dimaksudkan untuk berlaku sepanjang zaman, maka ia harus senantiasa mampu berdialog dengan perubahan kehidupan manusia yang terus berlangsung.

Dalam konteks inilah Imam az-Zarkasyi mengutip pernyataan Sultanul Ulama, Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salam:

يَحْدُثُ لِلنَّاسِ فِي كُلِّ زَمَانٍ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا يُنَاسِبُهُمْ.

"Pada setiap zaman akan lahir ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan manusia pada zamannya."[28]

Namun, perubahan tersebut bukanlah perubahan terhadap syariat itu sendiri, melainkan perubahan dalam penerapan syariat terhadap realitas yang berubah. Karena itu Imam az-Zarkasyi memberikan batasan yang sangat penting:

فَلَا نَقُولُ: إِنَّ الْأَحْكَامَ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ، بَلْ بِاخْتِلَافِ الصُّورَةِ الْحَادِثَةِ.

"Kita tidak mengatakan bahwa hukum berubah karena perubahan zaman, melainkan karena berubahnya bentuk dan karakter peristiwa yang baru muncul."[29]

Rumusan ini memberikan fondasi metodologis yang sangat penting. Yang berubah bukanlah syariat, tetapi objek penerapan syariat (المناط), realitas sosial, adat kebiasaan, perkembangan ilmu pengetahuan, serta bentuk-bentuk baru kehidupan manusia. Perubahan realitas tersebut menuntut adanya pembacaan ulang terhadap proses istinbath dan penerapan hukum agar tujuan-tujuan syariat (مقاصد الشريعة) tetap terwujud dalam setiap ruang dan waktu.

Atas dasar itu, i'adah an-nadzar bukanlah mekanisme untuk mengubah syariat ataupun membatalkan ijtihad ulama terdahulu, melainkan ikhtiar ilmiah untuk memastikan bahwa hukum syariat yang bersifat abadi tetap relevan dengan perubahan realitas yang dihadapi manusia. Peninjauan ulang dilakukan bukan karena syariat mengalami perubahan, tetapi karena manusia, adat, sistem sosial, teknologi, ekonomi, dan berbagai bentuk kehidupan

[27] Az-Zarkasyi, al-Baḥr al-Muhith, vol. I, hlm. 217
[28] Ibid, Vol I, hlm. 219
[29] Ibid

terus mengalami perkembangan yang melahirkan صورة حادثة(bentuk-bentuk baru) yang memerlukan pembacaan hukum secara lebih tepat.

Dengan demikian, i'adah an-naẓar merupakan salah satu instrumen untuk menjaga keabadian syariat melalui pembaruan cara memahami dan menerapkannya. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan antara ثبات الشريعة(ketetapan syariat) dan تغير الواقع (dinamika realitas), sehingga hukum Islam tetap mampu menghadirkan kemaslahatan bagi manusia di setiap zaman tanpa kehilangan akar normatifnya yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.

B. Status *I'adah an-Nadẓar*

I'adah an-nadẓar bukan hanya merupakan sesuatu yang **diperbolehkan secara syar'i (جائز شرعًا)**, tetapi juga merupakan praktik yang **telah terjadi (وقع شرعًا)** dalam sejarah panjang perkembangan fikih Islam. Sejak masa sahabat hingga para imam mazhab, para ulama telah memberikan contoh bagaimana suatu hasil ijtihad dapat ditinjau ulang ketika ditemukan alasan yang menghendakinya, baik karena perubahan realitas, perubahan cara pandang, maupun ditemukannya dalil dan argumentasi yang lebih kuat.

Salah satu catatan historis yang sering dikemukakan adalah wasiat Sayyidina Umar bin Khaththab kepada Abu Musa al-Asy'ari sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Mawardi dalam *al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah*:

ولا يمنعك قضاء قضيته أمس، فراجعت اليوم فيه عقلك، وهديت فيه لرشدك، أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.

"Janganlah suatu keputusan yang engkau putuskan kemarin menghalangimu untuk kembali meninjaunya hari ini setelah engkau menggunakan akalmu kembali dan memperoleh petunjuk kepada kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu telah ada sejak dahulu, dan kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus menerus berada dalam kekeliruan."[30]

Wasiat ini menunjukkan bahwa peninjauan ulang terhadap suatu keputusan bukanlah bentuk inkonsistensi, melainkan manifestasi komitmen terhadap kebenaran. Selama ditemukan alasan ilmiah yang lebih kuat, kembali kepada kebenaran merupakan sikap yang lebih utama daripada mempertahankan pendapat lama hanya demi menjaga konsistensi formal.

Contoh lain dari praktik i'adah an-nadẓar dapat ditemukan dalam perkembangan pendapat ulama mazhab Syafi'i mengenai **bai' al-mu'athahh**, yaitu transaksi jual beli tanpa lafaz ijab dan kabul. Kitab *al-Fiqh al-Manhaji* menjelaskan:

وهل ينعقد البيع بالمعاطاة؟ كأن يُقبض البائع المبيع ويُقبضه المشتري الثمن، من غير أن يتلفظ واحد منهما بشيء، أو يتلفظ أحدهما ويسكت الآخر.

المشهور في المذهب: أنه لا بدَّ من التلفظ من العاقدين، وأن البيع لا يصح بالمعاطاة. وبعض فقهاء المذهب صحَّح البيع بالمعاطاة في غير النفيس من الأشياء كرطل خبز وحزمة بصل ونحو ذلك، ولم يصححه في النفائس من السِّلَع والمبيعات ذات القيمة العالية.

وأجاز ذلك مطلقاً المتأخرون من فقهاء المذهب - كالنووي رحمه الله تعالى - إذا جرى به العرف. وهذا أيسر للناس وأرحم، وأبعد عن إيقاعهم في الإثم وإبطال بياعاتهم، ولا سيما في هذه الأيام التي أصبح البيع بالمعاطاة فيها هو الشائع والغالب، وقلما تجد متبايعين يتلفظان بإيجاب أو قبول

"Apakah akad jual beli dapat dianggap sah hanya dengan mu'athah (serah terima barang dan harga tanpa ijab kabul secara lisan)? Misalnya, penjual menyerahkan barang kepada pembeli,

[30] Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, hlm. 122

lalu pembeli menyerahkan uang kepada penjual, tanpa ada satu pun dari keduanya mengucapkan sesuatu, atau salah satu berbicara sementara yang lain hanya diam."Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa akad harus disertai lafaz dari kedua belah pihak, sehingga jual beli dengan mu'athah tidak dianggap sah. Sebagian fuqaha Syafi'iyyah kemudian membolehkan mu'athah pada barang-barang yang tidak bernilai tinggi, seperti satu roti, seikat bawang, dan barang-barang sejenis, namun tidak membolehkannya pada barang-barang berharga atau komoditas yang bernilai tinggi. Adapun ulama muta'akhkhirin mazhab Syafi'i, seperti Imam an-Nawawi, membolehkannya secara mutlak apabila praktik tersebut telah menjadi kebiasaan ('urf) masyarakat. Pendapat ini lebih memberikan kemudahan dan lebih membawa kasih sayang kepada masyarakat, serta lebih menjauhkan mereka dari jatuh ke dalam dosa dan batalnya transaksi-transaksi mereka, terutama pada masa sekarang ketika jual beli dengan cara mu'athah telah menjadi praktik yang umum dan dominan, sedangkan sangat jarang ditemukan dua orang yang bertransaksi dengan mengucapkan lafaz ijab dan qobul secara eksplisit."[31]

Perubahan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa i'adah an-nadzar dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

1. perubahan **'urf** (kebiasaan masyarakat);
2. penerapan prinsip **at-taysīr** (kemudahan) dalam syariat;
3. pertimbangan kemaslahatan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam kesulitan atau divonis melakukan transaksi yang batal padahal telah menjadi praktik umum.

Contoh lain yang banyak dibahas dalam literatur ushul fikih adalah i'ādah an-naẓar yang terjadi karena **berulangnya suatu peristiwa (تكرر الواقعة)** atau **berulangnya permintaan fatwa (تكرر الاستفتاء)**[32].

Imam Tajuddin as-Subki dalam Jam'ul Jawami' menjelaskan:

مسألة: إذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل الأول - وجب النظر قطعاً وكذا إن لم يتجدد لا إن كان ذاكرا وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت ثم تقع تلك الحادثة هل يعيد السؤال؟

"Masalah: Apabila suatu peristiwa terulang kembali, sementara muncul hal baru yang menghendaki perubahan pendapat, dan seorang mujtahid tidak lagi mengingat dalil yang menjadi dasar ijtihad pertamanya, maka ia wajib melakukan penelaahan ulang (النظر) secara pasti.Demikian pula menurut pendapat yang kuat, apabila tidak muncul hal baru sekalipun, selama ia tidak mengingat dalil pertamanya, ia tetap harus melakukan penelaahan ulang.Berbeda halnya apabila ia masih mengingat dalil pertama tersebut, maka ia tidak wajib mengulang penelaahannya.Demikian pula orang awam yang pernah meminta fatwa, meskipun kepada seorang mufti yang kini telah wafat. Apabila kemudian peristiwa yang sama terjadi kembali pada dirinya, apakah ia harus mengulangi pertanyaannya? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama."[33]

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa i'adah an-naẓar memiliki legitimasi yang kuat dalam tradisi fikih Islam. Ia bukan sekadar kemungkinan teoritis, melainkan telah dipraktikkan oleh para pendahulu kita. Dalam kepurtusan Nahdlatul Ulama pun terjadi peninjauan ulang ter-hadap keputusan lama sehingga melahirkan keputusan baru. Perubahan

[31] Dr. Musthafa Khin dkk, Al-Fiqh al-Manhaji, vol. VI, hlm. 14.
[32] Dalam permasalahan ini, az-Zarkasyi secara detail menjelaskan dalam kitabnya al-Bahrul Muhith
[33] Tajudin s-Subki, Jam'ul Jawami'

pandangan keagamaan NU terkait hukum memakai jas, hukum pemimpin perempuan, status miqat makanai dalam haji, merupakan bukti bahwa nahdlatul Ulama berpandangan bahwa peninjauan ulang dilakukan bukan karena syariat berubah, tetapi karena perubahan realitas, adat kebiasaan, kemaslahatan, atau ditemukannya argumentasi yang lebih kuat dalam proses istinbath. Oleh karena itu, i'adah an-naẓar merupakan bagian dari dinamika ijtihad yang justru menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan kehidupan manusia.

C. OBJEK I'ADATUN NADZAR

Sebelum membahas sebab-sebab yang melatarbelakangi i'adah an-nadzar, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa tidak semua keputusan keagamaan dapat menjadi objek peninjauan ulang. I'adah an-nadzar hanya dapat dilakukan pada persoalan-persoalan yang berada dalam wilayah ijtihad (*al-ahkām al-ijtihādiyyah*), yaitu hukum-hukum yang dibangun melalui proses istinbath, qiyas, maupun pertimbangan kemaslahatan.

Dalam hal ini para ulama menjelaskan wWahbah az-Zuhaili menjelaskan[34]:

واتفق العلماء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية القياسية أو المصلحية، أي المقررة بناء على قواعد القياس أو على دواعي المصلحة. وهي الأحكام الاجتهادية المتعلقة بالمعاملات أو الأحوال المدنية، من كل ما له صلة بشؤون الدنيا وحاجات التجارة والاقتصاد.

"Para ulama sepakat bahwa hukum-hukum yang dapat berubah karena perubahan zaman dan perubahan keadaan manusia adalah hukum-hukum ijtihadiyah yang dibangun di atas qiyas atau pertimbangan kemaslahatan, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan kaidah qiyas atau tuntutan maslahat. Hukum-hukum tersebut umumnya berkaitan dengan muamalah dan urusan-urusan kemasyarakatan yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, perdagangan, dan ekonomi."

Keterangan ini menunjukkan bahwa ruang perubahan dan peninjauan ulang terletak pada hukum-hukum yang memang sejak awal dibangun melalui proses ijtihad. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan realitas, perubahan maslahat, perubahan kondisi masyarakat, atau munculnya argumentasi yang lebih kuat, maka i'ādah an-naẓar dimungkinkan untuk dilakukan.

Sebaliknya, hukum-hukum yang telah ditetapkan secara tegas oleh nash syar'i dan bersifat qath'i tidak termasuk wilayah yang dapat ditinjau ulang. Sebagaimana dijelaskan:

أما الأحكام الأساسية في الشريعة المقررة بصريح النصوص الشرعية، أو التي تضع أصلاً تشريعياً عاماً ودائماً، فلا تقبل التبديل مطلقاً مهما تبدل المكان، وتغير الزمان.

"Adapun hukum-hukum dasar dalam syariat yang telah ditetapkan secara tegas oleh nash-nash syar'i, atau yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dan permanen, maka tidak menerima perubahan sama sekali, meskipun tempat dan zaman berubah."

Kemudian disebutkan beberapa contohnya:

مثل الأحكام التعبدية في العبادات الشرعية من صلاة وصيام وحج وزكاة ونحوها، والمقدرات الشرعية، مثل الحدود والعقوبات المقدرة على بعض الجرائم كالزنى والسرقة والقذف والحرابة وشرب المسكرات، والكفارات مثل كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة اليمين.

"Seperti hukum-hukum ta'abbudi dalam ibadah syariat berupa shalat, puasa, haji, zakat, dan semisalnya; demikian pula ketentuan-ketentuan syariat yang telah ditetapkan kadarnya, seperti hudud dan hukuman-hukuman yang telah ditentukan bagi tindak pidana tertentu, seperti zina,

[34] Wahbah az-Zuhaili, Taghayyur al-Ijtihad, hlm. 31-32.

pencurian, qadzaf, hirabah, dan minum minuman memabukkan; serta kafarat-kafarat seperti kafarat pembunuhan tidak sengaja, kafarat zihar, dan kafarat sumpah."

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa objek i'ādah an-naẓar adalah keputusan-keputusan ijtihadiyah yang lahir dari proses pemahaman, penalaran, qiyas, atau pertimbangan maslahat terhadap nash. Adapun perkara-perkara qath'iyyah yang telah ditetapkan secara tegas oleh Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' tidak termasuk wilayah i'ādah an-naẓar.

Dengan demikian, i'ādah an-naẓar bukanlah sarana untuk mengubah syariat, melainkan mekanisme untuk meninjau kembali hasil ijtihad manusia dalam memahami dan menerapkan syariat pada realitas yang terus berkembang. Prinsip ini sekaligus menjadi batas metodologis agar i'ādah an-naẓar tetap berada dalam koridor Ahlussunnah wal Jama'ah dan tradisi fikih yang mu'tabar.

D. FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI I'ADAH AN-NADZAR

Untuk memastikan faktor-faktor yang menghendaki terjadinya I'adah an-nadzar, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan *al-istiqra' al-ma'nawi*, yaitu meneliti furu'-furu' yang ada kemudian mengkanalisasi mana furu'-furu' yang mengalami perubahan status fikih. Dari perubahan-perubahan tersebut kita dapat menganalisa dengan cukup akurat apa saja faktor penyebab *I'adah an-nadzar*. Karena itu uraian di bawah ini akan menyebutkan faktor-faktor tersbut *taqriban* secara kira-kira, bukan *tahdidan* secara pasti.

1. Munculnya dalil yang lebih kuat

   Salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya i'adah an-naẓar adalah ditemukannya dalil yang lebih kuat daripada dalil yang sebelumnya dijadikan dasar suatu keputusan. Dalam kondisi seperti ini, peninjauan ulang tidak terjadi karena perubahan realitas, perubahan adat, atau perubahan kemaslahatan, melainkan karena perubahan dalam proses istidlal dan tarjih terhadap dalil-dalil syar'i.

   Prinsip ini telah ditegaskan sendiri oleh Imam asy-Syafi'i. Imam an-Nawawi meriwayatkan:

   فصل صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي: وروي عنه إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو مذهبي وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة: وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما

   "Imam asy-Syafi'i berkata: "Apabila kalian menemukan dalam kitabku suatu pendapat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah maka ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan pendapatku." Diriwayatkan pula dari beliau: "Apabila hadis yang sahih bertentangan dengan pendapatku, maka amalkanlah hadis tersebut dan tinggalkanlah pendapatku." Atau dalam riwayat lain: "Maka hadis itu adalah mazhabku."

   Makna ini diriwayatkan dari beliau dengan berbagai redaksi yang berbeda.Para ulama Syafi'iyyah telah mengamalkan prinsip ini, di antaranya dalam masalah tatswib dan masalah persyaratan tahallul dari ihram karena uzur sakit, serta beberapa masalah lain yang telah dikenal dalam kitab-kitab mazhab. Penulis (asy-Syirazi) juga telah menukil penerapan prinsip tersebut dari para ulama mazhab pada kedua masalah tersebut."[35]

[35] An-Nawawi, al-Majmu', vol I, hlm. 63

Keterangan ini menunjukkan bahwa para ulama Syafi'iyyah tidak memahami mazhab sebagai kumpulan pendapat yang tertutup dari evaluasi. Sebaliknya, apabila ditemukan dalil yang lebih kuat, maka pendapat yang telah mapan sekalipun dapat ditinjau ulang.

Salah satu contoh yang terkenal adalah masalah tatswib. Dalam qaul qadim, Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa tatswib merupakan sunnah. Namun dalam qaul jadid beliau berpendapat bahwa tatswib bukan sunnah. Sebagaimana dijelaskan:

فذهب الشافعي في القديم إلى أن التثويب سنة في صلاة الصبح، وقال في الجديد: ليس بسنة.

"Imam asy-Syafi'i dalam qaul qadim berpendapat bahwa tatswib merupakan sunnah dalam adzan Subuh. Namun dalam qaul jadid beliau berpendapat bahwa tatswib bukan sunnah."[36]

Alasan qaul jadid didasarkan pada tidak adanya riwayat tatswib dalam hadis Abu Mahdzurah, serta riwayat dari Ibnu Umar yang mengingkari tatswib.

Akan tetapi, para ulama Syafi'iyyah kemudian melakukan penelaahan ulang terhadap seluruh hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasilnya, mereka menilai bahwa hadis-hadis tentang tatswib ternyata memiliki banyak jalur periwayatan yang menguatkan satu sama lain. Karena itu sebagian ulama mazhab kembali menguatkan qaul qadim. Dalam kitab disebutkan:

ومذهبه في القديم أصح، لأن من قوله: إن ما ثبتت الرواية به عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول راجع إليه وآخذ به، وقد ثبتت الرواية بالتثويب من جهات.

"Pendapat beliau dalam qaul qadim lebih sahih, karena termasuk prinsip yang beliau nyatakan sendiri bahwa apabila terdapat riwayat yang sahih dari Nabi ﷺ maka beliau adalah orang pertama yang akan kembali kepadanya dan mengamalkannya. Sementara riwayat tentang tatswib telah terbukti sahih melalui berbagai jalur periwayatan."[37]

Kasus ini menunjukkan bahwa peninjauan ulang terhadap suatu pendapat dapat terjadi bukan karena perubahan zaman atau perubahan realitas, melainkan karena ditemukannya dalil yang lebih kuat atau karena adanya penilaian ulang terhadap kekuatan dalil yang telah ada.

Dari sini dapat dirumuskan bahwa salah satu sebab yang sah untuk melakukan i'adah an-nazar adalah:

ظهور دليل أقوى أو إعادة تقييم قوة الأدلة الشرعية المعتمدة سابقًا.

"Munculnya dalil yang lebih kuat atau dilakukannya evaluasi ulang terhadap kekuatan dalil-dalil syar'i yang sebelumnya dijadikan dasar keputusan."

Dengan demikian, i'adah an-nazar tidak hanya berfungsi merespons perubahan realitas sosial, tetapi juga menjadi instrumen ilmiah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil senantiasa bertumpu pada dalil yang paling kuat dan paling mendekati maksud syariat.

2. Perubahan Keadaan (الأحوال)

Salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi i'ādah an-nadzar adalah perubahan keadaan (*taghayyur al-ahwāl*). Yang dimaksud dengan perubahan keadaan adalah perbedaan kondisi, kebutuhan, kemampuan, atau situasi yang melingkupi subjek hukum, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara kolektif. Dalam kondisi seperti ini, hukum

[36] Al-Mawardi, al_Hawi al-Kabir, vol. II, hlm. 55.
[37] Ibid

yang diterapkan pada suatu keadaan belum tentu tepat diterapkan pada keadaan yang lain, meskipun nash yang menjadi landasannya tetap sama.

a. Perubahan Keadaan Individual

Contoh perubahan keadaan individual dapat dilihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: "لَا". فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ: أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ."

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash, ia berkata: Kami berada di sisi Rasulullah ﷺ. Lalu datang seorang pemuda dan bertanya: "Wahai Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya saat berpuasa?" Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian datang seorang lelaki tua dan bertanya: "Bolehkah saya mencium istri saya saat berpuasa?" Beliau menjawab: "Ya." Kami pun saling berpandangan. Rasulullah ﷺ lalu bersabda: "Aku tahu mengapa kalian saling berpandangan. Sesungguhnya orang tua itu mampu mengendalikan dirinya."

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ memberikan jawaban yang berbeda terhadap perbuatan yang sama karena perbedaan kondisi pelaku. Pertimbangan utama bukan terletak pada tindakan mencium itu sendiri, melainkan pada kemampuan masing-masing orang dalam mengendalikan syahwatnya. Dengan demikian, keadaan psikologis dan kemampuan individu dapat menjadi faktor yang memengaruhi penerapan hukum.

b. Perubahan Keadaan Sosial dan Kebutuhan Masyarakat

Perubahan keadaan juga dapat terjadi pada tingkat masyarakat secara umum. Contohnya dapat ditemukan dalam pembahasan distribusi zakat[38]. Syekh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i mewajibkan distribusi zakat kepada seluruh ashnaf yang berhak menerima zakat. Namun ia juga mengakui bahwa penerapan pendapat tersebut sering kali menghadapi kesulitan dalam praktik. Ia menjelaskan

ولا يخفى ما في هذا من الصعوبة سيما في زكاة الفطر.

"Tidak tersembunyi lagi bahwa pelaksanaan ketentuan ini mengandung kesulitan, khususnya dalam zakat fitrah."

Selanjutnya beliau mengutip pendapat Ibn 'Ujail al-Yamani:

ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب: نقل الزكاة، ودفع زكاة واحد لواحد، ودفعها إلى صنف واحد.

---

[38] Lihat selengkapnya: Nawawi al-bantani, Nihayah Zain, hlm. 181-182. Ibarat lengkapnya:
تَنْبِيه مَا تقرر من أَنه لَا بُد من تَعْمِيم الْأَصْنَاف هُوَ مُعْتَمد الْمَذْهَب لِأَن معنى الْحصْر الْمَذْكُور فِي الْآيَة عِنْد الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِنَّمَا تصرف لهَؤُلَاء لَا لغَيرهم وَلَا لبَعْضهم فَقَط بل يجب استيعابهم وَلَا يخفى مَا فِي هَذَا من الصعوبة سِيمَا فِي زَكَاة الْفطر وَالْمعْنَى عِنْد الإِمَام مَالك وَأبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُمَا إِنَّمَا تصرف لهَؤُلَاء لَا لغَيرهم وَهَذَا يصدق بِعَدَمِ استيعابهم فَيجوز دَفعهَا لصنف مِنْهُم وَلَا يجب التَّعْمِيم قَالَ ابْن عجيل اليمني ثَلَاث مسَائِل فِي الزَّكَاة يُفْتى فِيهَا على خلاف الْمَذْهَب نقل الزَّكَاة وَدفع زَكَاة وَاحِد لوَاحِد وَدفعهَا إِلَى صنف وَاحِد قَالَ وَلَو كَانَ الشَّافِعِي حَيا لأفتى بذلك.

"Ada tiga persoalan zakat yang dalam praktik fatwa sering diputuskan berbeda dengan pendapat resmi mazhab, yaitu memindahkan zakat ke daerah lain, memberikan zakat seseorang kepada satu orang penerima saja, dan memberikan zakat hanya kepada satu golongan (ashnaf)."

Bahkan Ibn 'Ujail mengatakan:

ولو كان الشافعي حياً لأفتى بذلك.

"Seandainya Imam asy-Syafi'i masih hidup, niscaya beliau akan berfatwa demikian."

Ungkapan ini tidak dimaksudkan untuk mengoreksi Imam asy-Syafi'i, melainkan menunjukkan keyakinan para ulama bahwa perubahan keadaan sosial dan kebutuhan masyarakat dapat melahirkan penerapan hukum yang berbeda dari formulasi sebelumnya. Yang berubah bukanlah nash maupun prinsip zakat, melainkan kondisi masyarakat yang menjadi tempat diterapkannya hukum tersebut.

Dari kedua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan keadaan (*taghayyur al-ahwāl*) merupakan salah satu alasan yang sah untuk melakukan i'ādah an-naẓar. Sebab boleh jadi suatu keputusan ditetapkan berdasarkan kondisi tertentu, sementara kondisi individu atau masyarakat yang menjadi objek hukum telah berubah secara signifikan. Dalam keadaan demikian, diperlukan peninjauan ulang agar penerapan hukum tetap sejalan dengan tujuan syariat dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

3. Perubahan keadaan manath hukum

Faktor lainnya diperlukan I'adah nadzar karena terjadinya perubahan keadaan manath hukum pada sebuah kasus. Hal ini berkaitan erat dengan proses *tahqiq al*-manath. Terkait hal ini Imam al-Ghazali dalam kitabnya *asas al-qiyas* menjelaskan:

الفن الأول: النظر في تحقيق وجود المناط في محل النزاع: ومثاله: أنه إذا بان لنا بالنص - مثلاً- أن الربا منوط بوصف الطعم بقوله:لا تبيعوا الطعام بالطعام أو بتصريحه -مثلاً- بأنه لأجل الطعم، فيتصدى لنا طرفان في النفي والإثبات واضاحان: أحدهما: الثياب والعبيد والدور والأواني، فإنها ليست مطعومة قطعاً. والثاني: الأقوات والفواكه والأدوية، فإنها مطعومة قطعاً. وبينهما أوساط متشابهة ليس الحكم فيها بالنفي والإثبات جلياً كدهن الكتان ودهن البنفسج والطين الأرمني والزعفران ، وأنها معدودة من المطعومات أم لا؟ فيحتاج إلى نوع من النظر في تحقيق معنى الطعم فيها أو نفيه عنها .

"metode pertama: meneliti keberadaan manāṭ (illat yang menjadi dasar hukum) pada objek yang diperselisihkan. Contohnya, apabila melalui nash telah jelas bagi kita bahwa riba dikaitkan dengan sifat "dapat dimakan" (ṭa'm), misalnya melalui sabda Nabi:

لا تبيعوا الطعام بالطعام

"Janganlah kalian menjual bahan makanan dengan bahan makanan (secara ribawi)."

Atau melalui penegasan nash yang secara eksplisit menyatakan bahwa illatnya adalah karena sifat makanan (ṭa'm).

Maka di hadapan kita terdapat dua kelompok yang jelas dalam penafian dan penetapannya:

1. *Pakaian, budak, rumah, dan bejana, yang secara pasti bukan termasuk benda yang dimakan, sehingga tidak memiliki sifat ṭa'm.*
2. *Bahan makanan pokok, buah-buahan, dan obat-obatan, yang secara pasti termasuk benda yang dimakan, sehingga memiliki sifat ṭa'm.*

Di antara kedua kelompok tersebut terdapat objek-objek pertengahan yang samar, yang status penetapan atau penafian sifat ṭa'm-nya tidak begitu jelas, seperti: minyak biji rami (duhn al-kattān), minyak bunga violet (duhn al-banafsaj), tanah Armenia (aṭ-ṭīn al-Armanī, sejenis tanah liat yang dahulu digunakan sebagai obat), dan saffron (za'farān). Apakah benda-benda tersebut termasuk kategori makanan (al-maṭ'ūmāt) atau tidak? Untuk menjawabnya diperlukan suatu kajian dan penelaahan guna memastikan ada atau tidaknya makna "dapat dimakan" (ṭa'm) pada benda-benda tersebut"[39].

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perubahan hukum bisa bergantung pada proses verifikasi keberadaan illat yang sudah diketahui pada objek yang sedang diperselisihkan. Ketika NU memutuskan dalam Munas 2019 bahwa tidak ada kafir dalam konteks kenegaraan di Indonesia, hal ini karena tidak ditemukan alasan penyebutan kafir dzimmi, harbi, musta'man dan mu'ahad yang sudah tidak ditemukan hakikatnya pada non muslim di Indonesia.

4. Munculnya Pemahaman Baru terhadap Dalil dan Nushush Ulama

Salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya i'ādah an-naẓar adalah munculnya pemahaman baru terhadap dalil syar'i, nushush para ulama, maupun peta khilaf fikih yang sebelumnya belum terungkap secara memadaiSalah satu contoh yang menarik dalam sejarah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah perkembangan pandangan mengenai hukum fotografi.

Muktamar NU ke-13 pernah memutuskan:

"Bahwasanya menggambar hewan yang sempurna anggota tubuhnya dengan potret, begitu pula memindahkan gambar dari film ke kertas, hukumnya haram dan tidak terdapat khilaf yang terhitung."

Namun dalam Konferensi Besar yang kemudian menggantikan Muktamar ke-22, persoalan tersebut dibahas kembali secara lebih mendalam. Hasil penelaahan ulang menunjukkan bahwa ternyata terdapat pendapat ulama yang membolehkan fotografi, sehingga klaim tidak adanya khilaf yang mu'tabar dalam masalah tersebut perlu ditinjau ulang.

Pendapat yang menjadi dasar keputusan lama dapat ditemukan dalam Majalah *Nahdlah al-Ishlahiyah*, yang menyatakan:

أحبُّ أن نجزم الجزمَ كلَّه أنَّ التصويرَ بالآلةِ (فوتوغراف) كالتصوير باليد تمامًا، فيحرم على المؤمن تسليطها للتصوير ويحرم عليه تمكين مسلطها لالتقاط صورته بها؛ لأنَّه بهذا التمكين يعين على فعلٍ محرَّمٍ غليظ.

"Saya berkeyakinan dengan penuh ketegasan bahwa fotografi sama persis dengan menggambar menggunakan tangan. Karena itu haram bagi seorang mukmin menggunakan alat tersebut untuk mengambil gambar dan haram pula membiarkan orang lain memotretnya, sebab hal itu berarti membantu terlaksananya perbuatan yang sangat diharamkan."

Kemudian ditegaskan lagi:

فَهِمتُ مما سبق أن الكلام في الصور له مقامان، المقام الأول في نفس التصوير، وهو حرام بالإجماع دون أي تفصيل، وقد علمتَ مما قدَّمنا أن التصوير بآلة التصوير كالتصوير باليد تمامًا لا فرق بينهما.

[39] Al-Ghazali, Asas al-Qiyas hlm. 28.

"Dapat dipahami dari penjelasan sebelumnya bahwa pembahasan mengenai gambar memiliki dua aspek. Aspek pertama adalah aktivitas membuat gambar itu sendiri, dan hal itu haram berdasarkan ijmak tanpa rincian apa pun. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, fotografi sama persis dengan menggambar menggunakan tangan dan tidak ada perbedaan sama sekali di antara keduanya."

Dari uraian tersebut tampak bahwa dasar utama pengharaman fotografi adalah anggapan bahwa fotografi merupakan bentuk yang identik dengan aktivitas menggambar (التصوير) yang disebutkan dalam hadis-hadis larangan tashwir. Dengan kata lain, fotografi diposisikan sebagai cabang dari hukum menggambar yang telah disepakati keharamannya.

Namun, pembahasan berikutnya dalam Majalah *Nur al-Islam* menunjukkan adanya pembacaan yang berbeda terhadap dalil-dalil tersebut. Disebutkan:

رأى بعض الفقهاء فيما حكاه الجويني جواز نقش الصور في الثوب، وأفتى آخرون بإباحة التصوير على الأرض ونحوها.

"Sebagian fuqaha, sebagaimana dinukil oleh Imam al-Juwaini, membolehkan gambar pada kain. Sebagian yang lain juga membolehkan menggambar di atas tanah dan semisalnya."

Al-Khaththabi bahkan mengatakan:

الذي يصور أشكال الحيوان دون أن يكون لها ظل أرجو أن لا يكون داخلاً في هذا الوعيد.

"Orang yang menggambar bentuk-bentuk hewan tanpa memiliki bentuk tiga dimensi (bayangan), saya berharap tidak termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis."

Mereka juga berdalil dengan sabda Nabi:

إلا رقمًا في ثوب

"Kecuali gambar yang terdapat pada kain."

Menurut para ulama, pengecualian ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk gambar masuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadis-hadis tashwir.

Berdasarkan pemahaman tersebut, Majalah *Nur al-Islam* menyimpulkan:

فمن يذهب إلى إباحة رقم الصور في الثوب يجيز التصوير بهذه الآلة من غير تردد، إذ لا تزيد على الرقم في الثوب والنقش على الورق بشيء تقتضي منعه.

"Ulama yang membolehkan gambar pada kain tanpa ragu akan membolehkan fotografi dengan alat ini, karena fotografi tidak lebih dari sekadar gambar pada kain atau gambar pada kertas yang tidak terdapat alasan syar'i untuk melarangnya."

Perdebatan ini menunjukkan bahwa perubahan keputusan bukan terjadi karena perubahan realitas masyarakat, melainkan karena perubahan cara memahami dalil dan mengidentifikasi hakikat objek hukum.

5. Perubahan Zaman

Salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi i'adah an-naẓar adalah perubahan zaman. Namun yang dimaksud dengan perubahan zaman di sini bukanlah berubahnya hukum syariat itu sendiri, melainkan berubahnya karakter dan bentuk permasalahan yang dihadapi manusia seiring perkembangan waktu. Dengan kata lain, muncul realitas baru (*ṣūrah ḥāditsah*) yang memiliki karakteristik berbeda dengan realitas yang pernah dibahas sebelumnya, sehingga memerlukan peninjauan ulang terhadap proses tashwīr, takyīf, maupun penerapan hukumnya.

Dalam hal ini, Imam as-Subki menjelaskan:

فَلَا نَقُولُ: إِنَّ الْأَحْكَامَ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ، بَلْ بِاخْتِلَافِ الصُّورَةِ الْحَادِثَةِ، فَإِذَا حَدَثَتْ صُورَةٌ عَلَى صِفَةٍ خَاصَّةٍ عَلَيْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِيهَا، فَقَدْ يَكُونُ مَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي الشَّرْعُ لَهُ حُكْمًا.

"Kita tidak mengatakan bahwa hukum-hukum berubah karena perubahan zaman, melainkan karena berubahnya bentuk peristiwa yang baru muncul. Apabila muncul suatu peristiwa dengan karakteristik tertentu, maka kita wajib menelitinya, karena bisa jadi keseluruhan unsur yang ada di dalamnya menuntut suatu hukum tertentu menurut syariat."[40]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa yang menjadi fokus perhatian fikih bukanlah perubahan waktu itu sendiri, melainkan perubahan pada realitas yang menjadi objek hukum. Oleh karena itu, setiap kali muncul fenomena baru yang belum dikenal sebelumnya, atau terjadi perubahan mendasar pada karakter suatu persoalan, maka diperlukan penelaahan ulang untuk memastikan kesesuaian antara hukum yang ditetapkan dengan realitas yang dihadapi.

Dalam konteks i'adah an-naẓar, perubahan realitas semacam ini dapat menjadi alasan yang sah untuk meninjau kembali keputusan yang telah ada. Sebab, boleh jadi keputusan terdahulu ditetapkan berdasarkan gambaran realitas tertentu, sementara realitas yang dihadapi saat ini telah mengalami perubahan sehingga memerlukan tashwīr, takyīf, dan taḥqīq al-manāṭ yang baru. Dengan demikian, i'adah an-naẓar berfungsi menjaga relevansi penerapan syariat tanpa mengubah prinsip-prinsip syariat itu sendiri.

Contoh kontemporer dari hal ini adalah perubahan bentuk transaksi ekonomi akibat digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan, mata uang kripto, atau berbagai bentuk hubungan sosial yang tidak dikenal pada masa sebelumnya. Yang ditinjau ulang bukan hukum syariatnya, melainkan karakter realitas baru yang menjadi tempat diterapkannya hukum tersebut.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud perubahan zaman adalah perubahan standar nilai yang berbeda pada setiap zaman. Ibn ʻAbidin menjelaskan:

إنَّ كثيرًا من الأحكام بَيَّنَها المجتهد على ما كان في زمانه، فتختلف باختلاف الزمان ... لحدوث ضرورة أَوْ لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف، والتيسير، ورفع الضرر، والفساد؛ لأجل بقاء النظام على أحسن إحكام "

"*Banyak hukum yg dijelaskan oleh para mujtahid didasarkan pada kondisi zaman mereka. Karena itu, hukum (sebagian hukum tertentu) tersebut dapat berubah seiring perubahan zaman, baik karena munculnya kebutuhan yang mendesak (dharurah) maupun karena rusaknya keadaan masyarakat pada suatu masa. Seandainya hukum itu tetap dipertahankan sebagaimana pada masa sebelumnya, niscaya akan menimbulkan kesulitan dan kemudaratan bagi manusia, serta bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat yang dibangun di atas prinsip keringanan, kemudahan, penghilangan mudarat, dan pencegahan kerusakan, demi menjaga keteraturan kehidupan dalam bentuk yang paling baik*"[41]

[4040] As-Subki, Fatawa Subki,vol II, hlm. 572.

[41] Ibn ʻAbidin, Nasyr al-Urf

Salah satu contoh bentuk perubahan hukum karena perubahan standar nilai dijelaskan oleh as-Shabuni sebagai berikut:

استدل العلماء من قوله تعالى: {إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ البينات ... } الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، أو تعليم العلوم الدينية، لأن الآية أمرت بإظهار العلم ونشره وعدم كتمانه، ولا يستحق الإنسان أجراً على عملٍ يلزمه أداؤه، كما لا يستحق الأجر على الصلاة، لأنها قربة وعبادةلذلك يحرم أخذ الأجرة على تعليمها.غير أن المتأخرين من العلماء لما رأوا تهاون الناس، وعدم اكتراثهم لأمر التعليم الديني، وانصرافهم إلى الاشتغال بمتاع الحياة الدنيا، ورأوا أن ذلك يصرف الناس عن أن يعنوا بتعلم كتاب الله، وسائر العلوم الدينية، فينعدم حفظة القرآن، وتضيع العلوم، لذلك أباحوا أخذ الأجور، بل زعم بعضهم أنه واجب للحفاظ على علوم الدين

"Para ulama berdalil dengan firman Allah Ta'ala:

(Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas...),bahwa tidak boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an maupun ilmu-ilmu agama. Sebab ayat tersebut memerintahkan untuk menampakkan ilmu, menyebarkannya, dan tidak menyembunyikannya. Seseorang tidak berhak memperoleh upah atas pekerjaan yang memang wajib ia lakukan, sebagaimana ia tidak berhak memperoleh upah atas shalat, karena shalat merupakan ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an dan ilmu agama dihukumi haram. Namun para ulama muta'akhkhirin (belakangan) ketika melihat manusia mulai meremehkan pendidikan agama, tidak lagi memberikan perhatian yang memadai terhadap pengajaran ilmu-ilmu agama, dan lebih sibuk mengejar kesenangan kehidupan dunia, serta melihat bahwa kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat enggan mempelajari Kitab Allah dan ilmu-ilmu agama lainnya, sehingga para penghafal Al-Qur'an berkurang dan ilmu-ilmu agama terancam hilang, maka mereka membolehkan pengambilan upah tersebut. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu menjadi wajib demi menjaga kelestarian ilmu-ilmu agama."[42]

6. Perubahan Kebiasaan (*'adah)*

Al-Qarrafi menjelaskan

أنَّ إجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد: خلافُ الإجماع وجهالةٌ في الدّين، بل كلُّ ما هو في الشريعةِ يَتْبَعُ العوائدَ: يَتغيَّرُ الحكمُ فيه عند تغيُّرِ العادةِ إلى ما تقتضيه العادَةُ المتجدِّدةُ (2)، وليس هذا تجديدًا للإجتهاد من المقلِّدين حتى يُشترَطَ فيه أهليةُ الإجتهاد، بل هذه قاعدةٌ اجتهدَ فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نَتْبَعُهم فيها من غيرِ استئنافِ اجتهاد.[43]

Terkait hal ini Ibn Ziyad berpendapat bahwa memberi nama seseorang dengan lafal abdun yang mudaf kepada lafal nabi atau nama ulama tertentu tidak lah haram. Pendapat ini sekilas berbeda dengan yang dijelaskan oleh al-Bajuri dalam Hasyiyahnya:

ويحرم التسمية بعبد الكعبة او عبد الحسن أو عبد علي وكذا كلما أضيف إليه بالعبودية لغير أسمائه تعالى لإيهامه التشريك.

"Haram memberi nama dengan abdul ka'bah, abdul hasn, abdu ali dan semua nama abdu yang digandengkan tidak kepada nama Allah karena mengesankan kesyirikan."[44]

[42] As-Shabuni, Rawa'I al-Bayan, vol I, hlm 151.

[43] Al-Qarafi, al-ihkam, hlm 218-219

[44] Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, vol. II, hlm.314.

Alasan kesyirikan yang dikemukakan al-Bajuri diangap oleh Ibn Ziyad tidak berlaku pada suatu komunitas tertentu yang menamai diri merka dengan nama abdun yang mudhaf kepada guru mereka dengan tujuan menghendaki kemulian gurunya tanpa tujuan ubudiyah. Ia menjelaskan:

التسمية بعبد النبي ونحوه لا تحرم الا اذا قصد حقيقة العبودية وقد غلب على الفقراء المنتسبين الى المشايخ من أهل الله تعالى ان يقول احدهم انا عبد سيد الشيخ ولا يريدون بذلك الا شرف النسبة لا حقيقة العبودية.

"penamaan dengan abdun nabi atau semisalnya tidak haram kecuali jika tujuannya adalah pengertian kehambaan sebenarnya. Telah menjadi hal lumrah bagi para murid tarekat yang menisbatkan diri kepada para syekh mereka, mereka melakukan itu semata menghendaki kemulian gurunya"[45]

E. PROSEDUR

1. I'adah Tashwīr al-Mas'alah (إعادة تصوير المسألة)

Tahapan pertama dalam i'adah an-naẓar adalah melakukan penggambaran ulang terhadap persoalan (reconstruction of the case). Tahap ini sangat fundamental, karena kesalahan dalam menggambarkan masalah akan berimplikasi pada kesalahan dalam melakukan takyif, istidlal, hingga penetapan hukum.

Imam al-Juwaini menegaskan:

وأول ما يجب به الافتتاح تصوير المسألة

"Hal pertama yang harus dilakukan dalam suatu pembahasan adalah menggambarkan persoalannya secara tepat."[46]

Ungkapan ini menunjukkan bahwa tashwīr al-mas'alah merupakan pintu masuk seluruh proses istinbath.

Senada dengan itu, Imam al-Ghazali dalam *al-Mankhūl* menjelaskan:

واما الصحابة لم يكثر بحثهم ولم يطل في الفروع نظرهم، وليس هذا منا طعنًا فيهم، فإنهم اشتغلوا بتقعيد القواعد وضبط أركان الشريعة وتأسيس كلياتها، ولم يصوروا المسائل تقديرًا، ولم يبوبوا ذلك الأبواب تطويلًا وتكثيرًا، ولكنهم كانوا يجيبون عن الوقائع.

"Para ulama terdahulu tidak banyak memperluas pembahasan cabang-cabang persoalan. Hal itu bukanlah kekurangan mereka, sebab perhatian mereka tertuju pada peletakan kaidah-kaidah dasar, peneguhan pilar-pilar syariat, dan pembangunan prinsip-prinsip umumnya. Mereka tidak banyak membuat persoalan-persoalan hipotetis, melainkan memberikan jawaban terhadap peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi."[47]

Keterangan ini memberikan pelajaran bahwa ijtihad selalu berangkat dari pemahaman yang benar terhadap realitas (waqi'), sehingga ketika realitas berubah, tashwīr terhadap persoalan juga perlu diperbarui.

Hal yang sama ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-'id:

وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة... وتحقيق ذلك أولًا يتوقف على تصوير المسألة.

"Perbedaan pendapat dalam masalah ini bertumpu pada persoalan ushul yang rumit, dan penyelesaiannya terlebih dahulu bergantung pada ketepatan dalam menggambarkan persoalan tersebut."[48]

---

[45] Abdurrahman Ba'alawi, ghayah talkhish fi fatawa ibn ziyad hlm. 254

[46] Al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, vol. II, hlm. 233

[47] Al-Ghazali, al-Mankhul, hlm. 607.

[48] Ibn Daqiq al-Id, Ihkam al-Ahkam, Vol I, hlm. 289

Oleh karena itu, sebelum dilakukan i'adah an-nadzar terhadap suatu keputusan Bahtsul Masail, harus dipastikan terlebih dahulu apakah terdapat alasan yang sah untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

Merujuk pada Perkum Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 16, alasan tersebut antara lain:

- adanya ketidaktepatan dalam memahami nash, dalil, atau realitas yang menjadi objek pembahasan;
- munculnya 'illat baru akibat perubahan 'urf, kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, i'adah tashwīr al-mas'alah merupakan proses menghadirkan kembali realitas secara utuh, sehingga keputusan yang akan ditinjau ulang benar-benar bertumpu pada fakta dan konteks yang aktual.

2. I'adah at-Takyif (إعادة التكييف)

Setelah tashwīr diperbarui, langkah berikutnya adalah i'adah at-takyīf, yaitu menempatkan kembali persoalan pada konstruksi fikih yang paling tepat.

Tidak jarang suatu persoalan yang dahulu dipahami dalam satu bab fikih, setelah dilakukan peninjauan ulang justru lebih tepat ditempatkan pada bab lain atau dianalisis dengan pendekatan yang berbeda.

Misalnya, suatu masalah yang sebelumnya dibahas secara waqi'iyyah (kasuistik) dapat ditinjau ulang secara maudhu'iyyah (tematik). Atau suatu persoalan yang sebelumnya dipandang sebagai persoalan ta'abbudi dapat dikaji kembali apakah sesungguhnya mengandung dimensi ta'aqquli yang membuka ruang ijtihad lebih luas.

Contohnya adalah pembahasan mengenai miqat makani, yang dapat ditinjau ulang bukan hanya sebagai persoalan lokasi keberangkatan haji, tetapi juga dari perspektif tujuan pensyariatannya.

Tahapan ini juga menjadi ruang untuk menentukan apakah penyelesaian masalah ditempuh melalui pendekatan qauli, ilhaqi, atau manhaji, sesuai dengan tradisi Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

3. I'adah Bayān al-Hukmi (إعادة بيان الحكم)

Setelah persoalan ditempatkan pada konstruksi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyusun kembali argumentasi hukum.

Pada tahap ini, mekanisme penetapan pandangan keagamaan tetap mengikuti prosedur Bahtsul Masail yang berlaku, baik melalui pendekatan qauli, ilhaqi, maupun manhaji.

Dengan demikian, i'adah an-naẓar bukanlah proses yang berdiri di luar metodologi NU, melainkan bagian dari mekanisme istinbath jama'i yang telah menjadi tradisi Nahdlatul Ulama.

4. I'tibar al-Ma'al (اعتبار المآل)

Keputusan fikih tidak hanya dinilai dari kekuatan dalilnya, tetapi juga dari konsekuensi penerapannya di tengah masyarakat. Karena itu, hasil i'adah an-nadzar perlu mempertimbangkan *ma'alat al-ahkam*, yaitu dampak sosial, ekonomi, politik, budaya, dan kemaslahatan umum yang ditimbulkan oleh suatu keputusan. Pertimbangan terhadap ma'āl merupakan implementasi dari maqashid al-syarī'ah, agar hukum tidak hanya benar secara teoritis, tetapi juga meng-hadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. As-Syathibi menjelaskan:

النَّظَرُ فِي مَآلَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا كَانَتِ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالِفَةً، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَحْكُمُ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْدَامِ أَوْ بِالْإِحْجَامِ إِلَّا بَعْدَ نَظَرِهِ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ.

"Memperhatikan dampak dan konsekuensi dari suatu perbuatan (ma'alat al-af'al)l) merupakan sesuatu yang diakui dan menjadi tujuan syariat, baik perbuatan tersebut pada asalnya sesuai dengan syariat maupun bertentangan dengannya. Hal itu karena seorang mujtahid tidak boleh menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf—baik berupa melakukan sesuatu maupun meninggalkannya—sebelum ia mempertimbangkan terlebih dahulu akibat dan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut."[49]

Terkait hal ini PBNU pernah memutuskan haramnya ekspor benih lobster dengan alasan dampak mafsadatnya di masa depan, bukan hanya mempertuimbangkan sah tidaknya jual beli tersebut.

5. Ishdar al-Hukm

Tahap terakhir adalah penetapan keputusan baru berdasarkan hasil i'adah an-nadzar.

Keputusan tersebut dapat berupa:

1. menguatkan keputusan sebelumnya karena dasar-dasarnya masih tetap relevan;
2. menyempurnakan dan mereinterpretasi keputusan sebelumnya;
3. menghadirkan alternatif pandangan hukum;
4. atau mengubah keputusan sebelumnya apabila terbukti terjadi perubahan kondisi manath, perubahan maslahat, atau kekeliruan dalam memahami nash maupun realitas.

Dengan kerangka demikian, i'adah an-naẓar bukanlah mekanisme untuk mengganti keputusan lama secara serampangan, melainkan proses ilmiah yang memastikan bahwa keputusan Bahtsul Masail senantiasa selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, perkembangan realitas, dan metodologi istinbath yang mu'tabar, tanpa melepaskan diri dari kesinambungan tradisi turats dan ijtihad jama'i Nahdlatul Ulama.

3. STATUS HUKUM HASIL I'ĀDAH AN-NAẒAR

Salah satu persoalan penting dalam pembahasan i'adah an-nadzar adalah kedudukan hukum hasil peninjauan ulang terhadap keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah keputusan baru membatalkan keputusan lama, ataukah keduanya tetap memiliki legitimasi pada konteks zamannya masing-masing?

Dalam hal ini, para ulama ushul memberikan penjelasan yang penting. Al-'Izz ibn Abdissalam menjelaskan:

لو حكم الحاكم في محل يسوغ فيه الاجتهاد، ثم تغير اجتهاده فحكم بما أدى إليه اجتهاده ثانيًا، كان ذلك قطعًا لما حكم به أولًا، ولا يبطل الأول بذلك، بل ينقطع من حين تغير الاجتهاد، ويبقى الأول على ما كان عليه.

"Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara yang memang menjadi ruang ijtihad, kemudian ijtihadnya berubah dan ia memutuskan dengan hasil ijtihad yang baru, maka keputusan yang baru itu menghentikan keberlakuan keputusan yang pertama. Namun keputusan yang pertama tidak menjadi batal karenanya. Keputusan pertama tetap sah sebagaimana adanya, hanya saja keberlakuannya berakhir sejak terjadinya perubahan ijtihad."[50]

[49] Al-muwadaqat, vol. V, hlm. 517

[50] Al-Izz Ibn Abdissalam, Qawa'idul Ahkam, vol. II, hlm. 48.

Beliau kemudian memberikan analogi:

كما تنتقض الطهارة عند الناقض وتنقطع أحكامها حينئذ، ولا تبطل فيما تقدم على الناقض.

"Sebagaimana wudhu menjadi batal ketika muncul pembatalnya. Keberlakuan hukum wudhu berakhir sejak saat itu, tetapi tidak membatalkan seluruh ibadah yang telah dilakukan sebelum datangnya pembatal tersebut."

Keterangan ini menunjukkan bahwa hasil i'adah an-nadzar tidak berfungsi membatalkan keputusan sebelumnya secara mutlak, melainkan menghentikan keberlakuannya sejak lahirnya ijtihad baru. Dengan demikian, keputusan lama tetap dipandang benar menurut ijtihad dan konteks yang melahirkannya, sedangkan keputusan baru menjadi pedoman untuk masa berikutnya.

Prinsip yang sama dapat ditemukan dalam penjelasan Imam an-Nawawi mengenai hubungan antara qaul qadim dan qaul jadid Imam asy-Syafi'i. Beliau mengatakan:

واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبًا للشافعي أو مرجوعًا عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نص في الجديد على خلافه.

"Ketahuilah bahwa ketika para ulama mengatakan suatu pendapat termasuk qaul qadim yang ditinggalkan, yang dimaksud adalah pendapat lama yang telah dinyatakan berbeda oleh Imam asy-Syafi'i dalam qaul jadid."

Kemudian beliau menegaskan:

أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه.

"Adapun qaul qadim yang tidak ditentang oleh qaul jadid atau tidak dibahas kembali dalam qaul jadid, maka ia tetap merupakan mazhab dan keyakinan Imam asy-Syafi'i, dapat diamalkan dan dijadikan fatwa, karena beliau tidak pernah mencabutnya."

Keterangan ini menunjukkan bahwa dalam tradisi mazhab sendiri, munculnya pendapat baru tidak serta merta menghapus seluruh pendapat lama. Yang ditinggalkan hanyalah pendapat yang memang telah digantikan oleh pendapat yang lebih akhir atau lebih kuat.

Atas dasar itu, hasil i'adah an-nadzar dapat memiliki beberapa kemungkinan status:

1. Ta'kid al-Qarar (تأكيد القرار), yaitu menguatkan kembali keputusan sebelumnya setelah dilakukan penelaahan ulang.
2. Tafsīr wa Tatwir al-Qarar (تفسير القرار وتطويره), yaitu menyempurnakan, memperjelas, atau memperluas interpretasi keputusan yang telah ada tanpa mengubah substansinya.
3. Tarjiḥ Qaul akhar (ترجيح قول آخر), yaitu memilih pendapat lain yang dinilai lebih kuat daripada pendapat yang sebelumnya dijadikan dasar keputusan.
4. Istibdāl al-Qarar (استبدال القرار), yaitu mengganti keputusan sebelumnya dengan keputusan baru karena ditemukan dalil yang lebih kuat, perubahan keadaan manath, perubahan keadaan, atau alasan syar'i lainnya.

Dengan demikian, hasil i'ādah an-naẓar pada prinsipnya tidak berfungsi membatalkan keputusan lama secara retroaktif, melainkan menjadi pedoman baru sejak ditetapkan. Adapun keputusan sebelumnya tetap dihormati sebagai hasil ijtihad yang sah pada konteks, data, dan pertimbangan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, i'ādah an-naẓar lebih tepat dipahami sebagai mekanisme keberlanjutan ijtihad (استمرار الاجتهاد) daripada mekanisme pembatalan ijtihad (إبطال الاجتهاد).

MATERI III
KONSEP NILAI-NILAI KEULAMAAN
NILAI-NILAI KEULAMAAN DALAM NAHDLATUL ULAMA

Terminologi Ulama dalam Khazanah Islam

Istilah ulama dalam al-Qur'an disebutkan secara jelas sebanyak dua kali, yaitu pada surah Fathir ayat 28 yang diawali dengan *alif lam* dan pada surah al-Syuara' ayat 197 yang diikuti kata *bani israil* setelah kata ulama'. Meski demikian, ada beberapa kata yang memiliki makna atau tafsiran yang senada dengan kata ulama, termasuk di antaranya adalah *ulu al-ilm, ulul albab, ulunnuha, ulul abshar, al-rasikhuna fil ilmi,* dan *ahl al-dzikr.*

Berdasarkan berbagai pandangan ulama klasik, terminologi *ulama* tersebut tidak dimaknai semata-mata sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama, tetapi sebagai sosok yang memenuhi seperangkat kualifikasi keilmuan, spiritual, dan moral yang membentuk otoritas keagamaannya. Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari dalam *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim* menegaskan bahwa ulama adalah mereka yang memiliki rasa takut *(khaysyah)* kepada Allah swt.

وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال الله تعالى: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي ربه، فاقتضت أيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله.[51]

Dari sisi kapasitas intelektual, al-Qurtubi menjelaskan bahwa ulama dalam hal ini dengan istilah *al-rasikhun fi al-'ilm* adalah orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu sehingga mampu memahami makna-makna Al-Qur'an secara lebih komprehensif, tidak terbatas pada makna lahiriah yang dapat dipahami oleh setiap orang yang menguasai bahasa Arab.

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، فَإِنَّ تَسْمِيَتَهُمْ رَاسِخِينَ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَكْثَرَ مِنَ الْمُحْكَمِ الَّذِي يَسْتَوِي فِي عِلْمِهِ جَمِيعُ مَنْ يفهم كلام العرب.[52]

Berbeda dengan al-Qurthubi, al-Thabari mendefinisikan *al-rasikhuna fi al-ilm* lebih kepada kapasitas moral yang seharusnya dimiliki oleh ulama termasuk di antaranya kejujuran, kemurnian hati, dan pengendalian diri. Hal ini sebagaimana tercermin dalam hadis sebagai berikut:

حدثنا أنس بن مالك وأبو أمامة وأبو الدرداء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الراسخين في العلم فقال: من برَّت يمينه، وصدق لسانه، واستقام به قلبه، وعفّ بطنه وفرجه، فذلك الراسخ في العلم.[53]

Ibn Hajar al-Asqalani menempatkan ulama sebagai *ahl al'ilm bi al-atsar,* yaitu orang-orang yang menguasai hadis beserta metodologi periwayatannya, memahami kaidah-kaidah agama, dan mendalami *furu'* dalam agama. Penjelasan ini merupakan syarh Ibn Hajar terhadap hadis من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .

وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم وقال القاضي عياض أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.

ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير.[54]

---

[51] Hadratus Syaikh Hasyim Asyari, *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim,* h.13.

[52] Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an,* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964), Juz 4, h. 18.

[53] Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an,* (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turats, t.th), juz 6, h. 207.

[54] Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari,* (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1390), juz 1, h. 165.

Sementara itu, al-Mubarakfuri ketika menjelaskan kata al-'alim dalam hadis فـضل العالم على العابد... menyebutkan bahwa maksud *al-'alim* dalam hadis tersebut adalah mereka yang memiliki kepakaran dalam ilmu-ilmu syariat serta mengimplementasikan kewajiban-kewajiban dalam beribadah.

(فضل العالم) بالعلوم الشرعية مع القيام بفرائض العبودية (على العابد) أي على المتجرد للعبادة بعد تحصيل قدر الفرض من العلوم.[55]

Berdasarkan keseluruhan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ulama adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu-ilmu syariat, memahami Al-Qur'an dan sunnah beserta metodologi pengkajiannya, memiliki rasa takut kepada Allah yang tercermin dalam ketakwaan dan pengamalan ilmu,

Khashais al-'Ulama' **di Nahdlatul Ulama**

1. Memiliki pemahaman ilmu agama yang mendalam (العالم العاكف على دينه). Kedalaman penguasaan ilmu agama merupakan fondasi utama yang membentuk otoritas seorang ulama sehingga dapat menjadi rujukan umat dalam menjawab masalah hukum dan lainnya. Khusus untuk ulama NU, penguasaan tersebut mencakup pemahaman yang mendalam terhadap akidah, fiqih, dan tasawwuf yang sesuai dengan Aswaja An-Nahdliyyah.

   فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام وهم حجة الله على العوام وقد يراقبهم الأخذ عنهم من حيث لا ينظرون ويقتدي بهداهم من لا يعلمون.[56]

2. Memiliki sanad keilmuan. Dalam tradisi keilmuan Islam, sanad bukan sekadar mata rantai transmisi ilmu dari guru kepada murid, tetapi juga menjamin otentisitas, validitas, dan keberlanjutan ajaran Islam. Melalui sanad, ilmu agama ditransmisikan secara bertanggung jawab dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga terpelihara dari penyimpangan maupun klaim keilmuan yang tidak memiliki legitimasi.

   يا أيها العلماء والسادة الأتقياء من أهل السنة والجماعة أهل مذاهب الأئمة الأربعة أنتم قد أخذتم العلوم ممن قبلكم ومن قبلكم ممن قبله بالتصال السند إليكم وتنطرون عمن تأخذون دينكم فأنتم خزنتها وأبوابها ولا تؤتوا البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبواتها سمي سارقا.[57]

3. Memahami realitas dan kebutuhan umat (العارف بحال قومه) . Seorang ulama tidak hanya dituntut memiliki kedalaman ilmu, tetapi juga kepekaan sosial terhadap realitas dan kebutuhan masyarakat. Pemahaman terhadap kondisi umat harus diwujudkan dalam sikap yang penuh empati, pelayanan, dan pengabdian. Dengan demikian, ilmu yang dimiliki tidak berhenti pada tataran teoritis, melainkan menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai syariat.

   والسادسة عشر أن يعامل الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الإستئثار والإنصاف وترك الإستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجة وبذل الجاه في الشفاعة والتلطف بالفقراء والتجنب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم.[58]

4. Memiliki sifat adil. Keadilan tidak hanya bermakna integritas moral dan kejujuran pribadi, tetapi juga objektivitas dalam memahami, menyampaikan, dan menetapkan hukum agama berdasarkan dalil yang benar. Dengan sifat adil, seorang ulama mampu menjaga kemurnian

[55] Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1431 H), juz 7, h. 379.
[56] Hadratus Syeikh Hasyim Asyari, *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim,* h. 62.
[57] Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, *Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyyah Nahdlatil 'Ulama*, h. 15.
[58] Hadratus Syaikh Hasyim Asyari, *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim,* h. 63.

ajaran Islam dari berbagai bentuk penyimpangan, baik berupa pemalsuan oleh orang-orang yang batil, penafsiran yang lahir dari kebodohan, maupun distorsi akibat sikap berlebihan dalam beragama.

وأنتم العدول الذين ينفون انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين بحجة رب العالمين التي جعلها على لسان من شاء من خلقه.[59]

5. Memiliki kegigihan dalam perjuangan dan pengabdian *(al-jihad),* termasuk di antaranya adalah gigih dalam menjaga persatuan umat karena seorang ulama pasti menyadari betapa besar manfaat yang didapatkan dari adanya persatuan dan kerukunan dari umat.

فإن الإجتماع والتعارف والاتحاد والتآلف هو الأمر الذي لا يجهل أحد منفعته.[60]

6. Produktif dalam mengembangkan dan mendokumentasikan ilmu pengetahuan bagi yang memiliki keahlian di bidang ini. Hal ini karena otoritas keilmuan tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas mengajar dan berdakwah, tetapi juga melalui tradisi intelektual berupa penulisan, penyusunan, dan pengembangan karya ilmiah yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

أن يشتغل بالتصنيف والجمع والتأليف إن كان أهلا لذلك.[61]

7. Mencintai tanah air. Salah satu *khashais* ulama NU adalah memiliki kecintaan terhadap tanah air yang merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial. *Hubb al-watan* diwujudkan melalui komitmen menjaga persatuan, keutuhan NKRI, keamanan, serta kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, cinta tanah air menjadi salah satu bentuk aktualisasi nilai keislaman dan pengabdian ulama kepada bangsa.
8. Berpegang pada *fikrah nahdhiyyah* sebagai kerangka berpikir dan orientasi kegamaan. Fikrah ini tercermin dalam sikap *tawassut, tawazun, i'tidal,* dan *tasamuh* sehingga ulama NU mampu menjaga kesinambungan tradisi yang berkembang di masyarakat sekaligus mampu merespon dinamika kehidupan dengan pendekatan yang moderat dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
9. Menjadikan *Mabadi' Khaira Ummah* sebagai landasan etis dalam menjalankan fungsi keulamaan. Nilai *al-sidq, al-amanah, al-ta'awun,* dan *al-istiqamah* membentuk integritas ulama sekaligus mengarahkan pengabdiannya pada terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan kehidupan sosial yang harmonis.

***Harakah al-'Ulama'* di Nahdlatul Ulama**

Dalam menjalankan fungsi keulamaannya, ulama tidak hanya berperan sebagai penjaga dan penyampai ajaran agama, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang mencakup berbagai dimensi kehidupan umat. Peran tersebut dapat dipetakan ke dalam beberapa bentuk gerakan, yaitu *harakah diniyah, harakah siyasiyah, harakah ijtima'iyyah, dan harakah iqtishadiyyah.*

1. Harakah diniyah, termasuk di dalamnya adalah *harakah 'ilmiyyah* dan *harakah da'wah.* Salah satu tugas utama ulama adalah menyampaikan ajaran agama kepada para khalayak. Harakah diniyah ini merupakan manifestasi tanggung jawab ulama dalam menjaga otoritas keagamaan melalui penguatan tradisi keilmuan dan penyebaran ajaran Islam secara berkesinambungan.

[59] Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, *Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyyah Nahdlatil 'Ulama*, h. 17.
[60] Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, *Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyyah Nahdlatil 'Ulama*, h. 17.
[61] Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*, h.69.

والرابع عشر أن يقوم بإظاهر السنن وإماتة البدع وبأمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المعروف شرعا المألوف عادة.[62]

إن هؤلاء العلماء والفقهاء والمجتهدين مهمتهم في الحياة حمل الدعوة الإسلامية إلى الناس، وبيان أحكام الله في كل مشكلة وحادثة.[63]

2. *Harakah siyasiyah*, seorang ulama seyogyanya memiliki kepekaan terhadap kondisi dan perkembangan politik negara. Dalam hal ini, ulama memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik melalui fungsi pengawasan, pemberian nasihat, serta penyampaian kritik yang konstruktif kepada pemerintah.

إن هؤلاء العلماء والفقهاء والمجتهدين مهمتهم في الحياة.....، ومن واجبتهم مناقشة الحكام ومحاسبة المسؤولين وإيداء النصيحة لهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.[64]

3. *Harakah ijtima'iyyah*. Selain menjalankan fungsi keagamaan, ulama juga memiliki tanggung jawab sosial sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, menumbuhkan solidaritas, membantu kelompok yang membutuhkan, serta menghadirkan kemaslahatan di tengah kehidupan umat. Dengan demikian, keberadaan ulama tidak hanya menjadi rujukan dalam persoalan hukum agama, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun relasi sosial yang dilandasi nilai-nilai akhlak, kasih sayang, dan kepedulian.

والسادسة عشر أن يعامل الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الإستئثار والإنصاف وترك الإستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجة وبذل الجاه في الشفاعة والتلطف بالفقراء والتجنب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم.[65]

4. Harakah *iqtishadiyah. Harakah* ini merupakan bentuk gerakan ulama NU dalam membangun kemandirian ekonomi umat dan mendorong kesejahteraan umat. Orientasi harakah ini memiliki akar historis dengan gerakan Nahdlatut Tujjar, yang sejak awal menjadi wadah penguatan aktivitas ekonomi dan kemandirian warga pesantren serta masyarakat. Dalam konteks keulamaan NU, gerakan ekonomi tidak tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan sikap etis ulama dalam mengelola kehidupan dunia secara proporsional. Hal ini sejalan dengan prinsip kesederhanaan, kecukupan, dan keteladanan terhadap *salaf al-shalih* sebagaimana tergambar dalam ungkapan al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* sebagai berikut:

بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك ويتشبه فيه بالسلف رحمهم الله تعالى ويميل إلى الاكتفاء بالأقل في جميع ذلك وكلما زاد إلى طرف القلة ميله ازداد من الله قربه.[66]

[62] Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*, h.69.

[63] Abdul Aziz al-Badri, *al-Islam baina al-'Ulama wa al-Hukkam,* (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th), h. 30.

[64] Abdul Aziz al-Badri, *al-Islam baina al-'Ulama wa al-Hukkam,* (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th), h. 30.

[65] Hadratus Syaikh Hasyim Asyari, *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim,* h. 63.

[66] Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1431), juz 1, h. 66.

PIAGAM NILAI-NILAI KEULAMAAN

NAHDLATUL ULAMA

MUKADIMAH

Nahdlatul Ulama lahir dari rahim perjuangan para ulama pesantren yang mewarisi sanad keilmuan, keluhuran adab, kemuliaan akhlak, khidmah, kekuatan ruhani, dan tanggung jawab sosial serta keagamaan. Para ulama pendiri Nahdlatul Ulama tidak hanya menjaga ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, tetapi juga membangun peradaban umat melalui pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat, perjuangan kebangsaan, dan pengabdian kemanusiaan. Dalam sejarahnya, Nahdlatul Ulama senantiasa memadukan kelestarian tradisi ulama salaf dengan kemampuan memberikan jawaban hukum atas berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Nahdlatul Ulama menjaga warisan pesantren, sanad, turats salaf, dan adab ulama, sekaligus terbuka terhadap pembaruan yang membawa kemaslahatan.

Keulamaan dalam Nahdlatul Ulama bukan sekadar status sosial, kedudukan struktural, penguasaan pengetahuan agama secara formal, atau kemampuan menyampaikan dalil. Keulamaan adalah kesatuan antara tazkiyah ruhaniyah, keluhuran adab, kemuliaan akhlak, ilmu yang rāsikh, sanad yang bersambung, manhaj istinbath yang tertib, khidmah yang ikhlas, keberpihakan kepada umat, tanggung jawab kebangsaan, serta kesanggupan menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di tengah perubahan zaman yang cepat, nilai-nilai keulamaan menghadapi tantangan serius. Disrupsi teknologi mengubah cara manusia memperoleh ilmu. Kompetisi politik dan ekonomi dapat menyeret jam'iyah ke dalam kepentingan sempit. Polarisasi sosial dapat melemahkan ukhuwah. Kompleksitas hukum, ekonomi, teknologi, lingkungan, kesehatan, geopolitik, dan kemanusiaan menuntut ulama yang tidak hanya luas ilmunya, tetapi juga kuat ruhaninya, jernih tashawwurnya, teliti tatsabbutnya, mendalam tahqiqnya, dan arif dalam menimbang maslahat serta mafsadah.

Karena itu, Muktamar Ketiga Puluh Lima Nahdlatul Ulama memandang perlu merumuskan Piagam Nilai-Nilai Keulamaan Nahdlatul Ulama sebagai pedoman bersama untuk menghidupkan kembali ruh keulamaan dalam jam'iyah, memperkuat ketahanan bangsa, dan membangun harmoni semesta.

BAB I : PENGERTIAN DAN BATASAN ISTILAH

Piagam ini bertumpu pada sejumlah pengertian pokok yang menjadi pijakan bersama seluruh warga dan perangkat Nahdlatul Ulama dalam memahami, menginternalisasikan, dan menerapkan nilai-nilai keulamaan. Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah diniyyah ijtima'iyyah yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah dan berkhidmah bagi agama, umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Nilai-nilai keulamaan adalah himpunan nilai ruhani, keilmuan, adab, akhlak, sosial, jam'iyah, kebangsaan, dan peradaban yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' ulama, asas al-tasyrī', qawa'id fiqhiyyah dan ushuliyyah, maqashid syariah, tradisi pesantren, Qanun Asasi, Khittah Nahdlatul Ulama 1926, Mabadi Khaira Ummah, serta pengalaman historis perjuangan Nahdlatul Ulama. Keulamaan Nahdlatul Ulama adalah kualitas kepribadian, keruhanian, akhlak dan adab, keilmuan, kepemimpinan, serta pengabdian yang mencerminkan tazkiyah, quwwah ruhaniyah, keluhuran adab, kemuliaan akhlak, ilmu yang rāsikh, sanad yang bersambung, manhaj

istinbath yang bertanggung jawab, khidmah yang ikhlas, amanah jam'iyah, serta keberpihakan kepada kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Akhlak adalah kualitas batin dan perilaku yang mencerminkan kejujuran, amanah, keadilan, kasih sayang, kesantunan, dan keluhuran budi dalam kehidupan pribadi, organisasi, dan masyarakat. Adab adalah tata krama ruhani, intelektual, sosial, dan jam'iyah yang mengatur cara seseorang berilmu, berbicara, berbeda pendapat, bermusyawarah, memimpin, dan berkhidmah. Ruhani adalah dimensi batin yang berhubungan dengan keikhlasan, taqwa, muraqabah, muhasabah, khasyatullah, dzikir, riyadhah, dan keterhubungan hati dengan Allah dalam khidmah. Keilmuan adalah dimensi penguasaan ilmu yang bersanad, rāsikh, metodologis, beradab, serta mampu membaca nash, turats salaf, maqashid, dan realitas secara bertanggung jawab.

Manhajiyah adalah ketertiban metode dalam memahami nash, turats, mazhab, maqashid, qawa'id, fakta, konteks, dan akibat hukum, terutama dalam proses penetapan hukum atau istinbath. Jam'iyah adalah dimensi organisasi yang mencakup khidmah, musyawarah, taat asas, tertib administrasi, ukhuwah, ittihad, dan kesetiaan kepada kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Quwwah ruhaniyah adalah kekuatan batin, kejernihan hati, kedalaman taqwa, khasyatullah, dzikir, riyadhah, serta keterhubungan batin dengan Allah yang melahirkan keikhlasan, keteguhan moral, wara', tawadhu', istiqamah, dan kepekaan spiritual sebagai fondasi kewibawaan ulama. Tashawwur almas'alah adalah pemahaman yang mencakup keseluruhan aspek suatu objek kajian, baik unsur-unsur pembentuknya, rincian yang terkait dengannya, maupun hubungan sebab dan akibat yang melatarbelakangi serta ditimbulkannya, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif, proporsional, dan tidak parsial sebelum ditetapkan hukumnya. Ahlul khibrah wa al-mutakhassisun adalah orang atau pihak yang memiliki pengalaman, keahlian praktis, spesialisasi keilmuan, dan kompetensi yang relevan untuk menjelaskan fakta, data, konteks, atau aspek teknis suatu masalah yang diperlukan dalam penetapan hukum dan pengambilan keputusan keagamaan. Kehati-hatian dalam istinbath adalah proses penetapan hukum yang memenuhi standar minimal berupa kejelasan tashawwur, validitas data melalui tatsabbut, kedalaman analisis melalui tahqiq, pelibatan ahli yang relevan, keterukuran maslahat dan mafsadah, serta pertimbangan akibat keputusan. Revitalisasi nilai-nilai keulamaan adalah ikhtiar sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk menghidupkan, menguatkan, menginternalisasikan, menerapkan, dan mewujudkan nilai-nilai keulamaan dalam kehidupan jam'iyah, kepemimpinan, kaderisasi, tata kelola, dakwah, pendidikan, ekonomi, kebangsaan, dan pergaulan global.

BAB II : LANDASAN FILOSOFIS

A. Hakikat Keulamaan

Keulamaan dalam Nahdlatul Ulama bertumpu pada manhaj kenabian, yaitu pembacaan ayat-ayat Allah, tazkiyah, pengajaran kitab dan hikmah, serta pengabdian kepada kemaslahatan umat. Karena itu, hakikat keulamaan tersusun secara bertahap dan saling menguatkan, dimulai dari kekuatan ruhani, tazkiyah, dan khasyatullah; berlanjut kepada keluhuran adab dan kemuliaan akhlak; kemudian ilmu yang rāsikh, sanad yang bersambung, dan tafaqquh fid-din; lalu manhaj istinbath yang tertib, hati-hati, dan bertanggung jawab; disusul kepemimpinan yang amanah dan khidmah yang ikhlas; hingga keberpihakan kepada kemaslahatan umat, bangsa, manusia, dan alam semesta.

Keulamaan bukan hanya penguasaan teks keagamaan, melainkan kemampuan menerjemahkan tuntunan agama ke dalam kehidupan nyata secara arif dan bijaksana, adil, berimbang, berorientasi pada kemaslahatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban.

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." QS. Al-Mujadilah [58]: 11

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama." QS. Fathir [35]: 28

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

"Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu." QS. Ar-Rahman [55]: 7 sampai 8

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

"Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi." HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad

Mengenai hal ini, Ibn Jama'ah berkata dalam Tadzkirat al-Sami':

(إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) (فاطر: ٢٨)، وقال تعالى: (أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) (البينة: ٧) إلى قوله: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) (البينة: ٨)، فَاقْتَضَتْ الْآيَتَانِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ اللهَ تَعَالَى وَأَنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ اللهَ تَعَالَى هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، فَيُنْتَجُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِيْنِ)، وَعَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ) وَحَسْبُكَ هَذِهِ الدَّرَجَةُ مَجْدًا وَفَخْرًا، وَبِهَذِهِ الرُّتْبَةِ شَرَفًا وَذِكْرًا، فَكَمَا لَا رُتْبَةَ فَوْقَ رُتْبَةِ النُّبُوَّةِ فَلَا شَرَفَ فَوْقَ شَرَفِ وَارِثِ تِلْكَ الرُّتْبَةِ.

Artinya: "*Di antara hamba-hamba-Nya, yang (benar-benar) takut kepada Allah hanyalah para ulama" (QS. Fathir: 28). Allah juga berfirman dalam ayat lain: "Sesungguhnya mereka itu adalah sebaik-baik makhluk" (QS. al-Bayyinah: 7), sampai firman-Nya: "Yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Tuhannya" (QS. al-Bayyinah: 8). Dua ayat ini menunjukkan bahwa para ulama adalah mereka yang khasyatullah (takut kepada Allah), dan orang-orang yang khasyatullah adalah sebaik-baik makhluk. Maka kesimpulannya bahwa para ulama adalah sebaik-baik makhluk. Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah pahamkan ia dalam urusan agama (fiqih)." Beliau saw juga bersabda: "Para ulama adalah pewaris para nabi." Cukuplah kedudukan ini sebagai kemuliaan dan kebanggaan, serta cukuplah martabat ini sebagai kehormatan dan sebutan. Sebagaimana tidak ada martabat di atas martabat kenabian, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris martabat tersebut.*"

Sekali lagi perlu ditegaskan, kedudukan mulia ini tak lain juga sebab tanggung jawab yang berat: yakni takut kepada Allah.

B. Manusia, Agama, dan Peradaban

Nahdlatul Ulama memandang manusia sebagai makhluk Allah yang mulia, pemegang amanah, khalifah di bumi, dan bagian dari kehidupan semesta yang harus dijaga kehormatannya. Karena itu, nilai-nilai keulamaan harus mendorong perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, harta, martabat manusia, lingkungan hidup, dan kemaslahatan umum, serta menjamin terpeliharanya kebutuhan darūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt sebagai tujuan pokok syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam." QS. Al-Isra' [17]: 70

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." QS. Al-Baqarah [2]: 30

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

"Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya." QS. Hud [11]: 61

Mengenai tujuan ini, Al-Ghazali memberi penjelasan yang sangat baik yang merangkum tujuan agama diturunkan:

وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ؛ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Artinya: "*Tujuan syariat dari penciptaan (manusia) itu ada lima: yaitu menjaga bagi mereka agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima pokok ini adalah maslahat, dan setiap hal yang menghilangkan pokok-pokok ini adalah mafsadat, dan menolaknya adalah maslahat.*"

C. Tradisi dan Pembaruan

Nahdlatul Ulama berpegang pada kaidah pemeliharaan warisan lama yang baik dan pengambilan hal baru yang lebih baik.

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

"Memelihara warisan lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik."

Nilai keulamaan menuntut Nahdlatul Ulama untuk menjaga tradisi pesantren, sanad ilmu, turats salaf, dan adab ulama, sekaligus terbuka terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, tata kelola modern, dan kerja sama peradaban yang membawa kemaslahatan. Mengenai inovasi-inovasi ini, Al-'Izz b. Abd al-Salam menjelaskan:

الْبِدْعَةُ فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: بِدْعَةٍ وَاجِبَةٍ، وَبِدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ، وَبِدْعَةٍ مَنْدُوبَةٍ، وَبِدْعَةٍ مَكْرُوهَةٍ، وَبِدْعَةٍ مُبَاحَةٍ، وَالطَّرِيقُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ: فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَنْدُوبِ فَهِيَ مَنْدُوبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَكْرُوهِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمُبَاحِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ.

Terjemahan: "*Bid'ah (inovasi) adalah melakukan sesuatu yang tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. Ia terbagi menjadi: bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah mandub (dianjurkan), bid'ah makruh, dan bid'ah mubah (boleh). Cara mengetahuinya adalah dengan menimbang hal baru itu pada kaidah-kaidah syariat: jika masuk dalam kaidah kewajiban, maka ia wajib; jika masuk dalam kaidah keharaman, maka ia haram; jika masuk dalam kaidah anjuran, maka ia mandub; jika masuk dalam kaidah kemakruhan, maka ia makruh; dan jika masuk dalam kaidah kebolehan, maka ia mubah.*"

BAB III : KONSEPTUALISASI NILAI-NILAI KEULAMAAN NU

A. Rumusan Umum

Nilai-nilai keulamaan Nahdlatul Ulama adalah nilai yang menuntun setiap pengurus, kader, dan warga Nahdlatul Ulama agar berilmu secara rāsikh dan bersanad; beragama secara lurus, beradab, dan berakhlak; berorganisasi secara amanah, taat asas, dan tertib jam'iyah; melakukan penetapan hukum atau istinbath dan pengambilan keputusan keagamaan secara hati-hati; bermasyarakat secara maslahat, adil, tasamuh, dan ishlah; berbangsa secara bertanggung jawab dan berkeadaban; serta berperadaban secara rahmah dan menjaga harmoni semesta.

B. Dimensi dan Susunan Nilai Keulamaan

Nilai-nilai keulamaan Nahdlatul Ulama tersusun dalam tujuh dimensi yang saling melengkapi dan seluruhnya berjumlah lima puluh satu nilai.

Dimensi ruhani dan spiritual menghimpun delapan nilai, yaitu ikhlas, taqwa, muraqabah, muhasabah, quwwah ruhaniyah, wara', tawadhu', dan istiqamah.

Dimensi keilmuan dan manhaj istinbath menghimpun sembilan nilai, yaitu ilmu bersanad, tafaqquh fid-din, manhajiyah, adab ilmu, tashawwur al-mas'alah, tatsabbut, tahqiq, tanggung jawab istinbath, serta pelibatan ahlul khibrah wa al-mutakhassisun.

Dimensi akhlak menghimpun delapan nilai, yaitu ash-shidqu, al-amanah, al-wafa bil 'ahdi, al-'adalah, at-ta'awun, kesantunan, kasih sayang atau rahmah, dan keluhuran budi.

Dimensi jam'iyah dan kepemimpinan menghimpun tujuh nilai, yaitu khidmah, musyawarah, tabayyun jam'iyah, taat asas dan tertib jam'iyah, ukhuwah, ittihad, serta kesetiaan kepada kemaslahatan Nahdlatul Ulama.

Dimensi sosial dan kemasyarakatan Aswaja An-Nahdliyah menghimpun enam nilai, yaitu tawassuth, i'tidal, tawazun, tasamuh, ishlah, serta penolakan terhadap ekstremisme dan kekerasan.

Dimensi kebangsaan menghimpun tujuh nilai, yaitu hubbul wathan, komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, komitmen terhadap Pancasila, komitmen terhadap konstitusi, persatuan nasional, demokrasi berkeadaban, dan keadilan sosial.

Dimensi peradaban dan kemanusiaan menghimpun enam nilai, yaitu rahmatan lil 'alamin, penghormatan terhadap martabat manusia, perdamaian, kelestarian lingkungan, dialog peradaban, dan harmoni semesta.

BAB IV : NILAI-NILAI DASAR KEULAMAAN NAHDLATUL ULAMA

A. Nilai Ruhani dan Spiritual

Ikhlas

Ikhlas adalah memurnikan seluruh khidmah kepada Allah, bukan menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai sarana mencari kedudukan, keuntungan pribadi, popularitas, kekuasaan, atau kepentingan sempit. Nilai ini menuntut pengurus, kader, dan warga Nahdlatul Ulama mendahulukan agama, jam'iyah, umat, dan bangsa; menghindari penyalahgunaan jabatan; serta menjaga kemurnian niat dalam setiap amanah organisasi.

Allah berfirman:

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ

"Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat)." QS. Al-Bayyinah [98]: 5

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ

"Wahai kaumku, aku tidak meminta kepadamu harta (sedikit pun sebagai imbalan) atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah" QS. Hud [11]: 29

Salah seorang ulama sufi terkemuka, Dzu al-Nun Al-Mishri mengatakan:

ثَلَاثٌ مِنْ عَلَامَاتِ ٱلإِخْلَاصِ: اِسْتِوَاءُ ٱلْمَدْحِ وَالذَّمِّ مِنَ الْعَامَةِ، وَنِسْيَانُ رُؤْيَةِ ٱلأَعْمَالِ فِي ٱلأَعْمَالِ، وَاقْتِضَاءُ ثَوَابِ الْعَمَلِ فِي ٱلآخِرَةِ

"*Ada tiga tanda keikhlasan: pujian dan celaan orang banyak sama saja baginya; melupakan keberadaan (peran) dirinya dalam amal-amal yang ia kerjakan; dan mengharapkan pahala amal itu di akhirat (bukan di dunia).*"

Taqwa

Taqwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan demikian takwa adalah kesadaran menjaga diri dari penyimpangan, kezaliman, dan pengkhianatan amanah di hadapan Allah. Nilai ini menuntut setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan organisasi diarahkan kepada ridha Allah dan kemaslahatan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." QS. Al-Hasyr [59]: 18

Muraqabah

Muraqabah adalah kesadaran batin bahwa Allah mengetahui seluruh niat, ucapan, keputusan, dan tindakan. Nilai ini menuntut kehati-hatian dalam penggunaan kewenangan, pengelolaan aset, data, informasi, dan sumber daya jam'iyah. Allah berfirman:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

"Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." QS. Qaf [50]: 16

Al-Ghazali menjelaskan definisi dan urgensinya dalam Ihya'-nya:

الْمُرَاقَبَةُ هِيَ مُلَاحَظَةُ الرَّقِيبِ وَانْصِرَافُ الْهَمِّ إِلَيْهِ، وَيُعْنَى بِهَا حَالَةٌ لِلْقَلْبِ يُثْمِرُهَا نَوْعٌ مِنَ الْمَعْرِفَةِ، وَتُثْمِرُ تِلْكَ الْحَالَةُ أَعْمَالًا فِي الْجَوَارِحِ وَفِي الْقَلْبِ. أَمَّا الْحَالَةُ فَهِيَ مُرَاعَاةُ الْقَلْبِ لِلرَّقِيبِ وَمُلَاحَظَتُهُ إِيَّاهُ، وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ فَهِيَ الْعِلْمُ بِأَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَى الضَّمَائِرِ، عَالِمٌ بِالسَّرَائِرِ، رَقِيبٌ عَلَى أَعْمَالِ الْعِبَادِ، قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، وَأَنَّ سِرَّ الْقَلْبِ فِي حَقِّهِ مَكْشُوفٌ كَمَا أَنَّ ظَاهِرَ الْبَشَرَةِ لِلْخَلْقِ مَكْ

Artinya: "*Muraqabah adalah kesadaran akan Sang Pengawas (Allah) dan tercurahnya perhatian kepada-Nya. Yang dimaksud dengannya adalah suatu keadaan hati yang lahir dari sejenis makrifat (pengetahuan), dan keadaan itu membuahkan amal-amal pada anggota tubuh dan pada hati. Adapun keadaan itu adalah kesadaran hati akan Sang Pengawas dan perhatiannya kepada-Nya; adapun makrifatnya adalah pengetahuan bahwa Allah mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati, mengetahui segala rahasia, mengawasi amal-amal hamba-Nya, mengurus setiap jiwa atas apa yang diperbuatnya, dan bahwa rahasia hati bagi-Nya tersingkap sebagaimana permukaan kulit tersingkap bagi manusia.*"

Muhasabah

Muhasabah adalah introspeksi dan evaluasi diri secara jujur untuk menjaga keikhlasan, integritas, dan konsistensi dalam khidmah. Nilai ini menuntut pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berani menilai diri, mengakui kekurangan, memperbaiki kesalahan, dan tidak terus-menerus membenarkan penyimpangan. Allah swt berfirman tentang pentingnya muhasabah:

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

"Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok" QS. Al-Hasyr [59]: 18

Mengenai kedudukan muhasabah, Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya' Ulum al-Din:

عَرَفَ أَرْبَابُ الْبَصَائِرِ مِنْ جُمْلَةِ الْعِبَادِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَهُمْ بِالْمِرْصَادِ، وَأَنَّهُمْ سَيُنَاقَشُونَ فِي الْحِسَابِ، وَيُطَالَبُونَ بِمَثَاقِيلِ الذَّرِّ مِنَ الْخَطَرَاتِ وَاللَّحَظَاتِ، وَتَحَقَّقُوا أَنَّهُ لَا يُنْجِيهِمْ مِنْ هَذِهِ الْأَخْطَارِ إِلَّا لُزُومُ الْمُحَاسَبَةِ، وَصِدْقُ الْمُرَاقَبَةِ، وَمُطَالَبَةُ النَّفْسِ فِي الْأَنْفَاسِ وَالْحَرَكَاتِ، وَمُحَاسَبَتُهَا فِي الْخَطَرَاتِ وَاللَّحَظَاتِ.

Artinya: "*Para pemilik mata hati (bashirah) di antara sekian hamba telah mengetahui bahwa Allah senantiasa mengintai (mengawasi) mereka, dan bahwa mereka akan diperiksa dalam hisab, akan*

dituntut atas seberat biji dzarrah dari lintasan pikiran dan kejapan mata. Mereka menyadari betul bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari bahaya-bahaya ini kecuali keharusan muhasabah (introspeksi diri), kejujuran dalam muraqabah, menuntut diri sendiri atas setiap tarikan napas dan gerakan, serta mengevaluasi diri atas setiap lintasan pikiran dan kejapan mata."

Quwwah Ruhaniyah

Quwwah ruhaniyah adalah kekuatan batin, kejernihan hati, kedalaman taqwa, khasyatullah, dzikir, riyadhah, serta keterhubungan batin dengan Allah yang melahirkan keteguhan moral, wara', tawadhu', istiqamah, dan kepekaan spiritual. Nilai ini menuntut ulama, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama agar tidak dikendalikan hawa nafsu, tekanan politik, godaan materi, konflik kepentingan, atau arus opini sesaat; serta memadukan ketegasan prinsip dengan kasih sayang dan hikmah. Kekuatan rohani semacam ini yang disebut Al-Ghazali sebagai inti diri manusia yang arif dan bijaksana:

وَالْمَعْنَى الثَّانِي هُوَ لَطِيفَةٌ رَبَّانِيَّةٌ رُوحَانِيَّةٌ لَهَا بِهَذَا الْقَلْبِ الْجِسْمَانِيِّ تَعَلُّقٌ، وَتِلْكَ اللَّطِيفَةُ هِيَ حَقِيقَةُ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ الْمُدْرِكُ الْعَالِمُ الْعَارِفُ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ الْمُخَاطَبُ وَالْمُعَاقَبُ وَالْمُعَاتَبُ وَالْمُطَالَبُ.

"*Adapun makna kedua (dari kata al-qalb) adalah suatu 'lathifah' (esensi halus) yang bersifat rabbaniyah dan ruhaniyah, yang memiliki keterkaitan dengan hati jasmani ini. Esensi halus itulah hakikat sejati manusia, ialah yang berperan untuk memahami, mengetahui, dan mengenal (Allah). Ia lah yang dikhitabi, dihukum, dicela, dan dituntut.*"

Wara'

Wara' adalah sikap menjaga diri dari segala tindakan yang berpotensi merusak marwah jam'iyah, termasuk perkara syubhat, *moral hazard*, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang. Nilai ini menuntut penghindaran konflik kepentingan, transparansi amanah, kehati-hatian menerima fasilitas, dukungan, atau kerja sama, serta perlindungan terhadap marwah ulama dan jam'iyah.

Wara' dan kaitannya dengan konflik kepentingan ini tercermin dalam sebuah hadis Nabi saw ketika beliau meminta Ibn al-Lutbiyyah untuk mengambil harta-harta zakat. Ibn al-Lutbiyyah disebut-sebut menyisihkan beberapa harta untuk dirinya sendiri dan bilang bahwa harta itu memang dihadiahkan kepadanya; ia tak mengambil zakat. Nabi saw lantas bersabda: "Apakah kalau ia tidur di rumah ayah dan ibunya ia tetap akan diberi hadiah?" Dari hadis ini, Ibn Hajar Al-'Asqalani menyatakan bahwa konflik kepentingan bisa membuat kehalalan sesuatu dipertanyakan. Ia menulis:

بَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحُقُوقَ الَّتِي عَمِلَ لِأَجْلِهَا هِيَ السَّبَبُ فِي الْإِهْدَاءِ لَهُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يُهْدَ لَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَحِلَّهَا بِمُجَرَّدِ كَوْنِهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ عَلَى طَرِيقِ الْهَدِيَّةِ.

Artinya: "*Rasulullah saw menjelaskan kepadanya bahwa jabatan yang untuknya ia bekerja itulah sebab munculnya hadiah tersebut, dan seandainya ia hanya berdiam di rumahnya, tidak akan ada seorang pun yang memberinya hadiah. Maka tidak sepatutnya baginya menghalalkan hadiah itu hanya karena datangnya dalam bentuk 'hadiah'.*"

Tawadhu'

Tawadhu' adalah kerendahan hati dalam ilmu, kepemimpinan, dan pergaulan. Sikap ini bukan kelemahan, melainkan keluhuran akhlak dan kesediaan menerima kebenaran. Nilai ini menuntut pengurus dan kader Nahdlatul Ulama menjauhi kesombongan struktural, klaim kebenaran sepihak, dan sikap merendahkan sesama warga jam'iyah. Kerendahhatian ini tercermin dalam prinsip yang pernah disampaikan Imam Syafi'i:

وَمَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إِلَّا وَلَمْ أُبَالِ، بَيَّنَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِي أَوْ لِسَانِهِ

Artinya: "*Tidaklah aku pernah berdebat dengan seseorang melainkan aku tidak peduli apakah Allah menampakkan kebenaran itu melalui lisanku ataukah melalui lisannya.*"

Sehingga puncak tertinggi dari tawadhu' adalah menerima pendapat segala orang.

Istiqamah

Istiqamah adalah keteguhan menjaga kebenaran, konsistensi menjalankan amanah, dan kesabaran dalam perjuangan. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama tidak mudah berubah arah karena tekanan politik, godaan kekuasaan, kepentingan ekonomi, atau arus opini sesaat. Rasulullah saw bersabda:

قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ

Artinya: "*Katakan aku beriman pada Allah lalu istikamahlah!*"

Keteguhan yang dimaksud hadis ini dijabarkan lebih lanjut oleh Ibn Daqiq al-'Id dalam Syarah Arba'in:

لَا تَأْتِي الِاسْتِقَامَةُ مَعَ شَيْءٍ مِنَ الِاعْوِجَاجِ فَإِنَّهَا ضِدُّهُ.

Artinya: "*Tidak disebut sebagai istikamah apabila terdapat inkonsistensi yang menjadi kebalikan dari istikamah.*"

B. Nilai Keilmuan dan Manhaj Istinbath

Ilmu Bersanad

Ilmu bersanad adalah kesinambungan dan keberkahan ilmu, adab, otentisitas, serta tanggung jawab transmisi dari guru kepada murid, dari ulama terdahulu kepada generasi penerus. Nilai ini menuntut penghormatan kepada guru dan ulama, ketekunan belajar, kehati-hatian berbicara atas nama agama, penolakan terhadap pendangkalan ilmu, serta penguatan pesantren, bahtsul masail, dan kajian turats salaf. Dalam Sahih Muslim dinyatakan bahwa Ibn al-Mubarak pernah mengatakan:

الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

Artinya: "*Sanad itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja bisa berkata apa saja yang ia kehendaki.*"

Syaikh Abdul Hayy Al-Kattani, seorang ulama ahli sanad terkemuka menukil pernyataan Ibn al-'Araby yang menyebutkan bahwa sanad adalah keistimewaan umat Muhammad saw:

واللهُ أَكْرَمَ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالْإِسْنَاد، لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهَا، فَاحْذَرُوا أَنْ تَسْلُكُوا مَسْلَكَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَتُحَدِّثُوا بِغَيْرِ إِسْنَادٍ

Artinya: "*Dan Allah telah memuliakan umat ini dengan (adanya) sanad. Dia tidak memberikannya kepada seorang pun selain umat ini. Maka waspadalah agar kalian tidak menempuh jalan Yahudi dan Nasrani, sehingga kalian berbicara (menyampaikan ajaran agama) tanpa sanad.*"

Tafaqquh fid-Din

Tafaqquh fid-din adalah kedalaman memahami agama secara utuh, tidak parsial, tidak tekstual secara sempit, dan tidak tercerabut dari maqashid, manhaj, dan realitas kehidupan. Nilai ini menuntut ulama, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama membaca persoalan umat dengan kedalaman ilmu, keluasan pandangan, dan tanggung jawab maslahat. Allah berfirman:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ

"*Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali*" QS: at-Taubah; 122

Nabi saw bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

Artinya: "*Barangsiapa yang dia dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan maka Allah akan pasti memahamkan dia kepada urusan agama*"

Manhajiyah

Manhajiyah adalah kemampuan berpikir metodologis secara bayani, qiyasi, dan maqashidi dalam memahami teks Al-Qur'an dan Hadis, turats ulama salaf, metodologi mazhab, khazanah keilmuan, serta realitas kontemporer. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama tidak sekadar mengulang jawaban lama, tetapi mengembangkan jawaban keagamaan yang bertanggung jawab terhadap persoalan baru.

Mengenai tanggung jawab *manhajiyyah* ini, Al-Syafi'i pernah menjelaskan secara detail:

لَا يَقِيسُ إِلَّا مَنْ جَمَعَ آلَاتِ الْقِيَاسِ، وَهِيَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ مِنْ كِتَابِ اللهِ: فَرْضِهِ، وَأَدَبِهِ، وَنَاسِخِهِ، وَمَنْسُوخِهِ، وَعَامِّهِ، وَخَاصِّهِ، وإِرْشَادِهِ، وَنَدْبِهِ، وَيَسْتَدِلُّ عَلَى مَا احْتَمَلَ التَّأْوِيلَ مِنْهُ بِسُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سُنَّةٌ وَلَا إِجْمَاعٌ فَالْقِيَاسُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْقِيَاسُ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْقِيَاسُ عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ السَّلَفِ الَّذِين لَا يُعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفٌ، وَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَوْجُهِ أَوْ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَيْهَا، وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقِيسَ حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا مَضَى قَبْلَهُ مِنَ السُّنَنِ، وَأَقَاوِيلِ السَّلَفِ، وَإِجْمَاعِ النَّاسِ وَاخْتِلَافِهِمْ، وَلِسَانِ الْعَرَبِ، وَيَكُونُ صَحِيحَ الْعَقْلِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُشْتَبِهِ، وَلَا يَعْجَلَ بِالْقَوْلِ وَلَا يَمْتَنِعَ مِنَ الِاسْتِمَاعِ مِمَّنْ خَالَفَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلَى غَفْلَةٍ رُبَّمَا كَانَتْ مِنهُ، أَوْ تَنْبِيهًا عَلَى فَضْلِ مَا اعْتَقَدَ مِنَ الصَّوَابِ، وَعَلَيْهِ بُلُوغُ عَامَّةِ جُهْدِهِ، وَالْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ حَتَى يَعْرِفَ مِنْ أَيْنَ قَالَ مَا يَقُوْلُهُ

Artinya: "*Tidak boleh berqiyas kecuali orang yang telah menghimpun perangkat-perangkat qiyas, yaitu: pengetahuan atas hukum-hukum dari Kitabullah; kewajibannya, tuntunan akhlaknya, ayat nasikh dan mansukh-nya, ayat 'amm (umum) dan khash (khusus)-nya, petunjuknya, serta anjurannya (nadb). Ia menggali dalil atas apa yang mengandung kemungkinan tafsir (ta'wil) di dalamnya dengan sunnah-sunnah Nabi saw dan dengan ijma' kaum muslimin. Maka jika tidak ada sunnah maupun ijma', (ia menggunakan) qiyas kepada Kitabullah. Jika tidak ada (dasar qiyas dari Al-Qur'an), maka qiyas kepada sunnah Rasulullah saw. Jika tidak ada (dasar qiyas dari sunnah), maka qiyas kepada pendapat mayoritas ulama salaf yang tidak diketahui adanya perselisihan di antara mereka. Dan tidak boleh berbicara dalam perkara ilmu kecuali dari jalan-jalan ini atau dari qiyas kepadanya. Tidak boleh bagi siapa pun untuk berqiyas sampai ia menjadi orang yang mengetahui apa yang telah berlalu sebelumnya; dari sunnah-sunnah, pendapat-pendapat ulama salaf, ijma' manusia dan perbedaan pendapat mereka, serta bahasa Arab. Dan hendaklah ia memiliki akal yang sehat, agar mampu membedakan antara perkara yang serupa (namun sebenarnya berbeda). Ia tidak boleh terburu-buru dalam berpendapat, dan tidak boleh menolak untuk mendengar dari orang yang berbeda pendapat dengannya karena dalam hal itu terdapat peringatan atas kelalaian yang mungkin ada padanya, atau (sebaliknya) peringatan yang menegaskan keunggulan kebenaran yang ia yakini. Dan wajib baginya untuk mencurahkan seluruh kesungguhannya, serta bersikap adil terhadap dirinya sendiri, sampai ia benar-benar mengetahui dari mana ia mengambil (dasar) apa yang ia katakan.*"

Adab Ilmu

Adab ilmu adalah kesantunan ruhani dan intelektual dalam mencari, menyampaikan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu. Nilai ini menuntut agar ilmu tidak dijadikan alat kesombongan, tidak disebarkan secara serampangan, tidak diputus dari sanad dan guru, menghormati perbedaan pendapat ulama, serta mengutamakan kejernihan dan tanggung jawab sebelum menyimpulkan.

Tashawwur al-Mas'alah

Tashawwur al-mas'alah adalah pemahaman komprehensif terhadap hakikat masalah, unsur-unsurnya, hubungan sebab dan akibatnya, konteksnya, objek dan subjek hukumnya, serta dampak maslahat dan mafsadahnya. Nilai ini menuntut setiap penetapan hukum dan keputusan strategis didahului pemahaman yang terang, tidak parsial, dan tidak tergesa-gesa.

Tatsabbut

Tatsabbut adalah ketelitian memastikan validitas data, fakta, informasi, dokumen, dan sumber berita. Nilai ini menuntut pengurus Nahdlatul Ulama tidak membangun sikap organisasi berdasarkan kabar yang belum terverifikasi, klaim sepihak, atau dokumen yang belum diperiksa.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ

Artinya *"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu)" QS. Al-Hujurat [49]: 6*

Tahqiq

Tahqiq adalah pendalaman ilmiah untuk memastikan ketepatan dalil, data, konteks, hubungan hukum, dan penerapan manhaj. Nilai ini menuntut proses analisis yang jernih, terukur, dan bertanggung jawab sebelum penetapan hukum atau keputusan keagamaan. Tanggung jawab tahqiq inilah yang terus ada hingga akhir zaman sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syathibi:

الِاجْتِهَادُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ حَتَّى يَنْقَطِعَ التَّكْلِيفُ، وَذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ، وَالثَّانِي يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ قَبْلَ فَنَاءِ الدُّنْيَا. فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ الِاجْتِهَادُ الْمُتَعَلِّقُ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ، وَهَذَا الَّذِي لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي قَبُولِهِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ بِمُدْرَكِهِ الشَّرْعِيِّ، لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي تَعْيِينِ

Artinya: "*Sesungguhnya para fuqaha memusatkan perhatian pada penetapan batas-batas dan hukum pada hal-hal partikular yang menjadi ladang perselisihan, perebutan kepentingan, dan pengambilan keuntungan pribadi, serta penerapan hukum sesuai tuntutan persoalan-persoalan baru yang muncul (ath-thawari' al-'aridhah). Seolah-olah mereka berdiri di hadapan manusia dalam ijtihad mereka di atas garis pemisah antara apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, agar orang-orang tidak melampaui batas dari yang halal kepada yang haram. Maka merekalah yang memverifikasi bagi manusia titik penerapan (manath) hukum-hukum ini sesuai dengan kasus-kasus khusus (yang dihadapi).*"

Tanggung Jawab Istinbath

Tanggung jawab istinbath adalah kesadaran bahwa penetapan hukum tidak boleh dijadikan alat tekanan, propaganda, pembenaran kepentingan, atau manuver politik. Nilai ini menuntut penetapan hukum dilakukan dengan ilmu, musyawarah, kehati-hatian, tashawwur yang terang, tatsabbut yang memadai, tahqiq yang mendalam, dan pertimbangan ma'alat.

Dalam nash disebutkan:

مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاه

"*Barangsiapa yang diberi fatwa tanpa (landasan) ilmu maka dosanya bagi orang yang memberi fatwa*" HR. Abu Dawud

Secara eksplisit hadis di atas menekankan bahwa istinbath harus didasarkan atas ilmu. Istinbath yang didasarkan atas tekanan, propaganda, dan lain-lainnya adalah istinbath yang tidak bertanggung jawab dan berdosa.

Pelibatan Ahlul Khibrah wa al-Mutakhassisun

Pelibatan ahlul khibrah wa al-mutakhassisun adalah keharusan meminta penjelasan ahli berpengalaman dan spesialis bidang dalam masalah kontemporer yang kompleks. Nilai ini menuntut forum keulamaan Nahdlatul Ulama melibatkan ahli ekonomi, kesehatan, lingkungan, teknologi digital, pertambangan, geopolitik, hukum negara, dan bidang lain yang relevan agar keputusan tidak keliru akibat salah memahami fakta. Al-Syathibi berkata berkata tentang kedudukan ahl al-khubrah:

أَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَزَالُوا يُقَلِّدُونَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ مَنْ لَيسَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ فِيمَا قَلَّدُوا فِيهِ خَاصَّةً، وَهُوَ التَّقْلِيدُ فِي تَحقِيقِ الْمَنَاطِ.

Artinya: "*Sesungguhnya para ulama senantiasa ber-taqlid (mengikuti/merujuk) dalam perkara-perkara ini kepada orang yang bukan dari kalangan fuqaha, dan mereka hanya mempertimbangkan ahli ma'rifah (pakar/ahli bidang tertentu) khusus dalam hal yang mereka rujuk itu. Inilah yang disebut taqlid dalam tahqiq al-manath*."

C. Nilai Akhlak

Ash-Shidqu

Ash-shidqu adalah kejujuran, kebenaran, dan kesesuaian antara perkataan, niat, tindakan, dan kenyataan. Nilai ini menuntut kejujuran dalam menyampaikan informasi dan penetapan hukum, tidak berdusta, tidak memanipulasi fakta, tidak menyebarkan fitnah, berani mengakui kesalahan, serta mendahulukan kebenaran di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Al-Junaid Al-Baghdadi seorang sufi terkemuka menjelaskan tentang hakikat kejujuran:

وَحَقِيقَةُ الصِّدْقِ أَنْ تَصْدُقَ فِي مَوْطِنٍ لَا يُنْجِيكَ مِنْهُ إِلَّا الْكَذِبُ.

Artinya "*Hakikat kejujuran adalah engkau tetap berkata jujur pada suatu keadaan yang tidak dapat menyelamatkanmu darinya kecuali dengan berdusta*."

Al-Amanah

Al-amanah adalah kemampuan menjaga kepercayaan, mandat, jabatan, aset, data, keputusan, dan martabat jam'iyah. Nilai ini menuntut tanggung jawab dalam menjalankan jabatan, pengelolaan aset dan sumber daya Nahdlatul Ulama secara benar, serta penolakan terhadap pengkhianatan mandat jam'iyah. Allah swt berfirman:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya*." *QS. An-Nisa' [4]: 58*

Mengenai definisi jelas dari amanah, Al-Qurthubi menjelaskan:

وَٱلْأَمَانَةُ تَعُمُّ جَمِيْعَ وَظَائِفِ الدِّيْنِ عَلَى الصَّحِيْحِ مِنَ ٱلْأَقْوَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ ٱلْجُمْهُوْرِ

Artinya: "*Menurut pendapat sahih dari sekian banyak pendapat, makna amanah itu menyeluruh terhadap seluruh kegiatan keagamaan. Ini pendapat jumhur*."

Al-Wafa bil 'Ahdi

Al-wafa bil 'ahdi adalah kesetiaan pada janji, akad, keputusan Muktamar, baiat, kesepakatan, dan mandat organisasi. Nilai ini menuntut kepatuhan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, keputusan organisasi yang sah, dan komitmen jam'iyah. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji" QS. Al-Ma'idah [5]: 1*

Al-'Adalah

Al-'adalah adalah keadilan dalam berpikir, bersikap, bertindak, memutuskan perkara, menyampaikan amanah, dan mengelola sumber daya. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama menjauhi kezaliman, diskriminasi, ketidakjujuran, keberpihakan yang tidak proporsional, serta penyalahgunaan kewenangan. Allah swt berfirman:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya: "*Adillah! Hal itu bisa mendekatkan kepada ketakwaan*" QS. Al-Ma'idah [5]: 8

Al-Suyuthi mendefinisikan al-'adalah sebagai berikut:

حَدَّها الأصحابُ: بأنَّها مَلَكةٌ، أي: هَيئةٌ راسِخةٌ في النَّفسِ تَمنَعُ مِنِ اقتِرافِ كَبيرةٍ أو صَغيرةٍ دالَّةٍ عَلى الخِسَّةِ أو مُباحٍ يُخِلُّ بالمُروءةِ، وهَذِه أحسَنُ عِبارةٍ في حَدِّها

Artinya "*Para ulama mazhab (al-ashab) mendefinisikannya sebagai: suatu malakah, yaitu suatu kondisi/watak yang telah mengakar kuat dalam jiwa, yang mencegah (pemiliknya) dari melakukan dosa besar, dosa kecil yang menunjukkan kehinaan (kerendahan moral), atau perbuatan mubah yang mencederai muru'ah (kehormatan diri/harga diri). Dan inilah rumusan definisi yang paling baik mengenainya.*"

At-Ta'awun

At-ta'awun adalah sikap saling menolong dalam kebaikan, ketakwaan, kemaslahatan, dan pembangunan kehidupan bersama. Nilai ini menuntut penguatan solidaritas antarwarga Nahdlatul Ulama, antarpesantren, antarlembaga, antarbadan otonom, antarstruktur jam'iyah, serta kerja sama lintas elemen bangsa dan kemanusiaan.

Allah swt berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya *"Bertolong-tolonglah kalian atas kebaikan dan takwa" QS. Al-Ma'idah [5]: 2*

Kesantunan

Kesantunan adalah keluhuran cara dalam berbicara, berdakwah, berbeda pendapat, mengkritik, bermusyawarah, dan berkomunikasi publik. Nilai ini menuntut setiap pengurus dan warga Nahdlatul Ulama menjauhi caci maki, penghinaan, provokasi, dan perilaku kekerasan dalam ruang nyata maupun digital.

Allah swt berfirman:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

Artinya *: "Dan ucapkanlah kepada manusia dengan baik" QS. Al-Baqarah [2]: 83*

Kasih Sayang atau Rahmah

Kasih sayang atau rahmah adalah kelembutan hati dalam memimpin, melayani, menetapkan keputusan, dan memperlakukan sesama makhluk Allah. Nilai ini menuntut agar keputusan organisasi tidak hanya tepat secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kemanusiaan, kemaslahatan, kelembutan, dan kepedulian terhadap pihak yang lemah. Al-Ghazali menyebutkan ciri-ciri para sufi di dalam Bidayat al-Hidayah:

وَاقْتَضَتِ الْحَال عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ هُمْ أَشْرَفُ خَلْقِ اللَّهِ النَظَرَ إِلَى كَافَّةِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ وَتَرْكَ الْمُمَارَاةِ.

Artinya "*Dan keadaan itu menuntut bagi orang-orang yang berakal (dzawil-albab) - yang mereka itu adalah sebaik-baik makhluk Allah - untuk memandang seluruh makhluk Allah Ta'ala dengan pandangan kasih sayang (rahmah), serta meninggalkan sikap suka berdebat/berbantah-bantahan (mumarah).*"

Keteladanan atas Keluhuran Budi

Keteladanan atas keluhuran budi pekerti adalah sikap dan perilaku baik yang dapat dilihat, ditiru, dan diamalkan oleh orang lain dalam kehidupan sehar-hari yang mencakup semua akhlak, adab dan keluhuran budi pekerti; seperti bersikap jujur, amanah, adil, wara', zuhud, kasih sayang kepada orang lain, menjaga syariat, akhlak, adab serta tata krama dalam kehidupan sosial sehari-hari, dan lain sebagainya. Nilai ini menuntut pengurus dan kader Nahdlatul Ulama menjadi teladan yang menjaga marwah ulama dan nama baik jam'iyah. Dalam Alquran Allah memuji Nabi bukan dari segi genealogis, fisik, atau pun capaian duniawi, melainkan akhlaknya:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya *"Dan sungguh engkah (Muhammad) di atas akhlak yang agung" QS. Al-Qalam [68]: 4*

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

Artinya *"Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah" QS. Al-Ahzab [33]: 21*

D. Nilai Jam'iyah dan Kepemimpinan

Khidmah

Khidmah adalah inti pengabdian Nahdlatul Ulama. Setiap jabatan, amanah, dan peran dalam jam'iyah adalah sarana melayani agama, umat, bangsa, dan kemanusiaan. Nilai ini menuntut kesediaan bekerja, pengorbanan, kesungguhan, kedisiplinan, pengabdian tanpa pamrih, dan orientasi kepada manfaat nyata bagi umat. Perlu pemahan utuh bagi setiap pengurus NU bahwa menjadi pengurus merupakan juga menjadi pelayan bagi warga NU.

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

Artinya "*Pemimpin suatu kaum berarti pelayan mereka.*"

Musyawarah

Musyawarah adalah jalan keulamaan dalam mengambil keputusan dengan keterbukaan, penghormatan terhadap pandangan berbeda, pencarian titik temu, dan orientasi maslahat. Nilai ini menuntut keputusan organisasi tidak didasarkan pada kehendak pribadi, tekanan kelompok, atau manuver kekuasaan, melainkan pada mekanisme jam'iyah yang sah dan beradab. Allah berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya *"Dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam (segala) perkara" QS. Ali 'Imran [3]: 159*

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

Artinya *"Dan perkara mereka itu (selalu) dimusyawarahkan diatara mereka" QS. Asy-Syura [42]: 38*

Tabayyun Jam'iyah

Tabayyun jam'iyah adalah proses klarifikasi dalam kehidupan organisasi sebelum mengambil sikap, menyebarkan informasi, menjatuhkan penilaian, atau menetapkan keputusan. Nilai ini menuntut setiap pengurus memberi ruang klarifikasi, mendengar pihak terkait, menghindari fitnah, dan menolak penghukuman prematur.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ

Artinya *"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu)" QS. Al-Hujurat [49]: 6*

Taat Asas dan Tertib Jam'iyah

Taat asas dan tertib jam'iyah adalah kepatuhan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, keputusan Muktamar, keputusan permusyawaratan yang sah, serta tata kelola organisasi. Nilai ini menuntut kepastian prosedur, kejelasan kewenangan, administrasi yang rapi, dokumentasi yang benar, dan penyelesaian perbedaan melalui jalur organisasi yang sah.

Dasar nash:

أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"*Dan taatlah (kalian) kepada Allah dan taalah kepada Rasul*" QS. An-Nisa' [4]: 59

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

"*Orang-orang muslim itu di atas syarat-syarat mereka*" HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi

Ukhuwah

Ukhuwah adalah persaudaraan sesama warga Nahdlatul Ulama, umat Islam, warga bangsa, dan umat manusia. Nilai ini menuntut penghindaran perpecahan, fitnah, adu domba, perilaku kekerasan, dan tindakan yang melemahkan persaudaraan jam'iyah.

Dasar nash:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara" QS. Al-Hujurat [49]: 10

Ittihad

Ittihad adalah kesatuan arah, solidaritas, dan kekompakan langkah dalam menjalankan khidmah jam'iyah. Nilai ini menuntut warga Nahdlatul Ulama menjaga persatuan, tidak merusak organisasi demi kepentingan faksi, dan mengutamakan keselamatan jam'iyah.

(فَصْلٌ) وَأَمَّا الْمُؤَاخَاةُ بِالْمَوَدَّةِ، وَهِيَ الرَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الْأُلْفَةِ؛ لِأَنَّهَا تُكْسِبُ بِصَادِقِ الْمَيْلِ إِخْلَاصًا وَمُصَافَاةً، وَيَحْدُثُ بِخُلُوصِ الْمُصَافَاةِ وَفَاءٌ وَمُحَامَاةٌ. وَهَذَا أَعْلَى مَرَاتِبِ الْأُلْفَةِ، وَلِذَلِكَ آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ؛ لِتَزِيدَ أُلْفَتُهُمْ، وَيَقْوَى تَظَافُرُهُمْ وَتَنَاصُ

"(Pasal) Adapun persaudaraan yang dibangun dengan kasih sayang (inilah sebab keempat dari sebab-sebab terjalinnya persatuan/kerukunan) karena kecenderungan hati yang tulus itu melahirkan keikhlasan dan kejernihan hubungan, dan dari kejernihan hubungan itu lahir kesetiaan dan saling membela. Inilah tingkatan tertinggi dari al-ulfah. Karena itulah Rasulullah mempersaudarakan (mu'akhah) para sahabatnya, agar persatuan mereka bertambah kuat, dan agar soliditas (tazhafur) serta saling menopang (tanashur) di antara mereka semakin kokoh."

Kesetiaan kepada Kemaslahatan Nahdlatul Ulama

Kesetiaan kepada kemaslahatan Nahdlatul Ulama adalah mendahulukan kepentingan jam'iyah di atas kepentingan pribadi, kelompok, jaringan, atau agenda sempit. Nilai ini menuntut seluruh kebijakan, sumber daya, aset, sistem, dan kerja sama diarahkan untuk kemaslahatan Nahdlatul Ulama, umat, dan bangsa.

Para ulama memberikan kaidah;

ٱلْمَدَارُ مِنْ سَائِرِ ٱلأَوْلِيَاءِ عَلَى ٱلْمَصْلَحَةِ

"*Tolok ukur tindakan pemegang amanah adalah kemaslahatan.*"

E. Nilai Sosial dan Kemasyarakatan Aswaja An-Nahdliyah

Tawassuth

Tawassuth adalah sikap tengah, moderat, dan proporsional yang menolak ekstremisme, fanatisme buta, kekerasan, dan ghuluw. Sikap berlebihan diukur dari kecenderungan melampaui

batas dalil, akhlak, maslahat, kepantasan, dan tertib jam'iyah, sehingga menimbulkan mafsadah bagi umat dan organisasi.

Dasar Nash:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Artinya "*Dan begitulah kami menjadikan kalian sebagai umat yang tengah (tawassut)*" QS. Al-Baqarah [2]: 143

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ

Artinya "*Dan jauhilah kalian dari sifat keterlaluan (ekstrim) dalam urusan agama*" HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad

I'tidal

I'tidal adalah sikap tegak lurus, adil, objektif, dan proporsional. Nilai ini menuntut keberanian menyatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah dengan cara yang bijaksana, santun, dan maslahat.

Dasar nash:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

Artinya "*Dan jika kalian berucap maka bersikaplah adil meskipun itu kepada kerabat"*QS. Al-An'am [6]: 152

Tawazun

Tawazun adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, tradisi dan pembaruan, nash dan akal, syariat dan realitas, individu dan jamaah, jam'iyah dan bangsa, serta dunia dan akhirat. Nilai ini menuntut keputusan yang proporsional, tidak jumud, tidak sembrono, dan selalu menimbang maslahat serta mafsadah.

Dasar nash:

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya "*Dan janganlah kamu lupa atas bagiamu di dunia*" QS. Al-Qashash [28]: 77

Tasamuh

Tasamuh adalah toleransi, kelapangan hati, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam batas-batas prinsip agama, akhlak, dan kemaslahatan. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama membangun kehidupan bersama yang damai, menghormati keragaman, dan menghindari kebencian atas dasar perbedaan agama, mazhab, suku, budaya, maupun pilihan politik.

Dasar nash:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya "*Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian bisa saling mengenal*" QS. Al-Hujurat [49]: 13

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

Artinya "*Tidakkah kami telah melapangkan dada (hati) kamu*" QS. Al-Insyirah [94]: 1

Ishlah

Ishlah adalah ikhtiar perbaikan, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik secara adil, bermartabat, dan maslahat. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan pemersatu, penengah, dan penyelesai masalah, bukan bagian dari sumber perpecahan.

Dasar nash:

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

Artinya "*Maka islahkanlah diantara keduanya*" QS. Al-Hujurat [49]: 9

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ

Artinya "*Maka barangsiapa yang bertaubat setelah kelalimannya dan ber-islah*" QS. Al-Ma'idah [5]: 39

Penolakan terhadap Ekstremisme dan Kekerasan

Penolakan terhadap ekstremisme dan kekerasan adalah sikap menolak penggunaan agama, organisasi, simbol, atau massa untuk membenarkan kebencian, pemaksaan, teror, dan perilaku kekerasan. Nilai ini menuntut dakwah Nahdlatul Ulama tetap meneduhkan, argumentatif, santun, dan menjaga keselamatan jiwa serta martabat manusia.

Dasar nash:

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya "*Maka janglah kalian melampau batas (bersikap ekstrim). Sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas*" QS. Al-Baqarah [2]: 190

F. Nilai Kebangsaan

Hubbul Wathan

Hubbul wathan adalah cinta tanah air sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama menjaga Indonesia, memperkuat persatuan nasional, dan merawat kehidupan kebangsaan sebagai bagian dari khidmah keulamaan.

Dasar nash:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

Artinya "*Wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman*" QS. Al-Baqarah [2]: 126

Komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesetiaan menjaga negara sebagai rumah bersama dan wadah kebangsaan yang sah. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama menolak disintegrasi, menjaga keutuhan bangsa, dan memperkuat persatuan warga negara di tengah keragaman.

Dasar nash:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya "*Tunaikanlah janji-janji*" QS. Al-Ma'idah [5]: 1

Komitmen terhadap Pancasila

Komitmen terhadap Pancasila adalah penerimaan terhadap dasar negara sebagai kesepakatan kebangsaan yang menjamin ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nilai ini menuntut pengamalan Pancasila secara substantif dalam kebijakan, pendidikan, dakwah, dan pelayanan masyarakat.

Dasar nash:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya "*Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan*". QS. An-Nahl [16]: 90

Komitmen terhadap Konstitusi

Komitmen terhadap konstitusi adalah penghormatan terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mekanisme hukum yang sah. Nilai ini menuntut perjuangan kemaslahatan dilakukan secara tertib, beradab, demokratis, dan konstitusional.

Dasar nash:

أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya "*Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang yang memegang urusan kalian (pemerintah)*". QS. An-Nisa' [4]: 59

Persatuan Nasional

Persatuan nasional adalah kesadaran menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman suku, agama, budaya, bahasa, daerah, dan pilihan politik. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama menjadi perekat sosial, peneduh ketegangan, dan penjaga ukhuwah wathaniyah.

Dasar nash:

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

Artinya "*Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang*". QS. Al-Anfal [8]: 46

Demokrasi Berkeadaban

Demokrasi berkeadaban adalah partisipasi publik yang menjunjung etika, musyawarah, kejujuran, persatuan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai ini menuntut penolakan terhadap politik uang, kebencian, hoaks, manipulasi, fitnah, dan pembelahan sosial.

Dasar nash:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

Artinya "*Dan urusan mereka itu dimusyawarahkan diantara mereka*". QS. Asy-Syura [42]: 38

Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah keberpihakan kepada kesejahteraan rakyat, pemerataan kesempatan, perlindungan kelompok lemah, dan distribusi sumber daya secara adil. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama membela akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, tanah, lingkungan yang baik, dan perlindungan sosial bagi masyarakat kecil.

Dasar nash:

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya "*Dan jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan*". QS. An-Nisa' [4]: 135

G. Nilai Peradaban dan Kemanusiaan

Rahmatan lil 'Alamin

Rahmatan lil 'alamin adalah misi Islam untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama melindungi martabat manusia, memperkuat perdamaian, membangun kerja sama lintas bangsa dan agama, menegakkan keadilan sosial, dan menjaga lingkungan hidup.

Dasar nash:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

Artinya "*Dan kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan sebagai rahmah bagi alam semesta*". QS. An-Anbiya' [21]: 107

Perkataan Imam Ghazali dalam Bidayat al-Hidayah yang sudah disebutkan di atas kiranya relevan untuk disebutkan lagi di sini:

وَاقْتَضَتِ الْحَالُ عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ هُمْ أَشْرَفُ خَلْقِ اللهِ النَظَرَ إِلَى كَافَّةِ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ وَتَرْكَ الْمُمَارَاةِ.

Artinya "*Dan keadaan itu menuntut bagi orang-orang yang berakal (dzawil-albab) - yang mereka itu adalah sebaik-baik makhluk Allah - untuk memandang seluruh makhluk Allah Ta'ala dengan pandangan kasih sayang (rahmah), serta meninggalkan sikap suka berdebat/berbantah-bantahan (mumarah).*"

Penghormatan terhadap Martabat Manusia

Penghormatan terhadap martabat manusia adalah kesadaran bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga dari penghinaan, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama membela kelompok rentan, korban ketidakadilan, dan mereka yang martabatnya terancam.

Mengenai merendahkan ini Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya':

الْآفَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: السُّخْرِيَةُ وَالِاسْتِهْزَاءُ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، قَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُن خَيْرًا مِنْهُنَّ) [الحجرات: 11]. وَمَعْنَى السُّخْرِيَةِ الِاسْتِهَانَةُ وَالتَّحْقِيرُ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ، عَلَى وَجْهٍ يُضْحك منه

"*Bahaya kesebelas: mengejek dan merendahkan (sukhriyah wal-istihza'), dan ini haram. Allah berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diejek) lebih baik dari mereka (yang mengejek)…' (QS. al-Hujurat: 11). Makna sukhriyah adalah meremehkan dan merendahkan, serta menunjuk-nunjuk aib dan kekurangan orang lain dengan cara yang membuatnya ditertawakan.*"

Perdamaian

Perdamaian adalah keadaan batin, sosial, politik, dan budaya yang memungkinkan manusia hidup aman, adil, dan bermartabat. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama mencegah konflik, menghentikan permusuhan, memperkuat rekonsiliasi, dan menolak penggunaan agama untuk mengobarkan kebencian.

Dasar nash:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

Artinya "*Jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya*". QS. Al-Anfal [8]: 61

Kelestarian Lingkungan

Kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab menjaga keseimbangan alam, lingkungan hidup, dan keberlanjutan kehidupan. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama menolak perusakan bumi, pencemaran, eksploitasi serakah, dan kebijakan yang mengancam generasi mendatang.

Allah swt berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya "*Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah (kondisi) baiknya*" QS. Al-A'raf [7]: 56

Dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Al-Mawardi menulis:

وَإِنْ حَمَوْا أَقَلَّهُ لِخَاصٍّ مِنَ النَّاسِ أَو لِأَغْنِيَائِهِمْ لَمْ يَجُزْ.

Artinya "*Apabila dilakukan monopoli terhadap tanah yang dilindungi - sedikit saja - untuk segelintir orang atau untuk orang-orang kaya saja, maka itu tidak diperbolehkan.*"

Dialog Peradaban

Dialog peradaban adalah perjumpaan antaragama, bangsa, budaya, dan pemikiran untuk saling memahami, bekerja sama, dan mencari jalan keselamatan bersama. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama menjadi jembatan antara tradisi Islam, hikmah Indonesia, dan kebutuhan dunia akan perdamaian.

Dasar nash:

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya "*Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian bisa saling mengenal (antara satu dengan yang lain)*". QS. Al-Hujurat [49]: 13

Harmoni Semesta

Harmoni semesta adalah kesadaran bahwa khidmah Nahdlatul Ulama tidak hanya untuk warga Nahdlatul Ulama, tetapi untuk umat, bangsa, manusia, dan alam raya. Nilai ini menuntut perluasan khidmah dari kemaslahatan jamaah menuju kemaslahatan bangsa, kemanusiaan, tata dunia yang adil, dan keberlanjutan semesta.

Dasar nash:

كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ

Artinya "*Masing-masing sangat patuh kepadanya*". QS. Shad [38]: 19

BAB V : ETOS KEPEMIMPINAN KEULAMAAN

A. Kepemimpinan sebagai Amanah

Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama adalah amanah, bukan kekuasaan pribadi. Setiap pemimpin Nahdlatul Ulama wajib menjaga marwah ulama, kehormatan jam'iyah, kepentingan umat, dan kemaslahatan bangsa.

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Artinya "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya*". QS. An-Nisa' [4]: 58

B. Kriteria Kepemimpinan Nahdlatul Ulama

Pemimpin Nahdlatul Ulama wajib mencerminkan quwwah ruhaniyah, keluhuran adab, kemuliaan akhlak, ilmu yang rāsikh, sanad yang bersambung, keikhlasan khidmah, kejujuran, amanah, kemampuan bermusyawarah, kesediaan mendengar nasihat ulama, keberanian menegakkan keadilan, kejernihan tashawwur dalam memahami masalah, kehati-hatian dalam membuat keputusan, ketaatan pada aturan jam'iyah, dan orientasi kepada kemaslahatan.

وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

Artinya "*Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang*". QS. Al-Anfal [8]: 46

C. Larangan Etis

Setiap pemimpin, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama wajib menghindari penyalah-gunaan jabatan, konflik kepentingan, manipulasi keputusan organisasi, penggunaan Nahdlatul Ulama untuk kepentingan pribadi atau kelompok sempit, serta penetapan hukum atau sikap keagamaan tanpa ilmu, tanpa tashawwur yang memadai, tanpa tatsabbut, dan tanpa tahqiq. Setiap pemimpin, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama juga wajib menghindari fitnah, provokasi, adu domba, perilaku kekerasan, tindakan yang merusak marwah ulama dan jam'iyah, serta pengabaian terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun keputusan organisasi yang sah. Hal semacam i i tergolong sebagai khawarim al-muru'ah (larangan etis) yang bisa mencerabut sifat 'adalah seseorang, sehingga ucapannya dalam bidang ilmu tidak lagi diterima. Mengenai khawarim al-muru'ah ini Ibn al-Sholah mengatakan:

خَوَارِمُ الْمُرُوءَةِ يَعْنِي مَا اعْتَادَ النَّاسُ فِعْلَهُ مِمَّا تَوَاطَئُوا عَلَيْهِ وَتَعَارَفُوا عَلَيْهِ، بِحَيْثُ يُعَدُّ مَنْ خَرَجَ عَلَى فِعْلِهِمْ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ شَاذًّا بَيْنَهُمْ، فَمِثْلُ هَذَا يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ.

Artinya "*Khawarim al-muru'ah adalah tindakan yang menyimpang dari kebiasaan yang telah disepakati dan dikenal umum oleh masyarakat, sehingga orang yang keluar dari kebiasaan dan kesepakatan mereka dalam perkara ini dianggap ganjil/menyimpang di tengah mereka. Perbuatan semacam inilah yang merusak marwah.*"

BAB VI : PENERAPAN NILAI-NILAI KEULAMAAN

A. Prinsip Penerapan

Nilai-nilai keulamaan Nahdlatul Ulama harus diterapkan dan diwujudkan dalam tata kelola organisasi, kaderisasi, pendidikan dan pesantren, bahtsul masail dan pengembangan keilmuan, dakwah dan komunikasi publik, ekonomi dan kemandirian jam'iyah, advokasi sosial dan pelayanan umat, kebangsaan dan kemanusiaan, transformasi digital, serta kerja sama global dan harmoni semesta.

B. Tata Kelola Organisasi

Dalam tata kelola organisasi, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui kepatuhan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perkumpulan, musyawarah yang sah, kejelasan kewenangan Syuriyah dan Tanfidziyah, transparansi dan akuntabilitas, pencegahan konflik kepentingan, serta penyelesaian konflik melalui tabayyun, ishlah, dan tertib organisasi. Indikatornya antara lain keputusan terdokumentasi, prosedur dipatuhi, laporan pertanggung-jawaban tersedia, kewenangan tidak disalahgunakan, dan konflik diselesaikan melalui mekanisme jam'iyah.

C. Kaderisasi

Dalam kaderisasi, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui tahapan pembentukan ruhani, penguatan ilmu bersanad, pembinaan adab dan akhlak, peneguhan amanah dan disiplin, penumbuhan jiwa khidmah, serta perluasan wawasan kebangsaan, kemanusiaan, dan peradaban. Kaderisasi juga harus memperhatikan pemetaan kebutuhan kader dan distribusi kader ke wilayah yang membutuhkan.

D. Pendidikan dan Pesantren

Dalam pendidikan dan pesantren, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui penguatan pesantren sebagai ruh, basis kultural, pusat transmisi ilmu, penjaga sanad, pembentuk karakter, pelahir kader ulama, dan tempat internalisasi nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Pesantren perlu

memperkuat tradisi ngaji, adab kepada guru, riyadhah, khidmah, kajian turats salaf, ilmu pengetahuan, teknologi, dan wawasan kebangsaan secara seimbang.

E. Bahtsul Masail dan Pengembangan Keilmuan

Dalam bahtsul masail, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui penguatan metode qauli, ilhaqi, dan manhaji secara proporsional, penguatan tashawwur al-mas'alah, takyif fiqhi, istinbath al-hukm, tahqiq al-manath, i'tibar al-ma'alat, serta pelibatan ahlul khibrah wa al-mutakhassisun dalam masalah kontemporer yang kompleks. Keputusan hukum tidak boleh ditetapkan apabila fakta utama, objek hukum, atau dampak maslahat dan mafsadah belum cukup terang.

F. Dakwah dan Komunikasi Publik

Dalam dakwah dan komunikasi publik, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui dakwah bil hikmah wal mau'izhah hasanah, komunikasi yang teduh, tabayyun, penolakan terhadap hoaks, fitnah, dan kebencian, serta penguatan etika dan tanggung jawab dalam bermedia digital.

G. Ekonomi dan Kemandirian Jam'iyah

Dalam bidang ekonomi, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui penguatan kemandirian ekonomi umat dan jam'iyah, penerapan prinsip shidq, amanah, wafa bil 'ahdi, ta'awun, 'adalah, dan istiqamah, serta pencegahan moral hazard, penyalahgunaan aset, dan konflik kepentingan. Indikatornya meliputi transparansi kerja sama, akuntabilitas aset, kejelasan manfaat bagi jam'iyah, dan perlindungan terhadap hak umat.

H. Advokasi Sosial dan Pelayanan Umat

Dalam pelayanan umat, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui perlindungan terhadap kelompok lemah dan rentan, penguatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, advokasi keadilan sosial, solidaritas kebencanaan, dan pelayanan umat tanpa diskriminasi. Indikatornya meliputi adanya program nyata bagi mustadh'afin, layanan sosial yang merata, pembelaan korban ketidakadilan, dan penguatan kapasitas masyarakat kecil.

I. Kebangsaan

Dalam kehidupan kebangsaan, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui penguatan persatuan nasional, pengamalan Pancasila secara substantif, demokrasi yang beradab, penolakan ekstremisme dan politik kebencian, penguatan keadilan sosial, serta partisipasi aktif Nahdlatul Ulama dalam menjaga ketahanan bangsa. Indikatornya meliputi sikap kebangsaan yang konsisten, kontribusi dalam penyelesaian masalah bangsa, dan peran Nahdlatul Ulama sebagai perekat sosial.

J. Harmoni Semesta

Dalam pergaulan global dan kemanusiaan, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui kerja sama lintas agama dan bangsa untuk perdamaian, dialog peradaban, pembelaan terhadap martabat manusia, perlindungan lingkungan hidup, tata dunia yang adil, dan pengembangan Islam rahmatan lil 'alamin. Indikatornya meliputi partisipasi Nahdlatul Ulama dalam agenda perdamaian, kemanusiaan, lingkungan, dan dialog peradaban yang bermartabat.

BAB VII : INDIKATOR REVITALISASI NILAI KEULAMAAN

A. Indikator Umum

Revitalisasi nilai-nilai keulamaan dipandang berhasil apabila tampak meningkatnya kedisiplinan jam'iyah, menguatnya akhlak dan adab pengurus, menguatnya quwwah ruhaniyah dalam

kepemimpinan dan khidmah, meningkatnya kualitas musyawarah, serta meningkatnya kehati-hatian dalam istinbath dan keputusan keagamaan. Keberhasilan itu juga tampak pada menguatnya harmoni, kohesi, persatuan, dan soliditas jam'iyah, menguatnya kaderisasi dan distribusi kader, meningkatnya kepercayaan jamaah, membaiknya tata kelola organisasi, dan meningkatnya kontribusi Nahdlatul Ulama bagi bangsa serta kemanusiaan.

B. Indikator Kelembagaan

Pada tataran kelembagaan, revitalisasi nilai keulamaan ditandai oleh tersedianya pedoman implementasi nilai keulamaan, terintegrasinya nilai keulamaan dalam kurikulum kaderisasi, adanya kode etik pengurus Nahdlatul Ulama, adanya mekanisme pencegahan konflik kepentingan, serta adanya forum tabayyun dan ishlah dalam penyelesaian konflik. Penandanya juga meliputi adanya pedoman tashawwur al-mas'alah dalam bahtsul masail, adanya mekanisme pelibatan ahlul khibrah wa al-mutakhassisun, adanya laporan pertanggungjawaban organisasi yang tertib, adanya penguatan sistem bahtsul masail, adanya penguatan etika dan tanggung jawab bermedia digital, serta adanya pemetaan kebutuhan kader dan mekanisme distribusi kader ke wilayah yang membutuhkan.

C. Indikator Personal Pengurus dan Kader

Pada tataran personal, nilai keulamaan tampak pada niat khidmah yang ikhlas, quwwah ruhaniyah dan khasyatullah, kejujuran dalam perkataan, tindakan, dan penetapan hukum, kesetiaan kepada aturan jam'iyah, serta kesediaan bermusyawarah dan bertabayyun. Nilai itu juga tampak pada penghormatan kepada ulama dan guru, kemampuan menjaga adab dalam perbedaan, kehati-hatian dalam menyampaikan pandangan keagamaan, keberanian menolak penyimpangan, dan komitmen terhadap kemaslahatan umat serta bangsa.

BAB VIII : PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT

A. Tanggung Jawab Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berkewajiban menjabarkan Piagam ini ke dalam pedoman implementasi, kurikulum kaderisasi, tata kelola organisasi, kode etik kepengurusan, penguatan bahtsul masail, pendidikan pesantren, dakwah digital, pengelolaan ekonomi jam'iyah, dan program-program strategis Nahdlatul Ulama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga berkewajiban menyusun pedoman tashawwur al-mas'alah, pelibatan ahlul khibrah wa al-mutakhassisun, serta standar, indikator, dan parameter kehati-hatian dalam penetapan hukum atau istinbath, bahtsul masail, dan pengambilan keputusan keagamaan Nahdlatul Ulama.

Penjabaran tersebut diwujudkan dalam bentuk Pedoman Implementasi Piagam Nilai-Nilai Keulamaan Nahdlatul Ulama, Kode Etik Pengurus Nahdlatul Ulama, Kurikulum Revitalisasi Nilai Keulamaan dalam kaderisasi, Pedoman Penguatan Quwwah Ruhaniyah dalam Kaderisasi dan Kepemimpinan Nahdlatul Ulama, Pedoman Tashawwur al-Mas'alah dan Pelibatan Ahlul Khibrah wa al-Mutakhassisun dalam Bahtsul Masail, Pedoman Etika dan Tanggung Jawab Bermedia Digital, Pedoman Pencegahan Konflik Kepentingan dan Moral Hazard, Mekanisme Tabayyun, Ishlah, dan Resolusi Konflik Jam'iyah, serta pedoman pemetaan kebutuhan kader, program kaderisasi khusus, pendampingan ranting, penugasan kader, dan distribusi kader serta ulama Nahdlatul Ulama ke wilayah yang membutuhkan.

B. Tanggung Jawab Struktur Nahdlatul Ulama

Segenap jajaran struktural Nahdlatul Ulama mulai dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting,

hingga Pengurus Anak Ranting, serta lembaga, badan otonom, dan perangkat Nahdlatul Ulama lainnya bertanggung jawab menginternalisasikan dan menerapkan Piagam ini sesuai tingkat, fungsi, dan kewenangannya. Seluruh tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama berkewajiban menginternalisasikan, mensosialisasikan, menerapkan, dan mewujudkan nilai-nilai keulamaan dalam kehidupan organisasi, pelayanan umat, pembangunan bangsa, dan pergaulan kemanusiaan global.

C. Pengarusutamaan Nilai Keulamaan

Piagam ini harus menjadi rujukan dalam penyusunan program kerja Nahdlatul Ulama, kaderisasi dan distribusi kader ke wilayah yang membutuhkan, pengangkatan dan evaluasi pengurus, penyusunan kebijakan organisasi, kerja sama dengan pihak luar, pengelolaan aset dan usaha, komunikasi publik, penyelesaian konflik, pengembangan dakwah dan pendidikan, serta pengambilan keputusan keagamaan dan bahtsul masail.

D. Evaluasi Berkala

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Piagam Nilai-Nilai Keulamaan Nahdlatul Ulama dan melaporkannya dalam forum permusyawaratan Nahdlatul Ulama sesuai ketentuan organisasi.

BAB IX : PENUTUP

Piagam Nilai-Nilai Keulamaan Nahdlatul Ulama ini ditetapkan sebagai pedoman akhlak, adab, ruhani, keilmuan, manhajiyah, dan jam'iyah bagi seluruh struktur, perangkat, pengurus, kader, lembaga, badan otonom, pesantren, dan warga Nahdlatul Ulama dalam menjalankan khidmah jam'iyah.

Piagam ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, atau keputusan-keputusan resmi Nahdlatul Ulama, melainkan menjadi ruh, orientasi, dan pedoman nilai dalam pelaksanaan seluruh ketentuan organisasi.

Dengan Piagam ini, Nahdlatul Ulama meneguhkan kembali dirinya sebagai jam'iyah ulama, jam'iyah khidmah, jam'iyah kebangsaan, dan jam'iyah peradaban yang berakar pada pesantren, berpegang pada Ahlussunnah wal Jama'ah, berkhidmah untuk Indonesia, dan menghadirkan rahmat bagi semesta.

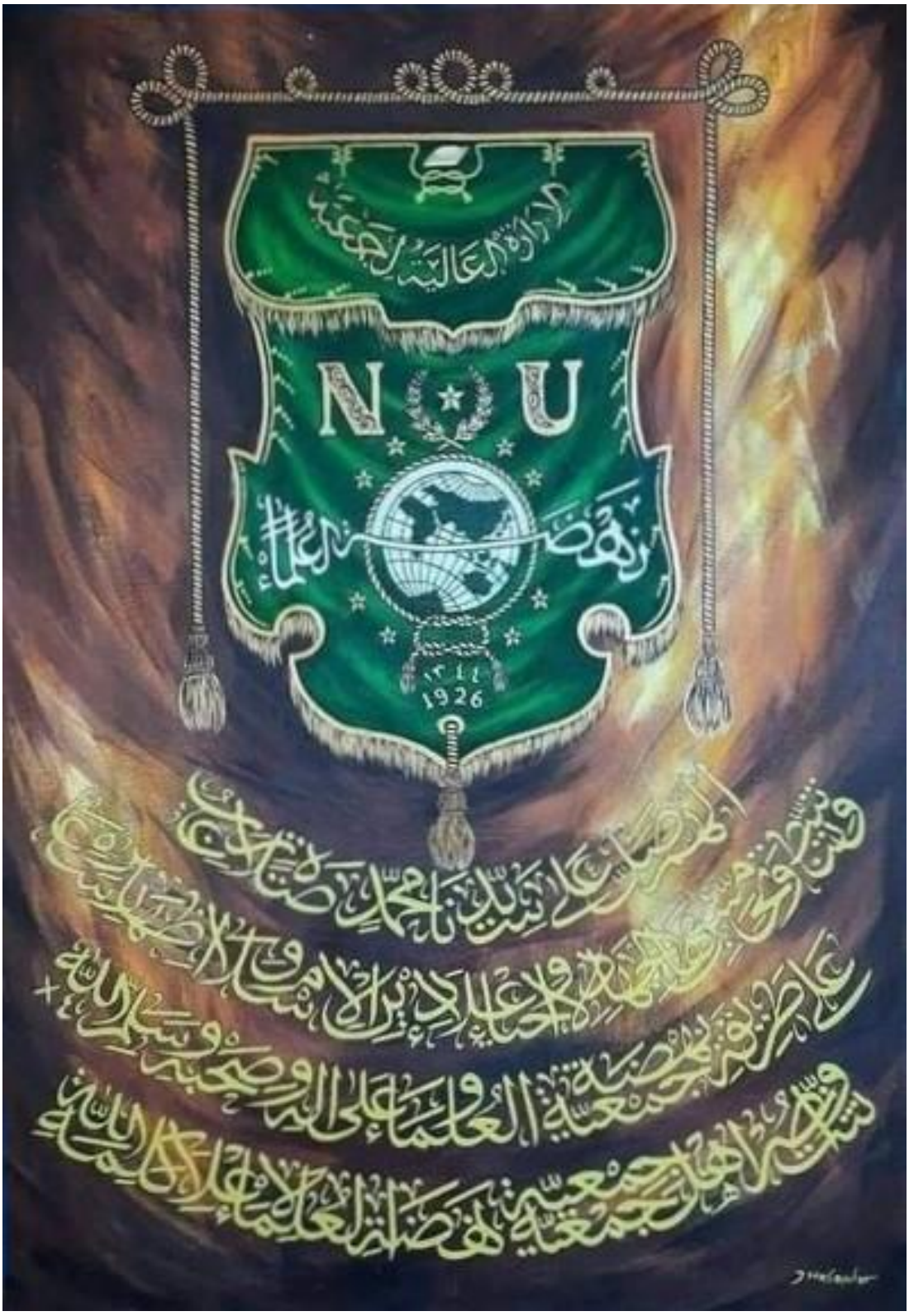
N U
1926

Muktamar Ke-35
Nahdlatul Ulama
Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang
27-31 Agustus 2026 | 14-18 R. Awwal 1448 H

BAHTSUL MASA'IL QANUNIYAH

MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
14-18 Rabi'ul Awwal 1448 H/27-31 Agustus 2026 M

Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama

MATERI BAHTSUL MASAIL AL-QANUNIYAH MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

MATERI I
RUU TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Deskripsi Masalah

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagai pedoman pendidikan di Indonesia sudah berlaku lebih dari dua dekade. Sementara, perkembangan di dunia pendidikan sudah sangat banyak, mulai dari teknologi AI, pembelajaran terdiferensiasi, hingga keberagaman jalur dan jenis pendidikan.

Pada 2022 lalu, revisi UU Sisdiknas sempat menjadi pembahasan di DPR tapi gagal dilanjutkan karena menuai pro-kontra—terutama terkait pengaturan tata kelola guru. Pada 2025, RUU Sisdiknas ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Artinya, saat ini, Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai penyempurnaan dari tiga undang-undang yang sebelumnya mengatur pendidikan. Ketiga undang-undang tersebut yakni, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Namun, di tengah prosesnya, RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ini menuai kontroversi dari sejumlah kalangan, terutama karena beberapa pasal dianggap berpotensi merugikan guru, memperlemah jaminan hak atas pendidikan, belum masuk wajib belajar 13 tahun, penggunaan anggaran pendidikan 20% yang tidak terarah, membuka ruang liberalisasi pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam Bahtsul Masail al-Qanuniyah ini, terdapat dua permasalahan yang penting untuk dibahas.

B. Pokok Permasalahan

1. *Anggaran Pendidikan 20%*

Rujukan besaran anggaran pendidikan itu berapa, jelas termaktub dalam UUD 1945 pasal 31, ayat 2: *"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenihi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional."*

Pada APBN 2026, total anggaran pendidikan mencapai Rp. 769 triliun (20% dari APBN)[1]. Angka ini terlihat begitu besar. Tapi, mengapa layanan pendidikan masih terus menuai banyak masalah. *Pertama*, infrastruktur sekolah yang rusak dan kurang. Saat ini, lebih dari 60% bangunan sekolah SD/MI dalam kondisi rusak[2]. Belum lagi, banyak daerah-daerah yang kekurangan sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Bahkan jumlah anak usia sekolah, jauh lebih banyak daripada daya tampung sekolah. Artinya, secara sistem, layanan pendidikan kita belum bisa melayani semua anak dengan layak. *Kedua*, persoalan kesejahteraan guru yang tak berujung. Setiap saat, kita sering dikejutkan oleh berbagai berita viral kondisi guru-guru kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini terutama dialami oleh guru honorer, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Ada yang "nyambi" jadi pemulung sampah, kuli bangunan,

hingga ojek online. Ini semua dilakukan hanya untuk menyambung hidup karena upah guru yang sangat minim.[3] Bahkan, tak sedikit dari mereka yang tiba-tiba dipecat karena kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.[4] Ini adalah sebagian kecil dari fakta-fata yang dialami oleh guru sekolah di Jakarta. Kondisi ini kian mengenaskan menimpa guru-guru

di daerah, dan juga guru-guru madrasah.

Ketiga, anak tidak sekolah masih meraja lela. Di Jakarta saja, yang anggaran pendidikannya mencapai Rp.19 triliun [5] (20% dari APBD), kita bisa menyaksikan bagaimana anak putus sekolah berkeliaran di jalan-jalan ibu kota. Mereka saat ini hamper mencapai 100.000 anak[6]. Ini baru di Jakarta. Bila dijumlah secara nasional,

1. https://nasional.kompas.com/read/2026/02/25/16333001/pdip-rp-769-triliun-anggaran-pendidikan-dipakai-mbg-rp-2235-triliun?page=all
2 https://www.cnbcindonesia.com/research/20230502113207-128-433664/potret-suram-pendidikan-ri-60-sekolah-sd-rusak
3 https://megapolitan.kompas.com/read/2026/04/22/09330481/guru-honorer-jakarta-curhat-gaji-tak-cukup-terpaksa-ambil-kerja-sampingan
4 https://kumparan.com/kumparannews/cleansing-guru-honorer-duduk-perkara-dan-tindak-lanjutnya-239NyFMANYR
5 https://www.jakarta.go.id/apbd-jakarta-2026
6 https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/

Jumlah anak tidak sekolah (ATS), menurut Mensos, saat ini mencapai sekitar 4 juta anak.[7] Mayoritas dari mereka tidak bisa menjangkau sekolah karena alasan biaya.

Ini adalah tiga kebutuhan dasar pendidikan (infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru, pembiayaan anak) yang belum bisa terpenuhi walau dengan anggaran pendidikan yang cukup fantastis, bahkan tiap tahun mengalami kenaikan. Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata, anggaran pendidikan tidak hanya untuk membiayai 3 kebutuhan dasar pendidikan tersebut. Tapi, digunakan untuk program non pendidikan oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Struktur pembiayaan ini tercermin pada APBN tiap tahun. Untuk tahun ini saja, berdasarkan dokumen UU APBN 2026, 20% anggran pendidikan dinikmati oleh 23 kementerian dan lembaga. Ironisnya, tiga kementerian utama untuk urusan pendidikan (Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisaintek) hanya menguasai sekitar 25 persen anggaran pendidikan. Lalu, ke mana 75 persen sisanya mengalir?

Untuk tahun ini, alokasi anggaran pendidikan paling jumbo dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Jika dipersentasekan, sekitar 29 persen anggaran pendidikan tersedot ke program MBG. Artinya, hampir sepertiga anggaran pendidikan nasional kini terkonsentrasi pada satu program, MBG.

Bila anggaran pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD itu selalu digunakan program non pendidikan dan tidak memperioritaskan kebutuhan daasar pendidikan, maka tak heran kondisi pendidikan Indonesia hingga kini masih sangat memperihatinkan. Dari sisi kualitas, pendidikan Indonensia masih di papan bawah dunia[8], bahkan rangking 2 terburuk di ASEAN. Ini berdampak pada IQ anak Indonesia, yang sampai hari ini masih terendah di ASEAN.[9]

Bila tidak ada perubahan struktur alokasi 20% anggaran pendidikan untuk apa dan untuk siapa, maka nomenklatur 20% dalam pasal 31 UUD 1945 menimbulkan

7 https://nasional.kompas.com/read/2025/07/10/19100311/mensos-sebut-lebih-dari-4-juta-anak-usia-7-18-tahun-tidak-sekolah-dan-putus

8 https://kumparan.com/ferdy-ramesyah/pisa-skor-pendidikan-indonesia-masih-di-bawah-rata-rata-rata-dunia-1usItNpTYEW

9 https://www.cnbcindonesia.com/news/20240925102000-4-574396/miris-iq-anak-indonesia-terendah-di-asean

ketidakpastian hukum, dan berbelok arah dari amanat konstitusi untuk menjamin hak anak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk semua.

Pertanyaan:

1. Bagaimana batasan (*dhawabith*) dalam perumusan kebijakan anggaran negara (*siyasah maliyah*), terutama anggaran pendidikan?
2. Sejauh mana kewenangan *waliyy al-amr* dalam menentukan *awlawiyyat al-mīzāniyyah* (prioritas anggaran negara) berdasarkan prinsip syar'i?
3. Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap kebijakan publik yang berpotensi dimanfaatkan untuk *al-maṣlaḥah as-siyāsiyyah* (kepentingan politik kekuasaan)?
4. Bagaimana prinsip *ar-raqabah 'ala as-siyāsah al-'āmmah* (pengawasan kebijakan publik) dalam anggaran pendidikan, apakah secara konstitusional seperti program MBG dapat mengambil dari anggaran pendidikan?

2. Potensi Ketidakselarasan dengan UU No. 18 Pesantren 2019

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan pengakuan bahwa pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, di mana fungsi pendidikan yang dijalankan pesantren bukan hanya berorientasi penguasaan keilmuan, terutama ilmu-ilmu keislaman (*tafaqquh fi al-dīn*), tetapi menjadi instrumen untuk menyebarluaskan ajaran Islam yang *raḥmatan lil 'ālamīn* dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut dijalankan oleh pesantren sebagai amanat syariat Islam dan telah menjadi karakter utama pesantren sepanjang sejarah perkembangannya di Indonesia.

Namun, jika kita membaca secara saksama RUU SISDIKNAS ini maka akan berpotensi pada ketidakselarasan dengan UU Pesantren. Memang, pada dasarnya RUU ini mengakui "Jenis Pendidikan Pesantren" sebagai jenis pendidikan tersendiri (Pasal 13, Pasal 49, Pasal 165), sejajar dengan Jenis Pendidikan umum, vokasi, khusus, dan keagamaan. Tapi pengaturannya sangat tipis — **Bagian Kedua Bab VI (Pasal 165) hanya berisi 3 ayat**, jauh lebih ringkas dibanding Bagian Kesatu tentang Pendidikan Keagamaan (Pasal 159–164, 6 pasal). Sementara itu, bab-bab umum RUU (Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum, Pendidik, Penjaminan Mutu, Akreditasi) berlaku luas untuk "setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan" tanpa pengecualian eksplisit bagi pesantren — di sinilah potensi tabrakan muncul.

Pasal-pasal yang berpotensi 'tabrakan'

Berikut peta pasal yang paling berpotensi 'tabrakan', beserta akar persoalannya:

No	Pasal RUU Sisdiknas	Isu	Titik gesek dengan UU 18/2019
1	**Pasal 165** (hanya 3 ayat, Bagian Kedua Bab VI) vs Penjelasan Umum RUU yang menyebut niat "mengintegrasikan pengaturan ... terkait dengan UU No. 18/2019"	Kedudukan hukum	Pesantren hanya diatur generik ("sesuai kekhasan, tradisi, dan kurikulum masing-masing pesantren... dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan") tanpa penegasan eksplisit UU 18/2019 sebagai *lex specialis* yang mengikat. Berbeda jauh dari Bagian Kesatu (Pendidikan Keagamaan) yang diatur 6 pasal detail.
2	**Pasal 61–69** (Standar Nasional Pendidikan: standar capaian, pembelajaran, pendidik)	Standardisasi	Berlaku untuk semua Jenjang & Jenis Pendidikan. Pasal 65 hanya bilang "disesuaikan dengan Jenis dan Jenjang Pendidikan" — klausul karet, tidak mengunci rujukan ke standar mutu versi UU 18/2019.
3	**Pasal 70–75** (Kurikulum Nasional, 14 muatan wajib di Pasal 73)	Otonomi kurikulum	Kurikulum Nasional wajib berlaku untuk Satuan Pendidikan jenjang PAUD–menengah tanpa pengecualian eksplisit bagi Jenis Pendidikan pesantren — padahal Pasal 49 & 165 menjamin pesantren berhak atas kurikulum sendiri berbasis kitab kuning/dirasah islamiyah.
4	**Pasal 167 & 190** (kategori "Pendidik Lainnya" wajib Kualifikasi Akademik & Kompetensi)	Otoritas kiai	Kiai/ustaz pesantren kemungkinan besar masuk kategori ini. Tidak ada pengecualian bagi otoritas keilmuan berbasis **sanad**, padahal UU 18/2019 menempatkan kiai sebagai figur sentral berdasarkan sanad keilmuan, bukan (semata) ijazah formal.
5	**Pasal 78–81** (Penjaminan Mutu) & **Pasal 80 ayat (2)** (Akreditasi oleh Pemerintah Pusat untuk "setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan")	Instrumen mutu seragam	Tidak ada instrumen akreditasi/penjaminan mutu khusus yang mengakomodasi karakter pesantren (turats, sanad, kaderisasi ulama) — berbeda dari semangat UU 18/2019 yang mengamanatkan standar mutu sesuai karakteristik pesantren sendiri.
6	**Pasal 117–135** (Perguruan Tinggi, termasuk "Pendidikan tinggi keagamaan")	Ma'had Aly tak dikenali	RUU tidak menyebut **Ma'had Aly**, **Pendidikan Diniyah Formal**, atau **Satuan Pendidikan Mu'adalah** sama sekali — struktur jenjang ula-wustha-ulya yang eksplisit diatur UU 18/2019 tidak muncul. Pendidikan tinggi keagamaan hanya ditundukkan pada kerangka Perguruan Tinggi umum (statuta, tridarma, program studi).
7	**Pasal 6** (asas Pendidikan Nasional: keadilan, nondiskriminasi, dll.)	Tiadanya asas kekhususan	Tidak memuat asas kemandirian/kekhasan sebagaimana ruh UU 18/2019 — berisiko ditafsirkan menuntut keseragaman (*taswiyah*) yang justru berlawanan dengan kebutuhan keadilan substantif bagi pesantren.

Pertanyaan:

a) Bagaimana pandangan fikih terhadap RUU Sisdiknas yang berpotensi tidak selaras dengan UU Pesantren 2019? Apakah UU Pesantren harus masuk secara keseluruhan dalam RUU Sisdiknas atau tetap sebagai UU *lex specialis*?

b) Bagaimana bentuk harmonisasi yang ideal antara RUU Sisdiknas dengan UU Pesantren dalam pandangan fikih?

Jawaban

a) Batasan (*dhawabith*) dalam perumusan kebijakan anggaran negara (*siyasah maliyah*), terutama anggaran pendidikan diperinci sebagai berikut:

Jika anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan untuk *maslahah al-ta'limiyyah* (kemaslahatan pengajaran/pendidikan) yang nyata dan termasuk kemaslahatan umum seperti pemenuhan kebutuhan pokok layanan pendidikan), maka termasuk *tasharruf* yang dibenarkan.

Jika anggaran pendidikan dialihkan untuk hal yang tidak terkait kebutuhan pendidikan atau keterkaitannya lemah, sementara kebutuhan pokok pendidikan terbengkalai, maka kebijakan tersebut tidak sesuai *dhawabith siyasah maliyah* dan wajib ditata ulang dengan mengembalikan kepada prinsip *al-ahamm fal-ahamm*.

Batasan (*dhawabith)* dalam perumusan kebijakan anggaran negara (siyasah maliyah), terutama anggaran pendidikan diperinci sebagai berikut: • Jika anggaran pendidikan dialihkan untuk hal yang tidak terkait kebutuhan pendidikan atau keterkaitannya lemah, sementara kebutuhan pokok pendidikan terbengkalai, maka kebijakan tersebut tidak sesuai dhawabith siyasah maliyah dan wajib ditata ulang dengan mengembalikan kepada prinsip al-ahamm fal-ahammtau keterkaitannya lemah, sementara kebutuhan pokok pendidikan terbengkalai, maka kebijakan tersebut tidak sesuai dhawabith siyasah maliyah dan wajib ditata ulang dengan mengembalikan kepada prinsip al-ahamm fal-ahamm.

مغني المحتاج (86/6)

وللإمام التصرف في أموال بيت المال بالمصلحة، فيفعل ما هو الأحظ للمسلمين تنزيلا له منزلة ولي اليتيم.

السياسة الشرعية الجزء الأول صـ: 55

وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح ؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوعا كالصدقات والمغنم.

إحياء علوم الدين (140/2)

وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال من بيت المال إليه هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مخصوصين بصفات جمع الإسلام ولكن مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين **كافة بل على مخصوصين بصفات.**

b) *Waliyy al-amr* (Pemerintah) berwenang menyusun prioritas anggaran, dengan mengedepankan kemaslahatan rakyat dan memilih yang paling menguntungkan umat (الأحظ للمسلمين).

Dalam menetapkan *awlawiyyat*, Pemerintah wajib bermusyawarah dengan para pakar di bidangnya (*ahlul-'ilm* dan *ahlur-ra'y*), meneliti kondisi aparatur/pelaksana, dan memastikan anggaran negara dialirkan kepada kebutuhan paling penting.

Dan yang paling penting: kewenangan itu tidak boleh digunakan untuk memberi kepada yang "tidak berhak", karena relasi, kontrak politik, dll.

التنبيه في الفقه الشافعي الجزء الأول صـ 262

ويستحب أن يشاور أهل العلم في الأحكام، وأهل الرأي في النقض والإبرام، ويلزمه النظر في مصالح الرعية من أمر الصلاة والأئمة، وأمر الصوم والأهلة، وأمر الحج والعمرة، والقضاء والحسبة، وأمر الأجناد الرتبين في الحصون وغيرها، والإمرة، ولا يولي ذلك إلا ثقة، مأموناً، عارفاً بما يتولاه، كافياً لما يتقلده من الأعمال. ولا يدع السؤال عن اخبارهم والبحث عن أحكامهم. وينظر في أموال الفيء، والخراج، والجزية، ويصرف ذلك في الأهم فالأهم من المصالح من سدّ الثغور، وأرزاق الأجناد، وسد البثوق، وحفر الانهار، وأرزاق القضاة، والمؤذنين، وغير ذلك من المصالح، وينظر في أموال الصدقات، ومصارفها، ويتأمل أمر المرافق، والمعادن، ومن يقطعها على ما ذكرناه في مواضعها

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع الجزء 4 صـ 291 المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (ت 1392هـ)

(يصرف في مصالح المسلمين). ولا يختص بالمقاتلة، ويبدأ بالأهم فالأهم. قاله الشيخ وغيره، وقال: يبدأ بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين، المقاتلة الذين هم للنصرة والجهاد، وهم أولى الناس بالفيء لأنه لا يحصل إلا بهم، حتى قيل: إن مال الفيء مختص بهم، ولا يجب عطاء إلا لبالغ، عاقل، حر، صحيح يطيق القتال، ومن مات بعد حلوله، دفع لورثته حقه، وصغار أولاده كفايتهم، فإذا بلغ ذكرهم أهلا فرض له إن طلب، وإلا ترك، قال عمرك ما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أنا على منازلنا من كتاب الله، الرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وغناؤه، والرجل وحاجته.قال الشيخ: «بلاؤه» هو الذي يجتهد في قتال الأعداء، «وغناؤه» هو الذي يغني عن المسلمين في مصالحهم، كولاة أمورهم، ومعلميهم، وأمثال هؤلاء، والرجل وسابقته، وهو من كان من السابقين الأولين، فإنه كان يفضلهم في العطاء على غيرهم، والرجل وفاقته، فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء، وذكر نحوه ثم قال: وإذا عرفت أن العطاء بحسب منفعة الرجل، وبحسب حاجته في حال المصالح، وفي الصدقات أيضا، علمت أنه يبدأ بالأهم فالأهم. قال: فإنه مع وجود المحتاجين، كيف يحرم بعضهم، ويعطي لغني لا حاجة له، ولا منفعة به، لا سيما إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل المسلمين، غنيهم وفقيرهم فكيف يعطى الغني الذي ليس فيه نفع عام، ويحرم الفقير المحتاج، بل الفقير النافع أولى. قال: ولا يجوز لولي الأمر أن يعطي أحدا ما لا يستحقه، لهوى نفسه، من قرابة، أو مودة أو نحو ذلك، وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء، ونواب، ووكلاء، ونص العلماء أنه يجب أن يقدم في مال الفيء والمصالح أهل المنفعة العامة.

c). Jika suatu kebijakan anggaran tampak "politis" tetapi nyata-nyata memberi *maslahah 'ammah* dan mengikuti urutan kebutuhan tanpa menelantarkan kewajiban yang lebih pokok, maka ia dinilai dari hasil maslahatnya, bukan sekadar label politis. Apabila program dijalankan dengan cara yang membuat hilang kepercayaan publik pada keadilan pemerintah, maka perlu mempertimbangkan sisi mafsadah sosial yang berdampak pada masyarkat luas.

Tidak boleh menyusun kebijakan anggaran untuk kepentingan kekuasaan hingga mengorbankan kebutuhan pokok pendidikan/maslahah umum, atau memberi pada pihak yang tidak berhak.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 71)

فصل: فيما يجوز أخذه من مال بيت المال إن قال قائل: إذا دفع الظلمة مما بأيديهم من الأموال إلى إنسان شيئا فهل يجوز له أخذه منهم أم لا؟ قيل له: إن علم المبذول له أن ما يدفع له مغصوب فله حالان: الأولى: أن يكون ممن يقتدى به ولو أخذ لفسد ظن الناس فيه بحيث لا يقتدون به ولا يقبلون فتياه، فلا يجوز له أخذه لما في أخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه، لا يقبلون له فتيا، فيكون قد ضيع على الناس مصالح الفتيا. ولا شك أن حفظ تلك المصالح العامة الدائمة أولى من أخذ المغصوب ليرده على صاحبه. وكذلك الشهود والحكام ما لم يصرحوا بأنهم أخذوه للرد على مالكه. الحالة الثانية: ألا يكون المبذول له كذلك، فإن أخذه لنفسه حرم عليه، وإن أخذه ليرده إلى مالكه جاز ذلك، وإن جهل مالكه بحث عنه إلى أن يعرفه، فإن

تعذرت معرفته صرفه في المصالح العامة أهمها فأهمها، وأصلحها فأصلحها، فإن لم يعرف تلك المصالح دفعه إلى من يعرفها، فإن لم يجد من يعرفها تربص بها إلى أن يجده فيتعرفها منه، أو يدفعها إليه ليصرفها في مصالحها إن كان عدلا، وإن كان المال الذي يبذلونه مأخوذا بحق، فإن كان المال لمصالح خاصة كالزكاة لأربابها والخمس لأربابه، والفيء للأجناد على قول، فإن كان المبذول له من أهل ذلك المال الخاص فإن أعطي قدر حقه فليأخذه، وإن أعطي زائدا على حقه فليأخذ قدر حقه ويكون حكم الزائد على حقه ما ذكرناه في المال المغصوب، وإن كان ذلك من الأموال العامة فليأخذه إن لم تفت بأخذه مصلحة الفتيا، وليصرفه في المصارف العامة أصلحها فأصلحها، وإن لم يكن من أهل ذلك فعل ما ذكرنا في المال المغصوب، وإن بذل له المال من جهة مجهولة فإن يئس من معرفة مستحقه فقد صار باليأس للمصالح العامة فليأخذه ويصرفه فيها، وإن توقع معرفة مستحقيه فليأخذه بنية البحث عن مستحقيه، فإن تعذرت معرفتهم بعد البحث التام صار كمال المصالح العامة.

(d). Pengawasan kebijakan publik dalam syariat dilakukan lewat musyawarah, penelitian, dan pemeriksaan jalannya urusan-urusan umum—termasuk hisbah—serta tidak meninggalkan pencarian informasi tentang pelaksana dan dampak kebijakan. Status boleh/tidaknya MBG mengambil dari anggaran pendidikan diperinci sebagai berikut:

- Jika MBG diposisikan sebagai program yang *taḥqīqan* termasuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (mis. syarat kuat untuk keberlangsungan belajar, mengatasi hambatan besar yang langsung menjatuhkan capaian pendidikan), serta tidak menelantarkan kebutuhan primer pendidikan yang lebih pokok, maka secara siyasah maliyah ia bisa dimasukkan ke "mashalih pendidikan"—dengan syarat tetap tunduk pada الأهم فالأهم.
- Jika MBG tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan kebutuhan pendidikan (atau hubungan itu sekunder), sementara kebutuhan primer pendidikan (sekolah, guru, akses biaya, mutu belajar) terbengkalai, maka pengambilan dari anggaran pendidikan tidak tepat dan harus dikoreksi: pos "pendidikan" dikembalikan ke prioritas yang lebih pokok.
- Jika pengambilan itu berpotensi menjadi sarana kepentingan politik (al-maṣlaḥah as-siyāsiyyah) dan menyebabkan pemborosan/penyaluran tidak pada yang berhak, maka semakin kuat alasan penertiban.

a). UU Pesantren tetap harus menjadi UU lex specialis dan tidak masuk secara keseluruhan dengan RUU Sisdiknas. Hal ini karena Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, melainkan memiliki dua fungsi lainnya: pemberdayaan masyarakat dan dakwah.

b). Meskipun RUU ini sudah memiliki norma penghubung (*bridging*) antar RUU ini dengan UU No. 18 tahun 2019, namun norma penghubung ini hanya pada satu bagian, yakni pada jenis pendidikan. Sementara pada bab-bab lainnya tidak disediakan norma penghubung kepada UU No. 18 tahun 2019 sehingga memberikan pemahaman bahwa norma-norma tersebut juga berlaku untuk jenis pendidikan pesantren. Dampaknya, ada pertentangan norma antara RUU ini dengan UU No. 18 tahun 2019. Contohnya, pasal 73 pada RUU itu mewajibkan 14 mata pelajaran wajib di mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip menjaga kekhasan pesantren sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 18 tahun 2019.

Untuk itu, perlu mengusulkan perubahan berupa 1) penambahan norma penghubung (*bridging*) pada beberapa bab yang relevan dengan UU No. 18 tahun 2019, 2) perbaikan minor pada batang tubuh RUU Sisdiknas, 3) memberikan tambahan pada penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tersebut, sehingga RUU ini selaras dan harmoni dengan UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

C. Rekomendasi

PBNU perlu menindaklanjuti persoalan RUU Sisdiknas ini dengan membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengkaji masalah-masalah dalam RUU tersebut dan membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM).

MATERI II
Pembatasan Alih Daya, PKWT, Pengupahan, dan PHK dalam RUU Ketenagakerjaan

A. Deskripsi Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 merupakan titik penting dalam penataan kembali hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional terhadap sejumlah norma dalam klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah juga meminta pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Waktu paling lama dua tahun dinilai cukup untuk menyusun undang-undang baru yang menampung materi UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2023, serta substansi dan semangat berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja atau serikat buruh. (Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023, hlm. 675-677.)

Mandat tersebut membuka ruang bagi DPR dan Presiden untuk menyusun politik hukum ketenagakerjaan yang lebih utuh. RUU yang baru tidak cukup hanya memindahkan kembali pasal-pasal lama ke dalam satu undang-undang. Pembentuk undang-undang harus menata hubungan antara fleksibilitas usaha dan perlindungan pekerja, memperjelas hak serta kewajiban para pihak, menutup celah penghindaran hukum, dan memastikan bahwa perlindungan normatif dapat benar-benar ditegakkan. Kebutuhan dunia usaha untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi, siklus produksi, dan persaingan ekonomi perlu dihormati, tetapi kebutuhan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk memindahkan hampir seluruh risiko usaha kepada pekerja yang pada umumnya mempunyai posisi tawar lebih lemah.

Dalam bidang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Mahkamah memaknai bahwa jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk apabila terdapat perpanjangan. Mahkamah juga menegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. PKWT hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat, atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu dan tidak dapat digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, hak, dan pembuktian hubungan kerja. Masalah timbul apabila PKWT digunakan berulang kali terhadap pekerjaan yang secara nyata bersifat tetap sehingga pekerja terus berada dalam status sementara. (Pertimbangan hukum hlm. 562-570; amar angka 4-5, hlm. 680.)

Dalam bidang alih daya, Mahkamah memaknai Pasal 64 ayat (2) bahwa Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya. Putusan tersebut menghendaki batas yang jelas mengenai jenis dan bidang pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Namun, Mahkamah tidak menghidupkan kembali secara utuh pembatasan lama yang hanya memperbolehkan pekerjaan penunjang dan juga tidak secara langsung melarang alih daya pada seluruh pekerjaan utama. Karena itu, pembatasan alih daya pada pekerjaan penunjang harus ditempatkan sebagai rekomendasi kebijakan NU kepada DPR dan Presiden, bukan sebagai bunyi langsung amar Putusan MK. (Pertimbangan hukum hlm. 577-580; amar angka 6, hlm. 680.)

Alih daya dapat memberikan manfaat berupa spesialisasi, efisiensi, dan kemudahan memenuhi kebutuhan pekerjaan tertentu. Akan tetapi, praktik tersebut juga dapat menimbulkan

pemisahan antara pihak yang mengendalikan dan menikmati hasil pekerjaan dengan pihak yang secara formal menjadi pemberi kerja. Jika perusahaan pengguna dapat mengarahkan pekerjaan sehari-hari tetapi sepenuhnya melepaskan tanggung jawab terhadap keselamatan, pembayaran hak, dan keberlanjutan hubungan kerja, maka alih daya berpotensi menjadi sarana penghindaran kewajiban. Persoalan menjadi lebih berat apabila pekerja terus berpindah perusahaan penyedia jasa, sedangkan pekerjaan, tempat kerja, dan perusahaan pengguna tetap sama.

Dalam bidang pengupahan, Mahkamah memulihkan kejelasan makna penghidupan yang layak sebagai penerimaan pekerja yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar, meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Mahkamah juga mewajibkan gubernur menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan membuka kemungkinan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota; memaknai indeks tertentu sebagai variabel kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, proporsionalitas, serta KHL; mengembalikan unsur golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi dalam struktur dan skala upah; serta menegaskan partisipasi aktif Dewan Pengupahan. (Pertimbangan hukum hlm. 598-600, 615-620, 632-636, dan 645-646; amar angka 7-18, hlm. 681-684.)

Pengaturan upah menimbulkan pertanyaan mengenai batas kebebasan para pihak dalam menentukan imbalan kerja. Secara formal, pekerja dapat menyetujui suatu besaran upah. Akan tetapi, persetujuan tersebut tidak selalu lahir dari posisi yang seimbang. Kebutuhan mendesak atas pekerjaan dapat membuat pekerja menerima upah yang berada di bawah batas yang wajar. Di sisi lain, kebijakan upah yang tidak memperhatikan produktivitas, skala usaha, dan kondisi ekonomi dapat menimbulkan kesulitan bagi perusahaan serta mengurangi kesempatan kerja. Karena itu, negara perlu menetapkan batas minimum yang bersifat memaksa sekaligus membangun struktur dan skala upah yang proporsional.

Dalam bidang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Mahkamah menegaskan bahwa perundingan bipartit wajib dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Kewajiban para pihak selama proses perselisihan juga berlangsung sampai berakhirnya proses yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap pesangon, Mahkamah memaknai frasa dalam Pasal 156 ayat (2) sebagai jumlah paling sedikit, sehingga jumlah yang lebih tinggi tetap dimungkinkan. (Pertimbangan hukum hlm. 647-652 dan 664-666; amar angka 19-22, hlm. 684-686.)

Dari perspektif fikih, relasi kerja pada dasarnya dapat dipahami sebagai akad ijarah atas jasa atau tenaga (*ijarah 'alal a'mal*). Akan tetapi, persoalan ketenagakerjaan modern tidak dapat diselesaikan hanya dengan menilai sah atau batalnya kontrak individual. Kesetaraan para pihak yang sedang berakad tidak terjadi. Penerima kerja pada umumnya tidak memiliki daya tawar yang setara dibanding pemberi kerja, sehingga secara susbstantif mesuk kategori terpaksa (*mukrah*) yang bisa berpengaruh pada tegaknya rukun akad. Hubungan kerja juga menyangkut ketimpangan daya tawar, dampak **sosial** terhadap keluarga, jaminan penghidupan, tanggung jawab perusahaan, kepentingan ekonomi nasional, dan kewajiban negara melakukan pengawasan. Karena itu, diperlukan pendekatan fikih-siyasah, yaitu keterlibatan ulil amri, yang mempertemukan kebebasan muamalah dengan kewajiban mencegah kezaliman serta menjaga kemaslahatan umum.

Alih daya dan PKWT pada hukum asalnya merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan, tetapi penggunaannya tunduk pada karakter masing-masing. PKWT hanya tepat

untuk pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu dan bukan untuk pekerjaan tetap. Alih daya dapat digunakan untuk penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang jenis dan bidangnya ditentukan secara jelas. Bentuk yang sah dapat berubah menjadi siasat hukum yang tercela apabila sengaja digunakan untuk mempertahankan pekerjaan tetap dalam status sementara, memutus tanggung jawab perusahaan pengguna, atau menghilangkan hak yang seharusnya diterima pekerja. Demikian pula, kesepakatan upah tidak dapat dibaca secara terpisah dari posisi tawar para pihak dan ketentuan minimum yang ditetapkan negara. Pesangon bukan pembayaran ulang atas tenaga yang telah dibayar melalui upah, melainkan hak yang lahir dari undang-undang atau kesepakatan sebagai instrumen untuk mengurangi dampak kehilangan pekerjaan.

Atas dasar itu, Nahdlatul Ulama perlu memberikan pandangan keagamaan sekaligus rekomendasi qonuniyyah kepada DPR dan Presiden agar RUU Ketenagakerjaan baru tidak hanya memenuhi amar Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mewujudkan keadilan, kepastian hukum, perlindungan terhadap pihak yang lemah, keberlangsungan usaha, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

B. Permasalahan

1. Bagaimana seharusnya pemerintah mengatur alih daya dan PKWT agar kedua bentuk hubungan tersebut tidak digunakan sebagai siasat (*ḥīlah*) untuk mempertahankan pekerjaan yang bersifat tetap dalam status kerja yang terus-menerus tidak pasti, tanpa meniadakan kebutuhan fleksibilitas usaha yang wajar?
2. Bagaimana seharusnya pemerintah mengatur upah minimum, pesangon, dan prosedur PHK agar menjamin penghidupan yang layak dan mencegah kesewenang-wenangan terhadap pekerja, tanpa membebani keberlangsungan usaha secara tidak proporsional?

C. Jawaban Permasalahan Nomor 1

1. Alih daya pada prinsipnya merupakan bentuk akad ijarah atas pekerjaan atau jasa (*ijarah ʻalal aʻmal*) yang dapat dibenarkan syariat selama objek pekerjaan, manfaat yang diperjanjikan, imbalan, jangka waktu, dan tanggung jawab para pihak diketahui secara jelas serta tidak mengandung unsur yang dilarang.

   Namun demikian, alih daya sebaiknya diprioritaskan untuk pekerjaan penunjang atau pekerjaan yang membutuhkan spesialisasi tertentu. Alih daya tidak boleh dijadikan sarana untuk menghindari kewajiban pemberi kerja, menurunkan hak pekerja secara tidak patut, atau mengalihkan risiko usaha kepada pekerja secara tidak proporsional. Pengalihdayaan pekerjaan yang bersifat tetap dan menjadi bagian utama proses produksi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan objektif serta harus disertai perlindungan yang lebih ketat terhadap kesinambungan kerja dan hak pekerja.

   Dalam perspektif fikih, pekerjaan yang dapat dipisahkan dari fungsi utama perusahaan, pekerjaan penunjang, dan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus lebih dekat dengan konsep *ijarah ʻala al-ʻamal* atau *ajir musytarak*, sehingga dapat dilaksanakan melalui penyedia jasa. Adapun pekerjaan yang bersifat terus-menerus dan menjadi bagian integral dari proses utama produksi tidak serta-merta dilarang untuk dialihdayakan, tetapi semakin kuat karakter hubungan kerja dan semakin besar ketergantungan pekerja kepada pengguna, semakin kuat pula kewajiban untuk memastikan kesinambungan hubungan kerja dan perlindungan hak-haknya.

   Referensi :

   وَالأَجِيرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: خَاصٌّ، وَمُشْتَرَكٌ، فَالْخَاصُّ هُوَ الَّذِي يَقَعُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، يَسْتَحِقُّ الْمُسْتَأْجِرُ نَفْعَهُ فِي جَمِيعِهَا، كَرَجُلٍ اسْتُؤْجِرَ لِخِدْمَةٍ، أَوْ عَمَلٍ فِي بِنَاءٍ، أَوْ خِيَاطَةٍ، أَوْ رَعْيِ يَوْمًا أَوْ

شَهْرًا؛ سُمِّيَ خَاصًّا لِاخْتِصَاصِ الْمُسْتَأْجِرِ بِنَفْعِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ. وَأَمَّا الْمُشْتَرَكُ: فَهُوَ الَّذِي يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِي ذِمَّتِهِ، كَمَا هُوَ عَادَةُ الْخَيَّاطِينَ وَالصَّوَّاغِينَ، فَإِذَا الْتَزَمَ لِوَاحِدٍ أَمْكَنَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ لِغَيْرِهِ مِثْلَ ذَلِكَ الْعَمَلِ، فَكَأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّاسِ.(روضة الطالبين، للإمام النووي)

فَصْلٌ وَأَمَّا الْمَالُ فِي يَدِ الْأَجِيرِ، كَالثَّوْبِ إذَا اسْتُؤْجِرَ لِخِيَاطَتِهِ أَوْ صَبْغِهِ أَوْ قِصَارَتِهِ، وَالْعَبْدِ إذَا اسْتُؤْجِرَ لِتَعْلِيمِهِ أَوْ لِرِضَاعِهِ، وَالدَّابَّةِ إذَا اسْتُؤْجِرَ لِرِيَاضَتِهَا. فَإِذَا تَلِفَ وَالْأَجِيرُ مُنْفَرِدٌ بِالْيَدِ، فَهُوَ ، إمَّا أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ، وَإِمَّا مُنْفَرِدٌ. وَالْمُشْتَرَكُ: هُوَ الَّذِي يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِي ذِمَّتِهِ ، كَمَا هُوَ عَادَةُ الْخَيَّاطِينَ وَالصَّوَّاغِينَ. فَإِذَا الْتَزَمَ لِوَاحِدٍ، أَمْكَنَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ لِغَيْرِهِ مِثْلَ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، فَكَأَنَّهُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ النَّاسِ. وَالْمُنْفَرِدُ: هُوَ الَّذِي أَجَّرَ نَفْسَهُ مُدَّةً مُقَدَّرَةً لِعَمَلٍ، فَلَا يُمْكِنُهُ تَقَبُّلُ مِثْلَ ذَلِكَ الْعَمَلِ لِغَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ. (.(روضة الطالبين، للإمام النووي)

2. Perusahaan pengguna tidak dapat melepaskan seluruh tanggung jawab terhadap pekerja hanya karena hubungan kerja secara formal berada pada perusahaan alih daya. Dalam perspektif fikih, pembagian atau pengalihan fungsi pengelolaan tenaga kerja tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban pihak yang secara langsung mengendalikan pekerjaan, tempat kerja, sarana kerja, dan kondisi pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, apabila pelaksanaan pekerjaan berada dalam pengendalian perusahaan pengguna, khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dari diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak minimum pekerja, perusahaan pengguna tetap harus memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kewenangan, penguasaan, kontribusi terhadap timbulnya risiko, dan sebab terjadinya kerugian.

   Atas dasar itu, RUU perlu menetapkan tanggung jawab bersama atau tanggung renteng antara perusahaan alih daya dan perusahaan pengguna sekurang-kurangnya terhadap hak-hak minimum pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang bebas dari diskriminasi, serta kerugian atau pelanggaran yang timbul dalam ruang lingkup pekerjaan yang berada di bawah pengendalian perusahaan pengguna. Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab utama perusahaan alih daya sebagai pemberi kerja formal, melainkan untuk memastikan bahwa pengalihan hubungan kontraktual tidak menjadi sarana untuk menghindari tanggung jawab terhadap pekerja

   Referensi:

   "أن يكون في قدرته -أي الأجير المشترك- رفع ذلك؛ فلو غرقت بموج أو ريح أو صدمة جبل؛ لا يضمن، وأن يكون محل العمل مسلماً إليه بالتخلية؛ فلو ربُّ المتاع أو وكيله في السفينة؛ لا يضمن، وأن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد، فلا يضمن الآدمي" [حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/ 66].

   وقد عرفه البهوتي في كشاف القناع بقوله :وَالأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ بِالْعَمَلِ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَبِنَاءِ حَائِطٍ, وَحَمْلِ شَيْءٍ إلَى مَكَان مُعَيَّنٍ، أَوْ عَلَى عَمَلٍ فِي مُدَّةٍ لا يَسْتَحِقُّ نَفْعَهُ فِي جَمِيعِهَا, كَالطَّبِيبِ وَنَحْوُهُ: الْكَحَّالُ، وَيَتَقَبَّلُ الأَعْمَالَ لِجَمَاعَةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ يَعْمَلُ لَهُمْ, فَيَشْتَرِكُونَ فِي نَفْعِهِ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَ مُشْتَرَكًا، فَتَتَعَلَّقُ الإِجَارَةُ بِذِمَّتِهِ لا بِعَيْنِهِ، وَلا يَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ إلا بِتَسْلِيمِ عَمَلِهِ دُونَ تَسْلِيمِ نَفْسِهِ، بِخِلافِ الْخَاصِّ . انتهى.

3. PKWT hanya boleh digunakan untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat, atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, termasuk pekerjaan sekali selesai, sementara, musiman, atau berkaitan dengan produk dan kegiatan baru yang masih dalam tahap penjajakan. PKWT tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak boleh memuat masa percobaan kerja.

   PKWT pada prinsipnya dapat dibenarkan dalam perspektif fikih apabila hubungan kerja tersebut dibatasi oleh waktu atau pekerjaan tertentu yang secara sifat, jenis, atau kegiatannya

memang mempunyai batas penyelesaian yang dapat diketahui. Karena itu, PKWT dapat digunakan untuk pekerjaan yang sekali selesai, pekerjaan sementara, pekerjaan musiman, atau pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan atau produk baru yang secara nyata masih berada dalam tahap penjajakan. Adapun pekerjaan yang secara hakikat bersifat tetap, terus-menerus, dan merupakan kebutuhan permanen perusahaan, pada prinsipnya tidak tepat ditempatkan dalam hubungan kerja yang dibatasi secara semu untuk menghindari perlindungan hubungan kerja yang berkelanjutan.

Pembatasan masa kerja dalam PKWT juga harus diketahui dan disepakati sejak awal serta tidak boleh mengandung ketidakjelasan yang menimbulkan sengketa. PKWT tidak semestinya memuat masa percobaan kerja, karena sejak akad kerja mulai berlaku, pekerja telah memberikan manfaat tenaganya berdasarkan akad yang sah dan berhak memperoleh imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.

Referensi:

(وليس له) أي الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي غير مستأجره؛ لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد. (فإن عمل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر فله) أي المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره. قال أحمد في رجل استأجر أجيرا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم، فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر، ويأخذ منه الأجرة، فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة. قال في المغني: فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله. قال: ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره. وقال القاضي: معناه يرجع بالأجر الذي أخذه من الآخر؛ لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره، فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره. انتهى. وعلم منه أنه إذا لم يستضر لا يرجع بشيء؛ لأنه اكتراه لعمل، فوفاه على التمام .اهـ. (كشف القناع، للبهوتي)

4. PKWT yang didasarkan pada jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu harus dibatasi paling lama lima tahun, termasuk seluruh perpanjangannya. PKWT wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin serta memuat jenis pekerjaan, jangka waktu, upah, dan hak pekerja secara jelas. (Amar angka 4-5 Putusan MK, hlm. 680.)

   Menurut fikih, PKWT yang didasarkan pada jangka waktu atau penyelesaian pekerjaan tertentu pada prinsipnya dibenarkan, selama masa kerja atau pekerjaan yang menjadi objek akad diketahui secara jelas. Pembatasan jangka waktu maksimal lima tahun, termasuk seluruh perpanjangannya, merupakan kebijakan pengaturan (*taqyīd al-mubāḥ*) yang dapat ditetapkan oleh negara berdasarkan kemaslahatan, kepastian hukum, pencegahan penyalahgunaan akad, dan perlindungan terhadap hak pekerja. Angka lima tahun itu sendiri bukan batas yang ditentukan secara khusus oleh fikih, melainkan batas regulatif yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. PKWT wajib dibuat secara tertulis dengan memuat sekurang-kurangnya identitas para pihak, jenis dan sifat pekerjaan, jangka waktu atau ukuran penyelesaian pekerjaan, besaran dan tata cara pembayaran upah, serta hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip fikih bahwa manfaat yang menjadi objek akad ijarah, masa akad, dan ujrah harus diketahui sehingga terhindar dari ***jahālah***, ***gharar***, dan sengketa.

   Referensi:

والأجير على ضربين: خاص، ومشترك، فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في جميعها، كرجل استؤجر لخدمة، أو عمل في بناء، أو خياطة، أو رعاية يوما، أو شهرا؛ سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس ...اهـ. (المجموع، للإمام النووي)

Dalam literatur Hanafiyyah:

»الأجير الخاص من يكون العقد واردًا على منافعه، ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسافة«.

Artinya:

"Pekerja khusus adalah orang yang akadnya berkaitan dengan manfaat dirinya; manfaat tersebut menjadi diketahui dengan menyebutkan masa atau jarak."

5. RUU harus melarang pemutusan dan penyambungan kontrak secara artifisial yang tidak mengubah karakter pekerjaan. PKWT tidak boleh digunakan melalui pemutusan dan penyambungan kontrak secara artifisial apabila pekerjaan yang dilakukan pada hakikatnya tetap sama dan tidak mengalami perubahan karakter, jenis, sifat, atau kebutuhan objektif yang menjadi dasar penggunaan PKWT. Alasannya karena, penilaian terhadap akad tidak semata-mata didasarkan pada nama dan bentuk formalnya, tetapi juga pada hakikat pekerjaan, tujuan akad, dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Karena itu, perubahan nama atau pemutusan formal akad tidak dapat dijadikan sarana untuk menghindari hak pekerja yang telah timbul atau mengubah pekerjaan tetap menjadi seolah-olah pekerjaan sementara.

   PKWT yang digunakan untuk pekerjaan tetap atau tidak memenuhi kriteria objektif PKWT harus berubah demi hukum menjadi PKWTT, disertai pengakuan masa kerja dan pembayaran kekurangan hak. Sanksi administratif dapat ditambahkan untuk pelanggaran yang disengaja atau berulang. (Pertimbangan hukum hlm. 569-570.) Pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan secara sengaja atau berulang juga dapat dibenarkan sebagai bentuk ***ta'zīr*** dan ***siyāsah shar'iyyah***, untuk mencegah penyalahgunaan akad dan menjaga hak pekerja.

   Referensi

   (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل .رواه ابن بطة) وحسنه ابن تيمية.

   قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا فِي الْحَدِيثِ بُطْلَانُ كُلِّ حِيلَةٍ يَحْتَالُ بِهَا الْمُتَوَسِّلُ إلَى الْمُحَرَّمِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِتَغَيُّرِ هَيْئَتِهِ وَتَبْدِيلِ اسْمِهِ .انتهى. (إعلام الموقعين، لابن القيم الجوزي)

6. Pengawas ketenagakerjaan harus diberi kewenangan memeriksa praktik nyata, bukan hanya dokumen kontrak. Pengawas perlu dapat menilai pihak yang mengendalikan pekerjaan, kontinuitas pekerjaan, pergantian vendor, serta aliran pembayaran hak pekerja.

   Dalam perspektif fikih, kewenangan demikian dapat ditempatkan dalam fungsi *wilāyah al-ḥisbah* dan *siyāsah shar'iyyah*, yaitu kewenangan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mencegah kemudaratan, dan melindungi hak-hak masyarakat. Penilaian terhadap hubungan hukum tidak semestinya berhenti pada bentuk formal dokumen apabila terdapat indikasi bahwa keadaan faktual berbeda dari yang dinyatakan dalam dokumen tersebut. Karena itu, pengawas dapat menilai substansi hubungan kerja berdasarkan keseluruhan fakta yang relevan, termasuk siapa yang mengendalikan pekerjaan, siapa yang memberikan perintah dan pengawasan, apakah pekerjaan berlangsung secara terus-menerus, apakah terjadi pergantian perusahaan alih daya tanpa perubahan substansi pekerjaan, serta siapa yang membayar dan bertanggung jawab atas hak-hak pekerja.

7. Perumusan jenis pekerjaan alih daya dan kriteria PKWT harus melibatkan serikat pekerja, organisasi pengusaha, pakar, dan pemerintah melalui partisipasi yang bermakna agar pembatasan mempunyai dasar empiris dan tidak dibentuk secara sepihak.

   Dalam perspektif fikih, pelibatan para pihak tersebut sejalan dengan prinsip ***al-syūrā*** dalam penetapan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Pemerintah sebagai ***wali al-amr***

memiliki kewenangan menetapkan regulasi ketenagakerjaan, tetapi pelaksanaannya harus berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kemudaratan. Oleh karena itu, konsultasi dengan pihak yang memiliki pengetahuan dan kepentingan langsung terhadap persoalan merupakan bagian dari mekanisme untuk memperoleh pertimbangan yang lebih objektif dan mewujudkan kebijakan yang lebih maslahat.

Penegasan:

NU tidak memandang alih daya (*outsourcing*) dan PKWT pada dirinya sebagai praktik yang haram atau terlarang. Keduanya pada dasarnya merupakan bentuk akad muamalah yang dapat dibenarkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad, objek pekerjaan dan manfaatnya jelas, tidak mengandung *gharar* dan *jahālah* yang merusak akad, serta tidak menjadi sarana untuk mengambil hak pihak lain.

Yang harus dicegah adalah penyalahgunaan bentuk akad tersebut untuk tujuan yang bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan, seperti mempertahankan pekerjaan yang pada hakikatnya bersifat tetap dalam status sementara secara terus-menerus, melakukan pemutusan dan penyambungan kontrak secara artifisial untuk menghindari hak pekerja, memisahkan tanggung jawab dari pihak yang secara nyata mengendalikan dan memperoleh manfaat utama dari pekerjaan, atau mengurangi hak pekerja yang semestinya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Dalam perspektif fikih, larangan tersebut dapat didasarkan pada prinsip *raf' al-ḍarar*, *sadd al-dharā'i*, larangan *ḥiyal* yang bertujuan menghindari ketentuan hukum, serta kewajiban menunaikan akad dan memenuhi hak pihak yang telah memberikan manfaat pekerjaannya. Karena itu, negara melalui kewenangan *siyāsah shar'iyyah* dapat mengatur dan membatasi penggunaan alih daya dan PKWT sepanjang pembatasan tersebut didasarkan pada kemaslahatan, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Atas dasar itu, RUU perlu memadukan batasan substantif mengenai pekerjaan yang dapat dialihdayakan dan menggunakan PKWT, kejelasan pembagian dan tanggung jawab para pihak, pengawasan terhadap praktik hubungan kerja yang sebenarnya, mekanisme pemulihan hak pekerja, serta sanksi administratif yang efektif dan proporsional terhadap pelanggaran, terutama pelanggaran yang dilakukan secara sengaja atau berulang

D. Jawaban Permasalahan Nomor 2 tentang Pengupahan, Pesangon, dan Prosedur PHK

Jawaban langsung: DPR dan Presiden wajib menetapkan upah minimum sebagai norma perlindungan yang bersifat memaksa, dengan memperhatikan KHL, pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas, kondisi usaha, dan partisipasi dewan pengupahan. Pesangon harus ditempatkan sebagai hak minimum yang lahir dari undang-undang atau kesepakatan yang sah untuk mengurangi dampak kehilangan pekerjaan. PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak; apabila perundingan bipartit gagal, penyelesaiannya wajib ditempuh melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap. Pengaturan tersebut harus disertai proses yang cepat, pemulihan hak, dan sanksi yang proporsional.

فصل . إذا دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ، أو خياط ليخيطه ، أو جلس بين يدي حلاق ليحلق رأسه ، أو دلاك ليدلكه ، ففعل ، ولم يجر بينهما ذكر أجرة ولا نفيها ، فيه أوجه . أصحها وهو المنصوص : لا أجرة له مطلقا ، لأنه لم يلتزم ، وصار كما لو قال : أطعمني خبزا ، فأطعمه ، لا ضمان عليه . والثاني : يستحق أجرة المثل . والثالث : إن بدأ المعمول له فقال : افعل كذا ، لزمه الأجرة . وإن بدأ العامل فقال : أعطني ثوبا لأقصره ، فلا أجرة . والرابع : إن كان العامل معروفا بذلك العمل وأخذ الأجرة عليه ، استحق الأجرة للعادة ، وإلا ، فلا. (روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي)

ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره ، ومع ذلك يعذر مخالفه للاقتيات ويصح البيع إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود ، وظاهر كلام أصل الروضة أن التعزير مفرع على تحريم التسعير ، وجرى عليه ابن المقري لما مر وإن خالف فيه ابن الرفعة وغيره حيث قالوا بتفريعه على جوازه والأوجه الأول. (نهاية المحتاج، الرملي)

a. Ujrah al-mitsl dan Kebutuhan Hidup Layak

Ujrah al-mitsl dan KHL tidak identik. Ujrah al-mitsl adalah ukuran kesepadanan nilai jasa berdasarkan jenis pekerjaan, keahlian, kebiasaan, tempat, waktu, serta keadaan yang sebanding. KHL merupakan standar kebijakan pengupahan untuk memastikan bahwa pendapatan pekerja sekurang-kurangnya diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar. Ujrah al-mitsl menilai kewajaran pertukaran jasa, sedangkan KHL menambahkan dimensi perlindungan sosial yang ditetapkan negara.

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Ada tiga golongan yang Aku menjadi lawannya pada hari kiamat ... salah satunya orang yang mempekerjakan pekerja, telah mengambil manfaat pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya.”

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū‘.

Hadis tersebut menegaskan beratnya pelanggaran terhadap hak upah, walaupun tidak menentukan formula upah minimum. Penetapan formula merupakan wilayah siyasah syar‘iyyah yang dapat disusun berdasarkan data ekonomi dan tujuan perlindungan. Upah minimum yang ditetapkan secara sah tidak boleh dikurangi melalui kesepakatan individual, sebab keberadaannya dimaksudkan sebagai batas perlindungan publik, bukan sekadar hak privat yang dapat dilepaskan tanpa batas.

مَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالشَّرْطِ

“Ketentuan yang ditetapkan oleh syariat didahulukan daripada ketentuan yang ditetapkan melalui persyaratan.”

Al-Suyūṭī, al-Asybāh wa al-Naẓā’ir, al-qā‘idah al-khāmisah wa al-‘isyrūn.

Penerapan kaidah ini memerlukan jembatan argumentasi: pertama, pemerintah berwenang menetapkan upah minimum berdasarkan kemaslahatan; kedua, kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat; ketiga, kebijakan yang sah menjadi mengikat dalam kehidupan publik. Karena itu, kesepakatan yang menetapkan upah di bawah batas minimum tidak dapat menghapus kewajiban pemberi kerja. Namun, upah yang telah berada di atas upah minimum tetapi belum sepenuhnya mencapai seluruh komponen KHL tidak otomatis dapat disebut haram atau ghabn fāḥisy. Negara tetap wajib mendorong peningkatan secara bertahap melalui struktur dan skala upah, produktivitas, perundingan kolektif, dan kebijakan ekonomi.

Referensi:

(فلا أجرة له) لأنه متبرع قال في البحر ولأنه لو قال أسكني دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة إجماعا وبحث الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه ؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع ومثلهما بالأولى غير مكلف (وقيل له) أجرة مثله لاستهلاكه منفعته (وقيل إن كان معروفا بذلك العمل) بالأجرة (فله) أجرة مثله وقال ابن عبد السلام بل الأجرة المعتادة بمثل ذلك العمل (وإلا فلا وقد يستحسن) ترجيحه لوضوح مدركه إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرا ومن ثم نقل عن الأكثرين وأفتى به كثيرون أما إذا ذكر أجرة فيستحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل وأما إذا عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل نعم في الأخيرة يحسب على

الأجير ما أطعمه إياه كما هو ظاهر ؛ لأنه لا تبرع من المطعم ، وقد تجب من غير تسميتها ولا تعريض بها كما في عامل الزكاة اكتفاء بثبوتها له بالنص فكأنها مسماة شرعا وكعامل مساقاة عمل غير لازم له بإذن المالك اكتفاء بذكر المقابل له في الجملة وكقاسم بأمر الحاكم على ما قاله جمع لكن أطال في رده في التوشيح ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام]ص [182 :أو راكب سفينة مثلا بلا إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه. (تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي)

تجب في مواضع؛ أحدها الإجارة في صور: منها الفاسدة، ومنها: لو قال له المؤاجر بعد انقضاء المدة إن فرغتها اليوم وإلا فعليك كل شهر كذا، وقيل: يجب المسمى. ومنها: لو قال مشتري العين للأجير اعمل كما كنت ولم يعلم بالأجر، بخلاف ما إذا علم فإنه يجب. ومنها: لو عمل له شيئًا ولم يستأجره وكان الصانع معروفًا بتلك الصنعة وجب أجر المثل على قول محمد رحمه الله وبه يفتى. (الأشباه والنظائر، لابن نجيم)

ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال } " : لا يحتكر إلا خاطئ " {فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم وهو ظالم للخلق المشترين ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في]ص [76 :مخمصة . فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ولهذا قال الفقهاء : من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره. ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ; أو منعهم مما أباحه الله لهم : فهو حرام . وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ; ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل : فهو جائز ; بل واجب. (مجموع فتاوى, لابن تيمية)

b. Pesangon sebagai hak yang lahir dari regulasi dan kesepakatan

Pesangon bukan pengganti upah atas pekerjaan masa lalu, karena manfaat kerja tersebut pada dasarnya telah dibayar melalui upah. Pesangon merupakan hak yang lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagai instrumen untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi akibat kehilangan pekerjaan. Setelah ditetapkan oleh sumber hukum yang sah, pesangon menjadi kewajiban yang harus ditunaikan.

Pemaknaan Mahkamah Konstitusi bahwa besaran pesangon merupakan jumlah paling sedikit harus dipertahankan dalam RUU. Ketentuan ini memberikan batas minimum sekaligus membuka ruang pemberian jumlah yang lebih tinggi. Pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa pengaturan pesangon tidak kehilangan daya perlindungannya akibat terlalu banyak pengecualian atau pendelegasian kepada peraturan yang lebih rendah. (Pertimbangan hukum hlm. 664-666; amar angka 22, hlm. 686.)

Dalam perspektif fikih, pemerintah berwenang untuk membuat pengaturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum, mencegah kemudaratan, dan melindungi pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Oleh karena itu, ketika negara menetapkan hak pesangon sebagai norma yang bersifat mengikat, kewajiban tersebut tidak lagi semata-mata bersumber dari akad individual, tetapi juga dari ketentuan hukum publik yang sah.Pemerintah juga berwenang mengatur batas minimum pesangon tersebut. Ia menjamin agar pekerja tidak kehilangan perlindungan yang telah ditetapkan hukum, sekaligus tetap memberikan ruang bagi pemberi

kerja dan pekerja untuk menyepakati jumlah yang lebih tinggi melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, norma minimum tersebut menjalankan fungsi perlindungan tanpa menutup ruang bagi pemberian hak yang lebih besar. Atas dasar itu, pembentuk undang-undang perlu mempertahankan pesangon sebagai **hak minimum yang bersifat mengikat**, serta memastikan bahwa pengecualian, pengurangan, atau pendelegasian pengaturannya kepada peraturan yang lebih rendah tidak menghilangkan substansi perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهم فسخها، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
(المغني، لابن قدامة)

c. Keadilan prosedural dalam PHK

PHK dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang sah, seperti berakhirnya kegiatan usaha, efisiensi yang nyata, pelanggaran yang terbukti, atau sebab lain yang ditentukan undang-undang. Namun, pemberi kerja tidak boleh mengakhiri hubungan secara sepihak tanpa memberikan alasan, kesempatan membela diri, dan akses kepada penyelesaian sengketa. Kehilangan pekerjaan berdampak langsung pada penghidupan pekerja dan keluarganya, sehingga prosedur merupakan bagian dari keadilan, bukan sekadar formalitas.

الْحِسْبَةُ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ظَهَرَ تَرْكُهُ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا أُظْهِرَ فِعْلُهُ

"Hisbah adalah memerintahkan kebaikan apabila tampak ditinggalkan dan mencegah kemungkaran apabila tampak dilakukan."

Abū al-Ḥasan al-Māwardī, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, Bāb Aḥkām al-Ḥisbah.

Dalam negara modern, fungsi hisbah diwujudkan melalui peraturan, pengawasan, mediasi, penyelesaian perselisihan, peradilan, dan sanksi. Perundingan bipartit memberi ruang musyawarah kepada para pihak. Jika gagal, penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap mencegah salah satu pihak menggunakan kekuatan ekonominya secara sepihak. Selama proses berlangsung, kewajiban para pihak tetap berjalan sampai sengketa berakhir dengan kekuatan hukum tetap. Prosedur tersebut harus dilaksanakan secara cepat agar perlindungan tidak berubah menjadi beban karena sengketa berlangsung terlalu lama. (Pertimbangan hukum hlm. 647-652; amar angka 19-21, hlm. 684-685.)

d. Penegakan hukum dan sanksi

RUU harus membedakan pemulihan hak dari sanksi. Pembayaran kekurangan upah, pesangon, atau hak lain merupakan pemulihan terhadap kewajiban yang belum dilaksanakan, bukan hukuman. Sanksi administratif atau pidana diberikan sebagai konsekuensi tambahan terhadap pelanggaran yang disengaja, berulang, atau menimbulkan kerugian serius.

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

"Ta'zir adalah tindakan pendidikan dan penjeraan atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukuman hadnya."

Al-Māwardī, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, faṣl fī al-ta'zīr.

هُوَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةٌ

"Ta'zir disyariatkan pada setiap maksiat yang tidak mempunyai hukuman had dan kafarat."

Al-Nawawī, Rawḍat al-Ṭālibīn, juz X, Bāb al-Ta'zīr.

Berdasarkan prinsip tersebut, negara dapat menetapkan sanksi terhadap pelanggaran hak pekerja yang tidak lagi semata-mata bersifat privat, terutama apabila dilakukan secara sistematis dan merusak tata ketenagakerjaan. Bentuk sanksi harus efektif, terukur, dan proporsional. Pidana sebaiknya dipakai untuk perbuatan serius, seperti penggelapan upah, pemalsuan data, penghalangan pengawasan, atau pengulangan pelanggaran setelah adanya perintah pemulihan.

Rekomendasi kebijakan bagi DPR dan Presiden

1. Upah minimum harus dirumuskan sebagai norma yang bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan individual yang menetapkan upah lebih rendah. Formula harus memperhatikan KHL, pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas, kondisi sektor usaha, dan prinsip proporsionalitas.
2. Dewan pengupahan harus dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan, bukan hanya memberikan saran formal. Keanggotaannya harus mencerminkan pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan pakar, serta bekerja berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Struktur dan skala upah wajib diterapkan secara nyata dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan produktivitas. Pengawasan tidak boleh berhenti pada keberadaan dokumen administratif.
4. Pengaturan dapat membedakan skala kewajiban antara usaha besar dan usaha mikro atau kecil, tetapi pembedaan tidak boleh menghapus perlindungan paling dasar. Keringanan harus bersifat terukur, terbatas, dan diawasi.
5. Besaran pesangon harus ditempatkan sebagai jumlah paling sedikit. Perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, atau kebijakan perusahaan dapat memberikan jumlah yang lebih tinggi.
6. PHK wajib didahului perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. (Amar angka 19-20, hlm. 684-685.)
7. Alasan PHK, termasuk pelanggaran berat, harus dirumuskan secara jelas dan disertai proses pembuktian yang adil. PHK tidak boleh digunakan sebagai tindakan balasan terhadap kegiatan berserikat, pelaporan pelanggaran, atau penolakan terhadap tindakan yang melanggar hukum.
8. Proses penyelesaian sengketa harus cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. RUU perlu memberikan kepastian mengenai kewajiban para pihak selama sengketa, termasuk upah, skorsing, dan tenggat penyelesaian.
9. Pelanggaran kewajiban upah dan pesangon harus terlebih dahulu mengakibatkan pemulihan seluruh hak pekerja. Pelanggaran yang disengaja atau berulang dapat dikenai denda administratif, pembatasan kegiatan, dan untuk perbuatan tertentu yang serius dapat dikenai sanksi pidana.

Penegasan:

Kebijakan pengupahan, pesangon, dan PHK harus dibangun berdasarkan keseimbangan. Upah minimum berfungsi sebagai batas perlindungan; KHL menjadi arah pemenuhan penghidupan yang layak; struktur dan skala upah menjamin proporsionalitas; pesangon mengurangi dampak kehilangan pekerjaan; dan prosedur PHK mencegah kesewenang-wenangan. Seluruhnya perlu dirancang tanpa mengabaikan produktivitas, kondisi usaha, dan keberlanjutan kesempatan kerja.

E. Rekomendasi

1. Alih daya dan PKWT pada dasarnya diperbolehkan sepanjang digunakan sesuai karakter masing-masing. PKWT hanya untuk pekerjaan yang secara objektif akan selesai dalam waktu tertentu, sedangkan alih daya hanya untuk jenis dan bidang pekerjaan yang dirumuskan secara jelas. Keduanya tidak boleh dipakai sebagai ḥīlah untuk mempertahankan pekerjaan tetap dalam status yang terus-menerus tidak pasti atau melepaskan tanggung jawab pihak yang menerima manfaat utama.
2. DPR dan Presiden wajib merumuskan secara tegas jenis pekerjaan alih daya, batas penggunaan PKWT, tanggung jawab perusahaan pengguna dan penyedia, larangan penghindaran hukum, kewenangan pengawas, akibat hukum, dan sanksi.
3. PKWT tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tidak boleh memuat masa percobaan, harus dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin, serta jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu beserta perpanjangannya tidak boleh melebihi lima tahun. (Pertimbangan hukum hlm. 562-570; amar angka 4-5, hlm. 680.)
4. Upah minimum merupakan norma perlindungan yang bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan yang merugikan pekerja. Penetapannya harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja, KHL, kondisi usaha, struktur dan skala upah, serta partisipasi aktif Dewan Pengupahan. (Amar angka 7-18, hlm. 681-684.)
5. Ujrah al-mitsl dan KHL tidak identik. Ujrah al-mitsl mengukur kesepadanan nilai jasa, sedangkan KHL merupakan standar kebijakan untuk menjamin kebutuhan wajar pekerja dan keluarganya. Keduanya harus digunakan secara saling melengkapi.
6. Pesangon merupakan hak yang lahir dari peraturan perundang-undangan atau kesepakatan yang sah dan harus ditempatkan sebagai jumlah paling sedikit yang dapat ditingkatkan melalui perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, atau kebijakan perusahaan. (Amar angka 22, hlm. 686.)
7. PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak. Jika perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat gagal, PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Kewajiban para pihak selama sengketa juga berlangsung sampai putusan berkekuatan hukum tetap. (Amar angka 19-21, hlm. 684-685.)
8. Penegakan hukum harus membedakan pemulihan hak dari sanksi. Kekurangan upah, pesangon, dan hak lainnya wajib dibayarkan, sedangkan pelanggaran yang disengaja, berulang, atau sistematis dapat dikenai sanksi administratif dan pidana secara proporsional.

MATERI III

Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Revisi menjadi Qonun Aceh No.12 Tahun 2025 (Keadilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan)-Mekanisme Pembuktian Pemerkosaan

A. Deskripsi Masalah

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual paling berat yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, antara tahun 2011 hingga 2023 terjadi 24.529 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, di mana 23% di antaranya adalah pemerkosaan, yakni sekitar 5.654 kasus. Data lain menunjukkan bahwa sepanjang 2001–2021, jumlah kasus pemerkosaan yang dilaporkan mencapai

8.272. Sementara itu, BPS pada tahun 2022 mencatat 1.443 kasus, dengan Provinsi Aceh menempati posisi tertinggi (135 kasus), diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Namun sebagaimana umumnya kekerasan seksual, pemerkosaan merupakan fenomena "gunung es". Banyak korban enggan melapor karena stigma sosial, rasa malu, tekanan lingkungan, hingga ketakutan tidak mendapat keadilan. Indonesia masih dikejutkan oleh berbagai peristiwa tragis seperti pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak SMP berusia 14 tahun oleh 14 pelaku, kasus pemerkosaan terhadap perempuan penjual gorengan yang sedang membiayai sekolah, serta kematian siswi madrasah korban kekerasan seksual di Banyuwangi. Semua ini menegaskan bahwa sistem hukum dan sosial kita masih belum mampu menjamin keadilan dan perlindungan yang layak bagi korban.

Pemerkosaan membawa dampak multidimensi: fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam psikologi klinis, kondisi korban sering diklasifikasikan sebagai *Rape Trauma Syndrome (RTS)*, ditandai dengan kecemasan, insomnia, panik, depresi, hingga trauma seksual jangka panjang seperti *Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD)*. Beberapa korban bahkan kehilangan makna hidup dan berujung pada percobaan bunuh diri. Reaksi seperti diam atau menunda pelaporan merupakan bagian dari mekanisme bertahan (coping mechanism), bukan tanda kebohongan.

Sayangnya, masih ada masyarakat yang justru menyudutkan korban dengan label “tidak suci”, “perempuan nakal”, atau menyalahkan pakaian dan perilakunya. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan aparat seperti "kenapa baru melapor sekarang?" mencerminkan ketidakpekaan terhadap trauma. Bahkan, banyak korban mengalami reviktimisasi dalam proses hukum—yakni penderitaan tambahan akibat perlakuan aparat yang tidak sensitif, pembuktian yang berat, atau prosedur yang menyulitkan.

Hambatan utama adalah pada aspek pembuktian. Mayoritas kasus pemerkosaan terjadi di tempat tertutup dan sepi, sehingga saksi mata hampir tidak ada. Visum sebagai alat bukti medis pun sering terlambat dibuat karena korban baru berani melapor setelah mengalami tekanan mental. Jika bukti objektif dianggap tidak cukup, korban berisiko dikriminalisasi atau tidak dipercaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberi harapan baru. Pasal 24 ayat (2) mengakui keterangan korban yang direkam secara elektronik sebagai alat bukti sah. Pasal 24 ayat (3) menambahkan bahwa keterangan psikolog, psikiater, dan hasil pemeriksaan forensik juga dapat dijadikan alat bukti. Ini merupakan pendekatan progresif yang mengakui dimensi trauma dan dampak psikis pemerkosaan.

Namun implementasinya belum ideal. Banyak aparat penegak hukum masih menggunakan perspektif bias: mempertanyakan moral korban, mengabaikan testimoninya, atau mengarahkan

kasus ke zina karena relasi pacaran sebelumnya. Ini terlihat nyata dalam praktik hukum di Aceh, yang tunduk pada Qanun Jinayah.

Qanun Jinayah tidak selalu membedakan dengan tegas antara zina dan perkosaan. Dalam sejumlah kasus, korban perempuan justru dikenai pasal zina, terutama jika sebelumnya punya kedekatan personal dengan pelaku. Pasal 52 ayat (3) Qanun mensyaratkan sumpah dari korban, dan Pasal 54 menyatakan bahwa korban yang tidak bersumpah bisa dijatuhi had qazaf. Sementara Pasal 55 memberi hak kepada pelaku untuk bersumpah membantah tuduhan. Hal ini membuka ruang kriminalisasi terhadap korban dan berisiko mengulang trauma mereka.

Padahal, fikih Islam klasik telah membedakan antara zina dan perkosaan. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar nikah pernikahan yang sah. Sementara al-ightiṣāb (perkosaan) adalah hubungan seksual yang dipaksakan kepada perempuan tanpa kerelaannya. Hadis Nabi SAW. menyebutkan bahwa:

رُفِع القلمُ عنْ ثلاثةٍ عنِ الصغيرِ حتى يبلُغَ وعَنِ النائمِ حتى يستيقظَ وعنِ المصابِ حتى يُكشفَ عنهُ

Artinya:

"Telah diangkat pena (dosa dan beban hukum syariat) dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi (baligh), dan dari orang yang dipaksa hingga ia mampu (bebas dari paksaan)."

Hadis ini menjadi dasar penting dalam fikih bahwa orang yang berada dalam kondisi tidak sadar, belum balig, atau dipaksa (mukrah) tidak dibebani tanggung jawab hukum syariat.

"Diangkat pena" (رُفِع القلمُ) adalah ungkapan bahwa taklif syar'i (pertanggungjawaban dosa maupun pidana) tidak berlaku bagi mereka hingga kondisi yang memadai terpenuhi (bangun dari tidur, anak kecil yang sudah baligh, atau bebas dari paksaan). (HR. Abu Dawud no. 4403).

al-Sarakhsi menegaskan dalam al-Mabsuṭ:

وَلَوْ أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا بِحَبْسٍ، أَوْ قَيْدٍ دُرِئَ عَنْهَا الْحَدُّ؛ لِأَنَّهَا لَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى ذَلِكَ بِالْقَتْلِ يَسَعُهَا التَّمْكِينُ، وَلَا تَأْثَمُ فِيهِ

Artinya:

"Dan jika seorang perempuan dipaksa berzina dengan cara dikurung atau diborgol, maka hukuman had digugurkan darinya; karena jika ia dipaksa untuk itu dengan ancaman dibunuh, maka diperbolehkan baginya untuk pasrah, dan ia tidak berdosa karenanya." Kemudian al-Sarakhsī menyatakan bahwa jika perempuan dipaksa untuk berzina, baik dengan dikurung atau diborgol, maka ia tidak dikenai hukuman had. Bahkan jika paksaan berupa ancaman pembunuhan, dan ia memilih pasrah, itu dibolehkan dan tidak berdosa, karena unsur kerelaan tidak ada. Ini adalah prinsip penting bahwa pemaksaan menghapus hukuman. (Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Mesir: Mathba'ah al-Sa'ādah, tanpa tahun), jil. 24/138).

al-Jaziri bahkan menegaskan bahwa telah terjadi ijma' ulama bahwa perempuan yang dipaksa melakukan zina tidak terkena had:

أما المرأة فلا يقام عليها الحد لأنها في هذه الحالة مكرهة، بشهادة الشهود، والمكرهة على الزنا لا تحد إجماعًا. ويجب على الزاني دفع صداقها، ويلحق به ولدها إن حملت منه.

Artinya:

"Adapun perempuan, maka tidak ditegakkan atasnya hukuman had, karena dalam kondisi ini ia dipaksa, sebagaimana dibuktikan oleh kesaksian para saksi. Dan perempuan yang dipaksa untuk berzina tidak dijatuhi had menurut ijma'. Wajib atas pezina (laki-laki) untuk membayar mahar (kompensasi) kepada perempuan itu, dan jika ia hamil darinya maka anak itu dinasabkan kepada

laki-laki tersebut." (al-Jaziri, Abd al-Raḥman bin Muḥammad ʻAwaḍ. al-Fiqh ʻala al-Madhahib al-Arbaʻah. Beirut: Dar al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2003; 5/69).

al-Jaziri juga menambahkan aspek tanggung jawab pelaku: wajib membayar mahar sebagai 3erem rugi kepada korban, dan anak yang lahir dari peristiwa tersebut dinasabkan kepada pelaku, bukan dianggap anak zina. Ini menunjukkan fikih memberikan perlindungan hukum terhadap 4erempuan korban pemerkosaan dan tidak menyamakannya dengan pelaku zina sukarela.

Dalam hukum positif, Pasal 285 KUHP dan UU TPKS menyebut bahwa perkosaan adalah hubungan seksual tanpa persetujuan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman. Pembuktiannya tidak mensyaratkan empat orang saksi seperti dalam kasus zina, tetapi bisa dengan visum, rekaman, keterangan psikolog, atau bukti elektronik lainnya.

Dengan demikian, menyamakan pemerkosaan dengan zina dalam hukum sangat berbahaya karena bisa mengkriminalisasi korban dan bertentangan dengan nilai keadilan baik secara agama maupun hukum nasional.

B. Permasalahan

1. Apa hukum keabsahan penggunaan alat bukti seperti kesaksian korban, sumpah, bukti elektronik dan bentuk pembuktian lain dalam pembuktian kasus perkosaan?
2. Apakah pengakuan korban tentang terjadinya perkosaan dapat dipersamakan dengan tuduhan zina, sehingga diberlakukan mekanisme seperti sumpah liʻān sebagaimana dalam kasus qadzaf?

C. Jawaban

Pada Qanun Aceh telah dibedakan antara jarimah zina, pelecehan seksual, dan perkosaan. Ketiga jarimah ini dibedakan dalam hukuman dan pembuktiannya. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau Iebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Adapun pelecehan seksual adalah kekerasan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non- fisik kepada orang lain maupun dirinya sendiri, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pemerkosaan diartikan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan beberapa perbedaan terkait jarimah zina, pelecehan seksual, dan perkosaan. Pertama, zina merupakan tindakan jarimah yang dilakukan oleh para pihak yang saling suka. Adapun pelecehan seksual dan perkosaan terjadi atas tindakan kekerasan, ancaman, atau paksaan. Kedua, zina dan perkosaan memiliki kesamaan dari sisi jarimah tersebut menyangkut tindakan seksual terkait dengan zakar dan faraj. Meski demikian, definisi perkosaan mengalami perluasaan. Perkosaan tidak saja terjadi pada hubungan seksual dengan melibatkan zakar dan faraj, melainkan juga pada benda atau alat dengan faraj dan antara zakar dengan mulut. Adapun pelecehan seksual terjadi pada tindakan yang belum sampai pada hubungan seksual zakar dan faraj.

Hukuman untuk ketiga jarimah tersebut dibedakan. Jarimah zina dipidana dengan uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali. Qanun Aceh revisi menambahkan ketentuan terkait pelaku jarimah zina dari kalangan anak yang telah berumur 16 tahun dan belum berumur 18 tahun dan belum menikah. Baginya apabila melakukan zina akan dihukum dengan hukuman tazir.

Hukuman untuk jarimah zina adalah hudud cambuk 100 kali (Pasal 33). Adapun hukuman pelecehan seksual dikenakan ta'zir utama yaitu cambuk paling sedikit 55 (lima puluh lima) kali paling banyak 105 (seratus lima) kali atau denda paling sedikit 550 (lima ratus lima puluh) gram emas murni paling banyak 1.050 (seribu lima puluh) gram emas murni dan penjara paling singkat 55 (lima puluh lima) bulan paling lama 105 (seratus lima) bulan (Pasal 46). Ancaman hukum pemerkosaan lebih berat lagi yaitu hukuman ta'zir utama berupa cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni dan penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan (pasal 48).

Selain hukuman ta'zir utama di atas, pelaku pelecehan seksual dan perkosaan dikenakan uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Apabila kekayaan terpidana tidak mencukupi, maka dikenakan pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman 'Uqubat Takzir Utama (pasal 51).

Korban perkosaan memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Jarimah (Pasal 51C). Hak korban atas pemulihan tersebut meliputi: rehabilitasi medis dan rehabilitasi mental dan sosial.

Pembuktian jarimah perkosaan dengan menggunakan dua alat bukti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan hukum acara khusus yang mengatur acara pidana (lex spesialis) tertentu (jinayat). Adapun hukum acara umum yang berlaku pada pembuktian pidana merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (lex generalis).

Pasal 180 Qanun menyebutkan Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina. Khusus jarimah zina pembuktiannya dengan menghadirkan empat orang saksi yang melihat langsung kejadian zina tersebut pada waktu, tempat, dan orang yang sama (pasal 182 ayar 5).

Alat bukti yang dapat dihadirkan pada persidangan jarimah perkosaan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa (pasal 181 Qanun). Undang-Undang Nomor tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 24 memperjelas dan menambahkan alat bukti yang dapat diajukan pada kejahatan perkosaan, yaitu termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik (pasal 24 ayat 2). Termasuk alat bukti surat yang diakui dalam UU TPKS adalah surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensic, dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank (pasal 24 ayat 3).

Ketentuan tersebut memberikan kemudahan pembuktian pada jarimah perkosaan. Keterangan korban perkosaan sebagai satu alat bukti. Hal ini ditegaskan pada pasal 25 UU TPKS yang menyebutkan keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah. Keluarga korban perkosaan dapat memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa. Apabila hanya diperoleh keterangan saksi dari korban, kekuatan pembuktiannya dapat didukung

dengan keterangan yang diperoleh dari: orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut, saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk, dan/atau ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana (pasal 25 ayat 3).

Dengan demikian, pengakuan korban kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi dalam jarimah perkosaan. Untuk pembuktiannya perlu ditambahkan dengan alat bukti lain. Demikian pula pengakuan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan jarimah yang ia lakukan. Pengakuan ini menjadi alat bukti yang kuat apabila jarimah berupa zina (pasal 187 ayat 4).

Dari sisi hukum Islam (syariah), perkosaan merupakan gabungan antara unsur *had zina* pada pelaku dan unsur *ta'zir* dalam aspek penganiayaan dan perampasan hak korban. Dalam praktik pembuktian, para ulama kontemporer cenderung menempatkan perkosaan dalam kerangka *ta'zir* ketika alat bukti tidak mencapai standar had. Kaidah *"al-ḥudūd tudra'u bi al-syubuhāt"* hanya menggugurkan hudud karena syubhat, sementara ta'zir tetap dapat diterapkan.

Alat bukti dalam ta'zir lebih longgar. Menurut ulama Hanafiyah, dalam ta'zir diakui beberapa alat bukti, antara lain

a. pengakuan (*iqrār*)
b. kesaksian (*bayyinah*)
c. pengetahuan hakim (*'ilm al-qāḍī*)
d. dll.

Mayoritas ulama tidak memakai *qarinah* dalam hudud karena hudud digugurkan oleh syubhat. Namun dalam *ta'zir*, *qarinah qath'iyyah* (indikasi yang meyakinkan) menurut Hanafiyah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Bukti elektronik yang valid dapat dimasukkan ke dalam kategori ini.

Hal ini diperkuat fakta bahwa mayoritas ulama (Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah) memandang *qarinah zahirah* dan *ẓann gālib* dapat menjadi dasar kuatnya gugatan. Keterangan psikolog dan dokter forensik dapat dikategorikan sebagai kesaksian ahli *(ahl al-khibrah)* yang diakui dalam fikih untuk menguatkan gugatan dalam perkara ta'zir.

Ibn Hazm dalam *al-Muḥallā* menukilkan riwayat tentang Khalifah Umar bin Abd al-Aziz yang pernah menggugurkan had qazaf dari seorang perempuan korban perkosaan hanya berdasarkan satu saksi yang bersaksi bahwa ia mendengar teriakan korban, tanpa saksi mata atas kejadian Ini menunjukkan bahwa bukti yang bersifat tidak langsung, termasuk keterangan yang menggambarkan kondisi korban, suara, atau keadaan fisik, dapat memiliki nilai hukum yang dapat melindungi korban.

REFERENSI

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي – وهبة الزحيلي (٧ / ٥٨٠١)

يرى الحنفية أن التعزير يغلب فيه حق الآدمي، فتثبت جريمة التعزير عندهم بما تثبت به سائر حقوق العباد من الإقرار والبينة والنكول عن اليمين، وعلم القاضي، وشهادة النساء مع الرجال، والشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي – وهبة الزحيلي (٧ / ٥٨٠٢)
القرينة: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا، فتدل عليه. ومنه يفهم أنه لا بد في القرينة من تحقق أمرين:
١ - أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساسا للاعتماد عليه.
٢ - أن توجد صلة تربط بين الأمر الظاهر والأمر الخفي.
ولا يحكم عند جمهور الفقهاء بالقرائن في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات.
-إلى أن قال-
واعتبر الحنفية القرينة القطعية بينة نهائية كافية للقضاء بها، كما لو رئي شخص مدهوشا ملطخا بالدم، ومعه سكين ملوثة بالدم، بجوار مضرج بدمائه في مكان، فيعتبر هو القاتل.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي – وهبة الزحيلي (٨ / ٦١٢٩)
قال ابن القيم: نظر جمهور الفقهاء كمالك وأحمد وأبي حنيفة إلى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منها بما يصلح له، ورأوا أن الدعوى تترجح بما هو دون ذلك بكثير، كاليد والبراءة والنكول، واليمين المردودة، والشاهد واليمين، والرجل والمرأتين، فيثير ذلك ظنا تترجح به الدعوى. ومعلوم أن الظن الحاصل ههنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء، وهذا مما لا يمكن جحده ودفعه.
المحلى بالآثار – ابن حزم (ج 12 ص 259 - 262)
حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا قتادة أن رجلا استكره امرأة فصاحت؟ فجاء مؤذن فشهد لها عند عمر بن عبد العزيز: أنه سمع صياحها، فلم يجلدها. حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني عميرة بن أبي ناجية عن يزيد بن أبي حبيبة عن عمر بن عبد العزيز: أنه أتته امرأة فقالت: إن فلانا استكرهني على نفسي؟ فقال: هل سمعك أحد أو رآك؟ قالت: لا، فجلدها بالرجل - وهو عمرو بن مسلم، أو إسحاق بن مسلم مولى عمرو بن عثمان - قال ابن وهب: سألت مالكا عن المرأة تقول: إن فلانا أكرهني على نفسي؟ قال: إن كان ليس مما يشار إليه بذلك؛ جلدت الحد، وإن كان مما يشار إليه بالفسق نظر في ذلك قال أبو محمد - رحمه الله -: هاهنا يرون عليه السجن الطويل، والأدب، وغرم مهر مثلها - وهذه أقوال تدور على وجوه: إما جلدها حد القذف إن لم يكن لها بينة - وهو قول الزهري، وقتادة. وإما إسقاط الحد عنها بشهادة واحد: أنه سمع صياحها فقط - وهو عن عمر بن عبد العزيز - وإلا فتجلد. وإما أن يدرأ عنها الحد بأن يرى معها خاليا، ويؤثر فيه أثرا، أو يسمع صياحها - وهو قول ربيعة - وهو أيضا قول يحيى بن سعيد الأنصاري، وزاد: أن يعاقب الرجل المدعى عليه - إن كان ذلك - أشد العقوبة إن ظهر بشيء مما ذكرنا، وإلا فالحد على المرأة حد القذف. وإما أن ينظر، فإن كان المدعى عليه من أهل العافية جلد حد القذف - وإن كان ممن يشار إليه بالفسق فلا شيء عليها، ويسجن هو ويطال سجنه، ويغرم مهر مثلها - وهو قول مالك قال أبو محمد - رحمه الله -: أما قول مالك - فظاهر الخطأ؛ لأنه فرق في الادعاء بين المشار إليه بالخير، والمشار إليه بالفسق، ولم يوجب الفرق بين شيء من ذلك قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا قول صاحب وقد أجمعت الأمة كلها على أن رجلا يدعي دينا على آخر، والمدعى عليه منكر: فإنه يحلف - ولو أنه أحد الصحابة - رضي الله عنهم - وقد قضى باليمين علي وعمر، وعثمان وابن عمر، وغيرهم - رضي الله عنهم - ولا أحد أفضل منهم، ولا أبعد من التهمة، والدعوى بجحد المال، والظلم، والغصب كالدعوى بالغلبة في الزنا، ولا فرق؛ لأن كل ذلك حرام، ومعصية. وقد قال رسول الله - ﷺ - «لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على من ادعي عليه» وقال - عليه السلام - لصاحب من أصحابه اختصما «بينتك أو يمينه» وقد أجمعت الأمة، ومالك معهم على أن مسلما برا فاضلا عدلا - ولو أنه أحد الصحابة - رضي الله عنهم -: ادعى مالا على يهودي، أو نصراني، ولا بينة له أن اليهودي، أو النصراني: يبرأ من ذلك بيمينه، وأن الكافر لو ادعى ذلك على المسلم لأحلف له، فكيف يقضي لها بدعواها، فيغرمه مهرها من أجل أنه فاسق، ولا فاسق أفسق من كافر، قال الله تعالى الكافرون هم الفاسقون فهذان وجهان من الخطأ؟ وثالث - وهو القضاء عليه

بالسجن والعقوبة دون بينة - وهذا ظلم ظاهر لا خفاء به. ورابع - هو أنه لا يخلو من أن يكون يصدقها أو يكذبها، ولا سبيل إلى قسم ثالث - فإن كان يصدقها فينبغي له أن يقيم عليها حد الزنا وإلا فقد تناقض وضيع حدا لله تعالى، وإن كان يكذبها فبأي معنى يسجنه ويغرمه مهر مثلها، فيؤكلها المال بالباطل، ويأخذ ماله بغير حق. وخامس - وهو أنه إن تكلمت - وكان المدعى عليه معروفا بالعافية: جلدها حد القذف، وإن مكثت، فظهر بها حمل: رجمها إن كانت محصنة - وهذا ظلم ما سمع بأشنع منه، وحرج في الدين لم يجعله الله تعالى قط فيه، ولا يحفظ عن أحد فرق هذا التفريق قبل مالك - وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد - رحمه الله -: فنظرنا في ذلك - فوجدنا الله تعالى يقول ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء: ٥٩] الآية؟ ففعلنا - فوجدنا الله تعالى قد أوجب الحد على من رمى أحدا بالزنا، إلا أن يأتي ببينة. ثم نظرنا في التي تشتكي بإنسان: أنه غلبها على نفسها؟ فوجدناها لا تخلو من أن تكون قاذفة، أو تكون غير قاذفة، فإن كانت قاذفة فالحد واجب عليها بلا شك، إذ لا خلاف في أن قاذف الفاسق يلزمه الحد، كقاذف الفاضل، ولا فرق. والقذف هو ما قصد به العيب والذم وهذه ليست قاذفة إنما هي مشتكية مدعية، وإذ ليست قاذفة فلا حد للقذف عليها، ولكن تكلف البينة، فإن جاءت بها أقيم عليه حد الزنا، وإن لم تأت بها فلا شيء عليه أصلا، لا سجن، ولا أدب، ولا غرامة؛ لأن ماله محرم، وبشرته محرمة، ومباح له المشي في الأرض، قال الله تعالى ﴿فامشوا في مناكبها﴾ [الملك: ١٥] . فإن قال قائل: فإن لم تكن بينة فاقضوا عليه باليمين بهذا الخبر؟ قلنا: وبالله تعالى التوفيق - إن دعواها انتظم حقا لها وحقا لله تعالى، ليس لها فيه دخول ولا خروج؟ فحقها: التعدي عليها وظلمها، وحق الله تعالى: هو الزنا، فواجب أن يحلف لها في حقها، فيحلف بالله ما تعديت عليك في شيء، ولا ظلمتك وتبرأ ذمته. ولا يجوز أن يحلف بالله ما زنى؛ لأنه لا خلاف في أن أحدا لا يحلف في حق ليس له فيه مدخل. ولا يختلف اثنان في أن من قال: إنك غصبتني وزيدا دينارا، فإنه إنما يحلف له في حقه من الدينار لا في حق زيد، وهكذا في كل شيء. وأما الفرق بين الذم والشكوى، فإنهم لا يختلفون فيمن قال لآخر - ابتداء أو في كلام بينهما - يا ظالم، يا غاصب، أنه مسيء - فمن قائل: عليه الأدب، ومن قائل: لآخر أن يقول له مثل ذلك. ولا يختلفون فيمن شكا بآخر فقال: ظلمني وأخذ مالي بغير حق، أنه لا شيء عليه وأنه ليس مسيئا بذلك فصح الفرق بين الشكوى وبين الاعتداء بالسب والقذف - وبالله تعالى التوفيق.

فتاوى دار الإفتاء المصرية – مجموعة من المؤلفين (٧ / ٢٢٨)

المفتي جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الأول ١٤٠٢ هجرية - ٢ يناير ١٩٨٢ م

المبادئ ١ - جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية متفق على حرمة الحشيش ونحوه. ٢ - جرائم تعاطى المخدرات داخلة فى باب التعازير الشرعية. ٣ - للسلطة المنوط بها التشريع على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق. ٤ - نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق. ٥ - الشروط الواجب توافرها فى الشاهد واحدة، سواء كانت الشهادة فى جرائم الحدود والقصاص أو فى جرائم التعازير

السؤال بالطلب المطلوب به رأى الشريعة الإسلامية فيما إذا كان الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعازير وما نصاب الشهادة والشروط والواجب توافرها فى الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع

الجواب إن الجواهر المخدرة (الحشيش وأمثاله) يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر، وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنسانى، فحرمتها ليست لذاتها وإنما لأثارها وضررها. وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل فى هذا التحريم ما رواه أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت (نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر) وذلك لثبوت ضرر كل ذلك فى البدن والعقل، كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوى النافع طبيا لا يحد حد شرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر المذاب إلى حد الشدة المطربة، وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطى هذه المخدرات كشارب الخمر، باعتبار أنها أشد خبثا وضررا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات فى وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة بالحد

أيضا. ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمرا يقام الحد على متعاطيها مطلقا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علة، باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد، شأنها فى ذلك شأن الخمر أو أشد. ولما كانت الحدود مسماة من الشارع والعقوبات عليها مقدرة كذلك وإما بنص فى القرآن الكريم، أو بقول أو فعل من الرسول ﷺ، كان إيثار القول بدخول تعاطى المخدرات فى التعازير هو الأولى والأحوط فى العقوبة، باعتبار أن الخمر تطلق عادة على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطى المخدرات ضمن المنكرات التى يعاقب عليها بالتعزير كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيزا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى فى الردع الزجر. أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها فى الشاهد على جريمة تعاطى المخدرات، فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق، أى بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة وبالقرائن القاطعة، ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، ولا تقبل شهادة رجل واحد ولا أى عدد من النسوة منفردات دون رجل معهن فى إثبات هذه الجرائم. أما عن الشروط الواجب توافرها فى الشاهد فواحدة، سواء كانت الشهادة فى جرائم الحدود والقصاص، أو فى جرائم التعازير. وهى بإجمال الذكورة فى الحدود، بنعمنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال، وبعد هذا يشترط أن يكون الشاهد أو الشاهدة - فيما تجوز فيه شهادة النساء - بالغا، عاقلا، قادرا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه مما يشهد به، مأمونا على ما يقوله، لا تلحقه غفلة أو نسيان، وأن يكون ناطقا متكلما، فلا تقبل شهادة الآخرس فى قول فقهاء المذهب الحنفى ومذهب أحمد وقول فى فقه الإمام الشافعى، وتقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادة فى فقه الإمام مالك وقول فى مذهب الإمام الشافعى والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى، وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية والمعانية.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – الخطيب الشربيني (ج 5 ص 383 - 384)

وقول المجروح: جرحني فلان، أو قتلني، أو دمي عنده، أو نحو ذلك ليس بلوث؛ لأنه مدع فلا يعتمد قوله: وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه.

الفتاوى الكبرى الفقهية – ابن حجر الهيتمي (٤ / ٢٢٢)

(وسئل) نفع الله تعالى ببركته المسلمين عن تعيين المجروح لجارحه هل هو لوث في حقه مثلا أو لا؟ (فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ليس ذلك بلوث عندنا لضعف القرينة فيه فإن قلت يشكل عليه قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - يصح (إقرار المريض بدين، أو عين لوارث وغيره؛ لأنه وصل إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر فإذا كان وصل إلى هذه الحالة فلم لا يكون تعيينه لجارحه لوثا؛ لأن وصوله إلى هذه الحالة يؤكد ظن صدقه ومدار اللوث على مؤكد ظن هنا الصدق قلت قد عارض تلك القرينة غلبة وقوع الضغائن بين المجروح والمتهمين بجرحه فكان في تعيينه ما يؤكد عدم ظن صدقه فلم يعمل به وأما ثم فلا قرينة تنافي ما دل عليه حاله من الصدق فعمل بقوله وصححنا إقراره إذ لا عذر لمن أقر وأيضا فالحق هنا له إذ الدية له وإنما تنتقل لورثته عنه فلم يقبل قوله فيه مطلقا للتهمة وأما ثم فهو مقر على نفسه بالحق لغيره فلا تهمة فيه فقبل مطلقا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

Laporan korban perkosaan bukan sebagai jarimah qodzaf

Pengaduan jarimah perkosaan dapat dilakukan oleh korban atau keluarga korban. Sebagaimana jarimah lain pada umumnya, alat bukti perkosaan minimal 2 alat bukti yang diajukan. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 52 – 56 mengatur tentang aduan korban perkosaan ini, yaitu:

a. Korban dapat mengadukan jarimah perkosaan dengan alat bukti permulaan.
b. Penyidik dalam penyelidikan berkewajiban menemukan alat bukti permulaan.
c. Apabila bukti tidak memadai, korban dapat mengajukan sumpah (sumpah lian) yang dituangkan dalam berita acara.

d. Apabila korban membatalkan sumpah tersebut di depan hakim, maka korban dianggap melakukan jarimah qadzaf.
e. Setiap orang yang dituduh melakukan perkosaan dapat melakukan pembelaan diri.
f. Jika alat bukti korban yang diajukan adalah sumpah, maka tertuduh pelaku perkosaan dapat melakukan sumpah (lian).

Ketentuan tersebut menunjukkan keharusan pihak penyidik untuk menemukan bukti untuk mendukung pengaduan korban. Dalam hal alat bukti tidak memadai, korban dapat mengajukan alat bukti sumpah. Pada pengaduan perkosaan ini terjadi beberapa kemungkinan; pertama, ditemukan dua alat bukti atau lebih yang memadai sehingga tertuduh dapat mengajukan pembelaan dengan alat bukti yang dimiliki. Kedua, alat bukti yang diajukan berupa 1 alat bukti ditambah dengan sumpah lian, maka tertuduh dapat mengajukan pembelaan dengan bukti sumpah lian. Dalam kondisi seperti ini tertuduh terbebas dari hukuman. Kedua, pengaduan dengan 1 alat bukti dan sumpah yang disampaikan saat penyidikan namun korban membatalkan sumpah tersebut di hadapan persidangan, maka korban dianggap melakukan jarimah qadzaf.

Dari pandangan syariah, pengakuan korban tersebut tidak dapat disamakan dengan qadzaf dan tidak boleh diproses dengan mekanisme li'ān karena dua alasan yang berdiri sendiri-sendiri:

a. Korban adalah *musytakī* (pelapor), bukan *qādzif* (penuduh zina).
b. Li'ān secara syar'i hanya sah antara suami-istri.

Menurut Ibn Hazm dalam *al-Muḥallā* laporan korban bukan qadzaf, melainkan da'wā (gugatan). Beliau juga memberikan pembedaan yang sangat tegas dan fundamental: bahwa qadzaf merupakan ucapan yang menghina dan mencela, sedangkan laporan korban adalah pengaduan (*al-syakwa*). Konsekuensinya: korban tidak terkena had qadzaf dan kasusnya diproses sebagai dakwaan yang menuntut *bayyinah.* Jika *bayyinah* tidak terpenuhi, ia tidak boleh dijatuhi hukuman apapun.

Li'ān adalah mekanisme khusus bagi suami sebagai jalan keluar dari had qadzaf dalam konteks tuduhan zina terhadap istri. Ayat li'ān (*"wa al-ladzīna yarmūna azwājahum"*) secara spesifik menunjukkan bahwa subjeknya adalah suami-istri.

Referensi

المحلى بالآثار – ابن حزم (ج 12 ص 259 - 262)

ثم نظرنا في التي تشتكي بإنسان: أنه غلبها على نفسها؟ فوجدناها لا تخلو من أن تكون قاذفة، أو تكون غير قاذفة، فإن كانت قاذفة فالحد واجب عليها بلا شك، إذ لا خلاف في أن قاذف الفاسق يلزمه الحد، كقاذف الفاضل، ولا فرق. والقذف هو ما قصد به العيب والذم وهذه ليست قاذفة إنما هي مشتكية مدعية، وإذ ليست قاذفة فلا حد للقذف عليها، ولكن تكلف البينة، فإن جاءت بها أقيم عليه حد الزنا، وإن لم تأت بها فلا شيء عليه أصلا، لا سجن، ولا أدب، ولا غرامة؛ لأن ماله محرم، وبشرته محرمة، ومباح له المشي في الأرض، قال الله تعالى ﴿فامشوا في مناكبها﴾ [الملك: ١٥] . فإن قال قائل: فإن لم تكن بينة فاقضوا عليه باليمين بهذا الخبر؟ قلنا: وبالله تعالى التوفيق - إن دعواها انتظم حقا لها وحقا لله تعالى، ليس لها فيه دخول ولا خروج؟ فحقها: التعدي عليها وظلمها، وحق الله تعالى: هو الزنا، فواجب أن يحلف لها في حقها، فيحلف بالله ما تعديت عليك في شيء، ولا ظلمتك وتبرأ ذمته. ولا يجوز أن يحلف بالله ما زنى؛ لأنه لا خلاف في أن أحدا لا يحلف في حق ليس له فيه مدخل. ولا يختلف اثنان في أن من قال: إنك غصبتني وزيدا دينارا، فإنه إنما يحلف له في حقه من الدينار لا في حق زيد، وهكذا في كل شيء. وأما الفرق بين الذم والشكوى، فإنهم لا يختلفون فيمن قال لآخر - ابتداء أو في كلام بينهما - يا ظالم، يا غاصب، أنه مسيء - فمن قائل: عليه الأدب، ومن قائل: لآخر أن يقول له مثل ذلك. ولا يختلفون فيمن شكا بآخر فقال: ظلمني وأخذ مالي بغير حق، أنه لا شيء عليه وأنه ليس مسيئا بذلك فصح الفرق بين الشكوى وبين الاعتداء بالسب والقذف - وبالله تعالى التوفيق.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – الخطيب الشربيني (٥ / ٦٩)
(و) الملاعن (شرطه زوج) فلا يصح لعان أجنبي ولا سيد أمة وأم ولد؛ لأن الله تعالى لم يجعل لغير الزوج مخرجا من القذف إلا بالبينة، فقال تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ [النور: ٤] إلى قوله تعالى: ﴿فاجلدوهم﴾ [النور: ٤]: فأوجب سبحانه وتعالى الحد إن لم يأت بالبينة، وذلك يشمل الزوج وغيره، ثم خص الزوج بدفع الحد باللعان بقوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ [النور: ٦] الآية فبقي غيره على الأصل، والفرق بينهما احتياج الزوج للقذف لإفسادها فراشه بخلاف غيره فإن قيل: يصح لعان غير الزوج في صورتين: البائن لنفي الولد، ولإسقاط الحد بالقذف في النكاح كما سيأتي، والموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة كأن ظنها زوجته أو أمته ثم قذفها ولاعن لنفي السبب. أجيب بأن المراد بالزوج من له علقة النكاح كما قاله المصنف في التنقيح.

الفتاوى الكبرى الفقهية – ابن حجر الهيتمي (ج 4 ص 289 - 290)

(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن قول المنهاج والأظهر أنه يقضي بعلمه إلا في حدود الله سبحانه وتعالى قال الزين بن الحسين في تكملته يعني وأظهر القولين أن القاضي يقضي بعلمه كما إذا علم صدق المدعي لأنه يقضى بشاهدين وهو يفيد الظن فالقضاء بالعلم أولى ومنهم من قطع به وعن الربيع كان الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا يبوح به لقضاة السوء وعلى هذا يقضي بعلمه بالتواتر من باب أولى إلى آخر كلام ابن الحسين الذي يحيط علمكم به. فهل يا شيخ الإسلام بل إمام أئمة الأنام المحكم كالحاكم وإن قلتم لا فما الفرق وإن قلتم نعم فما هو العلم الذي يحكم به الحاكم أو المحكم بينوا لنا فإنا رأينا كلاما للأئمة لم نفهم الراجح منه. (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بأن الذي أفهمه كلام الأذرعي في توسطه أن المحكم لا يقضي بعلمه وعبارته هل للمحكم أن يحكم بعلمه بناء على المرجح أم لا لانحطاط رتبته لم أر فيه شيئا فيحتمل أن يجري فيه خلاف مرتب أولى بالمنع ويحتمل أن يقطع بالمنع انتهت وظاهرها بل صريحها ما تقرر من أنه لا يقضي بعلمه ومن ثم جزم بذلك بعض المتأخرين ولم يعزه للأذرعي كشيخنا في شرح الروض وغيره كصاحب العباب. وعليه فالفرق بين المحكم والحاكم ما أشار إليه الأذرعي بقوله لانحطاط رتبته ووجهه أن الحكم المستند إلى القضاء أقوى من الحكم المستند إلى التحكيم فالقاضي أعلى رتبة من المحكم فلا يلزم من إلحاقه به في جواز الحكم المستند إلى السبب المتفق عليه من البينة أو الإقرار إلحاقه به في جواز الحكم المستند إلى السبب المختلف فيه وهو علمه وإن كانت العلة المجوزة للقاضي الحكم بعلمه من أنه إذا جاز استناد حكمه إلى البينة التي لا تفيد إلا الظن فلأن يجوز استناد حكمه إلى العلم الذي يفيد اليقين من باب أولى جارية بعينها في المحكم على أن هذه العلة فيها نظر إذ اليقين في القاضي ليس بشرط وإنما الشرط غلبة الظن كما صرح به الشيخان حيث قالا المراد بالعلم الظن المؤيد بقرينة تمثيلهم للقضاء به بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه القاضي أقرضه ذلك أو سمع المدعى عليه أقر بذلك إذ رؤية الإقرار وسماع الإقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت القضاء. فقول الإمام إنما يقضي بالعلم فيما يستيقنه اختيار له مخالف للمذهب وبما تقرر علم أن للقاضي الحكم بعلمه المستفاد من الخبر المتواتر بالأولى لأنه يفيد العلم القطعي وبذلك صرح الإمام واعتمده ابن الرفعة وكذا ابن أبي الدم قال بعد نقله عن النهاية وهو في غاية الحسن ووجه علو مرتبة القاضي على الحكم أن القاضي له الحبس والترسيم واستيفاء ما يحكم به من العقوبات وحد القذف والمحكم ليس له شيء من ذلك لأن ذلك يخرم أبهة الولاة ومن ثم لم يجز له أن يهيئ حبسا لأنه حينئذ يكون مضاهيا للقاضي وهو ممنوع من مضاهاته وأيضا فلا يجوز أن يحكم في حدود الله سبحانه وتعالى وتعازيره وألحق بها الماوردي الولايات على الأيتام ولا يجوز تحكيمه إلا إن تأهل للقضاء بالنسبة لجميع الوقائع لا لتلك الواقعة فقط فإن لم يتأهل لذلك لم يجز تحكيمه مع وجود القاضي.

فتاوى دار الإفتاء المصرية – مجموعة من المؤلفين (١٠ / ٤٣٠)

المفتي عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ القرآن والسنة

السؤال يقول بعض الناس: إذا لم تقم الحكومة بتطبيق عقوبة الحدود عل الزنا والسرقة وشرب الخمر جاز للأفراد أن يقوموا بذلك تطبيقا لواجب تغيير المنكر باليد، فما رأى الدين فى ذلك؟

الجواب الحدود عقوبات شديدة قاسية شرعت لحكمة وهى الزجر إلى جانب ما فيها من مغفره، كما شرع تعريض النفس للقتل فى الجهاد فى سبيل الله لضرورته لرد العدوان والأمن على الحقوق، قال تعالى ﴿كتب عليكم القتال وهوكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم﴾ البقرة: ٢١٦، وقال ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾ البقرة: ٢٥١، ولما كانت الحدود شديدة كان لابد من الاستيثاق من الجريمة التى استوجبتها. فلا تثبت إلا بالإقرار الصريح الاختيارى أو شهادة العدول الذين قد يصلون إلى أربعة كما فى حد الزنى. وإذا وجدت شبهة فى الجريمة فلا يقام الحد، ويمكن اللجوء إلى التعزير. وهو دونه لا يصل إليه ولا يتجاوزه عند جمهور الفقهاء جاء فى الحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات» مع الاختلاف فى رفعه ووقفه وضعفه وقوته «نيل الأوطارج ٧، ١١٠» وحدث أن النبى ﷺ كان يتوثق ممن أقر بالجريمة ليكون الإقرار صريحا ونصا فيها.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي – وهبة الزحيلي (٧ / ٥٨٠١)

يرى الحنفية أن التعزير يغلب فيه حق الآدمي، فتثبت جريمة التعزير عندهم بما تثبت به سائر حقوق العباد من الإقرار والبينة والنكول عن اليمين، وعلم القاضي، وشهادة النساء مع الرجال، والشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي.

فتاوى دار الإفتاء المصرية – مجموعة من المؤلفين (٦ / ٢٠)

المفتي عبد الرحمن قراعة.

رجب ١٣٤٤ هجرية - ٧ فبراير ١٩٢٦ م

المبادئ ١ - الدفاع عن النفس مقرر فى الشريعة الإسلامية، ولا يختص به مذهب دون مذهب. ٢ - من رفع سيفا على مسلم قاصدا قتله كان للمرفوع عليه السيف قتل رافعه ولكن بشرط ألا يكون فى إمكانه دفعه إلا بقتله. ٣ - إذا تحقق الشرط المذكور فدفعه فقتله فلا شىء عليه. ٤ - إذا قتل رافع السيف - بعد تحقق الشرط - أحد من الناس فلا شىء عليه أيضا. ٥- الدفاع عن النفس دعوى لابد من إقامة البينة على صحتها حسب القواعد الفقهية فى ذلك

السؤال ١ - هل الدفاع عن النفس من المبادئ المقررة فى الشريعة الإسلامية وفى مذهب أبى حنيفة على الأخص. ٢ - وتنص الشريعة الإسلامية على أن الدفاع عن النفس يجب أن يثبته شاهدان أم أن هذا الإثبات مما يترك لرأى المحكمة

الجواب نعم مبدأ الدفاع عن النفس مقرر فى الشريعة الإسلامية، ولا يختص به مذهب أبى حنيفة، وإنا نورد هنا ماجاء فى بعض كتب الحنيفة. قال فى كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق مانصه (ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شىء بقتله) لقوله عليه الصلاة والسلام من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه (أى أهدره) ولأن دفع الضرر واجب، فوجب عليهم قتله إذا لم يمكن دفعه إلا به، ولا يجب على القاتل شىء لأنه صار باغيا بذلك وكذا إذا شهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه فلا يجب بقتله شىء لما بينا - أما الجواب عن السؤال الثانى. فإنه يؤخذ مما نبينه وهو أن الحجج الشرعية ثلاث البينة والإقرار والنكول، والذى يقدر صحة الدعوى وإقامة البرهان عليها إنما هو القاضى المترافع لديه المنوط بفصل الخصومات وفقا للقواعد المرعية فى الأحكام والله أعلم.

Muktamar Ke-35
Nahdlatul Ulama
Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang
27-31 Agustus 2026 | 14-18 R. Awwal 1448 H

KOMISI ORGANISASI

MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
14-18 Rabi'ul Awwal 1448 H/27-31 Agustus 2026 M

Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama

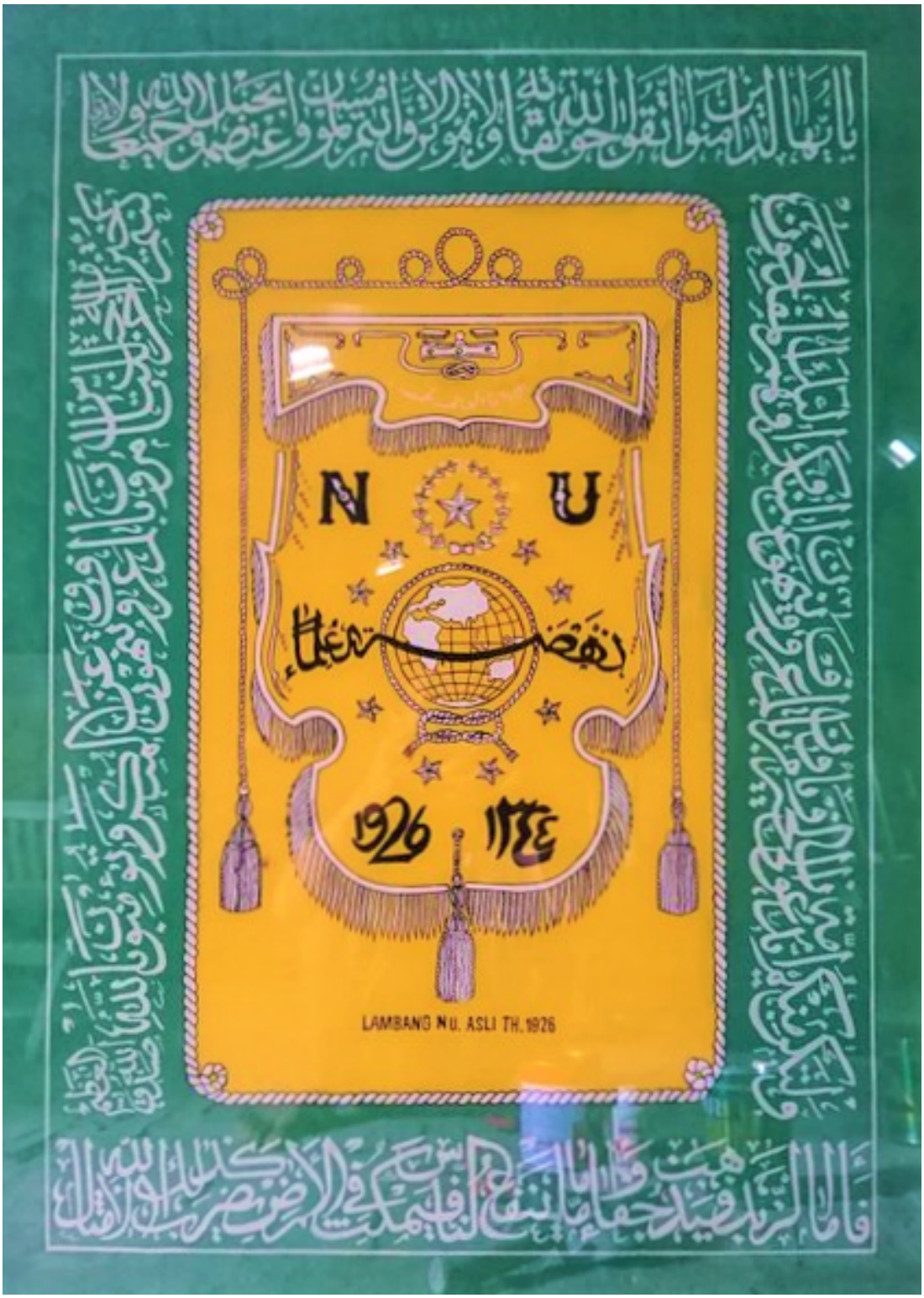
N U
نهضة العلماء
1926 ١٣٤٤
LAMBANG NU. ASLI TH. 1926

MATERI KOMISI ORGANISASI
MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

Panduan Umum

1. Anggaran Dasar mengatur hal-hal yang bersifat umum dan pokok serta jangka panjang; sedangkan yang bersifat detil diatur di peraturan di bawahnya.
2. Muatan Pengaturan dalam Anggaran Rumah Tangga mengadaptasi perubahan, khususnya untuk tuntutan modernisasi organisasi, tetapi tetap dalam koridor Muqaddimah Qanun Asasi.
3. Sedapat mungkin mengakomodasi seluruh aspirasi secara longgar, dengan tetap berpatokan pada khittah jam'iyyah; keluar dari pembahasan yang bersifat subyektif, *furu'iyah,* dan partikular.
4. Mengembalikan karakteristik khas NU sebagai Jam'iyyah Diniyah Ijtimaiyyah, termasuk dalam penyebutan istilah-istilah khas. Karenanya, penyebutan "perkumpulan" dikembalikan kepada istilah "jam'iyah", kecuali untuk menyebut Badan Hukum Perkumpulan.
5. Pembahasan sedapat mungkin mencari titik temu, kesepakatan-kesepakatan, serta tidak melahirkan isu-isu yang kontraproduktif.

Pertimbangan Perubahan/Perbaikan

1. Tindak lanjut Keputusan Munas/Konbes Ploso 2026
2. Penyesuaian dan Harmonisasi dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
3. Sinkronisasi antar-aturan di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sinkrinisasi urutan serta perbaikan redaksional.

Ikhtisar Perubahan/Perbaikan

1. Tindak lanjut Keputusan Munas/Konbes Ploso 2026, terdapat sembilan point sebagai berikut:
   a. Terdapat 7 (tujuh) usulan yang disepakati untuk dibahas di Muktamar: (i) tata kelola badan usaha; (ii) pelanggaran berat; (iii) Majelis Tahkim; (iv) kewenangan pengesahan MWCNU dan PARNU; (v) pengesahan kelembagaan/perangkat jam'iyah oleh pengurus NU sesuai tingkatannya; (vi) Muktamar Luar Biasa; dan (vii) sistem kaderisasi.
   b. Terdapat 2 (dua) usulan yang disepakati untuk disampaikan dengan dua opsi dan dibahas di Muktamar; (i) mekanisme pemilihan Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah; dan (ii) Ketentuan rangkap jabatan, mempertahankan rumusan yang ada atau menghapus frasa "Menteri".
2. Penyesuaian dan Harmonisasi dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:
   a. Ketentuan mengenai Majelis Tahkim sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan internal, yang bersifat final dan mengikat.
   b. Ketentuan mengenai payung hukum terkait badan usaha milik NU yang sesuai dengan ketentuan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia).
3. Sinkronisasi antar-aturan di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sinkronisasi urutan serta perbaikan redaksional, antara lain meliputi:
   a. Sinkronisasi aturan mekanisme pemilihan ketua di seluruh tingkatan dengan menyesuaikan aturan yang disepakati.
   b. Sinkronisasi ketentuan mengenai aturan larangan pengurus harian jam'iyah dengan pengurus partai politik
   c. Ketentuan peraturan di bawah AD/ART hasil Muktamar 35 yang harus disesuaikan, disinkronisasi, dan/atau diratifikasi seluruhnya dengan merujuk AD/ART terbaru.

d. Redaksi “perkumpulan” dikembalikan kepada “jam’iyah” untuk menegaskan jatidiri dan karakter khas NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah.
e. Sinkronisasi urutan Bab dan Pasal setelah perubahan/penambahan.

MATERI KOMISI ORGANISASI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
NAHDLATUL ULAMA

Matriks Usulan Redaksi Perubahan

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR				
No.	**Naskah Lama**	**Usulan Perubahan**	**No. Pasal yang Diubah/Ditambah**	**Keterangan Argumen**
	BAB I NAMA, KEDUDUKAN, DAN STATUS Pasal 1 (1) Perkumpulan/Jam’iyah ini bernama Nahdlatul Ulama disingkat NU. (2) Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi untuk waktu yang tidak terbatas.	Tetap		
	Pasal 2 Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibu kota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya	Tetap		
	Pasal 3 (1) Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. (2) Nahdlatul Ulama memiliki hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset lainnya.	Tetap		
	BAB II PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS Pasal 4 Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al Qur’an, As-Sunnah, Al Ijma’, dan Al-Qiyas.	Tetap		

	Pasal 5 Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari 4 (empat) madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam Al-Junaid Al-Bagdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali.	Tetap		
	Pasal 6 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap		
	BAB III Lambang Pasal 7 Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkari di atas garis khatulistiwa yang terbesar diantaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bin tang lainnya terletak melingkar di bawah garis khatulistiwa, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, dan ada huruf "N" di bawah kiri dan "U" di bawah kanan, semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau.	Tetap		
	BAB IV TUJUAN DAN USAHA Pasal 8 (1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyyah (perkumpulan sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan	Tetap		

	bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. (2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta			
	Pasal 9 Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: a. di bidang agama, mengupayakan ter laksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah; b. di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan ke budayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara; c. di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl'afin); d. di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk ke makmuran yang merata; dan e. mengembangkan usaha - usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairu Ummah	Perubahan	Pasal 9 (1)Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: a. di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah; b. di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan ke budayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara;	Ditambahkan ayat (2) dan (3) yang merupakan norma baru yang ada di sistem AHU dan belum pernah diatur AD lama

			c. di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl'afin); d. di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk ke makmuran yang merata; dan e. mengembangkan usaha - usaha lain melalui kerjasama dengan para pihak, baik dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *khairu ummah*. (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB V KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 10 (1) Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.	Tetap		

	(2) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga			
	Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban anggota serta ketentuan lainnya mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga	Tetap		
	BAB VI STRUKTUR DAN PERANGKAT PERKUMPULAN Pasal 12 Struktur Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. Pengurus Besar; b. Pengurus Wilayah; c. Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa; d. Majelis Wakil Cabang; e. Pengurus Ranting; dan f. Pengurus Anak Ranting			
	Pasal 13 Untuk melaksanakan tujuan dan usaha usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9, Nahdlatul UIama membentuk perangkat perkumpulan yang meliputi Lembaga dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama.	Tetap		
	BAB VII KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT Pasal 14 (1)Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah. (2)Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan Majelis Wakil Cabang. (3)Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. (4)Tanfidziyah adalah pelaksana. (5)Ketentuan lebih lanjut tentang susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.	Tetap		

	Pasal 15 (1) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama terdiri dari: a. Mustasyar Pengurus Besar; b. Pengurus Besar Harian Syuriyah; c. Pengurus Besar Lengkap Syuriyah; d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah; e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah; dan f. Pengurus Besar Pleno. (2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. Mustasyar Pengurus Wilayah; b. Pengurus Wilayah Harian Syuriyah; c. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah; d. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah; e. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah; dan f. Pengurus Wilayah Pleno. (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. Mustasyar Pengurus Cabang; b. Pengurus Cabang Harian Syuriyah; c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah; d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah; e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah; dan Pengurus Cabang Pleno. (4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. Mustasyar Pengurus Cabang Istimewa; b. Pengurus Cabang Istimewa Harian Syuriyah; c. Pengurus Cabang Istimewa Lengkap Syuriyah; d. Pengurus Cabang Istimewa Harian Tanfidziyah; e. Pengurus Cabang Istimewa Lengkap Tanfidziyah; dan	Tetap		

	f. Pengurus Cabang Istimewa Pleno. (5) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas: a. Mustasyar Majelis Wakil Cabang; b. Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah; c. Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriyah; d. Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah; e. Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah; dan f. Majelis Wakil Cabang Pleno. (6) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama terdiri atas: a. Pengurus Ranting Harian Syuriyah; b. Pengurus Ranting Lengkap Syuriyah; c. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah; d. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah; dan e. Pengurus Ranting Pleno. (7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. Pengurus Anak Ranting Harian Syuriyah; b. Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriyah; c. Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah; d. Pengurus Anak Ranting Lengkap Tanfidziyah; dan e. Pengurus Anak Ranting Pleno. (8) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.			
	Pasal 16 (1) Masa khidmat kepengurusan sebagai mana dimaksud pada Pasal 14 adalah 5 (lima) tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun. (2) Masa jabatan Pengurus Lembaga disesuaikan dengan masa jabatan	Tetap		

	Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing. (3) Masa khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua) periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 (satu) periode			
	BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG Pasal 17 Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak.	Tetap		
	Pasal 18 Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan keputusan perkumpulan sesuai tingkatannya.	Tetap Dengan penyesuaian "perkumpulan" menjadi "jam'iyah"	Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan keputusan Jam'iyah sesuai tingkatannya.	
	Pasal 19 Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan - keputusan perkumpulan sesuai tingkatannya.	Tetap Dengan penyesuaian "perkumpulan" menjadi "jam'iyah"	Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan Jam'iyah sesuai tingkatannya.	
	Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang sesuai Pasal 17, 18 dan 19 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.	Tetap		
	BAB IX PERMUSYAWARATAN Pasal 21 (1) Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang diikuti oleh struktur perkumpulan di bawahnya. (2) Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.	Tetap Dengan penyesuaian "perkumpulan" menjadi "jam'iyah"	(1)Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan yang diikuti oleh struktur jam'iyah di bawahnya.	

	Pasal 22 Permusyawaratan Tingkat Nasional yang sebagaimana dimaksud Pasal 21 terdiri dari: a. Muktamar; b. Muktamar Luar Biasa; c. Musyawarah Nasional Alim Ulama: dan d. Konferensi Besar	Tetap		
	Pasal 23 Permusyawaratan Tingkat Daerah sebagai mana dimaksud Pasal 21 terdiri dari: a. Konferensi Wilayah; b. Musyawarah Kerja Wilayah; c. Konferensi Cabang/ Konferensi Cabang Instimewa; d. Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Istimewa; e. Konferensi Wakil Cabang; f. Musyawarah Kerja Wakil Cabang; g. Musyawarah Ranting; h. Musyawarah Kerja Ranting; i. Musyawarah Anak Ranting; dan j. Musyawarah Kerja Anak Ranting.	Tetap		
	Pasal 24 (1) Permusyaratan di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah. (2) Permusyawaratan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini terdiri dari: a. Kongres; dan b. Rapat Kerja. (3) Permusyawaratan Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Jam'iyah dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (4) Badan Otonom harus meratifikasi hasil permusyawaratan Nahdlatul Ulama.	Tetap		
	Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.	Tetap		

	BAB X RAPAT-RAPAT Pasal 26 Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang dilakukan pada masing masing tingkat kepengurusan	Tetap Dengan penyesuaian “perkumpulan” menjadi “jam’iyah”	Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan jam’iyah yang dilakukan pada masing masing tingkat kepengurusan	
	Pasal 27 Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. Rapat Kerja; b. Rapat Pleno; c. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; d. Rapat Harian Syuriyah; e. Rapat Harian Tanfidziyah; dan f. Rapat - rapat lain yang dianggap perlu	Tetap		
	Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana Pasal 27 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga	Tetap		
	BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 29 (1) Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. (2) Sumber dana Nahdlatul Ulama diperoleh dari: a. uang pangkal; b. uang i’anah syahriyah; c. sumbangan; dan d. usaha lain yang halal. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan dan pemanfaatan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.	Tetap		
	Pasal 30 Kekayaan Perkumpulan adalah inventaris dan asset-aset Perkumpulan	Tetap Dengan penyesuaian	Kekayaan Perkumpulan/Jam’iya	

	yang berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak serta wakaf yang dimiliki/dikuasai oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama.	"perkumpulan" menjadi "jam'iyah"	h adalah inventaris dan asset-aset yang berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak serta wakaf yang dimiliki/dikuasai oleh Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama.	
		Penambahan	BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL Pasal 31 (1) Perselisihan dalam organisasi diselesaikan melalui musyawarah mufakat. (2) Apabila penyelesaian melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan melalui Majelis Tahkim (3) Ketentuan mengenai kedudukan dan kewenangan Majelis Tahkim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.	
	BAB XII PERUBAHAN Pasal 31 (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh keputusan Muktamar	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XIII PERUBAHAN Pasal 32	

	yang sah yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa yang sah dan sedikitnya disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah. (2) Dalam hal Muktamar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai kuorum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Muktamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.			
	BAB XIII PEMBUBARAN PERKUMPULAN Pasal 32 (1) Pembubaran Perkumpulan/ Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai suatu perkumpulan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan. (2) Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada perkumpulan atau badan amal yang sepaham dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XIV PEMBUBARAN PERKUMPULAN Pasal 33	
	BAB XIV PENUTUP Pasal 33 Naskah "Khittah Nahdlatul Ulama" merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XV PENUTUP Pasal 34	

II
MATERI KOMISI ORGANISASI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA

Matriks Usulan Redaksi Perubahan

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA				
No.	**Naskah Lama**	**Tetap/Perubahan**	**Naskah Baru**	**Keterangan/ Argumen**
	BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jam'iyah; b. anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama namun yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia; dan c. anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.	Tetap (1)		
	BAB II TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN Pasal 2 (1) Anggota biasa diterima melalui Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama dan/atau Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama setempat. (2) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. (3) Apabila tidak ada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama dan/atau Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama di	Tetap		

	tempat domisili maka pendaftaran anggota dilakukan pada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama terdekat. (4) Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.			
	Pasal 3 (1) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat. (2) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama setempat. (3) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di tempat domisili maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdekat.	Tetap		
	Pasal 4 (1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan. (3) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan.	Tetap		
	Pasal 5 (1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena: a. permintaan sendiri; dan/atau b. diberhentikan. (2) Seseorang berhenti karena permintaan sendiri mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting di mana dia terdaftar. (3) Seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi	Tetap		

	kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur penerimaan dan pemberhentian keanggotaan, akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.			
	BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 6 (1) Anggota biasa berkewajiban: a. menjaga dan mengamalkan Islam faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah; b. mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan serta menegakkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah; d. mempertahankan keutuhan keluarga dalam bidang agama, budaya dan tradisi; e. setia dan bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah Jam'iyah serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya; dan f. membayar i'anah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berkewajiban menjaga nama baik Jam'iyah, bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah Jam'iyah serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.	Tetap (2)		
	Pasal 7 (1) Anggota biasa berhak: a. mendapatkan pelayanan keagamaan; b. mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, sosial,	Tetap		

	ekonomi, kesehatan, informasi yang sehat, perlindungan hukum dan keamanan; c. berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. menjalankan tradisi dan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah; e. mendapatkan perlindungan diri dan keluarga dari pengaruh paham – paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah; dan f. mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTA NU). (2) Anggota luar biasa mempunyai hak se bagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih. (3) Anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTA NU). (4) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota Jam'iyah sosial keagamaan lain yang mempunyai akidah, asas, dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama.			
	BAB IV TINGKATAN KEPENGURUSAN Pasal 8 Tingkatan kepengurusan dalam Perkum pulan Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibu kota Negara; b. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) untuk tingkat Provinsi dan berkedudukan di wilayahnya;	Tetap		

	c. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk tingkat Kabupaten/ Kota dan berkedudukan di wilayahnya; d. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) untuk Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan; e. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) untuk tingkat Kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya; f. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) untuk tingkat Kelurahan/desa; dan g. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama (PARNU) untuk kelompok dan/ atau suatu komunitas.			
	Pasal 9 (1) Pembentukan wilayah Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Pembentukan wilayah Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. (4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 2 (dua) tahun. (5) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama berfungsi sebagai koordinator cabang Nahdlatul Ulama di daerahnya dan sebagai pelaksana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk daerah yang bersangkutan.	Tetap		
	Pasal 10 (1) Pembentukan cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama melalui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama	Tetap		

	kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Pembentukan cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. (4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun. (5) Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) di atas disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah atau sulitnya komunikasi dan/atau faktor kesejarahan, pembentukan cabang Nahdlatul Ulama diatur oleh kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.			
	Pasal 11 (1) Pembentukan cabang istimewa Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang anggota. (2) Pembentukan cabang istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. (4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.	Tetap		
	Pasal 12 (1) Pembentukan wakil cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.	Tetap		

	(2) Pembentukan wakil cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. (4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan			
	Pasal 13 (1) Pembentukan ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama melalui Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. (2) Pembentukan ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. (4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.	Tetap		
	Pasal 14 (1) Pembentukan anak ranting Nahdlatul Ulama dapat dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota. (2) Pembentukan anak ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh anggota melalui Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama ke pada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. (3) Pembentukan anak ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.	Tetap		

	(4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. (5) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.			
	Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pembentukan kepengurusan Jam'iyah diatur dalam Peraturan Jam'iyah Nahdlatul Ulama.	Tetap (3)		
	BAB V PERANGKAT JAM'IYAH DAN BADAN KHUSUS Pasal 16 (1) Perangkat Jam'iyah Nahdlatul Ulama terdiri dari: a. Lembaga; dan b. Badan Otonom. (2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat membentuk Badan Khusus	Tetap (4)		
	Pasal 17 (1) Lembaga adalah perangkat departementasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. (2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. (3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan. (4) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah masing – masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama. (5) Pembentukan Lembaga di tingkat wilayah, cabang dan cabang istimewa Nahdlatul Ulama, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.	Perubahan	- Pasal 17 Ayat 6 huruf k: (6)Lembaga meliputi: a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah; b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas	

	(6) Lembaga meliputi: a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah; b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal; c. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan; d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama; e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup; f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan; g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia; h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama di singkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan,		melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal; c. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan; d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama; e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan	

	konsultasi, dan kajian kebijakan hukum; i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya; j. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di singkat LAZISNU, bertugas menghimpun zakat dan shadaqah serta mentasharufkan zakat kepada mustahiqnya; k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWP NU, bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama; l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah – masalah maudlu'iyyah (tematik) dan waqi'iyyah (aktual) yang akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; m. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid; n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan; o. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan iImu falak; p. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/ buku serta media informasi menurut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah; q. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan		lingkungan hidup; f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan; g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia; h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama di singkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum; i. Lembaga Seni Budaya Muslimin	

	pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama; dan r. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.		Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya; j. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di singkat LAZISNU, bertugas menghimpun zakat dan shadaqah serta mentasharufkan zakat kepada mustahiqnya; k. Lembaga Aset dan Wakaf Nahdlatul Ulama disingkat LAW NU, bertugas mengurus dan mengembangkan aset dan harta benda wakaf milik Nahdlatul Ulama; l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah – masalah maudlu'iyyah (tematik) dan waqi'iyyah (aktual) yang akan menjadi keputusan	

			Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; m. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid; n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan; o. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan iImu falak; p. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/ buku serta media informasi menurut faham	

			Ahlus Sunnah wal Jama'ah; q. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama; dan r. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.	
	Pasal 18 (1) Badan Otonom adalah Perangkat Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. (2) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar. (3) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama. (4) Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.	Tetap		

	(5) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. (6) Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah: a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama; b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun; c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun; d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun; e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama Ulama yang berusia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun; dan f. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun. (7) Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya: a. Jam’iyah Ahli Thariqah al-Mu’ta barah an-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal thariqat yang mu’tabar;			

	b. Jam'iyyatul Qurra wal Huffazh di singkat JQH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/ Qoriah dan Hafizh/ Hafizhah; c. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual; d. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja; e. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri; f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan/atau ustadz; g. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan; dan h. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARI NU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan sholawat. (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Perangkat Jam'iyah, akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.			
	Pasal 19 (1) Badan Khusus berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan Jam'iyah di bidang tertentu. (2) Pembentukan dan penghapusan Badan Khusus ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan	Tetap		

	Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Khusus akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.			
	Pasal 20 Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga dan Badan Otonom pada tingkat masing masing.	Tetap		
	BAB VI SUSUNAN PENGURUS BESAR Pasal 21 (1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais 'Aam, beberapa Wakil Rais 'Aam, beberapa Rais, Katib 'Aam, dan beberapa Katib. (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.	Tetap		
	Pasal 22 (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara. (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga tingkat pusat.	Tetap		
	Pasal 23 Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat.	Tetap		
	BAB VII SUSUNAN PENGURUS WILAYAH Pasal 24 (1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.	Tetap		

	(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib. (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.			
	Pasal 25 (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga tingkat wilayah.	Tetap		
	Pasal 26 Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus Lengkap Tanfidziyah, dan Ketua Badan Otonom tingkat Wilayah.	Tetap		
	BAB VIII SUSUNAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS CABANG ISTIMEWA Pasal 27 (1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib. (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.	Tetap		
	Pasal 28 (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga di tingkat cabang.	Tetap		
	Pasal 29 Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah, dan Ketua Badan Otonom tingkat cabang.	Tetap		

	BAB IX SUSUNAN MAJELIS WAKIL CABANG Pasal 30 (1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib. (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan	Tetap		
	Pasal 31 Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.	Tetap		
	Pasal 32 Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat wakil cabang.	Tetap		
	BAB X SUSUNAN PENGURUS RANTING Pasal 33 (1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib. (2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.	Tetap		
	Pasal 34 Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.	Tetap		
	Pasal 35 Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat ranting.	Tetap		
	BAB XI SUSUNAN PENGURUS ANAK RANTING Pasal 36	Tetap		

	(1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib. (2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.			
	Pasal 37 Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.	Tetap		
	BAB XII SUSUNAN PENGURUS BADAN OTONOM Pasal 38 (1) Susunan kepengurusan Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom. (2) Pengesahan susunan kepengurusan Badan Otonom atas dasar rekomendasi Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatan masing-masing.	Tetap		
	BAB XIII SYARAT MENJADI PENGURUS Pasal 39 (1) Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting Nahdlatul Ulama harus sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama. (2) Untuk menjadi Pengurus Ranting harus sudah menjadi Pengurus Anak Ranting dan/ atau anggota aktif sekurang kurangnya 2 (dua) tahun. (3) Untuk menjadi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, atau Pengurus Badan Otonom tingkat wakil cabang, dan/ atau Pengurus Harian Ranting Nahdlatul Ulama. (4) Untuk menjadi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat cabang, dan/ atau Pengurus Harian	Tetap		

	tingkat wakil cabang, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. (5) Untuk menjadi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat wilayah, dan/ atau Pengurus Harian tingkat cabang, dan/ atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. (6) Untuk menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan/ atau Pengurus Harian tingkat wilayah, dan/ atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat pusat serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. (7) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat menjadi pengurus, akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.			
		Penambahan	BAB XIV KADERISASI Pasal 40 (1) Setiap pengurus NU di semua tingkatan harus telah melalui proses kaderisasi. (2) Kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat struktural dalam tata kelola kaderisasi jam'iyah NU dan badan otonomnya. (3) Kaderisasi sebagaimana dimaksud pada	

			ayat (1) dapat bersifat fungsional bagi calon pengurus dari kader fungsional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Jam'iyah	
	BAB XIV PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS Pasal 40 (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut: a. Rais 'Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi; b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 9 (sembilan) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam muktamar; c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An - Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud; d. Wakil Rais 'Aam ditunjuk oleh Rais 'Aam terpilih; e. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan	Ada dua opsi 1. Tetap 2. Perubahan	BAB XV PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS Pasal 41 e. Ketua Umum dipilih dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Ketua Umum dipilih secara langsung oleh peserta muktamar melalui musyawarah mufakat. (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak tercapai, maka ketua umum dipilih oleh ahlul halli wal 'aqdi. (3) Calon ketua umum sebagaimana dimaksud pada angka (2) dijaring melalui pemungutan suara oleh peserta muktamar dengan memilih sebanyak-banyaknya 5 calon	

	mendapat persetujuan dari Rais ‘Aam terpilih; dan f. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih. (2) Rais ‘Aam terpilih, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat. (3) Mustasyar dan A’wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah. (4) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah; (5) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga.	Sinkronisasi, ayat (4) dan ayat (5) digabung	yang memenuhi syarat. (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3) diambil 5 besar untuk menjadi calon ketua umum dan diserahkan kepada Ahlul Halli wal ‘Aqdi. (5) Calon ketua umum sebagaimana dimaksud pada angka (4) dipilih oleh ahlul halli wal ‘aqdi setelah menyampaikan kesedian secara lisan/tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Aam terpilih. (4) Pengurus Lembaga ditetapkan oleh Penguruh Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah (5) hapus	
	Pasal 41 (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai berikut: a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi; b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 7 (tujuh) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wilayah; c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah	Konkordan dengan Pasal sebelumnya Ada dua opsi 1. Tetap 2. Perubahan (menyesuaikan dengan mekanisme PB) urutan pasal berubah	Pasal 42	

	Ahlus Sunnah wal Jama'ah An – Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud; dan d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Wilayah dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih. (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona. (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah. (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.			
	Pasal 42 (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut: a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi; b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang; c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An - Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk	Konkordan dengan Pasal sebelumnya Ada dua opsi 1. Tetap 2. Perubahan (menyesuaikan dengan mekanisme PB) urutan pasal berubah	Pasal 43	

	memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud; d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Cabang dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih. (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona. (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah. (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.			
	Pasal 43 (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebagai berikut: e. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi; f. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang Istimewa; g. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An - Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud; h. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara	Konkordan dengan Pasal sebelumnya Ada dua opsi 1. Tetap 2. Perubahan (menyesuaikan dengan mekanisme PB) urutan pasal berubah	Pasal 44	

	dalam Konferensi Cabang Istimewa dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih. (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona. (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah. (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.			
	Pasal 44 (1)Pemilihan dan penetapan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut: a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi; b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wakil Cabang; c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud; dan d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta Konferensi melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Wakil Cabang dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.	Konkordan dengan Pasal sebelumnya Ada dua opsi 1. Tetap 2. Perubahan (menyesuaikan dengan mekanisme PB) urutan pasal berubah	Pasal 45	

	(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.			
	Pasal 45 (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut: a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi. b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Ranting; c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud; dan d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Ranting dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih. (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Ranting.	Konkordan dengan Pasal sebelumnya Ada dua opsi 1. Tetap 2. Perubahan (menyesuaikan dengan mekanisme PB) urutan pasal berubah	Pasal 46	
	Pasal 46 (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:	Konkordan dengan Pasal sebelumnya Ada dua opsi 1. Tetap	Pasal 47	

	a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi; b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musya warah Anggota; c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah An - Nahdliyah, wara’ dan zuhud, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin; dan d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Anggota dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih. (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.	2. Perubahan (menyesuaikan dengan mekanisme PB) urutan pasal berubah		
	Pasal 47 Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan dan penetapan pengurus, akan diatur dalam Peraturan Jam’iyah.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 48	
	BAB XV PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU Pasal 48 (1) Apabila Rais ‘Aam berhalangan tetap, maka Wakil Rais ‘Aam menjadi Pejabat Rais ‘Aam. (2) Apabila Wakil Rais ‘Aam berhalangan tetap, maka Rais ‘Aam atau Pejabat Rais ‘Aam menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi Wakil Rais ‘Aam. (3) Apabila Rais ‘Aam dan Wakil Rais ‘Aam berhalangan tetap dalam waktu	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XVI PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU Pasal 49	

	yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mene tapkan Pejabat Rais ‘Aam dan Pejabat Wakil Rais ‘Aam. (4) Apabila Mustasyar, Rais Syuriyah, Katib ‘Aam, Katib, dan A’wan berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.			
	Pasal 49 (1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjadi Pejabat Ketua Umum. (2) Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum atau Pejabat Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil Ketua Umum. (3) Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Ketua Umum dan Pejabat Wakil Ketua Umum. (4) Apabila Ketua Tanfidziyah, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (5) Apabila Ketua Lembaga berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan, ditetapkan melalui Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (6) Apabila anggota Pengurus Lembaga berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan dan	Sinkronisasi; konkordan dengan aturan di atasnya, pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bahwa penggantian pengurus, dilakukan melalui rapat pengurus harian syuriyah dan tanfizdiyah, dan ditetapkan dengan SK pengurus Nomor Pasal disesuaian	Pasal 50 (4) Apabila Ketua Tanfidziyah, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (5) Apabila Ketua Lembaga berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan, ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan	

	disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.		Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (6) Apabila anggota Pengurus Lembaga berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan, ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.	
	Pasal 50 Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan prinsip – prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 48 dan 49 Anggaran Rumah Tangga ini	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 51	
	BAB XVI RANGKAP JABATAN Pasal 51 (1) Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan: a. jabatan Pengurus Harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama; b. jabatan Pengurus Harian Lembaga dan Badan Otonom; c. jabatan Pengurus Harian Partai Politik; d. jabatan Pengurus Harian organisasi yang berafiliasi kepada partai politik; dan/atau	Ada dua opsi: 1. Tetap 2. Perubahan menghilangkan kata “menteri” Sinkronisasi	Penyesuaian Nomor Bab dan Pasal BAB XVII RANGKAP JABATAN Pasal 52 Opsi perubahan pada Pasal 52 ayat (5): (5) Yang disebut dengan jabatan politik dalam Anggaran Rumah Tangga adalah jabatan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil	

	e. jabatan Pengurus Harian organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip–prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama. (2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada semua tingkat kepengurusan. (3) Jabatan Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan: a. jabatan Pengurus Harian pada semua tingkat kepengurusan Badan Otonom lainnya; b. jabatan Pengurus Harian Lembaga; c. jabatan Pengurus Harian partai politik; dan/atau d. jabatan Pengurus Harian organisasi yang berafiliasi kepada partai politik. (4) Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Rais dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Rais dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik. (5) Yang disebut dengan jabatan politik dalam Anggaran Rumah Tangga adalah jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. (6) Apabila Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang		Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Menghapus kata “harian” pada Pasal 51 huruf c dan d menjadi: c. jabatan Pengurus Partai Politik; d. jabatan Pengurus organisasi yang berafiliasi kepada partai politik; dan/atau	

	bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan. (7) Apabila Rais dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Rais dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (8) Ketentuan lebih lanjut tentang rangkap jabatan, akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.			
	BAB XVII PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS Pasal 52 (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disahkan oleh Rais 'Aam dan Ketua Umum. (2) Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. (4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. (5) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. (6) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama disahkan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.	- Penyesuaian Nomor Bab dan Pasal - Perubahan kewenangan peng-SK-an pengurus	BAB XVIII PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS Pasal 53 - Perubahan pada Pasal 51 ayat (4) (4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (6) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atas usulan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama	Mekanisme pengesahan berdasarkan Pasal 52 ayat (4), dan (5) ART belum mencerminkan prinsip-prinsip dalam Upaya pembinaan dan pengembangan di Nahdlatul Ulama
	Pasal 53 (1) Pengurus Harian Lembaga ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan surat keputusan	Sinkronisasi, perubahan dijadikan satu pasal	Penyesuaian Nomor Pasal Pasal 54 Pengurus Lembaga ditetapkan dalam	

	pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya. (2) Pengurus Lengkap Lembaga disusun dan disahkan oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan.		Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah serta disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya.	
	Pasal 54 (1) Pengurus Harian Badan Otonom Tingkat Pusat disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Pengurus Harian Badan Otonom di tingkat wilayah dan cabang disahkan oleh pengurus Tingkat Pusat Badan Otonom yang bersangkutan, dengan rekomendasi dari pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 55	
	Pasal 55 (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat membekukan kepengurusan wilayah, kepengurusan cabang dan kepengurusan cabang istimewa melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat membekukan kepengurusan wakil cabang dan kepengurusan ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. (3) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dapat membekukan kepengurusan anak ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 56	
	Pasal 56 Ketentuan lebih lanjut tentang pengesahan dan pembekuan pengurus serta tata cara pelantikan kepengurusan, akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 57	
	BAB XVIII WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS Pasal 57 (1) Mustasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan/ atau nasehat, diminta atau tidak, baik secara perorangan maupun kolektif	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XIX WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS Pasal 58	

	kepada pengurus menurut tingkatannya. (2) Syuriyah bertugas merumuskan kebijakan umum Jam'iyah, mengarahkan dan mengawasi Tanfidziyah serta melakukan konsolidasi Syuriyah pada tingkat dibawahnya. (3) Tanfidziyah bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Jam'iyah berdasarkan kebijakan umum Jam'iyah yang ditetapkan oleh Muktamar dan Syuriyah.			
	Pasal 58 (1) Kewenangan Rais 'Aam adalah: a. mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum Jam'iyah; b. mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi, maupun informasi; c. bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/ atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama; d. bersama Ketua Umum menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan bersama Ketua Umum membatalkan keputusan Perangkat Jam'iyah yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. (2) Tugas Rais 'Aam adalah: a. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 59	

	b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Syuriyah; c. bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; dan d. memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriyah			
	Pasal 59 (1) Kewenangan Wakil Rais ‘Aam adalah: a. menjalankan kewenangan Rais ‘Aam apabila Rais ‘Aam berhalangan; dan b. bersama Rais ‘Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Tugas Wakil Rais ‘Aam adalah: a. membantu tugas-tugas Rais ‘Aam; b. mewakili Rais ‘Aam apabila berhalangan; dan c. melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/ atau bersama Rais ‘Aam.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 60	
	Pasal 60 (1) Kewenangan Rais adalah: a. menjalankan wewenang Rais ‘Aam dan/ atau Wakil Rais ‘Aam ketika berhalangan; dan b. merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing. (2) Tugas Rais adalah: a. membantu tugas-tugas Rais ‘Aam dan/ atau Wakil Rais ‘Aam; b. mewakili Rais ‘Aam dan/ atau Wakil Rais ‘Aam apabila berhalangan; dan c. melaksanakan bidang khusus masing-masing.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 61	

	Pasal 61 (1) Kewenangan Katib ‘Aam adalah: a. merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Pengurus Besar Syuriyah; dan b. bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Tugas Katib ‘Aam adalah: a. membantu Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan tugasnya; b. merumuskan dan mengatur manajemen administrasi Pengurus Besar Syuriah; dan c. mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Katib.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 62	
	Pasal 62 (1) Katib mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. melaksanakan kewenangan Katib ‘Aam apabila berhalangan; dan b. mendampingi Rais-rais sesuai bidang masing -masing. (2) Katib mempunyai tugas sebagai berikut: a. membantu tugas Katib ‘Aam; b. mewakili Katib ‘Aam apabila berhalangan; dan c. melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib ‘Aam	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 63	
	Pasal 63 A’wan memberi masukan dan membantu pelaksanaan tugas Pengurus Besar Syuriyah.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 64	
	Pasal 64 (1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut: a. mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan Jam’iyah dalam bentuk	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 65	

	konsultasi, koordinasi maupun informasi; b. merumuskan kebijakan khusus Jam'iyah; c. bersama Rais Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/ atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama; d. bersama Rais 'Aam menandatangani keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; e. bersama Rais 'Aam membatalkan keputusan Perangkat Jam'iyah yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; f. mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di dalam maupun di luar pengadilan; g. Ketua Umum dapat mewakilkan kepada pengurus lain untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f pada Pasal ini; dan h. bersama Rais/Katib dan Sekretaris Jenderal menandatangani surat surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut: a. memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan - keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Tanfidziyah;			

	c. bersama Rais ‘Aam memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; dan d. memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah			
	Pasal 65 (1) Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah: a. menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalangan; dan b. membantu Ketua Umum memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah: a. membantu tugas-tugas Ketua Umum; b. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan; dan c. melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/ atau bersama Ketua Umum.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 66	
	Pasal 66 (1) Kewenangan Ketua adalah: a. menjalankan wewenang Ketua Umum dan/ atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan; dan b. merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing. (2) Tugas Ketua-Ketua adalah: a. membantu tugas-tugas Ketua Umum; dan b. menjalankan tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembidangan yang ditetapkan.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 67	
	Pasal 67 (1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah: a. merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Pengurus Besar Tanfidziyah;	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 68	

	b. merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan c. bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Katib ‘Aam menandatangani surat-surat keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah: a. membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat Jenderal; c. mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Wakil Sekretaris Jenderal; dan d. bersama Rais/ Katib dan Ketua Umum menandatangani surat surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.			
	Pasal 68 (1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah: a. melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan; b. mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing; dan c. bersama Rais/ Katib dan Ketua Umum/ Wakil Ketua Umum/ Ketua menandatangani surat - surat biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah: a. membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal; b. mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan; dan c. melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 69	

	Pasal 69 (1) Kewenangan Bendahara Umum adalah: a. mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; b. melakukan pembagian tugas ke bendaharaan dengan bendahara; dan c. bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan keuangan. (2) Tugas Bendahara Umum adalah: a. mendapatkan sumber-sumber pendanaan Jam'iyah; b. merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan aset; membuat Standard Operating Procedure (SOP) keuangan; c. menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan d. menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan audit keuangan.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 70	
	Pasal 70 (1) Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus seba gaimana diatur dalam pasal - pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang wewenang dan tugas pengurus, akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 71	
	BAB XIX KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS Pasal 71 (1) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban:	Penyesuaian dan Penambahan	- Penyesuaian nomor Bab dan Pasal menjadi: BAB XX KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS Pasal 72	

	a. menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan Jam'iyah; b. menjaga keutuhan Jam'iyah ke dalam maupun keluar; dan c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya. (2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak: a. menetapkan kebijakan, keputusan dan Peraturan Jam'iyah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan b. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya.		- Penambahan huruf baru (b) pada pasal 72 ayat 2: (2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak: a. menetapkan kebijakan, keputusan dan Peraturan Jam'iyah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan b. memberikan saran atau koreksi kepada pengurus setingkat atau dua tingkat lebih tinggi dengan cara dan tujuan yang baik. c. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya.	
		Penambahan BAB baru tentang Larangan dan Sanksi	BAB XXI Larangan dan Sanksi Pasal 73 Setiap Pengurus Nahdlatul Ulama disemua tingkatan dilarang: a. Melakukan perbuatan yang melanggar syariat; b. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik,	

			martabat, dan kehormatan Nahdlatul Ulama; c. menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan dalam Jam'iyah untuk kepentingan pribadi maupun golongan; d. melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 74 (1) Pengurus yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat dikenakan sanksi organisasi. (2) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pemberhentian dari kepengurusan	
	BAB XX EVALUASI KEPENGURUSAN Pasal 72 (1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama di setiap tingkat diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut: a. kinerja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dinilai berdasarkan pelaksanaan mandat Muktamar,	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XXII EVALUASI KEPENGURUSAN Pasal 75	

	Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar, dan Rapat Kerja Nasional; dan b. kinerja Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diukur berdasarkan pelaksanaan kewajiban - kewajiban Jam'iyah. (2) Berdasarkan kinerjanya, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diklasifikasikan berdasarkan kelompok A, B, dan C. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi kepengurusan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.			
	BAB XXI PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL Pasal 73 (1) Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. (2) Muktamar membicarakan dan menetapkan: a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis; b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; c. Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun; d. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; e. rekomendasi Jam'iyah; f. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan g. memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (3) Muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun. (4) Muktamar dihadiri oleh: a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; b. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama; dan	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XXIII PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL Pasal 76	

	c. Pengurus Cabang/ Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. d. Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah wilayah dan cabang/ cabang istimewa yang sah.			
	Pasal 74 (1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan/ atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurang nya 50% (lima puluh persen) plus satu dari jumlah wilayah dan cabang. (3) Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Muktamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Muktamar.	Penyesuaian dan Penambahan	- Penyesuaian nomor Pasal menjadi Pasal 77 - Penambahan ayat (2) dan ayat (6) pada pada pasal 77: Pasal 77 (1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan/ atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2) Muktamar Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan setelah adanya keputusan Majelis Tahkim (3) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurang nya 50% (lima puluh persen) plus satu dari jumlah wilayah dan cabang. (4) Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus	

			Besar Nahdlatul Ulama. (5) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Muktamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Muktamar. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran berat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jam'iyah.	
	Pasal 75 (1) Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah - masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa. (3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Wilayah Syuriyah. (4) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat mengundang alim ulama, pengasuh pondok pesantren dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun dari luar pengurus Nahdlatul Ulama sebagai peserta. (5) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah wilayah yang sah. (6) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru. (7) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang -kurangnya 2	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 78	

	(dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.			
	Pasal 76 (1) Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan - keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Jam'iyah. (3) Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. (4) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru. (5) Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang -kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wilayah. (6) Konferensi Besar diadakan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 79	
	Pasal 77 Ketentuan lebih lanjut tentang permusya waratan tingkat nasional, akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 80	
	BAB XXII PERMUSYAWARATAN TlNGKAT DAERAH Pasal 78 (1) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wilayah. (2) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan: a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis; b. Pokok-pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XXIV PERMUSYAWARATAN TlNGKAT DAERAH Pasal 81	

	pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama; c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; d. rekomendasi Jam'iyah; e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan f. memilih Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. (3) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun. (4) Konferensi Wilayah dihadiri oleh: a. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama; dan b. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Jam'iyah, Konferensi Wilayah dapat dihadiri oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. (6) Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah cabang di daerahnya.			
	Pasal 79 (1) Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. (2) Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan - keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan Jam'iyah serta peranannya di tengah masyarakat. (3) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh anggota Pengurus Wilayah Pleno dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. (4) Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah cabang.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 82	

	(5) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. (6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.			
	Pasal 80 (1) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat cabang. (2) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan: a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis; b. Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama; c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; d. rekomendasi Jam'iyah; e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan f. memilih Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. (3) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun. (4) Konferensi Cabang dihadiri oleh: a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama; dan b. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Jam'iyah, Konferensi Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. (6) Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang -kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wakil cabang di daerahnya.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 83	
	Pasal 81 (1) Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 84	

	tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. (2) Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan - keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan Jam'iyah serta peranannya di tengah masyarakat. (3) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus Cabang Pleno dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. (4) Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wakil cabang. (5) Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang - kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. (6) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.			
	Pasal 82 (1) Konferensi Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wakil cabang. (2) Konferensi Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan: a. laporan pertanggungjawaban Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis; b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama; c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; d. rekomendasi Jam'iyah; e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan f. memilih Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. (3) Konferensi Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Majelis	Penyesuaian, penambahan dan perubahan susunan	- Penyesuaian nomor Pasal Pasal 85 - Penambahan ayat (3) dan memindahkan huruf c dan d pada ayat (2) ke dalam ayat (3): Pasal 85 (1) Konferensi Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wakil cabang. (2) Konferensi Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan: a. laporan pertanggungja waban Majelis	

	Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun. (4) Konferensi Wakil Cabang dihadiri oleh: a. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama; dan b. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Jam'iyah, Konferensi Wakil Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. (6) Konferensi Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah ranting didaerahnya.		Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis; b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama; c. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan d. memilih Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. (3) Konferensi Wakil Cabang dapat membicarakan dan menetapkan: a. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; dan b. rekomendasi Jam'iyah. (4) Konferensi Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun. (5) Konferensi Wakil Cabang dihadiri oleh:	

			a. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama; dan b. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. (6) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Jam'iyah, Konferensi Wakil Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. (7) Konferensi Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah ranting didaerahnya.	
	Pasal 83 (1) Musyarawah Kerja Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. (2) Musyarawah Kerja Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan keputusan Konferensi Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan perkum pulan serta peranannya di tengah masyarakat. (3) Musyarawah Kerja Wakil Cabang dihadiri oleh Majelis Wakil Cabang Pleno dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. (4) Musyarawah Kerja Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurang nya 50% (lima puluh persen) lebih	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 86	

	satu jumlah peserta sebagaimana di maksud ayat (3) Pasal ini. (5) Musyarawah Kerja Wakil Cabang di adakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. (6) Musyawarah Kerja Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus			
	Pasal 84 (1) Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat ranting. (2) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan: a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis; b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. d. rekomendasi Jam'iyah; e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan f. memilih Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. (3) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun. (4) Musyawarah Ranting dihadiri oleh: a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama; dan b. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. (5) Musyawarah Ranting sah apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anak ranting di daerahnya.	Penyesuaian, penambahan dan perubahan susunan	- Penyesuaian nomor Pasal Pasal 87 - Penambahan ayat (3) dan memindahkan huruf c dan d pada ayat (2) ke dalam ayat (3): Pasal 87 (1) Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat ranting. (2) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan: a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis; b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.	

			c. Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan d. memilih Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. (3) Musyawarah Ranting dapat membicarakan dan menetapkan: a. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; dan b. rekomendasi Jam’iyah. (4) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun. (5) Musyawarah Ranting dihadiri oleh: a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama; dan b. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. (6) Musyawarah Ranting sah apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anak ranting di daerahnya.	
	Pasal 85 (1) Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 88	

	yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. (2) Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan - keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan Jam'iyah serta peranannya di tengah masyarakat. (3) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh anggota Pengurus Ranting Pleno dan utusan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. (4) Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini. (5) Musyarawah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. (6) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.			
	Pasal 86 (1) Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat anak ranting. (2) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan: a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis; b. Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok -pokok Program Kerja Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama; c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; d. rekomendasi Jam'iyah; e. Ahlul Halli Wal 'Aqdi; dan f. memilih Ketua Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. (3) Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.	Penyesuaian, penambahan dan perubahan susunan	- Penyesuaian nomor Pasal Pasal 89 - Penambahan ayat (3) dan memindahkan huruf c dan d pada ayat (2) ke dalam ayat (3): Pasal 89 (1) Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat anak ranting. (2) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan: a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting	

	(4) Musyawarah Anggota dihadiri oleh: a. Pengurus Anak Ranting; dan b. anggota Nahdlatul Ulama. (5) Musyawarah Anggota sah apabila di hadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota di wilayahnya.		Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis; b. Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok -pokok Program Kerja Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama; c. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi; dan d. memilih Ketua Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. (3) Musyawarah Anggota dapat membicarakan dan menetapkan: a. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan ; dan b. rekomendasi Jam’iyah. (4) Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun. (5) Musyawarah Anggota dihadiri oleh: c. Pengurus Anak Ranting; dan	

			d. anggota Nahdlatul Ulama. (6) Musyawarah Anggota sah apabila di hadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota di wilayahnya.	
	Pasal 87 (1) Musyawarah Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anggota yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. (2) Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputusan - keputusan Musyawarah Anggota dan mengkaji perkembangan Jam'iyah serta peranannya di tengah masyarakat. (3) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting Pleno. (4) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini. (5) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang - kurangnya 5 (lima) kali dalam masa jabatan pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. (6) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 90	
	Pasal 88 Ketentuan lebih lanjut tentang permusya waratan tingkat daerah, akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 91	
	BAB XXIII PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM Pasal 89	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XXV PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM Pasal 92	

	Permusyawaratan Badan Otonom diatur tersendiri dan dimuat dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom yang bersangkutan.			
	BAB XXIV RAPAT-RAPAT Pasal 90 (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Pengurus Harian Lembaga. (2) Rapat Kerja Nasional membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasional keputusan - keputusan Muktamar. (3) Rapat Kerja Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam setahun. (4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat -lambatnya tiga bulan setelah Muktamar	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XXVI RAPAT-RAPAT Pasal 93	
	Pasal 91 (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom. (2) Rapat Pleno diadakan sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan sekali. (3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 94	
	Pasal 92 (1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah. (2) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah diadakan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali (3) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan Jam'iyah, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 95	
	Pasal 93 (1) Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan dapat mengikutsertakan Mustasyar.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 96	

	(2) Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. (3) Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan Jam'iyah, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.			
	Pasal 94 (1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah. (2) Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurang - kurangnya 2 (dua) bulan sekali. (3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan Jam'iyah, pelaksanaan dan pengembangan program kerja	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 97	
	Pasal 95 Rapat - rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat - rapat yang diselenggarakan sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 98	
	Pasal 96 Ketentuan lebih lanjut tentang rapat - rapat, akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 99	
	BAB XXV KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 97 Sumber keuangan dan kekayaan Nahdlatul Ulama diperoleh dari: a. uang pangkal adalah uang yang wajib dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota; b. uang i'anah syahriyah adalah uang yang wajib dibayar anggota setiap bulan; c. sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh dari anggota Nahdlatul Ulama dan/atau simpatisan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan; d. wakaf yang diterima oleh Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama; dan e. usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan/atau atas kerjasama dengan pihak lain.	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XXVII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 100	

		Penambahan	**BAB XXVIII A** **Badan Usaha dan Tata Kelola Aset** **Pasal 101A s.d. Pasal 101F ART** Pasal 101 (1) Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama adalah badan usaha yang didirikan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan/atau badan hukum yang seluruh atau sebagian besar kepemilikan, pengendalian, dan/atau manfaat ekonominya diperuntukkan bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. (2) Pembentukan, perubahan bentuk, penggabungan, pengambilalihan, kerja sama strategis dan/atau pembubaran Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pasal 102 (1) Seluruh saham, penyertaan modal, perizinan, konsesi, hak atas kekayaan intelektual, dan/atau hak ekonomi yang diperoleh atas nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau karena	

			kedudukan sebagai pengurus wajib dicatatkan sebagai kekayaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikuasai, dialihkan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lain di luar kepentingan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pasal 103 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama dikelola secara profesional, amanah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pasal 104 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama harus menyampaikan laporan keuangan dan kinerja secara berkala kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pasal 105 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola badan usaha dan aset Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Jam'iyah.	
	Pasal 98 (1) Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkat jam'iyahnya berupa dana,	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 106	

	harta benda bergerak dan/ atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. (2) Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan publik. (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Majelis Wakil Cabang, Lembaga, Badan Otonom dan/ atau Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama yang dibentuk untuk melakukan penguasaan dan/ atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan/ atau harta benda tidak bergerak. (4) Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada Lembaga, Badan Khusus, Badan Otonom, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan/ atau Perangkat Jam'iyahnya. (5) Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda yang bergerak dan/ atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya dan/ atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (6) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda bergerak dan/ atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh atau yang dibeli oleh Perangkat Jam'iyah Nahdlatul Ulama tanpa persetujuan pengurus perangkat Jam'iyah yang bersangkutan.			

	(7) Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan Perangkat Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka seluruh harta bendanya menjadi milik Nahdlatul Ulama			
	Pasal 99 (1) Uang pangkal dan uang i'anah syahriyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama, digunakan untuk membiayai kegiatan Jam'iyah dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut: a. 40% (empat puluh persen) untuk membiayai kegiatan anak ranting; b. 20% (dua puluh persen) untuk membiayai kegiatan ranting; c. 15% (lima belas persen) untuk membiayai kegiatan wakil cabang; d. 10% (sepuluh persen) untuk membiayai kegiatan cabang/ cabang istimewa; e. 10% (sepuluh persen) untuk membiayai kegiatan wilayah; dan f. 5% (lima persen) untuk membiayai kegiatan pusat. (2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan usaha-usaha lain dipergunakan untuk kepentingan Jam'iyah. (3) Kekayaan Jam'iyah yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk kepentingan Jam'iyah.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 107	
	Pasal 100 Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan dan kekayaan, akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 108	
	BAB XXVI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 101 (1) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan pertang gungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmatnya yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya. (2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama memuat:	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XXIX LAPORAN PERTANGGUNGJA WABAN Pasal 109	

	a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan tertinggi pada tingkat annya; b. pengembangan kelembagaan Jam'iyah; c. keuangan Jam'iyah; dan d. inventaris dan aset Jam'iyah.			
	Pasal 102 (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan Jam'iyah secara berkala dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja dan Rapat Pleno. (2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan Jam'iyah secara berkala kepada: a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan b. Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Pleno. (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan Jam'iyah secara berkala kepada: a. Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama; dan b. Musyawarah Kerja Cabang dan Rapat Pleno. (4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan Jam'iyah secara berkala kepada: a. Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama; dan b. Musyawarah Kerja Wakil Cabang dan Rapat Pleno. (5) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan Jam'iyah secara berkala kepada: a. Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama; b. Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno. (6) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan Jam'iyah secara	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 110	

	berkala kepada Rapat Anggota, Pengurus Ranting dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama			
	Pasal 103 Pengurus Lembaga dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatan masing masing	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 111	
	Pasal 104 Ketentuan lebih lanjut tentang laporan pertanggungjawaban, akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 112	
	BAB XXVII TATA URUTAN PERATURAN Pasal 105 Tata urutan peraturan di lingkungan Nahdlatul Ulama: a. Muqoddimah Qonun Asasi; b. Anggaran Dasar; c. Anggaran Rumah Tangga; d. Peraturan Jam'iyah Nahdlatul Ulama; e. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; f. Peraturan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama; g. Peraturan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama; h. Peraturan Badan Otonom pada masing-masing tingkatan; dan i. Ketentuan Lembaga.	Substansi tetap, urutan pasal berubah	Pasal 113	
		Penambahan	BAB XXX KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS TAHKIM Pasal 114 (1) Majelis Tahkim adalah perangkat jam'iyah yang dibentuk di tingkat pusat. (2) Majelis Tahkim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyelesaikan sengketa	

			organisasi di seluruh tingkatan. (3) Majelis Tahkim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa internal Jam'iyah berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Jam'iyah, dan Peraturan PBNU (4) Majelis Tahkim berwenang menangani: a. Sengketa antar fungsionaris; b. Sengketa mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Jam'iyah, Peraturan PBNU, atau Keputusan PBNU; dan c. Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1). (5) Keanggotaan Majelis Tahkim berjumlah 9 orang. (6) Keputusan Majelis Tahkim bersifat final dan mengikat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai	

			Majelis Tahkim diatur dalam Peraturan Jam'iyah.	
	BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 106 (1) Pengelolaan Jam'iyah dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. (2) Dalam situasi tertentu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk permusyawaratan dan pengambilan keputusan. (3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Jam'iyah.	Perubahan	BAB XXXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 115 (1) Pada saat Anggaran Rumah Tangga mulai berlaku, semua Peraturan Jam'iyah harus disesuaikan dengan Anggaran Rumah Tangga. (2) Pada saat Anggaran Rumah Tangga mulai berlaku, semua Peraturan Jam'iyah dinyatakan masih tetap berlaku setelah dilakukan ratifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.	
	BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 107 (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan/atau Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Muktamar. (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Substansi tetap, urutan bab dan pasal berubah	BAB XXXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 116	

Muktamar Ke-35
Nahdlatul Ulama
Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang
27-31 Agustus 2026 | 14-18 R. Awwal 1448 H

KOMISI REKOMENDASI

MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
14-18 Rabi'ul Awwal 1448 H/27-31 Agustus 2026 M

Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama

N U
١٣٤٤
1926

MATERI KOMISI REKOMENDASI
MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

I. TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM, KEDAULATAN ENERGI DAN KETAHANAN PANGAN

Konteks

Perubahan-perubahan geopolitik global yang terjadi di sejumlah belahan dunia tidak lepas dari kepentingan untuk memperebutkan pengaruh penguasaan atas sumber daya alam, terutama minyak. Di Balik perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, dan perang antara Iran dan Amerika Serikat-Israel, juga tidak lepas dari kepentingan seperti itu, bertemunya antara kepentingan geopolitik dan geoekonomi. Sementara itu, kekuatan dunia tidak lepas dari kekuatan hegemonik aliansi ekonomi global di bawah pimpinan Amerika Serikat yang bertumpu pada nilai tukar dolar AS. Namun, di lain pihak, terdapat penguatan aliansi tandingan seperti perlawanan Iran terhadap serangan Amerika-Israel. Kekuatan Iran ini, secara tidak langsung, didukung oleh kekuatan global alternatif yang dimotori oleh China dan Rusia. Dua negara ini pada 2009 membentuk organisasi ekonomi dan geopolitik yang disebut BRIC (singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina) dan setahun kemudian menjadi BRICS setelah masuknya Afrika Selatan. Mereka hendak melepaskan diri dari ketergantungan pada dolar AS dan beralih khususnya ke Yuan, mata uang China. Indonesia sendiri telah menjadi anggota resmi BRICS sejak 2025 lalu.

Indonesia sendiri dituntut untuk mengambil posisi menjaga independensi sesuai doktrin kebijakan luar negeri bebas-aktif. Namun untuk mempertahankan doktrin dan prinsip bebas aktif itu Indonesia juga menghadapi tantangan, yaitu memperkuat ekonomi domestik yang pada kenyataannya masih memiliki ketergantungan pada sumber daya alam dan membangun ketahanan energi dan pangan yang bersumber dari dalam negeri sendiri. Pemerintah Indonesia di bawah presiden Prabowo Subianto sejuah ini telah berusaha berada di jalan tengah, mengambil posisi tidak tergantung kepada salah satu aliansi dunia yang berseberangan, dan dalam waktu yang sama tetap berhubungan baik dan bekerja sama dengan kedua aliansi tersebut sembari memperkuat kedaulatan energi dan pangan yang bersumber dari dalam negeri.

Namun menjaga hubungan baik saja dengan kedua belah pihak tidaklah cukup melainkan harus lebih aktif dan progresif dan jika mungkin ikut dalam kepemimpinan guna mencari jalan keluar dan titik temu perdamaian dengan tetap mempertahankan independensi. Salah satu caranya adalah dengan membangun tata kelola sumber daya alam secara mandiri dalam teknologi dan sumber daya manusia serta memenuhi kebutuhan domestik dengan harga terjangkau sebelum dialirkan berupa ekspor ke luar negeri dengan harga tinggi dan kompetitif. Hal ini dilandasi dan berpedoman pada Konstitusi ayat 4 pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: 'Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional'.

Pada kenyataannya hingga sekarang, kekayaan yang melimpah SDA Indonesia belum sepenuhnya bermanfaat untuk kemakmuran rakyat. Yang lebih banyak menikmati kekayaan alam Indonesia itu adalah sekelompok kecil konglomerat yang memiliki usaha-usaha di dalam pengelolaan sumber daya alam dan berkolaborasi dengan kekuatan modal luar negeri dan bahkan secara manipulatif dengan hanya menyisakan keuntungan untuk negara dan rakyat Indonesia

sangat kecil. Hal itu disebabkan adanya kebocoran-kebocoran dan tata kelola yang buruk dan tidak transparan.

Antara 1991 sampai 2024, *under invoicing ekspor* komoditas sumber daya alam strategis mencapai US$ 908 milyar, suatu jumlah yang sangat besar (dalam kurs Rp 17.801 per US dollar berarti 16.163,2 triliun rupiah). Di dalam proses pengelolaannya sendiri juga telah ditemukan terjadinya praktik korupsi, *rent-seeking*, mulai dari pemberian ijin sampai adanya perlindungan (*backing*) terhadap praktik *illegal mining* oleh oknum-oknum aparat. Kasus Tata Niaga Komoditas Timah yang diduga telah merugikan Rp 300 triliun, merupakan contoh kasus praktik korupsi di sektor tambang. Antara 2018-2026, terdapat dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), merupakan contoh yang lain. Sekiranya, kebocoran-kebocoran di dalam pengelolaan sumber daya alam itu bisa diatasi, kekayaan yang merupakan karunia Allah SWT itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di antara kekayaan alam sumber daya alam yang akan terus menjadi kebutuhan sehari-hari, dan karena itu sangat strategis adalah terkait dengan sumber daya di bidang energi dan pangan. Indonesia pernah menjadi salah satu negara penghasil besar energi alam dari fosil, seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Tetapi, karena sifat energi demikian terkategori tidak terbarukan, potensi besar itu semakin hari semakin berkurang. Kalau pada 1970an dan 1980an, Indonesia termasuk negara pengekspor minyak dan gas bumi, dalam dekade-dekade belakangan ini Indonesia justru menjadi pengimpor energi minyak bumi dan gas. Padahal, kebutuhan energi minyak bumi di Indonesia sangat besar. Implikasinya, di dalam situasi tertentu, seperti adanya perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, telah membuat terjadinya kelangkaan energi bersumber pada minyak bumi dunia.

Di pihak lain, Indonesia juga memiliki potensi sumber energi yang terbarukan, seperti dari panas matahari, air (hidro), panas bumi (geothermal), biomassa dan biofuel. Tetapi sumber energi demikian masih belum dimanfaat dan dikelola secara baik. Konsekuensinya, ketergantungan Indonesia akan energi pada negara lain, masih sangat besar. Per hari, Indonesia mengimpor 360.000 sampai 500.000 barel minyak mentah per hari, dan mengimpor LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) sekitar 7,8 juta ton per tahun. Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan adanya pelemahan nilai rupiah, keadaan demikian semakin memberatkan pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, Indonesia juga mengalami paradoks di sektor pangan. Sebagai negara agraris yang kaya sumber daya untuk pangan, Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Hal ini bukan hanya terjadi pada makanan-makanan yang menjadi bagian dari kebiasaan baru, seperti makanan-makanan yang terbuat dari gandum yang memang tidak diproduksi di Indonesia, tetapi juga untuk makanan yang selama ini menjadi bagian dari tradisi bangsa Indonesia sendiri seperti nasi yang berbahan baku dari beras, dan tahu tempe yang terbuat dari kedelai. Dalam waktu cukup lama, Indonesia pernah menjadi impor beras, kedelai, gula, dan bahan-bahan makanan lainnya karena produksi yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan.

Upaya memiliki kemandirian di bidang energi dan pangan telah lama dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi, yang telah mendekati kenyataan baru pada pemenuhan pangan dari beras. Untuk kebutuhan pangan berbahan lain, seperti kedelai, apalagi gandum, masih jauh dari kata adana kemandirian. Kemandirian di bidang energi juga masih jauh, meskipun sudah lama disadari tentang pentingnya memiliki kemampuan lebih baik di dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber energi dari bahan fosil dan upaya mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan.

Rekomendasi:

1. Pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap tata kelola energi dan pangan dengan berorientasi pada penciptaan sumber daya manusia domestik yang kuat dan terampil serta mendorong inovasi teknologi dan rekayasa dalam negeri yang mendiri serta memprioritaskan kebutuhan dalam negeri secara cukup dengan harga terjangkau. Tata kelola itu, sekurang-kurangnya mencakup:
   a. proses bisnis yang harus dilakukan secara transparan, efektif dan efisien, yang dimaksudkan untuk kemakmuran dan kemashlahatan rakyat (umat);
   b. pengelolaan dan pemanfaatan *green energy* dan *renewable energy*, seperti panas bumi, angin, matahari, dan air, pengelolaan dan pemanfaatan sampah melalui berbagai teknologi (tepat guna) agar memiliki manfaat menjadi energi dan pupuk;
   c. Pemanfaatan sumber-sumber alam tertentu yang tidak dimiliki oleh semua negara seperti tanah jarang (*rare earth element*) dan nikel, agar dilakukan oleh negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan
   d. Pengembangan Riset dan ekosistem yang terkait bidang sumber alam, energi dan pangan, secara lebih terstruktur dan sistematis, yang melibatkan banyak *stakeholders*, seperti perguruan tinggi dan sektor industri, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat dan kemanusiaan. Untuk ini pemerintah dan sektor industri harus mengalokasikan dana khusus untuk *Research and Development* (R&D) terhadap lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi yang terkait.
2. Pemerintah harus memberi prioritas khusus pada penciptaan sumber daya manusia yang terdidik dan terampil serta kreatif dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan kemandirian dan ketahanan pangan. Kreasi-kreasi teknologi dalam negeri dan kerjasama luar negeri perlu didorong dan diberikan insentif dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelolaan sumber daya energi dan pangan. Untuk itu, langkah-langkah strategis perlu dilakukan, beberapa di antaranya:
   a. pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada penciptaan SDM lokal yang terampil, dan mampu menangkap sumber daya lokal seperti tanah jarang, penguatan pendidikan STEAM bersifat inklusif,
   b. Adanya pendidikan vokasi yang didasarkan pada analisis kebutuhan, berbasis potensi lokal, dan tersedianya alat-alat dan laboratorium untuk praktek, serta adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta lintas kementerian.
3. Pemerintah harus lebih tegas di dalam menangani praktik korupsi (*fraud*) yang terjadi di dalam pengelolaan sumber daya alam, energi dan pangan, agar pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber kekayaan itu lebih maksimal, bersahabat dengan lingkungan dan berkelanjutan. Tanpa penanganan korupsi yang tegas, kemanfaatan sumber daya alam yang ada hanya akan lebih menguntungkan orang atau kelompok tertentu saja, dan bukannya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
4. Di dalam mewujudkan kemandirian di bidang energi dan pangan, pemerintah harus bersinergi dengan berbagai *stakeholders*, membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang konsisten, terukur dan berkelanjutan di dalam memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia.
5. Pemerintah secara khusus menjadikan kelompok-kelompok sosial, budaya dan keagamaan sebagai bagian dari kreasi, pengembangan teknologi dan penciptaan tenaga kerja yang terampil

dan kreatif, sehingga program tersebut dapat memaksimalkan potensi rakyat serta melibatkan partisipasi masyarakat bawah secara luas.

6. Pemerintah harus melakukan perlindungan dan pengembangan keanekaragaman kekayaan sumber daya hayati lokal atau mega biodiversitas untuk mendorong terjadinya kedaulatan pangan, melalui berbagai riset dan pengembangan, agar tingkat nilai dan kemanfaatannya lebih besar.

II. LINGKUNGAN HIDUP DAN TEKNOLOGI TERBARUKAN

Konteks

Ancaman panas bumi dan perubahan iklim dalam dekade-dekade belakangan semakin nyata. Pada musim panas 2026 ini, misalnya, ribuan orang di Eropa meninggal disebabkan karena cuaca panas ekstrim yang diduga kuat bersumber dari perubahan iklim dan gelombang panas bumi yang meningkat. Saat ini dunia tengah menghadapi krisis lingkungan hidup yang serius. Flashback ke belakang, sepanjang 2021-2025 merupakan rentang waktu pecahnya rekor suhu dunia terpanas sepanjang sejarah kehidupan manusia sebagai dampak dari perubahan iklim. Hal ini dipicu oleh tingkat tertinggi emisi karbon global yang mencapai miliaran ton per tahun akibat pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi.

Situasi seperti itu telah memicu cuaca ekstrem dan bencana. Sekitar 90% populasi dunia minimal dalam satu dasawarsa terakhir terpapar minimal satu bentuk bencana akibat iklim: gelombang panas, kekeringan, banjir, longsor, banjir bandang dan lainnya. Bencana ekologis semakin naik trennya baik dari sisi intensitas kejadian maupun besarnya dampak yang ditimbulkan. Bencana hidrometeorologis yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, menjadi bukti dari dampak kerusakan lingkungan hidup yang masif di kawasan tersebut. Bencana di kawasan tersebut mengakibatkan 1.207 orang meninggal dunia dan menimbulkan kerusakan fisik yang sangat masif.

Pertumbuhan populasi, percepatan urbanisasi, dan pola konsumsi modern atau tidak bertanggung jawab menimbulkan krisis sampah. Saat ini, secara global lebih dari 2 (dua) miliar ton sampah padat perkotaan diproduksi setiap tahun, dan menyisakan setidaknya 33% yang tidak dikelola dengan baik dan merusak lingkungan. Indonesia menghasilkan sekitar 141.000 ton sampah setiap hari dan sebagian besar berasal dari rumah tangga. Hingga saat ini sekitar 75% atau setara dengan 109.053 ton sampah per hari di Indonesia tidak tertangani atau belum dikelola dengan baik.

Hingga saat ini, kesadaran sebagian besar masyarakat untuk mengurangi sampah masih minim. Terbukti dari minimnya pemilahan sampah dan masih menganut pola tradisional "kumpul-buang-angkut", dan membuang sampah secara sembarangan. Di sisi lain, alokasi anggaran pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah masih terbatas (rata-rata 0,4% dari total APB) dan jauh dari ideal. Akibatnya, semakin banyak TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang kelebihan muatan (*overload*) lalu berubah menjadi sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) yang mencemari lingkungan sekitarnya. Bahkan saat ini di banyak daerah banyak TPA yang ditutup karena sudah *overload*.

Selain mencemari lingkungan (air, tanah dan udara) timbunan sampah terutama organik melepaskan gas metana (CH_4) yang memicu pemanasan global lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Sampah juga berdampak terhadap kesehatan mulai dari penyakit menular (karena vektor) maupun saluran pernafasan hingga paru-paru. Selain itu, polusi dan degradasi lingkungan akibat krisis sampah juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.

Deforestasi (penghilangan atau penggundulan tutupan hutan secara permanen untuk dialihfungsikan menjadi lahan non-hutan) merupakan salah satu bentuk krisis lingkungan hidup yang mengkhawatirkan. Menurut data PBB dan berbagai pihak, meskipun menurun dibandingkan era 1990-an hingga 2000-an yang mencapai 17,6 juta hektar per tahun, tetapi laju deforestasi atau hilangnya tutupan hutan akibat alih fungsi lahan untuk pertanian, peternakan, dan infrastruktur saat ini masih tinggi yaitu 10 juta hektar per tahun.

Menurut riset terbaru, angka deforestasi netto Indonesia pada 2025 mencapai 433.751 hektar. Angka ini melonjak tajam sekitar 66% dibandingkan 2024 yang tercatat seluas 261.575 hektar. Krisis air bersih juga telah terjadi secara global. Menurut data PBB, diperkirakan 2,2 miliar orang tidak memiliki akses ke air minum yang aman, dan 703 juta orang kekurangan akses terhadap air bersih. Dengan kata lain, sekitar 1 dari 11 orang di seluruh dunia tidak memiliki akses ke air bersih. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 2025 lebih dari 11 juta jiwa penduduk Indonesia terdampak langsung kekeringan dan krisis air bersih. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah paling terdampak.

Krisis air bersih dipicu oleh kerusakan lingkungan hidup khususnya deforestasi dan perubahan iklim, pertumbuhan populasi yang menyebabkan menipisnya cadangan air tanah, dan pencemaran lingkungan khususnya pada sumber-sumber air menyebabkan menipisnya ketersediaan air bersih dan layak konsumsi.

Krisis air bersih berdampak tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga ekonomi dan bahkan dapat memicu konflik sosial. Di sektor kesehatan, krisis air bersih memicu dampak adanya peningkatan kasus diare dan penyakit kulit, kemudian penyebaran penyakit menular akibat sanitasi yang buruk, gangguan pencernaan, hingga ancaman malnutrisi atau stunting. Dampak krisis air terhadap sektor ekonomi terjadi di antaranya di bidang pertanian yang mengalami kerugian besar. Produksi padi di wilayah Jawa Timur menurun hingga 15% akibat kekurangan pasokan air, sementara industri makanan dan minuman harus menanggung biaya tambahan untuk suplai air bersih. Selain itu, potensi konflik sosial akibat krisis air terjadi di beberapa daerah di mana warga beberapa kali terlibat sengketa penggunaan air antara petani dan korporasi atau perusahaan air minum.

Untuk mencegah krisis lingkungan hidup menjadi lebih parah, juga untuk melindungi sumber kehidupan dasar (udara bersih, air, dan pangan), serta menjamin masa depan kehidupan bagi generasi yang akan datang, aksi lingkungan dan aksi iklim harus dilakukan. Aksi tersebut tidak saja harus dilakukan secara masif, tetapi juga harus terukur dan berdampak luas khususnya bagi masyarakat di tingkat tapak dan secara lebih khusus kelompok rentan/berisiko di antaranya fakir-miskin, di kawasan pesisir, komunitas adat, anak-anak, perempuan dan ibu hamil, penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Rekomendasi:

1. Pemerintah harus konsisten menerapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan dan penegakan hukum, adil.
2. Pemerintah harus konsisten dalam melaksanakan seluruh komitmen terkait pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim dengan spirit peningkatan resiliensi masyarakat sebagai wujud dari upaya pemerintah untuk melindungi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan/berisiko seperti anak-anak, perempuan dan ibu hamil, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Selain itu, pelaksanaan komitmen tersebut juga untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi masa depan juga harus menjadi

3. Pemerintah harus mengendalikan pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan. Pemerintah juga harus bertindak tegas dengan menghukum siapapun termasuk perusahaan yang telah merusak lingkungan. Karena setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah pelanggaran terhadap *maqashid asy-Syari'ah* sehingga dapat dianggap sebagai penistaan terhadap agama.
4. Pemerintah harus memperkuat keterlibatan seluruh komponen masyarakat termasuk masyarakat adat dengan menitikberatkan pada peningkatan dan penguatan aksi pelestarian lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim di antaranya konservasi lingkungan, konservasi dan transisi energi, konservasi air, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi yang akan diperoleh masyarakat.
5. Pemerintah bersama-sama seluruh kekuatan masyarakat harus mengembangkan dan menggunakan teknologi tepat guna dalam mengatasi krisis sampah dan krisis air bersih agar upaya mengatasi masalah sampah dan air bersih dapat dilakukan secara terstruktur dan masif, berbiaya murah, berkelanjutan dan ramah lingkungan.
6. Pemerintah secara khusus harus melakukan pemulihan daerah-daerah terdampak bencana ekologis secara serius khususnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan membangun kembali kehidupan yang lebih baik, aman dan tangguh *(build back better and safer)* bagi masyarakat terdampak bencana di kawasan tersebut mencakup perbaikan fasilitas fisik, pemulihan ekonomi, dukungan psikososial serta pengurangan risiko bencana berkelanjutan untuk mencegah kondisi serupa di masa yang akan datang.

III. PENGUATAN PERAN AGAMA DAN MASYARAKAT DALAM PERDAMAIAN DUNIA

Konteks:

Serangan aliansi Amerika-Israel kepada Iran di satu pihak dan perlawanan Iran yang mampu merepotkan dan bahkan memenangkan strategi serangan di lain pihak menandai pergeseran geopolitik global dalam berbagai aspek penting diantaranya adalah munculnya kekuatan alternatif dunia. Iran yang dibantu secara tidak langsung oleh kekuatan global lainnya, yaitu China dan Rusia, mendapat simpati dari masyarakat hampir seluruh dunia atas perlawanannya.

Belakangan muncul pula gagasan dan kecenderungan terbentuknya aliansi keamanan, semacam NATO, yang terdiri dari negara-negara Islam seperti Pakistan, Mesir, Turki, dan Arab Saudi yang bukan tidak mungkin akan menarik negara-negara yang semula di bawah perlindungan AS seperti UAE, Qatar, Bahrain dan Kuwait yang hendak melepaskan ketergantungan keamanan kepada AS untuk bergabung. Dalam waktu yang sama negara-negara anggota NATO di Eropa dan Kanada mengambil jarak dalam serangan aliansi AS-Israel terhadap Iran tersebut.

Namun yang paling mencemaskan adalah diam-diam motivasi dari serangan AS-Israel terhadap Iran tersebut bukan hanya dimotivasi oleh strategi ekonomi dan keinginan penguasaan minyak di Iran yang menjadi sumber energi utama dunia atau geoekonomi melainkan motivasi agama dan paham sekte tertentu dalam serangan tersebut.

Sebuah investigasi yang dilakukan oleh *The Guardian* dan *Al Jazeera*[67] menunjukkan bahwa sekte dimana menteri pertahanan atau menteri perang AS Pete Hegseth berasal dari sebuah sekte

[67] Julia Carrie Wong, 2025. "Pete Hegseth's holy war: the militant Christian theology animating the US attack on Iran." *The Guardian*, https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2026/apr/10/pete-hegseth-christianity-iran-war-crusade. "Simon Tisdall, 2026. "As Team Trump wage unceasing war on Iran, evangelical nationalists are destroying any moral world order we once had." *The Guardian* https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/apr/04/donald-trump-iran-war-evangelical-nationalists-moral-world-order-pete-hegseth. Riaz Khokhar, 2026. "The US-Israel war on Iran is shaped

evangelis dengan ideologi Kristen Nasionalis yang ekstrim beraliansi dengan agenda ideologi Zionisme Israel yang mengedepankan Supremasi Yahudi dan Kulit Putih melatarbelakangi serangan tersebut. Pemecatan sejumlah jenderal dan petinggi Pentagon sepanjang perang dengan Iran, menurut *the Guardian*, ikut memperkuat dominasi sekte tersebut dalam organisasi Pentagon. Strategi dan bellied Peter Hegseth tersebut selalu didukung oleh presiden AS Donald Trump dan wakil presiden JD Vance serta perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dengan demikian, patut diduga dengan kuat baik aliansi AS-Israel menang maupun kalah dalam perang melawan Iran akan memperkuat tersebarnya motivasi agama yang berbasis pada rasisme Yahudi dan Kulit Putih serta sekte keagamaan evangelis dan zionisme tersebut. Di sisi lain aliansi negara-negara Islam yang berorientasi pada keamanan dan pertahanan akan menjadikan ideologi agama sebagai basis berhadapan dengan ideologi agama lain tersebut meskipun yang disebut terakhir ini belum menunjukkan akar sentimen keagamaan sebagai basis permusuhan. Dukungan China dan Rusia sebagai negara besar yang netral agama dan spiritualitas di dalam negeri dan tentu saja menghormati basis spiritualitas dan agama di Iran serta aliansi negara-negara Islam memperkuat asumsi itu.

Dengan demikian ada kecenderungan kuat terjadinya polarisasi global yang bersifat baru dimana agama dan rasisme sebagai basis ideologi. Jika basis ideologi agama eksklusif dan rasisme ini terus memperkuat diri dan tersebar secara global maka situasi global ke depan mungkin lebih mengancam kemanusiaan daripada situasi kini dan sebelumnya. Gerakan ekstrimisme dan kekerasan berbasis agama dan rasisme dikhawatirkan lebih kuat akan melanda dunia global daripada sebelumnya.

Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya yang plural dari segi agama, etnis dan ras yang memiliki sejarah panjang karakter spiritual mengembangkan visi dan praktik inklusif, toleran dan setara. Sementara itu, Indonesia yang menjadi mayoritas penduduk di Asia Tenggara dan didominasi oleh Islam Nusantara yang berwatak inklusif, toleransi dan setara tersebut dalam waktu yang cukup lama lebih dari setengah abad telah mempelopori pendekatan soft power dalam diplomasi internasional ketimbang hard power dimana Islam Nusantara sebagai basis dalam usaha mempengaruhi dunia dalam arah peradaban yang lebih manusiawi dan saling respek antar peradaban guna menciptakan perdamaian.

Doktrin yang menunjukkan inklusivitas dan saling respek seperti ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama bangsa, bukan hanya nasional melainkan juga regional) serta ukhuwah basyariyah (kemanusiaan global) yang berbasis pada ideologi negara Pancasila sudah menjadi doktrin dan cara pandang klasik dan mapan bukan hanya di Indonesia melainkan di dunia Islam dan dunia global. Indonesia telah dilihat dan dipertimbangakan sebagai bangsa yang memiliki potensi untuk menghidupkan kembali spiritualitas dan agama sebagai pendekatan peradaban manusiawi.

Di sisi lain, terbangunnya aliansi baru berbasis Islam berhadapan dengan aliansi kristen evangelis dan zionisme meskipun tampak terjadi keseimbangan kekuatan karena munculnya keseimbangan baru namun hal itu telah menampakkan nafsu dorongan lahirnya perlombaan senjata yang berbasis pada teknologi canggih dan bahkan teknologi digital di masing-masing pihak. Skenario akhir dari kecenderungan ini bukan tidak mungkin adalah musnahnya umat manusia. Sambari mencermati pergeseran menuju keseimbangan geopolitik dan mencegah nafsu perlombaan senjata dengan

---

by religion as much as strategy." *Al Jazeera,* https://www.aljazeera.com/opinions/2026/3/17/the-us-israel-war-on-iran-is-shaped-by-religion-as-much-as-strategy.

teknologi canggih digital maka pendekatan spiritual dan agama dan masyarakat sipil yang berwatak inklusif, toleran dan setara perlu didesakkan dalam skala global.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia juga diharapkan membangun aliansi dengan wilayah regional lain dalam mengusung spiritualitas dan agama untuk perdamaian dalam perspektif global selatan (*global south*) seperti negara-negara dragon yang berbasis pada spiritual konfusianisme di Asia Timur dan wilayah Afrika yang plural serta India yang mayoritas Hindu. Dengan demikian akan menjadi kekuatan baru yang neutral dan kuat layaknya Konferensi Asia Afrika.

Rekomendasi

1. Pemerintah harus meningkatkan peran konkret dalam menciptakan perdamaian dunia dengan mengambil posisi bebas aktif yang dinamis, dengan cara pengonsolidasian kembali kekuatan diplomasi *soft power* yang berbasis pada spiritualitas dan nilai-nilai Islam Nusantara. Karakter Islam Nusantara yang inklusif, toleran, dan menjunjung kesetaraan harus dijadikan posisi tawar (*bargaining position*) yang kokoh di tengah perubahan politik global yang saat ini cenderung mengedepankan perlombaan senjata. Nilai spiritual yang inklusif ini sekaligus menjadi senjata ideologis untuk melawan arus radikalisme transnasional, terutama untuk meng-*counter* narasi Zionisme di tingkat global yang merusak keadilan geopolitik, serta membendung doktrin Takfiri di tingkat domestik yang kerap memicu sentimen, permusuhan, dan kekerasan berkedok agama.
2. Pemerintah harus memperluas area diplomasi Indonesia, tidak hanya terpaku pada jalur formal antar-negara (*state-to-state*), melainkan diperkuat melalui diplomasi kebudayaan yang melibatkan masyarakat (*people-to-people diplomacy*). Untuk ini, pemerintah wajib melibatkan organisasi masyarakat (Ormas), seperti organisasi keagamaan, secara aktif guna mendorong kemitraan yang lebih berkesinambungan dan organik antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Komunikasi dan diplomasi yang dibangun harus mengedepankan narasi yang konstruktif dan positif guna membangun kepercayaan internasional.
3. Pemerintah harus mengambil inisiatif untuk membangun kembali aliansi Global Selatan (*Global South Alliance*) layaknya spirit Konferensi Asia Afrika (KAA) masa lalu untuk memperjuangkan tatanan dunia yang setara, dengan memasukkan dimensi spiritualitas dan agama yang inklusif, toleran, dan setara. Demi memberikan dampak yang pragmatis dan nyata, aliansi moral ini harus dikonsolidasikan dan disinkronkan dengan aliansi ekonomi, keuangan, dan politik global yang sudah terbentuk sebelumnya, seperti BRICS.
4. Pemerintah harus memfasilitasi, mengadopsi, dan mengoptimalkan praktik dialog dan diplomasi global yang selama ini dipraktikkan organisasi keagamaan. Nahdlatul Ulama, misalnya, secara konsisten telah mempraktikkan dialog dan diplomasi global yang diakui dunia, mulai dari rekam jejak sejarah seperti Komite Hijaz, Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA), *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS), I*nternational Summit of the Moderate Islamic Leaders* (ISOMIL), Diplomasi Afghanistan, hingga forum R-20 (Religion 20) adalah bukti nyata.
5. Pemerintah perlu melakukan kampanye besar-besaran secara nasional, regional, maupun internasional mengenai karakteristik keberagaman Indonesia yang damai sebagai proposal mewujudkan perdamaian dunia. Strategi ini dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya manusia dan kelembagaan yang ada, mulai dari kementerian terkait, jaringan perguruan tinggi, lembaga pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan sebagai garda depan penyebar narasi perdamaian.
6. Pemerintah perlu secara sengaja (*by intention*) dan terencana memfasilitasi dialog antarpihak yang bertikai di panggung dunia dengan melibatkan tokoh masyarakat, pakar, dan diplomat senior. Untuk mengakselerasi hal ini, perlu dibentuk Tim *Task Force* (Gugus Tugas) khusus.

Namun, agar diplomasi luar negeri ini dihormati, stabilitas dan keamanan dalam negeri wajib dijaga seketat mungkin. Pemerintah harus secara tegas memitigasi dan menekan munculnya kembali gerakan ekstremisme, dan memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang *clear* mengenai ketidakadilan geopolitik akibat Zionisme, sehingga tidak terjadi bias informasi. Mensterilkan ruang publik dan institusi pendidikan dari penyebaran paham takfiri yang gemar mengeksklusi dan mengafirkan kelompok lain, karena paham inilah yang menjadi akar internal dari perpecahan bangsa dan kekerasan berbasis agama.

IV. PERBAIKAN TATA KELOLA PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU/DOSEN UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

Konteks:

Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Dalam Pasal 28C (ayat 1) disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Bahkan Pasal 31 memberikan amanat kepada negara untuk membiayai pendidikan dasar seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan nasional ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan UUD tersebut, Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pendidikan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial (*al-'adalah*), meningkatkan kualitas hidup rakyat, serta mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia yang bersumber dari keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah S.W.T.

Namun demikian, pendidikan nasional menghadapi sejumlah masalah serius yang harus segera dibenahi. Kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, antarstatus sosial ekonomi, serta antara sekolah negeri dan swasta masih sangat tinggi. Pertumbuhan jumlah satuan pendidikan di sejumlah wilayah tidak selalu didasarkan pada analisis kebutuhan, proyeksi demografi, pemerataan layanan, maupun daya dukung penyelenggaraan pendidikan. Akibatnya, di sebagian daerah terjadi kelebihan kapasitas lembaga pendidikan yang diikuti dengan rendahnya jumlah peserta didik, persaingan yang kurang sehat, serta menurunnya efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Di sisi lain, di berbagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap guru berkualitas, sarana pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, serta teknologi digital.

Pada jenjang pendidikan tinggi, orientasi kelembagaan yang semakin bergantung pada penerimaan mahasiswa dan pembiayaan mandiri berpotensi mendorong komersialisasi pendidikan yang semakin kuat. Kondisi tersebut mengurangi akses kelompok miskin terhadap pendidikan berkualitas serta berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Guru/Dosen sebagai aktor utama pendidikan sampai saat ini menghadapi sejumlah masalah seperti ketimpangan kesejahteraan antara ASN dan non-ASN, masih besarnya jumlah guru honorer dengan penghasilan di bawah standar hidup layak, distribusi guru berkualitas yang tidak merata, beban administrasi yang tinggi, rendahnya dukungan terhadap peningkatan kompetensi berkelanjutan, dan lain sebagainya.

Skema pembiayaan pendidikan masih lebih banyak menggunakan pendekatan administratif dibandingkan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi yang melayani kelompok miskin maupun wilayah tertinggal belum memperoleh afirmasi pembiayaan yang memadai. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang memiliki kemampuan finansial

tinggi sering kali memperoleh dukungan yang relatif sama. Di saat yang sama, pendidikan kedinasan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan sumber daya aparatur negara juga dihitung dalam mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20%. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal yang seharusnya dapat digunakan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi, memperkuat kesejahteraan guru dan dosen, serta memberikan afirmasi kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu

Dengan memerhatikan problem krusial di atas, Nahdlatul Ulama berpandangan perlunya perbaikan menyeluruh, dari hulu ke hilir, pusat dan daerah, melalui berbagai kebijakan yang berkeadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 serta memastikan implementasinya di lapangan selaras dengan amanat tersebut. Karena itu, pendidikan perlu diposisikan sebagai hal yang sangat strategis nasional berdasarkan data dan kebutuhan, bukan dalam bingkai kebijakan politik jangka pendek. Dengan menjadikan pendidikan sebagai *public good* yang asasi, maka perbaikan pendidikan dapat dilakukan secara komprehensif.

Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjadikan pendidikan sebagai hak konstitusional seluruh warga negara, termasuk kelompok disabilitas, melalui penguatan peran negara dalam pembiayaan pendidikan sehingga dapat mengurangi beban biaya masyarakat melalui peningkatan subsidi pendidikan, pengendalian komersialisasi pendidikan, penguatan sekolah/madrasah negeri dan sekolah/madrasah swasta yang melayani masyarakat luas, dan perluasan bantuan pendidikan berbasis kebutuhan.
2. Pemerintah wajib melakukan reformasi pendanaan pendidikan melalui pendekatan didasarkan pada kebutuhan dasar yang riil (*need-based funding*) secara berkeadilan, afirmasi lembaga pendidikan di wilayah 3T, afirmasi sekolah/madrasah swasta, afirmasi lembaga pendidikan berbasis masyarakat, serta afirmasi peserta didik dari keluarga miskin;
3. Pemerintah wajib memberikan perlakuan yang lebih adil kepada sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi swasta yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan, melalui bantuan operasional yang lebih proporsional, bantuan sarana prasarana, hibah pengembangan mutu, subsidi guru dan dosen, penugasan guru/dosen ASN untuk lembaga pendidikan swasta, dukungan transformasi digital, serta kesempatan di dalam menerima peserta didik sebagaimana di lembaga pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah
4. Pemerintah wajib melakukan perbaikan tata kelola guru/dosen secara menyeluruh melalui penyelesaian status guru honorer menjadi guru Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerataan distribusi guru berkualitas, penyederhanaan administrasi pembelajaran, penyempurnaan sistem sertifikasi, penguatan pengembangan profesi berkelanjutan, dan digitalisasi administrasi pendidikan.
5. Pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh guru/dosen memperoleh penghasilan yang layak melalui standar penghasilan minimum nasional bagi guru/dosen, peningkatan tunjangan profesi; afirmasi guru/dosen di daerah terpencil, perlindungan sosial yang komprehensif, dan kepastian jenjang karir guru/dosen.
6. Pemerintah wajib memperketat pemberian izin pendirian sekolah/ madrasah dan Perguruan Tinggi dengan merujuk pada prinsip kebutuhan, pemerataan, mutu, relevansi, dan keberlanjutan. Sementara itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan afirmatif dan asimetris dengan mempermudah pendirian satuan pendidikan di wilayah 3T, daerah dengan Angka

Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang masih rendah, atau wilayah yang belum terlayani secara memadai. Pada saat yang sama, Pemerintah juga wajib berfokus pada peningkatan mutu lembaga pendidikan yang sudah ada.

7. Pemerintah wajib menata kembali klasifikasi anggaran pendidikan dengan menempatkan pembiayaan pendidikan kedinasan sebagai bagian dari belanja pengembangan sumber daya aparatur pada kementerian/lembaga terkait, bukan menjadi bagian dari mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20%, sehingga anggaran pendidikan 20% dapat benar-benar digunakan untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, pemerataan, dan kesejahteraan pendidik pada pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi yang melayani hak konstitusional seluruh warga negara.

V. PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT MELALUI KOPERASI BERBASIS KOMUNITAS YANG INKLUSIF & BERDAYA SAING

Konteks

Konstitusi menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Namun, dalam praktiknya koperasi belum berkembang sebagai kekuatan utama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta penguatan rantai nilai nasional masih relatif kecil dibandingkan potensi ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagian besar pelaku UMKM masih beroperasi secara individual sehingga memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pasar, lembaga keuangan, maupun rantai pasok industri.

Program prioritas pemerintah terkait koperasi yang diberi nama Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif untuk memperkuat desa, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Namun demikian, keberhasilan program prioritas tersebut tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk, melainkan dari kemampuannya tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang sehat, profesional, produktif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.

Keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai apabila koperasi dibangun di atas nilai-nilai Mabādi' Khaira Ummah, yaitu kejujuran (*ash-shidq*), amanah dan menepati komitmen (*al-amānah wa al-wafā' bi al-'ahd*), keadilan (*al-'adālah*), gotong royong (*at-ta'āwun*), dan konsistensi (*al-istiqāmah*). Nilai-nilai tersebut merupakan prasyarat bagi terwujudnya tata kelola koperasi yang dipercaya masyarakat, berkeadilan, serta mampu tumbuh secara berkelanjutan

Karena itu, pendekatan yang digunakan tidak boleh hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan secara administratif dan bersifat *top-down*. Dalam banyak kasus, koperasi dibentuk sebagai instrumen program pemerintah, bukan sebagai manifestasi kebutuhan, aspirasi, dan partisipasi nyata masyarakat. Akibatnya, koperasi berisiko menjadi lembaga formal yang kurang memiliki akar sosial, tingkat partisipasi anggota yang rendah, serta keberlanjutan usaha yang lemah.

Di sisi lain, desa sesungguhnya memiliki modal sosial dan ekonomi yang beragam dalam bentuk komunitas-komunitas masyarakat yang telah lebih dahulu tumbuh dan berkembang, termasuk pesantren, kelompok tani, nelayan, pelaku UMKM, majelis taklim, komunitas perempuan, dan berbagai bentuk organisasi ekonomi rakyat lainnya. Sayangnya, berbagai entitas tersebut belum sepenuhnya ditempatkan sebagai bagian integral dalam ekosistem Koperasi Desa Merah Putih. Padahal, banyak koperasi yang telah eksis dan memiliki rekam jejak usaha, jaringan anggota, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, termasuk koperasi pesantren yang selama ini berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi umat.

Permasalahan lainnya adalah potensi tumpang tindih kelembagaan dan inefisiensi sumber daya akibat pembentukan koperasi baru tanpa mempertimbangkan keberadaan koperasi yang telah berjalan. Pendekatan yang berorientasi pada pendirian koperasi baru berisiko mengabaikan kebutuhan perbaikan tata kelola, penguatan kapasitas usaha, digitalisasi, akses permodalan, dan pengembangan jaringan pasar bagi koperasi yang sudah ada. Akibatnya, energi dan sumber daya yang tersedia lebih banyak digunakan untuk membangun struktur baru dibanding memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang telah tumbuh di masyarakat.

Karena itu, diperlukan perubahan paradigma kebijakan dari pendekatan yang berpusat pada desa sebagai entitas administratif menuju pendekatan yang berpusat pada komunitas masyarakat sebagai subjek pembangunan ekonomi. Koperasi Desa Merah Putih perlu dikembangkan dengan prinsip bottom-up, yakni dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan menjadikan komunitas-komunitas ekonomi yang telah hidup dan berkembang sebagai bagian dari ekosistem koperasi. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap koperasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas program, memperbaiki tata kelola, mengoptimalkan koperasi yang telah ada, serta membuka ruang bagi koperasi pesantren untuk menjadi bagian strategis dalam jaringan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis gotong royong.

Rekomendasi

1. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh dan mengubah orientasi Koperasi Merah Putih dari pendekatan administratif desa menjadi berbasis komunitas masyarakat, sehingga kelompok tani, UMKM, pesantren, dan komunitas ekonomi rakyat lainnya menjadi bagian dari ekosistem koperasi.
2. Di dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi, pemerintah harus mengedepankan pendekatan *bottom-up* (dari, oleh, dan untuk masyarakat - *vide* UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) agar dapat tumbuh berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal, sehingga koperasi ini dapat berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat desa, bukan melalui pendekatan *top-down* (dari atas dan instruktif).
3. Pemerintah harus memprioritaskan penguatan dan integrasi koperasi yang telah ada, termasuk koperasi pesantren (Badan Usaha Milik Pesantren), daripada semata-mata membentuk koperasi baru dengan memfasilitasi kemitraan antar koperasi dengan industri nasional, BUMN, perusahaan global, lembaga perdagangan internasional, diaspora Indonesia, platform ekspor digital, sehingga memiliki kapasitas global (*go global cooperative*)
4. Pemerintah terus memperkuat tata kelola koperasi melalui peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang efektif.
5. Pemerintah harus memberikan afirmasi kepada koperasi pesantren melalui dukungan regulasi, permodalan, pendampingan, dan akses terhadap program-program ekonomi nasional, sehingga pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal (vide UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren)
6. Di dalam pembentukan dan pengembangan koperasi, pemerintah memberi kesempatan kepada koperasi-koperasi itu berdasarkan potensi di daerah masing-masing, tidak seragam, agar tumbuh berkembang dari bawah serta pada akhirnya mampu memberi kontribusi besar kepada anggota dan masyarakat serta mampu bekerjasama dan bersaing dengan kekuatan-kekuatan ekonomi besar lainnya.

Muktamar Ke-35
Nahdlatul Ulama
Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang
27-31 Agustus 2026 | 14-18 R. Awwal 1448 H

KOMISI PROGRAM

MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
14-18 Rabi'ul Awwal 1448 H/27-31 Agustus 2026 M

Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
N
U
NAHDLATUL 'ULAMA

MATERI PROGRAM KERJA NAHDLATUL ULAM MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

PENDAHULUAN

Muktamar NU ke-35 di Tambakberas Jombang merupakan titik tolak istimewa dalam perjalanan khidmah jam'iyyah Nahdlatul Ulama, karena merupakan Muktamar pertama di abad kedua NU. Karena itu, arah strategis program perlu ditentukan untuk menjadi panduan program bagi Perkumpulan terbesar di Indonesia ini, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek.

Sebagai jam'iyyah dengan karakter khas organisasi masyarakat, maka NU dituntut untuk dapat mengelola perkumpulan secara efektif, sekaligus mengelola khidmah kepada jama'ah agar tujuan dasar perkumpulan dapat tercapai, yaitu mewujudkan tegaknya Islam Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah dan mewujudkan kemaslahatan umat. Panduan ini berlaku bagi seluruh tingkatan dan unsur jam'iyyah Nahdlatul Ulama, sehingga kita dapat mengarahkan seluruh sumber daya jam'iyyah secara terkonsolidasi .

Muktamar NU ke-34 di Lampung telah memberikan mandat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk membentuk Tim Penyusun Peta Jalan 25 tahun Nahdlatul Ulama. Melalui proses penyusunan Peta Jalan ini, dilakukan analisis konteks jangka panjang (25 tahun) maupun jangka pendek (5 tahun) yang akan dihadapi oleh jam'iyyah maupun jama'ah NU baik secara internal maupun secara eksternal yang memengaruhi, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat global.

Analisis ini dilandaskan kepada falsafah dasar Nahdlatul Ulama yang telah ditetapkan oleh para mu'assis NU, diselaraskan dengan perkembangan zaman. Ini untuk memastikan bahwa prinsip *istbatu as-stawabit wa taghyir al-mutghayyirat* dapat terpenuhi, sehingga NU dapat setia merawat keajegan hal-hal yang sudah seharusnya ajeg, tapi pada saat yang sama juga harus terbuka dan akseleratif pada inovasi-inovasi baru. Kaidah *al-muhafadzah ala al-qadim as-shalih wa akhdzu bi al-jadid al-ashlah* melengkapi prinsip di atas, sehingga kita dapat menggunakan ukuran kemaslahatan sebagai nilai utama untuk menanggalkan strategi lama ataupun memasukkan strategi dan program baru, semisal terkait dengan penguasaan teknologi informasi maupun perubahan demografi Indonesia yang berdampak besar kepada jama'ah dan jam'iyyah Nahdlatul Ulama.

Arah Strategis Program, baik jangka panjang maupun jangka pendek, merupakan kerangka kerja (*framework*) yang berkesinambungan dengan pokok haluan program yang telah ditetapkan oleh Muktamar sebelumnya, terutama dalam Muktamar NU ke-34 tahun 2021. Tiga pokok analisis digunakan dalam menyusun arah strategis progam ini, yaitu melihat ke belakang (hindsight), menera kondisi dan konteks saat ini (insight), dan memproyeksikan arah masa depan (foresight). Karena itu, analisis implementasi Pokok Haluan Program masa khidmah tahun 2021-2026 menjadi sumber pelajaran dan penajaman pengembangan program ke depan.

Dalam Muktamar NU ke-35 ini, akan ditetapkan Arah Strategis Program Jangka Panjang berupa Peta Jalan NU tahun 2026-2050 dan Arah Strategis Program Jangka Pendek berupa Arah Program tahun 2026-2031. Arah Program Jangka Pendek merupakan penggalan dari Arah Strategis Program Jangka Panjang, dengan fokus pada strategi implementasi dalam tahapan tersebut.

Bagian II.
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS NU

A. Analisis Implementasi Pokok Haluan Program NU 2022-2026 :

Evaluasi Pelaksanaan Mandat Muktamar NU ke-34 dan Arah Keberlanjutan Program 2026–2031

Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 menetapkan empat pilar utama program, yaitu meliputi: (i) Transformasi Aswaja an-Nahdiyah; (ii) Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia NU; (iii) Kemandirian Ekonomi untuk Kesejahteraan; dan (iv) Penguatan Organisasi, Kelembagaan, dan Jaringan. Empat pilar tersebut membentuk kerangka strategis untuk mengarahkan NU memasuki abad kedua melalui penguatan jemaah, kemandirian organisasi, kemaslahatan bangsa, dan kontribusi terhadap peradaban dunia. Naskah Komisi Program menjabarkan Pilar Transformasi Aswaja ke dalam empat subpilar, yaitu penyebarluasan Aswaja, penguatan ukhuwah dan kerukunan sosial, politik moral dan etik, serta perdamaian dunia.

Analisis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Lembaga PBNU tahun 2026, hasil Munas–Konbes 2023 dan 2026, dan hasil Komisi Program Konbes 2026 menunjukkan bahwa PBNU telah melaksanakan empat arah program Muktamar NU ke-34, tetapi tingkat kemajuannya belum merata. Konbes 2026 juga menyatakan secara eksplisit bahwa PBNU telah mengimplementasikan empat arah program Muktamar melalui berbagai strategi dan kegiatan.

Kemajuan program dapat diukur melalui lima tingkat kematangan analitis: Tingkat 1 (Rintisan); Tingkat 2 (Pelaksanaan Awal); Tingkat 3 (Perluasan); Tingkat 4 (Pelembagaan); dan Tingkat 5 (Dampak Sistemik). Skala tersebut merupakan instrumen analisis laporan ini dan bukan klasifikasi resmi PBNU.

Pelaksanaan keseluruhan mandat Muktamar NU ke-34 sampai 2026 berada pada Tingkat 3 (Perluasan). PBNU telah membangun kelembagaan, menjalankan program secara luas, memperluas kemitraan, mengembangkan sistem digital, menghasilkan regulasi, dan menjangkau penerima manfaat dalam skala besar. PBNU belum mencapai Tingkat 4 secara menyeluruh karena organisasi masih menghadapi fragmentasi data, ketimpangan implementasi antarwilayah, lemahnya keterhubungan antarlembaga, belum seragamnya indikator hasil, belum tuntasnya penataan aset, serta belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan program. Penilaian setiap pilar menghasilkan kesimpulan berikut:

Pilar	Tingkat Kemajuan 2026	Penilaian Utama
Pilar 1. Transformasi Aswaja an-Nahdiyah	Tingkat 3	Penyebaran dan diplomasi Aswaja berkembang kuat, tetapi pelembagaan Aswaja dan politik etik di akar rumput belum tuntas
Pilar 2. Pengembangan Kualitas SDM NU	Tingkat 3, beberapa unsur menuju Tingkat 4	Pendidikan, pesantren, kesehatan keluarga, beasiswa, dan kaderisasi mengalami ekspansi; ketenagakerjaan masih tertinggal

Pilar 3. Kemandirian Ekonomi untuk Kesejahteraan	Tingkat 2	Banyak prakarsa ekonomi berjalan, tetapi belum membentuk ekosistem ekonomi NU yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan
Pilar 4. Penguatan Organisasi, Kelembagaan, dan Jaringan	Tingkat 3, menuju Tingkat 4	Regulasi, digitalisasi, perencanaan, dan kaderisasi menunjukkan kemajuan besar, tetapi integrasi data, implementasi Renstra, aset, dan tata kelola belum merata

Pilar Kemandirian Ekonomi menjadi bidang dengan kesenjangan terbesar antara mandat Muktamar dan capaian aktual. Konbes 2026 menilai berbagai program ekonomi masih bersifat insidental, sporadis, berjangka pendek, kurang tersosialisasi, dan berpotensi tumpang tindih antara LPNU, LPPNU, RMI, dan LAZISNU. Konbes juga mencatat bahwa indikator kemandirian ekonomi belum terdefinisi secara jelas dan beberapa program unggulan belum berkesinambungan.

Kaderisasi dan transformasi digital menunjukkan kemajuan kelembagaan paling kuat. Sistem SiskaderNU telah mengelola data 145.590 kader secara digital, sedangkan pendampingan sistem telah menjangkau 585 administrator aktif dalam 29 kelompok provinsi. Munas–Konbes 2025 juga mengesahkan Peraturan Perkumpulan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Kaderisasi serta Peraturan Perkumpulan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Transformasi Digital NU.

Munas–Konbes 2023 menghasilkan keputusan pengembangan program yang signifikan dalam upaya mendorong konsolidasi jam'iyyah maupun konsolidasi program. Inisiatif PBNU untuk mengembangkan program terintegrasi Gerakan Keluarga Maslahat NU, Kaderisasi NU, dan Transformasi Digital NU dilembagakan dalam Munas Konbes 2023, dan pada akhirnya berhasil dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh lapisan struktural NU.

Munas–Konbes 2025 menjadi titik penting pelembagaan tata kelola program. Forum tersebut menyepakati Renstra sebagai dokumen perencanaan seluruh PWNU, mengarahkan pendampingan penyusunan Renstra PWNU dan PCNU, mendorong laporan kinerja tiga bulanan, serta mengarusutamakan lingkungan, ketahanan pangan, aset, wakaf, dan perhutanan sosial. Forum tersebut juga memperkuat tata kelola keuangan melalui penyusunan standar biaya, format anggaran, prosedur operasional keuangan, serta pengukuran kinerja yang diarahkan pada transparansi dan akuntabilitas.

Konbes 2026 mengubah orientasi evaluasi periode 2022–2026 menjadi fondasi transformasi jangka panjang melalui Peta Jalan NU Digdaya 2050. Peta Jalan NU 2026–2050 mengembangkan tujuh dimensi strategis berupa Konsolidasi *Jam'iyah*; Kesejahteraan Sosial Ekonomi; Keunggulan SDM NU; Pesantren dan Aswaja; Lingkungan Berkelanjutan; Kemaslahatan Bangsa; dan Peradaban Dunia. Tahap 2026–2030 secara khusus diarahkan pada Transformasi *Jam'iyah* melalui pembenahan organisasi, sistem, dan budaya kerja.

Sikap responsif Perkumpulan terhadap tantangan kontekstual juga dijalankan dengan baik dengan kemunculan berbagai inovasi program. Misalnya, pembentukan SAKA Pesantren (Satgas Penanggulangan Kekerasan di Pesantren) yang saat ini membangun Gerakan Pesantrenku Aman yang telah berjalan di puluhan kabupaten kota.

Analisis ini tidak menemukan alasan substantif untuk menyatakan salah satu dari empat pilar Muktamar NU ke-34 sudah tidak relevan. Seluruh pilar tetap relevan, bahkan Peta Jalan NU 2026–

2050 memperluas dan menyusun ulang keempatnya ke dalam arsitektur yang lebih komprehensif. Beberapa penugasan awal sudah selesai sehingga bentuk programnya tidak perlu diulang. Pembentukan tim penyusun peta jalan jangka panjang, misalnya, sudah bertransformasi menjadi Peta Jalan NU 2026–2050.

Secara umum, Pelaksanaan Program Nahdlatul Ulama periode 2022–2026 menunjukkan kemajuan nyata tetapi belum merata. PBNU berhasil membawa mandat Muktamar NU ke-34 keluar dari dokumen normatif menuju berbagai program, regulasi, lembaga, sistem digital, jaringan kemitraan, layanan publik, serta program dengan jangkauan besar.

Tingkat kemajuan agregat Program Muktamar NU ke-34 sampai 2026 berada pada Tingkat 3—Perluasan. NU telah melewati fase rintisan dan pelaksanaan awal, tetapi organisasi belum sepenuhnya mencapai fase pelembagaan. Kaderisasi dan sebagian tata kelola mulai mendekati Tingkat 4. Bidang ekonomi, ketenagakerjaan, politik etik, serta pengelolaan aset masih membutuhkan percepatan paling besar.

Tidak terdapat pilar utama Muktamar NU ke-34 yang kehilangan relevansi. Beberapa agenda pembentukan telah selesai, beberapa pendekatan lama perlu dihentikan, dan hampir seluruh substansi utama perlu dilanjutkan dengan tingkat kematangan yang lebih tinggi.

Tantangan NU periode 2026–2031 bukan lagi membuktikan bahwa organisasi mampu menjalankan banyak program. Tantangan utamanya ialah memastikan setiap program membentuk satu sistem NU yang terintegrasi, terukur, berkelanjutan, mandiri, dan menghasilkan kemaslahatan nyata bagi jemaah, bangsa, serta peradaban dunia.

Lebih lengkapnya mengenai Analisis Implementasi Pokok Haluan Program NU dapat dibaca dalam Lampiran 1.

B. Analisis Lingkungan Strategis

Perubahan zaman yang semakin cepat menempatkan NU pada titik persimpangan strategis. NU berada pada suatu titik balik (*critical juncture*) yang akan sangat menentukan arah keberlanjutannya menuju tahun 2050. Perubahan tersebut ditandai oleh beberapa tren utama, antara lain urbanisasi yang semakin masif, penetrasi teknologi digital yang hampir menyeluruh, pergeseran struktur demografi menuju masyarakat menua *(aging society),* serta meningkatnya mobilitas sosial dan pendidikan. Keempat faktor ini tidak hanya mengubah lanskap sosial Indonesia, tetapi juga menggeser pola relasi antara individu dengan institusi, termasuk institusi keagamaan.

Dalam kondisi demikian, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukan lagi terkait dengan ukuran atau besaran organisasi, melainkan terkait dengan tingkat relevansi dan kemampuan adaptasi. Dengan kata lain, tantangan utama NU ke depan bukan sekadar mempertahankan basis massa, tetapi memastikan bahwa kehadirannya tetap bermakna dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah.

Lingkungan global dan domestik saat ini ditandai oleh kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transformasi demografi menunjukkan bahwa generasi muda—yang akrab dengan teknologi digital, berpikir lebih terbuka, dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi serta partisipasi—akan menjadi aktor utama dalam kehidupan sosial dan keagamaan di masa depan.

Dinamika sosial-politik mengalami pergeseran yang signifikan. Polarisasi, populisme, serta menguatnya politik identitas di berbagai negara menunjukkan bahwa agama sering kali berada dalam posisi rentan untuk disalahgunakan. Dalam konteks ini, NU memiliki peran penting sebagai

penjaga Islam moderat (wasathiyah), yang mampu menjembatani perbedaan dan menjaga kohesi sosial. Namun, untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, diperlukan arah strategis jangka panjang yang jelas dan terukur.

Di bidang teknologi, revolusi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara beragama. Media sosial, kecerdasan buatan, dan platform digital lainnya telah menjadi ruang baru dalam produksi dan distribusi pengetahuan keagamaan. Tanpa strategi yang matang, NU bisa tertinggal dalam memanfaatkan peluang sekaligus menghadapi risiko tersebut.

Secara empiris, posisi NU saat ini masih menunjukkan kekuatan yang signifikan. Berdasarkan data survei Alvara Research Center tahun 2025, sekitar 57,2 persen umat Islam Indonesia menyatakan berafiliasi dengan NU. Angka ini juga tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang dilakukan lembaga survei lain seperti LSI dan Indikator Politik Indonesia. Angka ini sekaligus menegaskan bahwa NU tetap menjadi organisasi keagamaan dengan basis sosial terbesar di Indonesia.

Selain itu, praktik keagamaan yang menjadi ciri khas tradisi NU juga masih dijalankan secara luas. Ritual tahlilan, misalnya, dilakukan oleh sekitar 88,2 persen umat Islam . Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan berbasis tradisi yang selama ini diusung NU masih memiliki akar yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Kedua indikator tersebut memperlihatkan bahwa secara kultural, NU masih memiliki legitimasi yang kuat di Indonesia. Tradisi, jaringan sosial, serta warisan keilmuan pesantren menjadi fondasi utama yang menopang keberlanjutan NU. Namun demikian, jika dilihat lebih dalam, terutama melalui perspektif antar generasi, mulai terlihat adanya dinamika yang perlu mendapat perhatian serius. Tingkat kedekatan generasi muda, khususnya Generasi Z, terhadap NU relatif lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya perubahan dalam pola pewarisan identitas keagamaan.

Jika pada masa lalu identitas keagamaan cenderung diwariskan secara linier melalui keluarga dan lingkungan sosial, maka dalam konteks saat ini proses tersebut menjadi lebih terbuka dan tidak lagi bersifat deterministik. Generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber informasi dan pengetahuan, sehingga memiliki ruang yang lebih besar untuk membentuk preferensi dan identitasnya secara mandiri. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari transformasi yang terjadi pada level masyarakat secara lebih luas. Urbanisasi, sebagai salah satu faktor utama, telah mengubah struktur sosial dari yang semula berbasis komunitas menjadi lebih individualistik. Di wilayah pedesaan, praktik keagamaan umumnya bersifat kolektif dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Interaksi sosial yang intensif memungkinkan tradisi untuk terus diwariskan secara alami.

Sebaliknya, dalam konteks perkotaan, relasi sosial menjadi lebih longgar dan berbasis pilihan. Individu memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan aktivitas keagamaan yang diikuti, termasuk dalam memilih sumber rujukan keagamaan. Dalam situasi ini, institusi keagamaan tidak lagi menjadi satu-satunya otoritas, melainkan salah satu dari berbagai alternatif yang tersedia.

Perubahan serupa juga terjadi akibat digitalisasi. Perkembangan teknologi informasi telah membuka akses yang sangat luas terhadap berbagai konten keagamaan. Otoritas keilmuan yang sebelumnya terpusat pada lembaga atau figur tertentu kini mengalami desentralisasi. Individu dapat

mengakses beragam perspektif keagamaan melalui platform digital, yang pada akhirnya membentuk pola keberagamaan yang lebih beragam.

Digitalisasi tidak hanya memperluas akses, tetapi juga mengubah cara penyampaian dan penerimaan pesan keagamaan. Konten yang singkat, visual, dan mudah dipahami cenderung lebih diterima oleh generasi muda dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang lebih tekstual dan formal. Hal ini menuntut adanya adaptasi dalam metode dakwah dan penyebaran nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks ini, NU menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah tetap dapat hadir secara relevan dalam ruang digital yang kompetitif.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan tingkat pendidikan dan mobilitas sosial. Seiring dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan, masyarakat menjadi lebih kritis dan rasional dalam memandang berbagai aspek kehidupan, termasuk agama. Hal ini berdampak pada perubahan cara individu berinteraksi dengan institusi keagamaan.

Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pendekatan yang bersifat normatif dan otoritatif cenderung kurang efektif. Sebaliknya, pendekatan yang argumentatif, dialogis, dan berbasis solusi menjadi lebih relevan.

Selain itu, peningkatan mobilitas sosial juga mengubah aspirasi masyarakat. Individu yang mengalami peningkatan status ekonomi tidak hanya membutuhkan panduan spiritual, tetapi juga solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan anak, kesehatan, perencanaan keuangan, serta pengembangan karir.

Dalam konteks ini, institusi keagamaan dituntut untuk tidak hanya hadir sebagai sumber nilai, tetapi juga sebagai penyedia layanan yang mampu menjawab kebutuhan konkret masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai perubahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa NU tidak sedang menghadapi satu tantangan tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Urbanisasi, digitalisasi, perubahan demografi, peningkatan pendidikan, serta mobilitas sosial secara bersama-sama membentuk lanskap baru yang kompleks.

Kompleksitas ini menuntut adanya perubahan pendekatan dalam melihat peran NU ke depan. Jika pada masa lalu kekuatan utama NU terletak pada basis kultural dan jaringan tradisional, maka di masa depan kekuatan tersebut perlu dilengkapi dengan kapasitas adaptasi yang lebih tinggi.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana NU dapat mempertahankan nilai-nilai dasar yang menjadi identitasnya, sekaligus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini tidak dapat ditunda. Hal ini karena periode 2026 hingga 2035 merupakan fase yang sangat krusial dalam menentukan arah masa depan Indonesia dan tentu saja juga NU. Pada periode ini, bonus demografi mencapai puncaknya, generasi muda mulai mengambil alih peran kepemimpinan, dan berbagai kebijakan strategis akan menentukan arah pembangunan jangka panjang.

Bagi NU, periode ini merupakan “window of opportunity” sekaligus “window of risk”. Jika mampu memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi, maka NU memiliki peluang besar untuk tetap relevan hingga tahun 2050. Sebaliknya, jika tidak, maka NU berpotensi mengalami penurunan peran secara gradual. Transformasi yang dimaksud bukan sekadar perubahan pada level program atau kegiatan, melainkan perubahan paradigma. NU perlu bergerak dari model organisasi yang berorientasi pada struktur menuju model yang berorientasi pada nilai dan layanan.

Perubahan ini dapat dirumuskan sebagai pergeseran dari pendekatan “command and control” menuju “service and value”. Dalam pendekatan baru ini, NU tidak hanya berfungsi sebagai pemberi arahan, tetapi juga sebagai penyedia solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, NU diharapkan tidak hanya hadir dalam ruang ritual keagamaan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan digital.

Pada akhirnya, keberlanjutan NU tidak hanya ditentukan oleh besarnya basis massa atau kuatnya tradisi, tetapi oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam era yang ditandai oleh disrupsi dan kompleksitas seperti saat ini, organisasi yang mampu bertahan adalah organisasi yang memiliki fleksibilitas, relevansi, dan kapasitas inovasi. Organisasi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan kelas menengah berisiko kehilangan daya tarik. Hal ini menjadi penting mengingat kelas menengah merupakan kelompok yang terus berkembang dan memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk arah sosial dan budaya. Dengan demikian, NU menghadapi tantangan ganda, yakni mempertahankan basis akar rumput yang selama ini menjadi kekuatan utama, sekaligus meningkatkan relevansi di kalangan kelas menengah yang semakin besar dan dinamis.

Perubahan ekspektasi masyarakat terhadap peran organisasi keagamaan juga menjadi aspek penting yang perlu dicermati. Data survei juga menunjukkan bahwa warga NU tidak hanya membutuhkan layanan keagamaan dalam arti tradisional, tetapi juga layanan yang bersifat aplikatif dan kontekstual.

Dalam konteks layanan keagamaan, kebutuhan utama meliputi bimbingan keluarga sakinah, fiqih muamalah, serta metode mendidik anak . Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan pendekatan keagamaan yang mampu menjawab persoalan kehidupan sehari-hari, bukan sekadar memberikan panduan normatif.

Lebih jauh, kebutuhan terhadap layanan di luar aspek keagamaan juga cukup tinggi. Layanan ekonomi menjadi kebutuhan utama, diikuti oleh layanan kesehatan dan pendidikan . Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang organisasi keagamaan sebagai institusi yang diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Berbagai perubahan yang terjadi mensyaratkan NU untuk dapat terus beradaptasi, agar dapat mewujudkan cita-cita menegakkan Islam ASWAJA, membangun kemaslahatan, dan menciptakan rahmat bagi semesta.

Lebih lengkapnya mengenai Analisis Lingkungan Strategis NU dapat dibaca dalam Lampiran 2 Peta Jalan NU 2026-2050 Bagian 2 mengenai Konteks Perubahan

Bagian III
LANDASAN DASAR PROGRAM NU

Seluruh upaya yang dilakukan jam'iyyah NU tidak dapat dilepaskan dari jati diri NU dan falsafah dasar NU. Perjalanan panjang jam'iyyah telah memberikan jejak kearifan para ulama dan perkumpulan ini sendiri. Pergumulan yang intens antara jati diri NU dengan perkembangan peradaban memengaruhi keputusan-keputusan strategis yang telah dijalani NU, dan menjadikan NU sebagai organisasi masyarakat yang lentur dan adaptif.

NU dituntut untuk setia dengan jatidiri, tapi pada saat yang sama tidak menutup diri dengan perkembangan-perkembangan baru. Dalam kaitan ini, kaidah istbatu as-stawabit wa taghyir al-mutghayyirat, setia merawat keajegan sesuatu yang sudah seharusnya ajeg dan mengubah sesuatu yang memang bisa berubah, relevan menjadi pegangan dalam merespon berbagai perkembangan baru.

Dalam Muktamar pertama di abad kedua NU tahun 2026 ini, pengembangan program khidmah NU meneguhkan falsafah dasar NU sebagai landasan penyusunan arah strategis program jangka panjang 25 tahun maupun jangka pendek 5 tahun (2026-2031). Jati diri NU menjadi cara pandang (paradigma) utama dalam membaca perkembangan strategis zaman dan menentukan strategi yang akan digunakan oleh Pengurus NU dalam semua tingkatan struktural.

A. JATI DIRI NU

Jati diri NU tidak lahir secara instan, tapi terbentuk melalui proses sejarah panjang, dialogis, dan kontekstual. Secara ringkas, jati diri NU dibentuk melalui proses perjumpaan antara tradisi keislaman klasik *(turast)*, realitas sosial Islam Indonesia, dan perubahan zaman. Karena itu, jati diri NU bersifat historis sekaligus normatif: mengakar pada tradisi yang kuat, tetapi terus ditafsirkan ulang sesuai zaman yang berubah.

Dalam Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama atau Qanun Asasi yang dirumuskan para pendiri NU pada tahun 1926, Pasal 2, disebutkan:

"Adapun maksoed perkoempoelan ini jaitoe memegang dengan tegoeh salah satoe dari mazhabnja imam empat jaitoe Imam Moehammad bin Idris asj-Sjafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboe Hanifah An-Ne'man, atoe Imam Ahmad bin Hambal, dan mengedjakan apa sadja yang mendjadikan kemaslahatan agama Islam".

Dokumen tersebut menjadi spirit seluruh gerak dan khidmah yang dilakukan NU dari waktu ke waktu. Dalam dokumen Khittah NU yang dirumuskan dalam Muktamar ke27 pada 1984 di Situbondo Jawa Timur disebutkan, spirit dalam Qanun Asasi tersebut tetap dipegang teguh dimana NU bertujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dana mengamalkan ajaran Islam yang berhalauan ahlusunnah wal jama'ah serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

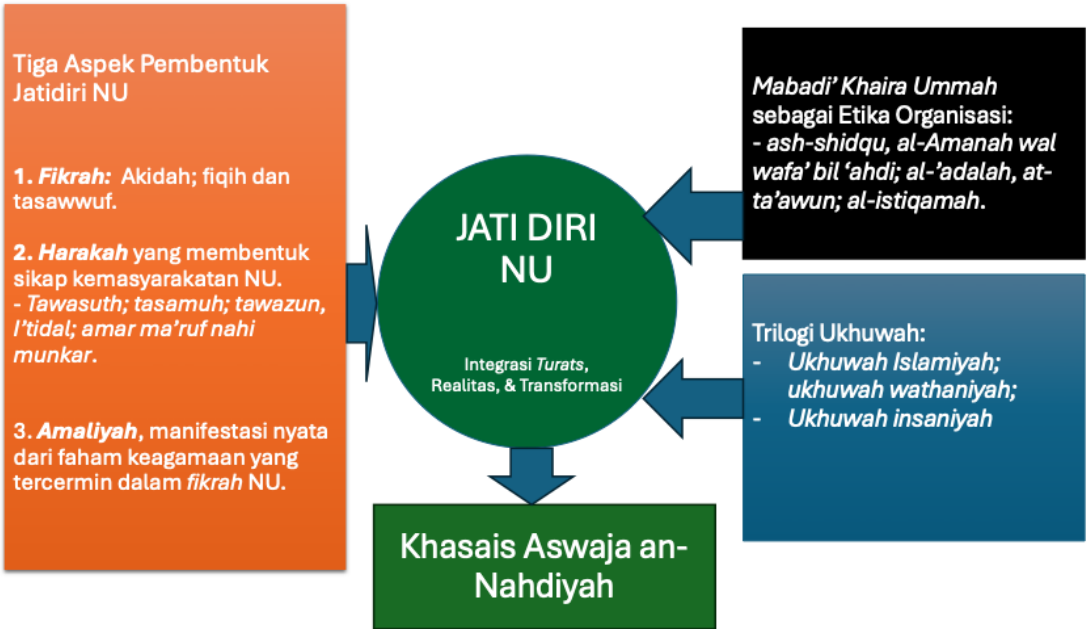

Dalam perkembangannya, jatidiri NU dirumuskan dalam tiga rumpun yang saling terkait berkelindan dalam satu kesatuan, yaitu 1) jatidiri terkait *fikrah*, yaitu pemikiran yang membentuk identitas NU; 2) jatidiri *harakah*, yaitu gerakan sosial keagamaan NU; dan 3) jatidiri *amaliyah,* yaitu praktik kehidupan keagamaan yang dilakukan NU.

B. VISI MISI

Dengan mengacu kepada jati diri NU dan analisis lingkungan strategis jangka panjang, ditentukan visi dan misi yang ingin diwujudkan NU pada tahun 2050, yang selanjutnya diturunkan menjadi tujuan-tujuan dan strategi-strategi program. Visi Misi NU tahun 2031 akan dicuplik dari Visi Misi NU 2050, sebagai bagian tak terpisahkan dan menjadi tahapan landasan.

1. Visi NU 2050

NU Digdaya 2050:

Tegaknya Islam Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA), terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kemaslahatan bangsa, serta terciptanya rahmat bagi semesta melalui kepemimpinan Jam'iyah NU yang mandiri, terpercaya, dan bermartabat.

Beberapa kata kunci rumusan visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- **NU Digdaya:** kondisi Nahdlatul Ulama yang kuat, berwibawa, berpengaruh, dan mampu menjadi kekuatan strategis dalam kehidupan keagamaan, sosial, dan kebangsaan.
- **Tegaknya Islam ASWAJA:** terimplementasinya nilai dan ajaran secara nyata dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara.
- **Kesejahteraan Masyarakat:** kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial) secara adil dan merata.
- **Kemaslahatan Bangsa:** segala sesuatu yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan bagi bangsa Indonesia.
- **Rahmat bagi Semesta:** prinsip bahwa Islam hadir sebagai kasih sayang universal bagi seluruh makhluk, bukan hanya umat Islam.

- **Mandiri:** kemampuan berdiri sendiri tanpa ketergantungan yang melemahkan.
- **Terpercaya:** memiliki integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas tinggi.
- **Bermartabat**: memiliki kehormatan, etika, dan nilai luhur.

Visi ini mencerminkan tiga orientasi utama sekaligus:

1. Orientasi keislaman (nilai). Orientasi ini menegaskan peran NU dalam menjaga dan mengembangkan ajaran Islam berhalauan ahlussunnah wal jama'ah dengan karakteritiknya yang moderat, seimbang, dan inklusif.
2. Orientasi kebangsaan (kesejahteraan). Orientasi ini untuk memastikan bahwa keberadaan NU memberikan manfaat riil yang bisa dirasakan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa.
3. Orientasi kemanusiaan global (peradaban). Orinetasi ini untuk memperluas peran NU sebagai aktor dalam membawa nilai rahmat bagi seluruh umat manusia.

2. Misi NU

Untuk mewujudkan visi besar tersebut, ditetapkan tiga misi utama :

1. Penguatan transformasi konsolidasi jam'iyyah dalam tata kelola, kaderisasi dan transformasi digital.
2. Pewujudan Kesejahteraan Rakyat Melalui Penguatan ASWAJA, Pengembangan Pesantren, Keunggulan SDM, Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan
3. Penguatan Peran NU dalam Khidmah Kemaslahatan Bangsa dan Peradaban Dunia

Hal ini mencerminkan perluasan peran NU dari organisasi keagamaan menjadi aktor perubahan sosial; dari aktor sosial menjadi aktor peradaban dunia. Dengan demikian, NU tidak hanya melayani kebutuhan internal umat Islam dan Indonesia, tetapi juga menjawab tantangan besar umat manusia secara global.

Visi Misi NU ini menjadi sebuah cita-cita pergerakan yang akan mengikat seluruh ekosistem NU. Visi Misi ini akan diturunkan menjadi arah strategis program secara lebih mendetil dan komprehensif, yang akan dimuat dalam Peta Jalan NU 2026-2050 dan Arah Strategis Program 2026-2031.

Dalam Peta Jalan NU, Visi dan Misi akan diterjemahkan menjadi 7 Dimensi Peta Jalan dan 5 Tahapan, di mana setiap Dimensi akan memiliki Subdimensi yang mewakili sektor-sektor utama. Dengan penjabaran ini diharapkan seluruh unsur ekosistem Jam'iyyah dapat bergerak secara terarah, sinergis dan saling memperkuat.

Bagian IV
PETA JALAN NU
2026-2050

Kesadaran akan kompleksitas tantangan perkembangan zaman semakin menegaskan pentingnya penyusunan peta jalan jangka panjang, khususnya dalam rentang waktu 25 tahun ke depan bagi NU sebagai jam'iyyah. Peta jalan ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan kerangka strategis yang memuat visi, arah kebijakan, prioritas program, serta indikator keberhasilan yang terukur. Dengan adanya peta jalan, NU dapat bergerak secara konsisten lintas generasi kepemimpinan, tanpa kehilangan arah akibat pergantian kepengurusan.

Peta jalan ini juga memiliki fungsi penting sebagai alat konsolidasi internal. Dengan struktur organisasi NU yang sangat besar dan tersebar hingga ke tingkat akar rumput (ranting), diperlukan panduan bersama yang mampu menyelaraskan gerak langkah seluruh elemen organisasi. Tanpa keselarasan tersebut, potensi besar NU justru bisa terhambat oleh fragmentasi dan ketidaksinambungan kebijakan.

Di sisi lain, peta jalan jangka panjang memungkinkan NU untuk bertransformasi dari organisasi yang reaktif menjadi organisasi yang proaktif dan antisipatif. Artinya, NU tidak hanya merespons perubahan setelah terjadi, tetapi mampu membaca tren masa depan dan menyiapkan langkah-langkah strategis sejak dini. Pendekatan ini sangat penting dalam menghadapi dunia yang semakin tidak pasti *(uncertain),* kompleks *(complex),* dan ambigu *(ambiguous).*

Dengan demikian, penyusunan peta jalan 25 tahun bagi NU merupakan kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda. Ini bukan sekadar soal perencanaan teknis, tetapi menyangkut arah peradaban yang ingin dibangun. Peta jalan tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan antara tradisi dan inovasi, antara nilai-nilai keislaman dan tuntutan modernitas, serta antara kepentingan lokal dan tanggung jawab global.

Pada akhirnya, melalui peta jalan yang terarah dan berkelanjutan, NU diharapkan dapat terus memainkan peran historisnya sebagai penjaga Islam yang ramah, penopang keutuhan bangsa, dan kontributor aktif bagi perdamaian dunia. Peta jalan ini menjadi fondasi bagi NU untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin dalam membentuk masa depan umat dan kemanusiaan secara lebih luas.

Tujuan Penyusunan Peta Jalan 25 Tahun NU

Penyusunan Peta Jalan *(roadmap*) 25 tahun NU bertujuan untuk:

1. Memberikan arah strategis jangka panjang yang komprehensif, terukur, dan berkesinambungan bagi perjalanan organisasi dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Sebagai organisasi keagamaan terbesar yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan, NU membutuhkan kerangka perencanaan yang mampu menjamin konsistensi visi di tengah dinamika perubahan kepemimpinan dan perkembangan global.
2. Mempersiapkan NU dalam menghadapi perubahan b**esar** yang meliputi aspek demografi, teknologi, sosial-politik, serta dinamika geopolitik global. Perubahan struktur penduduk, terutama meningkatnya dominasi generasi muda, menuntut NU untuk melakukan adaptasi dalam pendekatan dakwah, pendidikan, dan penguatan kaderisasi. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam penyebaran nilai-

nilai keislaman. Peta jalan ini membantu NU merumuskan strategi yang tepat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, sekaligus meminimalkan dampak negatifnya.

3. Memberikan kerangka prioritas program yang jelas, terukur, dan berkelanjutan bagi seluruh elemen organisasi di setiap periode kepengurusan. Dengan adanya peta jalan, setiap lembaga, badan otonom, serta struktur kepengurusan di berbagai tingkatan—mulai dari pusat hingga ranting—memiliki pedoman kerja yang terintegrasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan tidak berjalan secara parsial, tetapi saling mendukung dalam mencapai tujuan besar organisasi.
4. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas organisasi. Dengan adanya arah yang jelas, NU dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program serta menyesuaikan strategi jika diperlukan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk bergerak lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil *(outcome-oriented)*.

Lebih jauh lagi, penyusunan peta jalan 25 tahun ini dimaksudkan sebagai sarana konsolidasi dan integrasi seluruh potensi yang dimiliki NU. Dengan jaringan yang sangat luas dan beragam, diperlukan keselarasan visi dan koordinasi yang kuat agar potensi tersebut dapat dioptimalkan. Peta jalan berfungsi sebagai platform bersama yang menyatukan arah gerak, memperkuat sinergi, serta mendorong kolaborasi antar elemen organisasi.

A. KERANGKA KONSEPTUAL

Peta Jalan NU 25 tahun ini dikembangkan sebagai strategi implementasi untuk mewujudkan Visi Misi NU 2050, yaitu mewujudkan NU Digdaya 2050. Visi diwujudkan melalui tiga misi utama yang menggambarkan tahapan perjalanan transformasi NU. Urutan tiga misi tersebut menunjukkan logika transformasi yang sangat jelas: dimulai dari penguatan internal, kemudian berdampak sosial, dan akhirnya berperan global.

Tiga misi tersebut diterjemahkan ke dalam kerangka konseptual yang memuat tujuh dimensi Peta Jalan. Tujuh dimensi ini adalah sektor-sektor yang dipandang signifikan dalam perjalanan NU sampai tahun 2050.

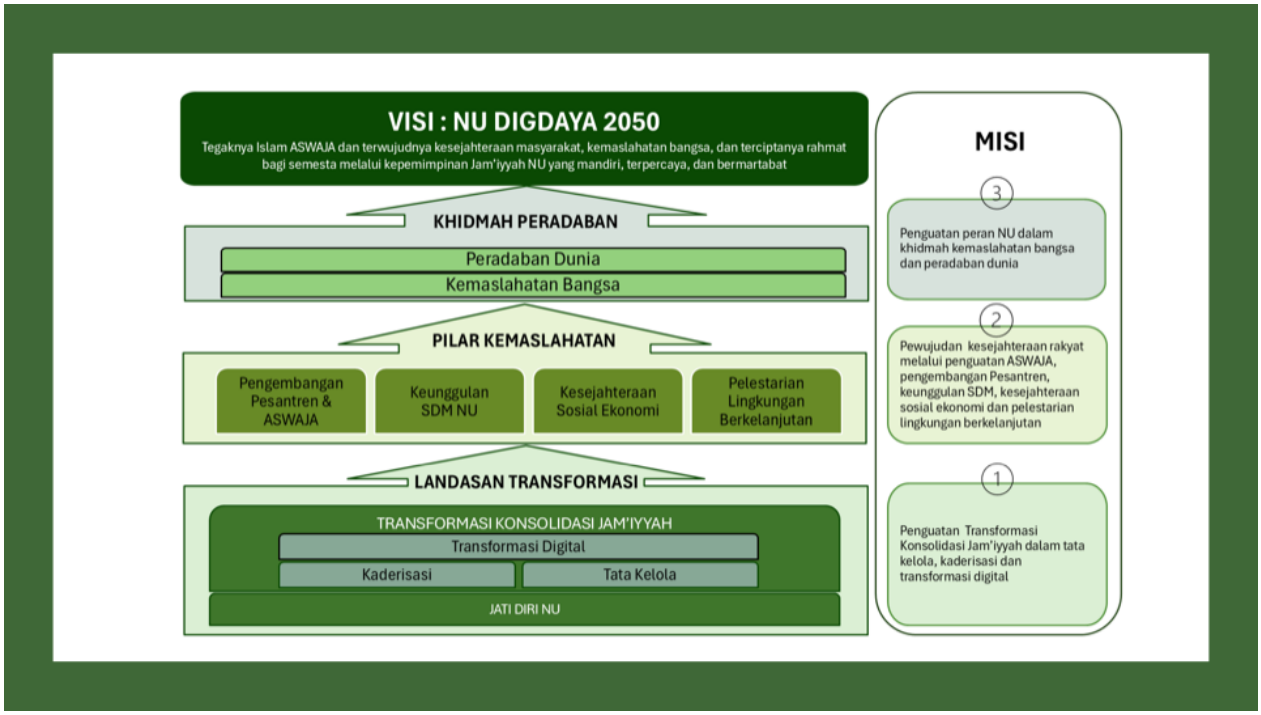

Misi 1: Penguatan Transformasi Konsolidasi Jam'iyah dalam Tata Kelola, Kaderisasi dan Transformasi Digital

Misi pertama menekankan pentingnya membangun kekuatan dari dalam jam'iyah. Misi ini difokuskan pada:

- Penguatan tata kelola organisasi
- Pengembangan kaderisasi
- Transformasi digital

Misi ini berangkat dari kesadaran bahwa organisasi yang besar tidak akan efektif tanpa sistem yang kuat. Karena itu, NU perlu memastikan bahwa seluruh struktur organisasi memiliki kapasitas yang kurang lebih sama, sistem yang terintegrasi, dan kemampuan kerja yang modern.

Misi 2: Pewujudan Kesejahteraan Rakyat Melalui Penguatan ASWAJA, Pengembangan Pesantren, Keunggulan SDM, Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan

Setelah penguatan internal, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa kekuatan tersebut berdampak nyata bagi masyarakat.

Misi ini menegaskan peran NU dalam:

- Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi
- Mengembangkan pendidikan dan pesantren
- Meningkatkan kualitas SDM
- Menjaga keberlanjutan lingkungan

Pada tahap ini, NU hadir secara langsung dalam kehidupan masyarakat sebagai agen perubahan sosial yang membawa manfaat konkret, manfaat yang langsung bisa dirasakan masyarakat terutama warga NU.

Misi 3: Penguatan Peran NU dalam Khidmah Kemaslahatan Bangsa dan Peradaban Dunia

Misi terakhir memperluas cakupan peran NU ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya untuk kepentingan Indonesia tapi juga untuk peradaban global. Khidmah Peradaban adalah bentuk pengabdian NU pada kehidupan manusia secara global yang melampaui batas-batas wilayah negara. Misi ini berfokus mengarahkan NU untuk:

- Berkontribusi dalam isu-isu kebangsaan
- Berkontribusi dalam isu-isu global
- Menjadi rujukan dalam pemikiran keislaman dan kemanusiaan
- Berperan dalam membangun peradaban dunia yang berkeadilan

Khidmah peradaban ini diwujudkan dalam dua ruang utama:

- Kemaslahatan Bangsa dengan memperkuat kontribusi NU terhadap kehidupan berbangsa Indonesia
- Peradaban Dunia dengan memberikan kontribusi terhadap isu-isu global lintas bangsa.

Secara umum, Peta Jalan digambarkan dalam tiga segmen :

1. Landasan Transformasi
   Berangkat dari Jati Diri NU, pewujudan NU Digdaya 2050 dimulai dari Transformasi Konsolidasi Jam'iyyah yang terdiri dari :
   a. Tata Kelola
   b. Kaderisasi
   c. Transformasi Digital

2. Pilar Kemaslahatan

   Dengan semangat pendekatan yang menyeluruh dan berpijak pada kekhasan NU dengan menggabungkan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologi dipilih empat pilar utama sebagai bidang intervensi strategis bagi NU , yaitu :

   a. Pengembangan ASWAJA dan Pesantren
   b. Keunggulan SDM NU
   c. Kesejahteraan Sosial Ekonomi
   d. Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan

3. Khidmah Peradaban

   Khidmah ini diwujudkan dalam dua ruang utama:

   a. Kemaslahatan Bangsa dengan memperkuat kontribusi NU terhadap pembangunan nasional
   b. Peradaban Dunia dengan memberikan kontribusi terhadap isu-isu global lintas bangsa.

B. TUJUH DIMENSI PETA JALAN NU

Dari penjabaran misi tersebut di atas, ditentukan tujuh dimensi Peta Jalan sebagai sektor-sektor strategis yang menjadi fokus ruang khidmah NU, dengan 20 subdimensi.

1. Penguatan Konsolidasi Jam'iyyah
   a. Tata Kelola Jam'iyyah
   b. Kaderisasi
   c. Transformasi Digital
2. Pengembangan Pesantren dan Aswaja.
   a. Aswaja
   b. Pesantren
3. Keunggulan SDM NU
   a. Pendidikan Anak Usian Dini (Day Care)
   b. Pendidikan Anak usia Dini (TK/RA)
   c. Pendidikan Dasar dan Menengah
   d. Pendidikan Tinggi
   e. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
   f. Talent Management
4. Kesejahteraan Sosial Ekonomi
   a. Ekonomi
   b. Kesehatan
   c. Keluarga Maslahat dan Kesetaraan Gender
5. Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan
6. Khidmah Kemaslahatan Bangsa
   a. Politik
   b. Hukum
   c. Demokrasi
   d. Kepemimpinan dalam Gerakan Masyarakat Sipil
7. Khidmah Peradaban Dunia

C. TAHAPAN PETA JALAN

Peta Jalan merupakan sebuah kerangka kerja yang mengawinkan pendekatan tematik (sektoral) dengan tahapan-tahapan kerja. Tahapan kerja ini bertujuan untuk menata langkah agar terkonsolidasi dan terukur. Setiap Tema Tahapan menggambarkan tema strategi implementasi utama yang menjadi target pencapaian terfokus. Tema strategi implementasi ini berlaku selaras untuk semua sektor.

Sebagai contohnya, pada tahun 2026-2031 tema yang menjadi fokus adalah Transformasi Jam'iyyah. Maka seluruh dimensi akan diarahkan untuk memperkuat landasan transformasi pada sektor terkait, baik di sektor pendidikan, pesantren, keluarga, dan seterusnya.

Tema Tahapan tidak berarti tema hal tersebut hanya akan dibahas pada periode tersebut. Tema Tahapan ditetapkan menjadi fokus strategi implementasi, namun kerja-kerja lainnya tetap dilaksanakan secara simultan. Tema Tahapan pada periode tertentu seringkali juga dirintis pada periode-periode sebelumnya. Misalnya Tema Tahapan pada tahun 2045-2050 yaitu Ekosistem Peradaban di mana NU sudah memiliki ekosistem yang kuat dalam setiap dimensi mensyaratkan rintisan-rintisan sejak tahun 2026.

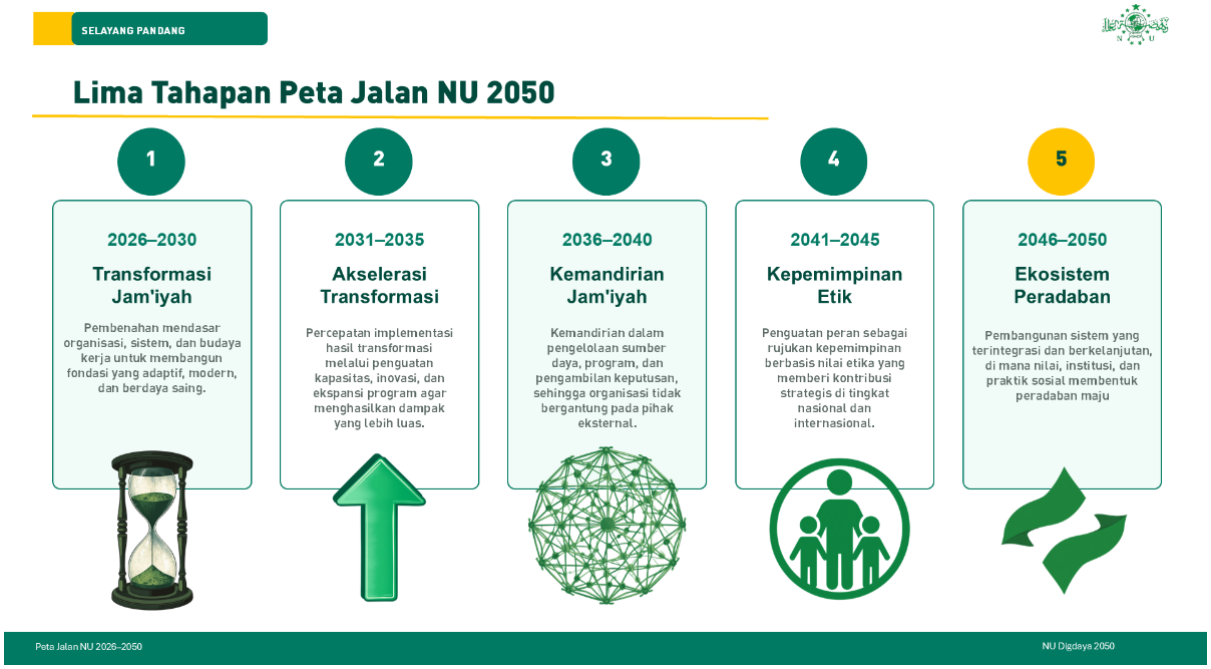

Tahapan Peta Jalan NU 2050 disusun sebagai berikut:

1. Transformasi Jam'iyah (2026–2030):

Tahap ini merupakan fase rekonstruksi mendasar yang bertujuan membangun ulang fondasi organisasi agar selaras dengan tantangan dan perubahan dunia yang begitu cepat. Transformasi tidak sekadar perubahan administratif, tetapi mencakup reorientasi paradigma gerakan dari pola tradisional menuju organisasi berbasis sistem, data, dan inovasi. Pembenahan dilakukan pada struktur kelembagaan, sistem tata kelola *(governance)*, mekanisme pengambilan keputusan, serta pola relasi antar-unit organisasi.

Di tingkat kultural, tahap ini menjadi momentum membangun etos kerja baru yang menjunjung profesionalitas, integritas, dan kolaborasi lintas sektor. NU diarahkan untuk menginternalisasi budaya organisasi yang adaptif terhadap disrupsi digital, perubahan sosial, dan dinamika global. Di fase ini pula dibangun fondasi digitalisasi organisasi, standardisasi prosedur, serta pemetaan potensi kader dan sumber daya secara sistematis.

Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai "peletakan batu pertama peradaban organisasi baru", di mana NU mulai bertransformasi dari organisasi berbasis tradisi menjadi organisasi modern tanpa kehilangan akar nilai Aswaja.

2. Akselerasi Transformasi Jam'iyah (2030–2035)

Jika tahap pertama bersifat internal dan struktural, maka tahap kedua menitikberatkan pada akselerasi dan ekspansi hasil transformasi. Fokusnya adalah memastikan bahwa perubahan yang telah dirancang benar-benar diimplementasikan secara luas dan menghasilkan dampak yang terukur.

Penguatan kapasitas dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul, peningkatan kualitas kepemimpinan kader, serta penguatan institusi pendidikan, ekonomi, dan sosial yang berada di bawah NU. Inovasi menjadi kata kunci pada fase ini—baik dalam model dakwah, pelayanan publik, maupun pengembangan ekonomi umat.

Di sisi lain, NU mulai memperluas jangkauan programnya secara geografis dan sektoral, sehingga kehadirannya semakin terasa di berbagai lapisan masyarakat. Indikator keberhasilan tahap ini adalah munculnya dampak nyata *(impact-driven organization)* yang dapat diukur dalam bidang kesejahteraan, pendidikan, dan pemberdayaan.

Tahap ini menjadikan NU sebagai organisasi yang tidak hanya "berubah", tetapi mampu menghadirkan perubahan bagi lingkungan sekitarnya.

3. Independensi Jam'iyah (2036–2040)

Tahap ketiga adalah fase konsolidasi menuju kemandirian strategis. Pada titik ini, NU diharapkan telah memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya secara mandiri, baik dalam aspek keuangan, program, maupun pengambilan keputusan.

Independensi tidak hanya berarti bebas dari ketergantungan eksternal, tetapi juga mencerminkan ketahanan organisasi *(organizational resilience)* dalam menghadapi krisis atau perubahan global. NU memiliki ekosistem ekonomi yang menopang aktivitasnya, sistem kaderisasi yang berkelanjutan, serta kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Selain itu, tahap ini juga ditandai dengan penguatan jejaring internal yang solid antarstruktur NU, sehingga tercipta sinergi yang efektif dari tingkat pusat hingga akar rumput. NU tidak lagi reaktif terhadap dinamika eksternal, tetapi menjadi organisasi yang proaktif, otonom, dan berdaya tawar tinggi. Dengan kata lain, fase ini merupakan titik di mana NU berdiri sebagai entitas yang berdaulat secara organisasi.

4. Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional & Global (2041–2045)

Memasuki tahap ini, NU melampaui batas sebagai organisasi nasional dan mulai memainkan peran sebagai aktor moral global. Dengan modal kemandirian yang telah dibangun, NU diproyeksikan menjadi rujukan dalam praktik kepemimpinan berbasis nilai etik, khususnya dalam konteks Islam moderat *(wasathiyah)* dan kemanusiaan universal.

Peran ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti diplomasi kebudayaan, forum internasional, advokasi perdamaian, serta kontribusi dalam penyelesaian konflik global. NU hadir sebagai kekuatan yang menawarkan paradigma alternatif terhadap ekstremisme, polarisasi, dan krisis kemanusiaan.

Di tingkat nasional, NU memperkuat perannya dalam memberikan arah moral bagi kebijakan publik, tanpa harus larut dalam politik praktis. Di tingkat global, NU menjadi *"moral*

compass" yang menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan isu-isu global seperti keadilan, lingkungan, dan keberlanjutan. Tahap ini menjadikan NU sebagai rujukan kepemimpinan etik lintas bangsa dan peradaban.

5. Ekosistem Peradaban (2046–2050)

Tahap terakhir adalah fase visioner yang melampaui kerangka organisasi menuju pembentukan ekosistem peradaban yang utuh. Pada tahap ini, NU tidak lagi sekadar menjalankan program, tetapi telah berkontribusi dalam membangun peradaban.

Ekosistem ini mencakup integrasi antara nilai-nilai keagamaan, institusi sosial, sistem ekonomi, pendidikan, serta praktik budaya yang harmonis dan berkelanjutan. NU menjadi bagian dari arsitektur peradaban yang menghubungkan dimensi spiritual, sosial, dan material secara seimbang.

Ciri utama tahap ini adalah terciptanya masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan. NU berfungsi sebagai katalis yang memastikan bahwa modernitas tidak tercerabut dari nilai, dan tradisi tidak terasing dari kemajuan. Dengan demikian, fase ini merupakan puncak perjalanan panjang NU menuju peran sebagai aktor pembentuk peradaban masa depan, yang tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia.

Elaborasi tersebut menunjukkan bahwa Peta Jalan NU 2050 pada hakikatnya adalah proyek transformasi historis, yang menempatkan NU sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang berevolusi menjadi arsitek peradaban global berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.

Lebih lengkapnya dapat dibaca dalam Lampiran 2. Peta Jalan NU 2026-2050.

Bagian V
ARAH STRATEGIS PROGRAM
2026-2031

A. ARAH STRATEGIS PROGRAM NU 2026–2031

Peta Jalan NU 2026–2050 memberi dasar yang kuat bagi penyusunan program periode masa khidmah 2026–2031. Visi NU Digdaya 2050 menghubungkan tegaknya Aswaja, kesejahteraan masyarakat, kemaslahatan bangsa, dan rahmat bagi semesta melalui kepemimpinan NU yang mandiri, terpercaya, dan bermartabat. Di sisi lain, pentahapan (milestones) dalam Peta Jalan tersebut menegaskan perlunya membangun landasan pengembangan jangka panjang yang kuat, melalui tema tahap 1 yaitu **Transformasi Konsolidasi Jam'iyyah.**

Tahap ini merupakan fase rekonstruksi mendasar yang bertujuan membangun ulang fondasi organisasi agar selaras dengan tantangan dan perubahan dunia yang begitu cepat. Transformasi tidak sekadar perubahan administratif, tetapi mencakup reorientasi paradigma gerakan dari pola tradisional menuju organisasi berbasis sistem, data, dan inovasi. Pembenahan dilakukan pada struktur kelembagaan, sistem tata kelola *(governance)*, mekanisme pengambilan keputusan, serta pola relasi antar-unit organisasi.

Di tingkat kultural, tahap ini menjadi momentum membangun etos kerja baru yang menjunjung profesionalitas, integritas, dan kolaborasi lintas sektor. NU diarahkan untuk menginternalisasi budaya organisasi yang adaptif terhadap disrupsi digital, perubahan sosial, dan dinamika global. Di fase ini pula dibangun fondasi digitalisasi organisasi, standardisasi prosedur, serta pemetaan potensi kader dan sumber daya secara sistematis.

Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai "peletakan batu pertama peradaban organisasi baru", di mana NU mulai bertransformasi dari organisasi berbasis tradisi menjadi organisasi modern tanpa kehilangan akar nilai Aswaja. Periode 2026–2031 perlu mengubah paradigma pengelolaan program dari banyak kegiatan menjadi hasil yang terukur; dari program lembaga menjadi portofolio lintas lembaga; dari aplikasi sektoral menjadi Satu Data NU; dari program ekonomi sporadis menjadi ekosistem ekonomi jemaah; dari kaderisasi berbasis pelatihan menjadi manajemen talenta; serta dari digitalisasi administrasi menjadi organisasi berbasis data.

B. VISI MISI NU 2026-2031

Dengan merujuk kepada Visi NU DIGDAYA 2050, Visi NU 2026-2031 diformulasikan sebagai berikut :

NU BARAKAH 2031

Tegaknya Islam ASWAJA an-Nahdliyyah & terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kemaslahatan bangsa dan terciptanya rahmat bagi semesta melalui konsolidasi & transformasi jam'iyyah NU yang amanah, adaptif, modern & berkesinambungan.

Sedangkan Misi NU 2026-2031 ditetapkan selaras dengan 3 Misi dalam Peta Jalan NU 2026-2050 yaitu :

1. Penguatan transformasi konsolidasi jam'iyyah dalam tata kelola organisasi, kaderisasi dan transformasi digital.

2. Pewujudan Kesejahteraan Rakyat Melalui Penguatan ASWAJA, Pengembangan Pesantren, Keunggulan SDM, Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan
3. Penguatan Peran NU dalam Khidmah Kemaslahatan Bangsa dan Peradaban Dunia

C. PRINSIP KERJA

Untuk mewujudkan Visi NU BARAKAH 2031, seluruh upaya khidmah perlu dibangun dengan prinsip kerja sebagai berikut :

1. **B**erorientasi Jama'ah**,**
2. **A**manah,
3. Kohe**R**en,
4. **A**kuntabel,
5. **K**esinambungan,
6. **A**daptif,
7. **H**andal

Yang disingkat menjadi BARAKAH, dan menjadi bagian dari semboyan Visi NU, yaitu NU BARAKAH 2031.

D. PROGRAM PRIORITAS

1. TATA KELOLA ORGANISASI BERSTANDAR INTERNASIONAL
   Penguatan tata kelola organisasi berstandar internasional baik dari aspek tata kerja, sistem perencanaan, serta monitoring dan evaluasi
2. TRANSFORMASI KADERISASI
   mencakup redesign kurikulum adaptif, penatakelolaan database terpadu (profil-perkembangan-potensi)
3. SATU DATA NU:
   Penguatan layanan ekosistem digital terhadap Jamaah dan Jam'iyyah (Digdaya dan NU online)
4. WARGA BERDAYA
   Penguatan ekosistem kesejahteraan warga Nahdliyyin mulai dari basis sampai layanan dan badan usaha milik NU
5. OPTIMALISASI LAYANAN KESEHATAN NU
   Peningkatan kualitas kesehatan umat melalui perbaikan layanan & promosi kesehatan
6. GERAKAN KELUARGA MASLAHAT NU
   Transformasi tata kelola GKMNU menjadi gerakan terintegrasi lintas struktural
7. STANDARISASI MUTU SEKOLAH NU
   Peningkatan tata kelola institusi pendidikan NU dari tingkat PAUD sampai Pendidikan Tinggi
8. TRANSFORMASI PESANTREN
   Peningkatan tata kelola pesantren melalui 6 Pilar Transformasi Pesantren
9. ASWAJA ARUS UTAMA
   Pengarusutamaan ideologi ASWAJA sesuai dengan perkembangan demografi Indonesia dan umat Islam
10. GERAKAN DARLING (Gerakan Sadar Lingkungan)
    Kesadaran Jam'iyyah dan Jama'ah untuk kehidupan yang lebih selaras dengan alam.

11. SANGGA ETIKA KEBANGSAAN
    Revitalisasi peran NU sebagai penyangga etika kebangsaan
12. POSITIONING GLOBAL NU
    Penguatan peran NU dalam gerakan agama-agama untuk peradaban dunia

E. TUJUH DIMENSI PROGRAM

1. Penguatan Konsolidasi Jam'iyyah

	Goal	Outcome	Strategi
TATA KELOLA	**Organisasi NU dari Pusat sampai Daerah yang terkonsolidasi dan terintegrasi melalui Konsolidasi Organisasi dan Konsolidasi Aksi**	1. Organisasi stabil. 2. Sistem berjalan. 3. Kinerja mulai terukur.	1. Institusionalisasi Badan Perencanaan Pengembangan NU (Bappenu) 2. Implementasi program kerja berbasis rencana strategis 3. Penguatan tata kelola organisasi (Sertifikasi ISO) 4. Penerapan sistem monitoring & evaluasi (M&E) yang rutin dan terukur 5. Pengumpulan baseline data untuk pengambilan Keputusan 6. Konsolidasi dan manajemen seluruh asset Jam'iyah 7. Pengembangan kapasitas SDM (pelatihan dasar dan manajemen organisasi) 8. Membangun budaya kerja yang disiplin, akuntabel, dan kolaboratif

KADERISASI	**Penguatan kader dalam ekosistem internal melalui sistem pengkaderan yang terstruktur dan konsisten**.	Sistem pengkaderan berjalan rapi, terukur, dan konsisten	1. Review dan/atau redesign kurikulum kaderisasi berdasarkan kebutuhan kader maupun perkembangan (nilai, ideologi, kompetensi) 2. Pembentukan database kader (profil, perkembangan, potensi)
TRANSFORMASI DIGITAL	**Terbangunnya ekosistem digital sebagai basis pengorganisasian dan pengembangan NU**	1. Terwujudnya Ekosistem Digdaya NU berbasis layanan. 2. Terwujudnya sistem Satu Data NU. 3. NU Online menjadi rujukan utama keagamaan di Indonesia.	1. Perluasan ekossistem Digdaya berbasis layanan 2. Pengembangan Infrastruktur data NU terpadu — cloud NU nasional, single sign-on Nahdliyin 3. Pengembangan NU Online SuperApps sebagai platform raksasa keagamaan

2. Pengembangan ASWAJA dan Pesantren

		Outcome	Strategi
Pesantren	**Penguatan fondasi kelembagaan melalui pembenahan tata kelola, kepengasuhan, kurikulum, serta integrasi antara tradisi keilmuan klasik dan kebutuhan modern.**	1. Standarisasi tata kelola pesantren 2. Kurikulum integratif (agama, sains, keterampilan hidup) 3. Digitalisasi administrasi dan pembelajaran awal	1. Reformasi manajemen berbasis good governance 2. Pelatihan SDM (kiai, ustaz, tenaga kependidikan) 3. Penguatan infrastruktur digital dan jaringan kolaborasi 4. Pembangunan database pesantren terafiliasi NU yang terintegrasi dengan sistem

		4. Kekerasan seksual dan bullying menurun. 5. Tersedianya database dan sistem akreditasi yang terintegrasi dan dapat diakses public 6. Tersusunnya skema pengembangan pesantren NU di wilayah 3T dan luar Jawa 7. Karya kader pesantren dan ulama NU mulai tersosialisasi secara luas	akreditasi pesantren NU. 5. Perluasan sosialisasi SAKA Pesantren, hotline pengaduan, serta integrasi dengan LBH-NU dan mekanisme pendampingan korban . 6. Merancang pengembangan pesantren luar Jawa dan daerah 3T 7. Transformasi kurikulum pesantren dengan mulai memperkuat vokasi dan STEM. 8. Mengintegrasikan AI dalam pembelajarannya
Aswaja	**Mengarusutamakan pemahaman Aswaja Nahdliyah sebagai manhaj berpikir, bukan semata-mata identitas organisasi.**	1. Tersedianya manual Aswaja Nahdliyah yang mudah diterima 2. Aswaja Nahdliyah menguasai ruang-ruang digital 3. Aswaja Nahdliyah "baru" terstandarisasi di lingkungan pendidikan NU 4. LBM, dengan Aswaja Nahdliyah, menjadi pusat kajian	1. Membuat rumusan Aswaja Nahdliyah dengan kemasan baru yang lebih menarik, mudah dipahami, dan diterima sesuai dengan basis demografi warga N 2. Mengarusutamakan Aswaja Nahdliyah "baru" yang telah dirumuskan sebagai manhaj berpikir - selain juga sebagai identitas organisasi 3. Menguatkan lembaga bahtsul masail sebagai pusat studi Aswaja Nahdliyah tingkat internasional

3. Kesejahteraan Sosial Ekonomi

	Goal	Outcome	Strategi
Ekonomi	**Terberdayakannya basis-basis ekonomi kerakyatan warga Nahdliyyin**	1. Database kesejahteraan warga NU lengkap & berbasis data 2. Akses pendidikan tinggi Nahdliyin meningkat signifikan 3. UMKM Nahdliyin naik kelas dari mikro ke kecil-menengah	1. **Pemetaan & profiling Nahdliyin terpadu** — Single-ID Nahdliyin, basis data sosio-ekonomi warga NU, indeks kesejahteraan Nahdliyin 2. **Akselerasi pendidikan tinggi & vokasi** — beasiswa massal S1–S3, sekolah vokasi NU berbasis industri, sertifikasi kompetensi nasional 3. **Pemberdayaan UMKM & ekonomi informal Nahdliyin** — pendampingan digitalisasi UMKM, akses pembiayaan syariah, koperasi NU modern 4. **Jaring pengaman sosial NU** — Lazisnu produktif, santunan terstruktur untuk dhuafa Nahdliyin, asuransi kesehatan mikro berbasis takaful
Kesehatan	1. Akses Kesehatan jamaah dan prasarana Kesehatan NU	Outcome: 1. Ekosistem kesehatan NU dengan awareness	Strategi: 1. Penguatan database dan asistensi, termasuk bagi asosiasi

	yang tersebar merata **2.** Peningkatan kualitas kesehatan umat melalui perbaikan layanan & promosi kesehatan	yang baik dan prasarana kesehatan yang terstandarisasi	profesi kesehatan NU 2. Pembangunan dan/atau perluasan layanan Kesehatan 3. Promosi Kesehatan bagi jamaah
Keluarga Maslahat dan Kesetaraan Gender	1. Penguatan kualitas keluarga NU melalui transformasi dan konsolidasi Gerakan Keluarga Maslahat NU **2.** Penguatan cross cutting issues antara nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyyah dengan program organisasi dan fondasi sosial bagi keadilan gender dan keluarga maslahat.	1. Program Gerakan Keluarga Maslahat NU terintegrasi dalam program struktur lintas lapisan 2. Semakin kuatnya ketahanan keluarga di level akar rumput 3. Kebijakan organisasi yang responsive gender di semua institusi NU 4. Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam kepemimpinan 5. Semakin berkurangnya praktik-praktik yang membahayakan keluarga (missal: kawin anak, KDRT).	1. Transformasi model implementasi GKMNU menjadi program terintegrasi dalam struktur lintas lapisan 2. Pengarusutamaan kesadaran Keluarga Maslahah an-Nahdliyyah dengan mencakup kesadaran keadilan hakiki 3. Pengarusutamaan kesadaran keadilan gender di pesantren, madrasah, dan institusi-institusi NU. 4. Peningkatan kapasitas penggerak perubahan di berbagai tingkatan 5. Membangun system data dan indicator sensitive gender **6.** Memperkuat kemitraan gender dalam pemerintahan dan civil society

4. Keunggulan Sumber Daya Manusia NU

	Goal	Outcome	Strategi
Pendidikan Anak Usia Dini (Day Care)	***Penguatan Tata Kelola Layanan Pengasuhan anak melalui Standarisasi, Legalitas, Digitalisasi, Kemaslahatan Anak dan Penguatan Karakter Aswaja An-Nahdliyah sejak Dini"***	Terwujudnya layanan pengasuhan sementara di luar rumah (day care) di lingkungan NU yang memiliki legalitas, memenuhi standar nasional, menerapkan pedoman kemaslahatan anak , mengintegrasikan nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah, serta didukung sistem data dan kelembagaan secara digital	**1. Standardisasi Mutu, Legalitas dan Akreditasi layanan** **2. Penyusunan standar layanan pengasuhan NU berbasis kemaslahatan anak.** **3. Digitalisasi Kelembagaan, Pengasuh, dan data Anak** **4. Sertifikasi dan peningkatan kapasitas pengasuh** **5. Penguatan sistem pengawasan, pelaporan dan manajemen resiko**
Pendidikan Anak usia Dini (TK/RA)	***Penguatan Kelembagaan melalui Standardisasi, Digitalisasi Tata Kelola, dan Penguatan Karakter Aswaja An-Nahdliyah sejak Dini"***	Terwujudnya tata kelola TK/RA NU yang terakreditasi, berbadan hukum, memiliki kurikulum khas Karakter Aswaja An-Nahdliyah yang terintegrasi, serta tersedianya database pendidik dan kelembagaan secara digital.	**1. Standardisasi Mutu & Legalitas: Penataan izin operasional, restrukturisasi tata kelola (di bawah LP Ma'arif NU / Muslimat NU), dan pendampingan akreditasi nasional secara menyeluruh.** **2. Pengembangan Kurikulum Khas NU: Penyusunan modul pengajaran nilai-nilai ke-NU-an, moderasi beragama, dan adab sejak dini yang terintegrasi dengan Kurikulum Nasional.** **3. Digitalisasi Kelembagaan: Penerapan Sistem Informasi Manajemen TK/RA NU (SIM-TK/RA NU) untuk pendataan pendidik, peserta didik, serta tata kelola keuangan.** **4. Peningkatan Sertifikasi Guru: Pelatihan kompetensi pedagogis dasar dan sertifikasi bagi guru TK/RA di lingkungan Nahdlatul Ulama.**

Pendidikan Dasar dan Menengah	**Kuatnya fondasi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas NU sambil tetap melestarikan identitas keagamaan dan budaya NU.**	1. Kurikulum NU terintegrasi untuk sekolah dasar hingga menengah atas 2. Sistem pembelajaran berbasis digital di sekolah 3. Kerangka kerja tata kelola sekolah yang terstandarisasi 4. Basis data nasional sekolah dan guru NU 5. Program peningkatan kompetensi guru 6. Standar kualitas minimum untuk semua sekolah NU	1. Mengintegrasikan nilai-nilai Aswaja An- Nahdliyah, sains, literasi, numerasi, teknologi, dan pendidikan karakter 2. Memperkuat literasi bahasa Arab, Inggris, dan digital sejak kelas awal 3. Menstandarisasi sistem manajemen sekolah di seluruh sekolah NU.
Pendidikan Tinggi	**Modernisasi sistem pembelajaran, reformasi tata kelola, transformasi digital, pengembangan dosen, dan standardisasi kualitas**	**Outcome:** 1. Kerangka kerja pendidikan tinggi NU yang terintegrasi 2. Sistem pembelajaran dan manajemen akademik digital 3. Model tata kelola standar untuk pendidikan tinggi NU 4. Penguatan kualifikasi dan kompetensi dosen 5. Integrasi nasional lembaga pendidikan tinggi NU 6. Peningkatan jaminan kualitas dan akreditasi dasa	**1. Mengintegrasikan ilmu-ilmu Islam, sains dan teknologi, kewirausahaan, dan tanggung jawab social** **2. Memperkuat studi interdisipliner dan pembelajaran berbasis penelitian** **3. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, Arab, penulisan akademik, dan literasi digital** **4. Menstandarisasi tata kelola institusional dan administrasi akademik** **5. Menerapkan sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi** **6. Mengembangkan Standar Mutu Pendidikan Tinggi NU**
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	**Pengarus-utamaan pendidikan dan pelatihan vokasi**	**Outcome:** 1. Terwujudnya agenda pengarus-utamaan pendidikan dan pelatihan vokasi	1. Mengembangkan perencanaan dan implementasi program pendidikan dan pelatihan vokasi yang integratif,

	sebagai agenda prioritas NU	sebagai agenda prioritas NU 2. Tersedianya database pendidikan dan pelatihan vokasi di lingkungan NU yang lengkap & terdayagunakan	koheren, berdampak dan berkelanjutan. 2. Pengembangan peta & profil lembaga pendidikan vokasi, lembaga pelatihan kerja (LPK) dan lembaga sertifikasi profesi (LSP) di lingkungan NU 3. Melaksanakan pemetaan sumber daya manusia dan angkatan kerja di lingkungan NU 4. Mendirikan lembaga pendidikan vokasi, LPK dan LSP berdasar potensi pasar kerja (STEM, ekonomi kreatif dan ekonomi perawatan) dan kewirausahaan 5. Mengembangkan program akses pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi, pemagangan dan penempatan 6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program-kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan vokasi di lingkungan NU 7. Mengembangkan pendekatan kolaborasi baik dengan pemerintah maupun swasta dalam agenda pendidikan dan pelatihan vokasi
Talent Management	**Terbentuknya Badan Talenta Nahdlatul Ulama (BATANU) Mengembangkan Data Talenta secara Digital (Digitalization of a Talent Pool)**	1. Tersedianya data talenta warga NU secara digital 2. Terwujudnya tata kelola talenta warga NU yang terdayagunakan demi terbangunnya meritokrasi di NU dan terdistribusikan	**1. Menetapkan pengelola talenta NU: pembentukan badan talenta NU** **2. Membangun pusat data digital talenta NU: Membangun platform basis data SDM dan kader terintegrasi (*Talent Database System*) yang mencatat rekam jejak,**

		talenta warga NU secara luas di luar NU	**keahlian, sertifikasi, dan kompetensi kader di seluruh jaringan NU.** **3. Menetapkan talenta prioritas: keulamaan, dakwah, seni budaya, olah raga, teknologi, kesehatan, pertanian, pendidikan, science, riset-inovasi, ekonomi-bisnis, pekerja sosial, dan politik** **4. Menetapkan standardisasi talenta: kriteria baku kompetensi, kinerja, peran, kontribusi dan potensi** **5. Membangun keterampilan pendataan dan pengelolaan talenta: menyelenggarakan pelatihan pendataan dan pengelolaan talenta NU secara berkala, menyelenggarakan studi banding pendataan dan pengelolaan talenta di dalam dan luar negeri dan fasilitasi pelatihan-sertifikasi talenta.** **6. Beasiswa khusus bagi warga Nahdliyin pada PCNU-PCNU 3T**

5. Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan

		Outcome	Strategi
	Terbangunnya kesadaran secara kuat keadilan ekologis, pelestarian	1. Model percontohan ekonomi sirkular berbasis pesantren dan komunitas	1. Edukasi dan kampanye fiqh lingkungan (eco-theology) 2. Kemitraan dengan pemerintah, NGO, dan sektor swasta

	lingkungan, dan kehidupan berkelanjutan yang berakar pada pesan *rahmatan lil 'alamin*, disertai aksi lingkungan di level grassroots.	2. Sistem pengelolaan sampah terpadu di jaringan NU 3. Program green jobs bagi santri dan warga nahdliyin 4. Inisiatif awal transisi energi terbarukan (PLTS, biogas, dll.) 5. Unit respons bencana berbasis komunitas NU	3. Penguatan kapasitas SDM di bidang lingkungan 4. Digitalisasi data lingkungan dan manajemen program 5. Pengembangan LSP Green Job 6. konsolidasi NU Peduli

6. Khidmah NU untuk Kemaslahatan Bangsa

		Outcome	Strategi
Politik	**Penguatan nilai-nilai Islam Inklusif dalam politik kebangsaan NU.**	1. Menjaga Moderasi Islam 2. Aktor berpengaruh dalam Politik Elektoral (Konteks politik kebangsaan) 3. Kontribusi signifikan dalam kebijakan publik 4. Stabilitas Politik	1. Menegaskan kembali Khittah 1926 2. memperkuat pendidikan politik umat 3. mendorong reformasi kaderisasi kepemimpinan 4. memperkuat jaringan internasional
Hukum	**Penguatan pemahaman hukum yang selaras dengan nilai dan prinsip Aswaja NU berbasis pada keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan**	1. Meningkatnya kesadaran hukum warga NU 2. Pesantren dan PTNU sebagai pusat literasi hukum	1. Pendidikan dan penyuluhan hukum berbasis pesantren 2. Advokasi hukum bagi masyarakat dan kelompok rentan 3. Penguatan LBH NU di semua tingkatan

Demokrasi	**Penguatan nilai dan prinsip demokrasi substantif berbasis Aswaja di semua tingkatan NU**	1. Kader NU aktif memperjuangkan demokrasi di tingkat nasional dan lokal 2. Lembaga di lingkungan NU sebagai pusat literasi publik	1. Pendidikan Politik warga dan kader NU 2. Dakwah kebangsaan 3. Penguatan forum warga NU 4. Penguatan literasi warga NU
Konsolidasi Sumber daya dan orientasi kepemimpinan gerakan sipil NU	**Konsolidasi Sumber daya dan orientasi kepemimpinan gerakan sipil NU**	Terbentuknya jaringan kepemimpinan dalam mendorong gerakan dan advokasi Masyarakat	leningkatkan kapasitas dan orientasi gerakan NU yang terintegrasi dengan sistem kaderisasi

7. Khidmah NU untuk Peradaban Dunia

		Outcome	**Strategi**
Peran NU Dalam Peradaban Dunia	**NU menjadi rujukan Islam moderat sekaligus menjadi simpul Islam global**	1. NU dikenal luas sebagai representasi utama Islam Wasathiyah, Islam rahmatan lil 'alamin, dan Islam Humanitarian yang mampu menawarkan solusi damai, inklusif, dan berkeadaban bagi tantangan dunia global. 2. NU menjadi simpul aktor keagamaan transnasional untuk perdamaian dunia NU berperan sebagai pusat jejaring *Religious Transnational Actors* (RTA) yang aktif membangun kerja	1. Memperkuat kepemimpinan global NU dalam tatanan dunia multipolar. Mengonsolidasikan berbagai gagasan etika global yang telah lahir melalui forum internasional seperti ICIS, ISOMIL, R20, ISORA, dan Humanitarian Islam menjadi narasi yang lebih sistematis, mudah dikenali, dan relevan bagi dunia global. 2. Mengarusutamakan Islam Wasathiyah dan Islam Nusantara sebagai narasi tandingan global Memperkuat branding internasional Islam Wasathiyah, Islam

		sama lintas agama, lintas bangsa, dan lintas peradaban dalam mendorong perdamaian global. 3. Menguatnya diplomasi keagamaan internasional NU Jaringan diplomasi keagamaan NU semakin aktif dan berpengaruh di forum-forum strategis internasional seperti OIC, R20, ASEAN Interfaith Dialogue, dan forum lintas agama dunia lainnya. 4. Narasi Islam Wasathiyah Indonesia menjangkau audiens global Gagasan Islam Nusantara dan Islam Humanitarian Indonesia semakin dikenal di tingkat internasional melalui kampanye global, jejaring pesantren, media digital, dan kolaborasi akademik lintas negara.	rahmatan lil 'alamin, dan Islam Nusantara melalui kampanye global, diplomasi budaya, serta penguatan narasi tandingan terhadap ekstremisme, sektarianisme, dan Islamofobia. 3. Memperluas diplomasi keagamaan multilateral dan peran NU sebagai jembatan peradaban Meningkatkan keterlibatan aktif dalam forum-forum global seperti OIC, R20, UN Interfaith, dan ASEAN Interfaith Dialogue, juga menjadi jembatan dialog antarperadaban berbasis pengalaman pluralisme Indonesia. 4. Menginternasionalisasi pesantren dan jaringan ulama NU. Memperkuat internasionalisasi pesantren melalui pertukaran santri global, beasiswa ulama NU ke universitas dunia, dan pengembangan jaringan pesantren ASEAN guna memperkuat posisi Indonesia dan kawasan Muslim ASEAN sebagai pusat Islam moderat yang stabil, kolaboratif, dan berpengaruh global.

N U
١٣٤٤
1926

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA

Muktamar Ke-35

Nahdlatul Ulama

Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang

27-31 Agustus 2026 | 14-18 R. Awwal 1448 H

Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama